BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN BELITUNG

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Selanjutnya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Belitung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Belitung Tahun 2025 yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memuat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada segenap jajaran Perangkat Daerah terutama Perangkat Daerah/Unit Kerja pengampu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan *stakeholder* terkait yang telah memberikan dorongan, dukungan, motivasi, pemikiran kritik dan saran serta sumbangsihnya dalam membantu mewujudkan pembangunan Kabupaten Belitung dengan lancar sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan kinerja dan evaluasi penyelenggara Pemerintah Kabupaten Belitung.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 kami sampaikan, semoga dapat memberikan informasi sebagai bahan evaluasi, pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung.

Tanjungpandan, 30 Maret 2026

BUPATI BELITUNG,

H. DJONI ALAMSYAH HIDAYAT, S.Sos

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tanjungpandan, 13 APRIL 2026

Plt. Inspektur Kabupaten Belitung,

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG INSPEKTORAT

EDWARD NIZAR, ST.

PEMBINA TK. I

NIP. 197012252001121002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban kinerja yang harus disampaikan kepada masyarakat secara transparan yang memiliki nilai moral dari kinerja yang telah dilakukan, selain itu pertangungjawaban tersebut perlu disampaikan kepada pemerintah pusat secara administratif melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perjalanan Reformasi Birokrasi, *Public Service and Civil Service* dalam periode satu tahun anggaran. LKjIP tidak hanya sekadar alat akuntabilitas, akan tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap Perangkat Daerah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2025 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Perangkat Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026.

Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

- 10 (Sepuluh) Indikator atau 83,34% dengan kategori **Sangat Berhasil**
- 2 (Dua) Indikator atau 16,67% dengan kategori **Berhasil**

Capaian Indikator Kinerja Utama Dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025

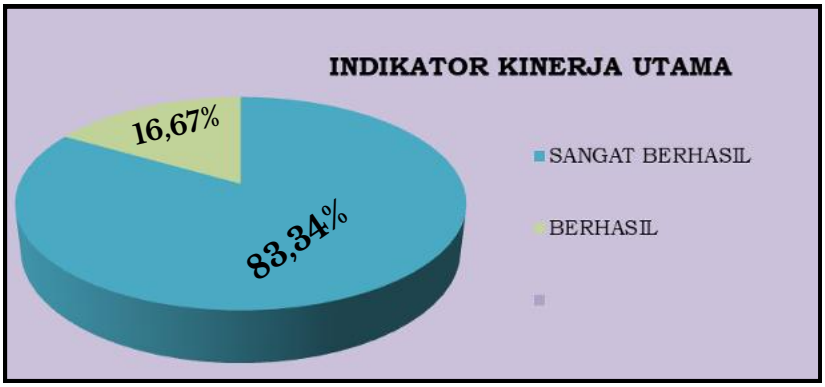

Namun jika dibandingkan dengan pencapaian periode pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan pada triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang ditetapkan pada 19 Agustus 2025, Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target yang disajikan dalam grafik berikut ini:

Capaian Indikator Kinerja Utama Dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025

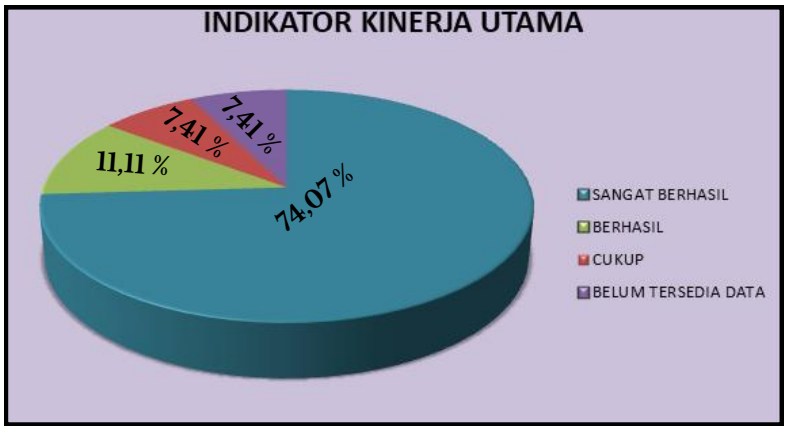

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 27 indikator kinerja utama tahun 2025, sebagai berikut:

- 20 Indikator atau 74,07% dengan kategori **Sangat Berhasil**
- 3 Indikator atau 11,11% dengan kategori **Berhasil**
- 2 Indikator atau 7,41% dengan kategori **Cukup**
- 2 Indikator atau 7,41% dengan kategori **Belum Tersedia Data**

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan dari setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Belitung ke depan. Walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan berbagai unsur baik Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, dan daerah-daerah lain maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GRAFIK ix
DAFTAR GAMBAR x

BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
1.5. Gambaran Umum Kabupaten Belitung 6
1.5.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah 6
1.5.2. Iklim 7
1.5.3. Topografi 7
1.5.4. Wilayah Administratif 7
1.5.5. Penduduk 8
1.5.6. Ketenagakerjaan 11
1.5.7. Pendidikan 11
1.5.8. Kesehatan 12
1.5.9. Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan 13
1.5.10. Pariwisata 14
1.5.11. Pertumbuhan Ekonomi 15
1.5.12. Pembangunan Manusia 17
1.5.13. Struktur Ekonomi 17
1.5.14. Struktur Organisasi 21
1.5.15. Kepegawaian 23
1.5.16. Isu Strategis Daerah 25

BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 41
2.1. Perencanaan Kinerja 41
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 52
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2025 56

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 58
3.1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama 60
3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja 66
3.2.1. Perjanjian Kinerja 2025 66
Tujuan 1 : Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi 70
Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia 98

Tujuan 3 : Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang Bersih, Inovatif, Profesional, Akuntabel dan Transparan..... 114
Tujuan 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup..... 135

3.2.2. Perubahan Perjanjian Kinerja 2025..... 144
Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia..... 149
Tujuan 2 : Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Sektor Unggulan dan Potensial..... 172
Tujuan 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)..... 189
Tujuan 4 : Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan..... 221

3.3. Capaian Kinerja Lainnya..... 238
3.4. Akuntabilitas Keuangan..... 240
3.4.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah..... 241
3.4.2. Pengelolaan Belanja Daerah..... 243
3.4.3. Kondisi Pembiayaan Daerah..... 245

BAB IV PENUTUP..... 247

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung 6
Tabel 1.2 : Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Belitung Tahun 2025 7
Tabel 1.3 : Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2025..8
Tabel 1.4 : Distribusi persentase penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2025 9
Tabel 1.5 : Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung Tahun 2025 9
Tabel 1.6 : Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Utama, TPAK dan TPT Tahun 2025 11
Tabel 1.7 : Jumlah sebaran SD dan SMP tiap kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2025 12
Tabel 1.8 : Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2021-2025 19
Tabel 1.9 : Uraian Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 21
Tabel 1.10 : Jumlah PNS Berdasarkan Eselon di Kabupaten Belitung Tahun 2025 24
Tabel 2.1 : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 45
Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 49
Tabel 2.3 : Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung Tahun 2025 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 53
Tabel 2.4 : Perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung Tahun 2025 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 54
Tabel 2.5 : Rencana Anggaran Kabupaten Belitung Tahun 2025 56
Tabel 2.6 : Alokasi Anggaran Per-sasaran Strategis Tahun 2025 57
Tabel 3.1 : Tabel Kriteria Status Capaian Kinerja Berdasarkan Persentase Realisasi 59
Tabel 3.2 : Tabel Kriteria Tingkat Keberhasilan Kinerja Berdasarkan Rata-Rata Persentase Capaian 59
Tabel 3.3 : Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 60
Tabel 3.4 : Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 terhadap Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 62
Tabel 3.5 : Tujuan, Sasaran Strategis, dan Jumlah Indikator Kinerja 66
Tabel 3.6 : Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 sesuai RPD Tahun 2024-2026 67
Tabel 3.7 : Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 sesuai RPD Tahun 2024-2026 68
Tabel 3.8 : Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 sesuai RPD Tahun 2024-2026 68
Tabel 3.9 : Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Kabupaten Belitung Tahun 2025 70
Tabel 3.10 : Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 1 72
Tabel 3.11 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 73
Tabel 3.12 : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitung 2022 –2024, (milyar rupiah) ADHK 2010 74
Tabel 3.13 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2023–2025 76
Tabel 3.14 : Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten di Prov. Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2025 77
Tabel 3.15 : Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Kemiskinan Penduduk 79
Tabel 3.16 : Perkembangan persentase Penduduk Miskin (%) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2025 80
Tabel 3.17 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya infrastruktur kewilayahan 81
Tabel 3.18 : Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an 82
Tabel 3.19 : Jumlah Pelanggan Aktif UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung Tahun 2025 86
Tabel 3.20 : Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Infrastruktur Permukiman 89
Tabel 3.21 : Realisasi Pemenuhan PSU Permukiman Tahun 2025 89
Tabel 3.22 : Target, Realisasi dan Capaian Program untuk Sasaran Pemenuhan PSU Permukiman 90
Tabel 3.23 : Pembangunan PSU di Kabupaten Belitung Tahun 2025 92
Tabel 3.24 : Data Trayek Penumpang Angkutan Jalan Kabupaten Belitung Tahun 2025 94
Tabel 3.25 : Data Lintas Komersil dan Lintas Perintis Kabupaten Belitung Tahun 2025 95
Tabel 3.26 : Rekapitulasi Data Kendaraan Lulus Uji Tahun 2025 96
Tabel 3.27 : Rekapitulasi Data Kendaraan Tidak Lulus Uji Tahun 2025 97
Tabel 3.28 : Data Fasilitas Perlengkapan dan Keselamatan Jalan Tahun 2025 97
Tabel 3.29 : Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia 98

Tabel 3.30 : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2023 – 2025 100
Tabel 3.31 : Komponen Penyusun IPM Kabupaten Belitung Tahun 2023 – 2025 101
Tabel 3.32 : Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 2 101
Tabel 3.33 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat 102
Tabel 3.34 : Perkembangan Angka Harapan Hidup Wilayah Bangka Belitung Tahun 2023 – 2025 103
Tabel 3.35 : Hasil kinerja upaya kesehatan masyarakat untuk 12 jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2025 104
Tabel 3.36 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan 105
Tabel 3.37 : Perkembangan Capaian RLS Kabupaten Belitung terhadap Prov. Kep. Babel Tahun 2023 - 2025 106
Tabel 3.38 : Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid jenjang TK/PAUD di Kabupaten Belitung Tahun 2024/2025 - 2025/2026 111
Tabel 3.39 : Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid jenjang SD di Kabupaten Belitung Tahun 2024/2025 - 2025/2026 111
Tabel 3.40 : Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid jenjang SMP di Kabupaten Belitung Tahun 2024/2025 - 2025/2026 112
Tabel 3.41 : Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang Bersih, Inovatif, Profesional, Akuntabel dan Transparan 114
Tabel 3.42 : Kategori, Nilai angka dan Persepsi Indeks Reformasi Birokrasi 115
Tabel 3.43 : Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Belitung Tahun 2023-2025 (Komponen dan Sub Komponen) 115
Tabel 3.44 : Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 3 126
Tabel 3.45 : Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel 127
Tabel 3.46 : Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung 128
Tabel 3.47 : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023-2025 130
Tabel 3.48 : Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional 133
Tabel 3.49 : Penilaian IP ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 134
Tabel 3.50 : Tabel Perbandingan IP ASN Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024 134
Tabel 3.51 : Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 4 136
Tabel 3.52 : Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup 136
Tabel 3.53 : Perbandingan Nilai IKLH Tahun 2022 sampai dengan 2025 137
Tabel 3.54 : Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup 138
Tabel 3.55 : Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 terhadap Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 144
Tabel 3.56 : Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 sesuai RPJMD 2025-2029 146
Tabel 3.57 : Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia Tahun 2025 149
Tabel 3.58 : Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 1 152
Tabel 3.59 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan 152
Tabel 3.60 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat 154
Tabel 3.61 : Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Prevalensi Stunting 156
Tabel 3.62 : Inovasi di lingkungan Dinas Kesehatan untuk mendukung Penurunan Prevalensi Stunting Kabupaten Belitung Tahun 2025 158
Tabel 3.63 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemerataan dan Pendapatan Masyarakat 166
Tabel 3.64 : Perkembangan Capaian Pengeluaran per kapita Kabupaten Belitung terhadap Kab/Kota di Prov. Kep. Babel dan Nasional Tahun 2025 167
Tabel 3.65 : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota, 2024 - 2025 di Prov. Kep. Babel 168
Tabel 3.66 : Perbandingan Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2025 170
Tabel 3.67 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Sektor Unggulan dan Potensial 172
Tabel 3.68 : Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitung 2023 – 2025, ADHB 173
Tabel 3.69 : Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 2 177
Tabel 3.70 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Investasi Daerah (juta rupiah) Tahun 2025 177
Tabel 3.71 : Perbandingan Rekapitulasi Investasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 178
Tabel 3.72 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Prima Tahun 2025 179
Tabel 3.73 : Produksi tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis tanaman di Kabupaten Belitung (kuintal) Tahun 2024–2025 181
Tabel 3.74 : Produksi tanaman Biofarmaka Menurut Jenis tanaman (kg) tahun 2023–2025 182
Tabel 3.75 : Produksi Perkebunan Jenis Tanaman (ton) Tahun 2024 dan 2025 182

Tabel 3.76 : Produksi Daging Ternak Besar Jenis ternak (kg) Tahun 2024 dan 2025 183
Tabel 3.77 : Produksi Unggas menurut Jenis Unggas (kg) Tahun 2024 dan 2025..... 183
Tabel 3.78 : Jumlah Produksi dan Barang Keluar Perikanan Tangkap dan Budidaya Menurut Komoditas di Kabupaten Belitung (ton/bulan) Tahun 2025..... 183
Tabel 3.79 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pariwisata serta Budaya Daerah Tahun 2025..... 188
Tabel 3.80 : Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)..... 189
Tabel 3.81 : Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Belitung Tahun 2023-2025 (Komponen dan Sub Komponen)..... 190
Tabel 3.82 : Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 3..... 201
Tabel 3.83 : Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel Berbasis Digital....202
Tabel 3.84 : Realisasi Terintegrasi Sistem Informasi Tahun 2025.....204
Tabel 3.85 : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023-2025.....208
Tabel 3.86 : Perkembangan Tingkat Maturitas SPIP Kab. Belitung Tahun 2023-2025.....213
Tabel 3.87 : Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Profesionalitas ASN.....214
Tabel 3.88 : Penilaian IP ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024..... 215
Tabel 3.89 : Perbandingan IP ASN Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024..... 215
Tabel 3.90 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah..... 217
Tabel 3.91 : Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan.....221
Tabel 3.92 : Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 4 223
Tabel 3.93 : Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Infrastruktur yang inklusif dan berkualitas.....223
Tabel 3.94 : Realisasi perhitungan Indeks Pembangunan Infrastruktur tahun 2025..... 224
Tabel 3.95 : Realisasi perhitungan Indeks Pembangunan Infrastruktur tahun 2024..... 224
Tabel 3.96 : Capaian Kinerja Sasaran Berkurangnya Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah..... 225
Tabel 3.97 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kelestarian Lingkungan..... 227
Tabel 3.98 : Perbandingan Nilai IKLH Tahun 2022 sampai dengan 2025.....228
Tabel 3.99 : Nilai IKD 2025 dan IRB 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....230
Tabel 3.100 : Perbandingan Capaian Indikator dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya.....231
Tabel 3.101 : Penghitungan Indeks Resiko Bencana 231
Tabel 3.102 : Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun 2025.....234
Tabel 3.103 : Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025..... 241
Tabel 3.104 : Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025..... 243
Tabel 3.105 : Komposisi Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025..... 245

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 : Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung Tahun 2025 11
Grafik 1.2 : Angka Harapan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2023-2025 13
Grafik 1.3 : Jumlah Kunjungan Tamu di Kabupaten Belitung Tahun 2025 14
Grafik 1.4 : Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Belitung Tahun 2022-2025 15
Grafik 1.5 : Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) di Kabupaten Belitung..... 16
Grafik 1.6 : Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2025 17
Grafik 1.7 : Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung dengan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2021-2025 18
Grafik 1.8 : Jumlah PNS Berdasarkan Gender di Kabupaten Belitung Tahun 2025..... 23
Grafik 1.9 : Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Jabatan di Kabupaten Belitung Tahun 2025 24
Grafik 1.10 : Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang di Kabupaten Belitung Tahun 2025..... 24
Grafik 3.1 : Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025..... 65
Grafik 3.2 : Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung dengan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2021-2025 99
Grafik 3.3 : Angka Harapan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2023-2025..... 102
Grafik 3.4 : Perkembangan APK Tahun 2023-2025 108
Grafik 3.5 : Perkembangan APM Tahun 2023-2025..... 109
Grafik 3.6 : Perkembangan APM Tahun 2022-2024..... 110
Grafik 3.7 : Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Belitung Tahun 2022-2024 114
Grafik 3.8 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2022-2025..... 137
Grafik 3.9 : Indeks Kualitas Air Kabupaten Belitung Tahun 2022-2025 140
Grafik 3.10 : Indeks Kualitas Udara Kabupaten Belitung Tahun 2022-2025..... 141
Grafik 3.11 : Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Belitung Tahun 2022-2025..... 142
Grafik 3.12 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Prima Tahun 2025..... 180
Grafik 3.13 : Tingkat Efisiensi Anggaran Kinerja Sasaran Tahun 2025..... 231
Grafik 4.1 : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis RPD 2024-2026 Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025..... 247
Grafik 4.2 : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis RPJMD 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025..... 248

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Peta Wilayah Kabupaten Belitung 8
Gambar 2.1 : Visi & Misi berdasarkan RPD Kabupaten Belitung 2024-2026 42
Gambar 2.2 : Visi & Misi berdasarkan RPJMD Kabupaten Belitung 2025-2029 47
Gambar 3.1 : Formula Perhitungan Persentase Capaian Kinerja atas Persentase Capaian 59
Gambar 3.2 : Kegiatan Penyelengaraan Jalan Kabupaten Tahun 2025 84
Gambar 3.3 : Kegiatan pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air 85
Gambar 3.4 : Kegiatan Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tahun 2025 85
Gambar 3.5 : Sosialisasi Perda Retribusi serta Penarikan Retribusi 86
Gambar 3.6 : Pengambilan Sampling Air 86
Gambar 3.7 : Sosialisasi Edukasi Air dari SMA Anugerah Belitung dan Kegiatan UPT PAM Tahun 2025 .. 87
Gambar 3.8 : Kegiatan Pembangunan SPALD 87
Gambar 3.9 : Kegiatan Pengembangan Sistem Darinase 88
Gambar 3.10 : Kegiatan untuk Mendukung Sasaran Strategis Pemenuhan PSU Permukiman 91
Gambar 3.11 : Penerimaan Penghargaan atas Opini BPK 128
Gambar 3.12 : Dokumentasi kegiatan skrining HIV di tempat hiburan dan pada ibu hamil Dinas Kesehatan Kab. Belitung 157
Gambar 3.13 : Pelaksanaan pemberian bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan 174
Gambar 3.14 : Pelaksanaan pemberian bantuan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan 174
Gambar 3.15 : Pelaksanaan penguatan daya saing sektor perikanan 174
Gambar 3.16 : Pelaksanaan Bimtek dan Pembinaan pelaku usaha perikanan 174
Gambar 3.17 : Pelaksanaan Bazar Ikan 174
Gambar 3.18 : Pelaksanaan operasional kapal perikanan dalam rangka pengendalian SDP 175
Gambar 3.19 : Pendampingan penanaman padi di Desa Cerucuk 175
Gambar 3.20 : Distribusi Bantuan Sapi dan penyaluran bantuan vaksin pada Kelompok Tani Sumber Jaya Makmur Desa Bantan Kecamatan Membalong 175
Gambar 3.21 : Pembagian Bibit Lada Bersertifikat ke Gapoktan Maju Bersama Kecamatan Membalong 175
Gambar 3.22 : Pelaksanaan CPCL Padi Gogo di Kecamatan Membalong 175
Gambar 3.23 : Penandatanganan Komitmen Program "KERISI" (Kios, Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Terintegrasi) 178
Gambar 3.24 : Laporan Hasil Pemantauan Indeks SPBE Tahun 2025 KemenPANRB 203
Gambar 3.25 : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Belitung Tahun 2025 218
Gambar 3.26 : Gebyar PBB-P2 Tahun 2025 219
Gambar 3.27 : *High Level Meeting* Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Belitung 2025 219
Gambar 3.28 : Sosialisasi Pajak Daerah 2025 219
Gambar 3.29 : Sosialisasi Dan Pendataan Sarang Burung Walet 2025 219
Gambar 3.30 : Pendataan PBB-P2 2025 219
Gambar 3.31 : Pelayanan Terpadu Samsat Setempoh Dan Pembayaran PBB-P2 2025 219
Gambar 3.32 : *High Level Meeting* Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Belitung yang dipimpin oleh Bapak Bupati Belitung selaku Ketua TP2DD Kabupaten Belitung 220
Gambar 3.33 : Kunjungan Ke KPP Pratama Tanjungpandan terkait Optimalisasi Pajak Daerah Khususnya Pajak Sarang Burung Walet dan PBB-P2 220
Gambar 3.34 : *High Level Meeting* (HLM) Edukasi Terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kabupaten Belitung dengan Bank Indonesia di pimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku Ketua Pelaksana Harian TP2DD Kabupaten Belitung 220
Gambar 3.35 : Monitoring Objek Pajak Terutang 220
Gambar 3.36 : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Belitung Tahun 2025 221

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Ketentuan mengenai SAKIP diatur dalam Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sedangkan pelaksanaan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Pemberyaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD). Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

Bertitik tolak dari Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025, selanjutnya pada tahun 2025 ini merupakan tahun transisi kepemimpinan Bupati terpilih untuk periode 2025-2029, oleh sebab itu dalam pelaksanaanya juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang ditetapkan pada 19 Agustus 2025, serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan LKjIP Tahun 2025 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana

ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LKjIP Kabupaten Belitung Tahun 2025 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden ini disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, LKjIP Kabupaten Belitung Tahun 2025 disusun sebagai instrumen akuntabilitas kinerja yang menggambarkan capaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh. Laporan ini memuat informasi kinerja yang terukur dan komprehensif atas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, yang disusun dengan memperhatikan keterpaduan antara dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, dan pengelolaan anggaran. Dengan demikian, LKjIP tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi juga sarana strategis dalam pengelolaan kinerja yang berorientasi pada hasil dan berbasis data.

Sejalan dengan penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, LKjIP Tahun 2025 juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi internal yang sistematis dan terukur. Evaluasi kinerja ini mencakup analisis terhadap pencapaian indikator sasaran, identifikasi hambatan, serta faktor pendukung yang memengaruhi hasil kinerja. Informasi tersebut menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan program, serta meningkatkan pengendalian dan pengukuran kinerja pada periode berikutnya.

Selain sebagai alat evaluasi dan pertanggungjawaban, LKjIP Kabupaten Belitung Tahun 2025 juga dimaksudkan untuk memperkuat budaya kinerja yang akuntabel dan transparan di seluruh perangkat daerah. Dengan tersusunnya laporan kinerja yang berbasis hasil dan indikator terukur, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap sumber daya yang dialokasikan dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sekaligus menjadi landasan pengambilan keputusan manajerial yang lebih tepat sasaran, strategis, dan responsif terhadap dinamika pembangunan daerah. Lebih jauh lagi, penyusunan LKjIP Tahun 2025 memperhatikan konteks transisi kepemimpinan Bupati Kabupaten Belitung periode 2025–2029. Laporan ini menjadi acuan penting dalam memahami capaian kinerja sebelumnya, mengidentifikasi prioritas pembangunan yang masih perlu diperkuat, serta merumuskan strategi kebijakan yang selaras dengan arah pembangunan jangka menengah daerah yang baru.

Dengan demikian, LKjIP Tahun 2025 berperan sebagai dokumen strategis yang tidak hanya memotret capaian kinerja, tetapi juga mendukung kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan Kabupaten Belitung.

Dalam konteks tersebut, penyusunan LKjIP Kabupaten Belitung Tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana penguatan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja. Laporan ini menyediakan informasi yang terukur dan dapat dibandingkan secara periodik, sehingga memungkinkan pemerintah daerah memantau kemajuan pencapaian sasaran strategis secara berkesinambungan. Dengan adanya data kinerja yang jelas dan sistematis, setiap perangkat daerah dapat melakukan evaluasi internal yang lebih akurat, mengidentifikasi praktik baik yang dapat diterapkan secara luas, serta menindaklanjuti permasalahan yang menjadi hambatan pencapaian kinerja.

1.2 DASAR HUKUM

Sebagaimana telah kita ketahui, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Artinya, menyusun laporan tersebut secara “Benar” dan “Tepat” sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggung jawab setiap instansi pemerintah. Hal ini merujuk pada aturan-aturan yang ada sebagai dasar atau pijakan hukum antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Instruksi Presdien Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Peberantasan Korupsi.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
6. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

7. Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.
8. Peraturan Bupati Belitung Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Belitung Tahun 2025 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah terhadap seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun, dalam rangka pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Belitung ini adalah sebagai informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung yang terukur kepada Presiden selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Pemerintah Kabupaten Belitung untuk meningkatkan kinerja pemerintahannya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, sistematika pelaporan Laporan Kinerja Kabupaten Belitung tahun 2025 sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

Daftar Gambar

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum daerah Kabupaten Belitung, dengan penekanan kepada aspek strategis daerah serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi daerah.

Bab II Perencanaan & Perjanjian Kinerja

Pada bab ini berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
8. Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini menginformasikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- Indikator Kinerja Utama Kabupaten Belitung 2024 – 2026 dan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Belitung 2025 – 2029
- Rencana Kinerja Tahun 2025
- Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025

1.5 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

1.5.1 LETAK GEOGRAFIS DAN LUAS WILAYAH

Kabupaten Belitung dengan bentuk kepulauan yang terdiri dari daratan dan lautan. Dengan luas wilayah daratan dengan luas 2.269,36 km^2. Luas wilayah daratan berdasarkan letak wilayah di tiap kecamatan, yaitu :

1). Kecamatan Tanjungpandan dengan luas wilayah 181,48 km^2;
2). Kecamatan Membalong dengan luas wilayah 941,11 km^2;
3). Kecamatan Badau dengan luas wilayah 496,25 km^2;
4). Kecamatan Sijuk dengan luas wilayah 480,00 km^2; dan
5). Kecamatan Selat Nasik dengan luas wilayah 170,52 km^2.

Secara geografis, Kabupaten Belitung terletak antara 107°08"-107°58" BT dan 02°30"-03°15" LS, dengan batas wilayah meliputi :

a). Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
b). Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur;
c). Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
d). Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar.

Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung juga merupakan wilayah kepulauan sesuai dengan Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau bahwa Kabupaten Belitung terdiri dari 153 buah pulau. Pulau yang terbesar adalah Pulau Belitung, disamping itu masih ada pulau besar lainnya seperti Pulau Seliu, Pulau Mendanau, dan Pulau Nadu. Penyebaran pulau di setiap kecamatan digambarkan melalui gambar berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung

Kecamatan	Jumlah Pulau
Tanjungpandan	17
Membalong	33
Badau	53
Sijuk	13
Selat Nasik	37
Kabupaten Belitung	**153**

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung

1.5.2 IKLIM

Kabupaten Belitung mempunyai iklim tropis dan basah dengan jumlah curah hujan pada tahun 2025 antara 42,30 mm/tahun sampai dengan 577,30 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 18 sampai 31 hari per bulan.

1.5.3 TOPOGRAFI

Daerah yang paling tinggi di Kabupaten Belitung hanya mempunyai ketinggian kurang lebih 500 m dari atas permukaan laut dengan puncak tertinggi ada di daerah Gunung Tajam. Sedangkan daerah hilir (pantai) terdiri atas beberapa Daerah Aliran
Sungai (DAS) utama, yaitu :

- Sebelah Utara oleh DAS Buding
- Sebelah Selatan oleh DAS Pala dan Kembiri, dan
- Sebelah Barat oleh DAS Brang dan Cerucuk.

Keadaan tanah di Kabupaten Belitung pada umumnya didominasi oleh kwarsa dan pasir, batuan aluvial dan batuan granit.

1.5.4 WILAYAH ADMINISTRATIF

Kabupaten Belitung dengan luas wilayah daratan 2.269,36 km^2 dengan ibu kota kabupaten di Tanjungpandan yang dikepalai oleh Bupati dan secara administratif dibantu oleh sekretaris daerah yang membawahi tiga orang asisten terdiri dari 42 buah desa dan 7 Kelurahan yang tersebar di lima kecamatan yang terbagi menjadi :

Tabel 1.2 Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Belitung Tahun 2025

Kecamatan	Tahun 2025	
	Desa	Kelurahan
Tanjungpandan	9	7
Membalong	12	0
Badau	7	0
Sijuk	10	0
Selat Nasik	4	0
Kabupaten Belitung	**42**	**7**

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka 2026, BPS Kabupaten Belitung

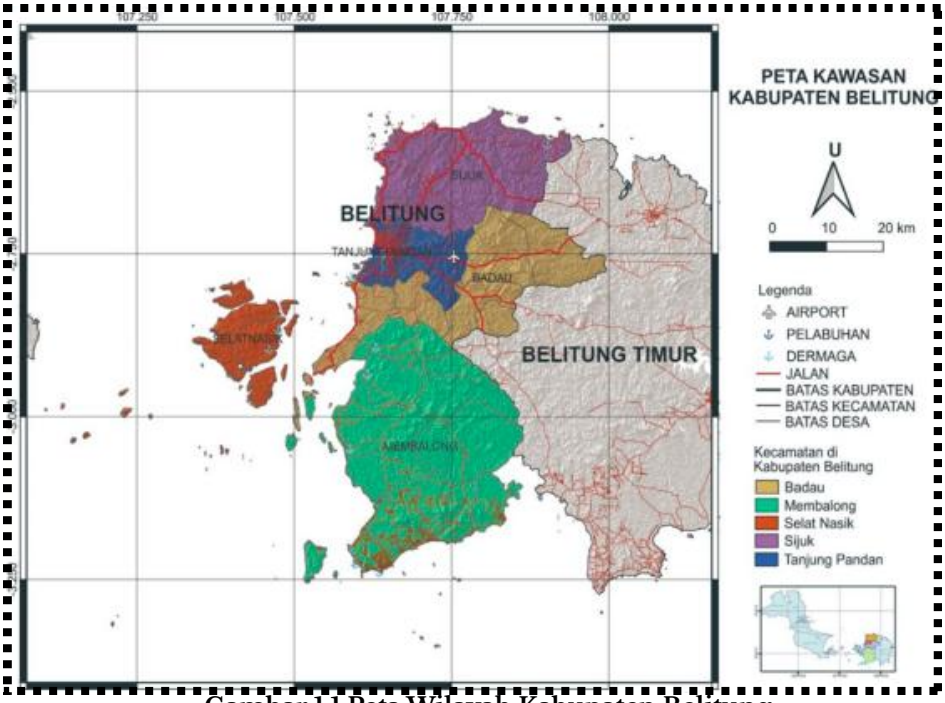

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Belitung
Sumber: Rantek RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029

1.5.5 PENDUDUK

Jumlah penduduk yang telah teregistrasi di dinas penduduk dan catatan sipil pada tahun 2025 sebanyak 194.392 jiwa. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan sebaran di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Belitung.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2025

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
Tanjungpandan	111.243	1,25
Membalong	27.615	0,74
Badau	16.097	1,77
Sijuk	33.736	1,11
Selat Nasik	5.701	-4,31
Kabupaten Belitung	**194.392**	**1,03**

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka 2026, BPS Kabupaten Belitung

Apabila dilihat menurut Kecamatan, Kecamatan Tanjungpandan memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 111,24 ribu jiwa dan Kecamatan Selat Nasik memiliki jumlah penduduk tersedikit yaitu 5,70 ribu jiwa. Adapun tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Belitung mencapai 83,88 orang per km² berikut ini rinciannya :

Tabel 1.4 Distribusi persentase penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2025

Kecamatan	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (per km²)
Tanjungpandan	57,23	293,95
Membalong	14,21	30,36
Badau	8,28	35,13
Sijuk	17,35	81,49
Selat Nasik	2,93	42,70
Kabupaten Belitung	**100**	**84,75**

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka 2026, BPS Kabupaten Belitung

Rasio jenis kelamin sebesar 103,72 artinya pada tahun 2025 untuk setiap 20.372 penduduk di Kabupaten Belitung terdapat 10.000 penduduk perempuan dan 10.372 penduduk laki-laki. Berikut ini rinciannya :

.

Tabel 1.5 Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung Tahun 2025

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin
Tanjungpandan	102,44
Membalong	106,01
Badau	106,69
Sijuk	104,56
Selat Nasik	104,70
Kabupaten Belitung	**103,72**

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka 2026, BPS Kabupaten Belitung

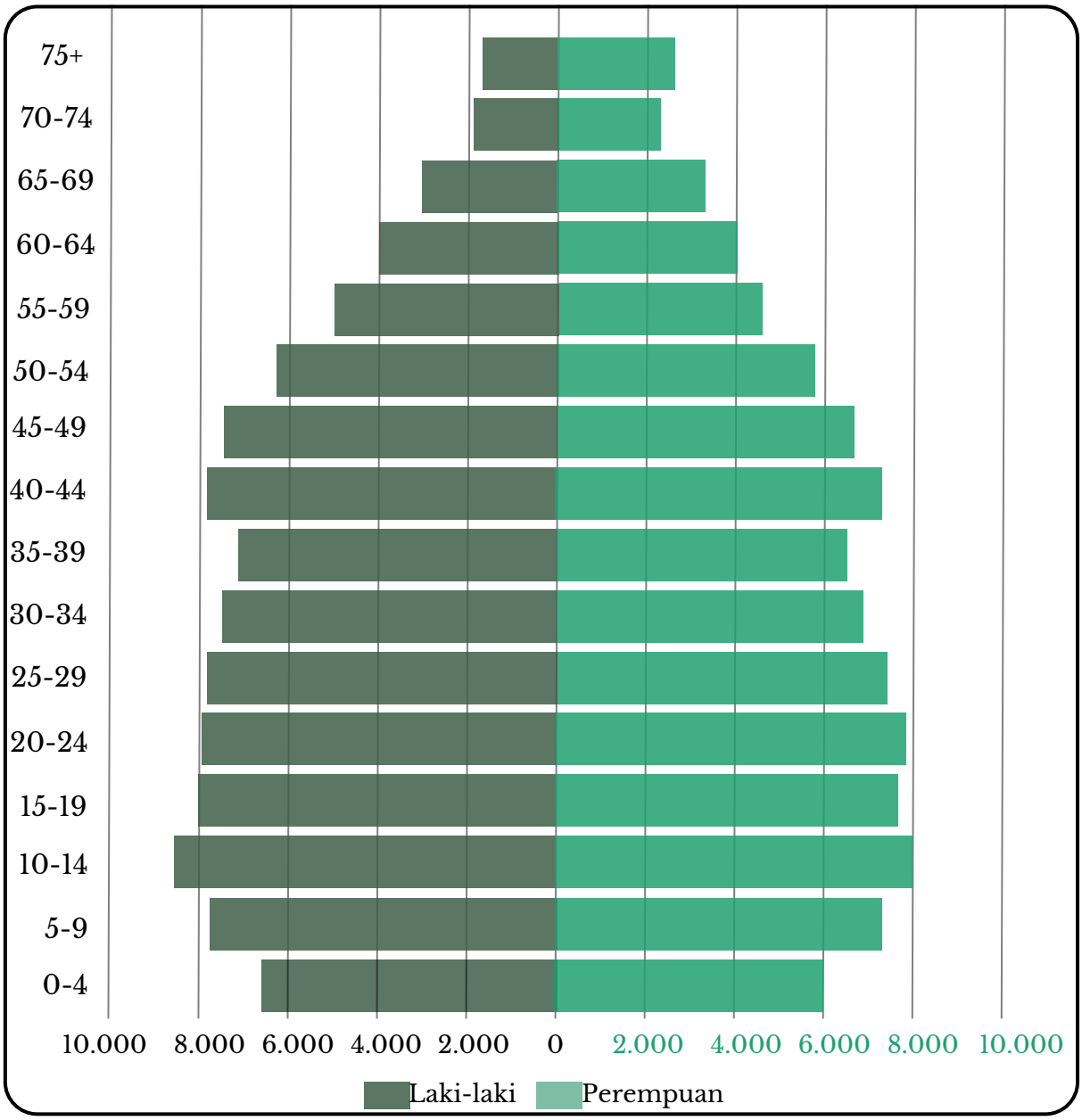

Grafik 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung Tahun 2025

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung

Grafik piramida penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2025 menunjukkan bahwa struktur penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif, khususnya pada rentang usia 20–44 tahun, dengan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang. Kondisi ini mencerminkan dinamika kependudukan yang mengarah pada fase bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia kerja lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif. Relatif lebih kecilnya proporsi penduduk usia anak (0–14 tahun) mengindikasikan kecenderungan penurunan angka kelahiran serta perubahan struktur keluarga. Sementara itu, mulai meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut pada kelompok umur 60 tahun ke atas menunjukkan adanya proses penuaan penduduk yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan jangka panjang.

1.5.6 KETENAGAKERJAAN

Jumlah penduduk Kabupaten Belitung usia 15 tahun ke atas atau yang termasuk Penduduk Usia Kerja (PUK) pada tahun 2025 sebanyak 150.826 jiwa (hasil Survei Angkatan Kerja Nasional [Sakernas], 2025). Sebesar 69,18 persen dari PUK termasuk dalam penduduk angkatan kerja (bekerja dan/atau mencari kerja) dan sisanya 30,82 persen adalah penduduk bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, lainnya).

Tabel 1.6 Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Utama, TPAK dan TPT, 2025

Kegiatan Utama	Tahun 2025
Penduduk Usia Kerja	**150.826**
Angkatan Kerja	**104.337**
- Bekerja	100.543
- Pengangguran Terbuka	3.794
Bukan Angkatan Kerja	**46.489**
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	**69,18%**
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	**3,64%**

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka 2026, BPS Kabupaten Belitung

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Belitung tahun 2025 sebesar 69,18 persen artinya sebesar 69,18 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Adapun tingkat pengangguran terbuka untuk Kabupaten Belitung tahun 2025 sebesar 3,64 persen artinya dari 10.000 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara rata-rata 364 orang diantaranya merupakan pencari kerja.

1.5.7 PENDIDIKAN

Salah satu tujuan nasional yang tercakup dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan salah satu program untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. baik pendidikan formal maupun nonformal. Pendidikan formal terdiri dari beberapa jenjang yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP), SekolahMenengah (SM)/ sederajat dan jenjang Perguruan Tinggi (PT).

Tabel 1.7 Jumlah sebaran SD dan SMP tiap kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2025

Kecamatan	SD		SMP	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Tanjungpandan	38	7	7	8
Membalong	30	0	5	0
Badau	17	0	3	0
Sijuk	22	0	4	0
Selat Nasik	7	0	2	0
Total	**114**	**7**	**21**	**8**

Sumber: Data Diolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Tahun 2025

Jumlah satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Belitung Tahun 2025 tersebar di seluruh kecamatan dengan dominasi sekolah berstatus negeri. Total terdapat 121 Sekolah Dasar yang terdiri dari 114 SD Negeri dan 7 SD Swasta, serta 29 Sekolah Menengah Pertama yang terdiri dari 21 SMP Negeri dan 8 SMP Swasta.

Berdasarkan himpunan data Kabupaten Belitung Dalam Angka Tahun 2026 Pada tahun ajaran 2025/2026 rasio murid SD sebesar 150 berarti SD di Kabupaten Belitung rata–rata menampung 150 murid. Rasio murid di sekolah di bawah Dinas Pendidikan masih relatif lebih banyak dibandingkan sekolah di bawah Kanwil Kementerian Agama.

1.5.8 KESEHATAN

Sumber daya manusia yang berkualitas dan sehat secara jasmani dan rohani menjadi modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang baik menjadi kebutuhan dalam menjaga kesehatan masyarakat. Kabupaten Belitung memiliki Rumah Sakit (RS) sebanyak 3 unit terbagi menjadi 1 RS umum pemerintah, dan 2 RS umum swasta. Puskesmas dan puskesmas pembantu sudah menjangkau setiap kecamatan, tapi tenaga medis yang tersedia dirasa masih kurang. Penyebaran sarana penunjang kesehatan masih terkelompok di wilayah tertentu.

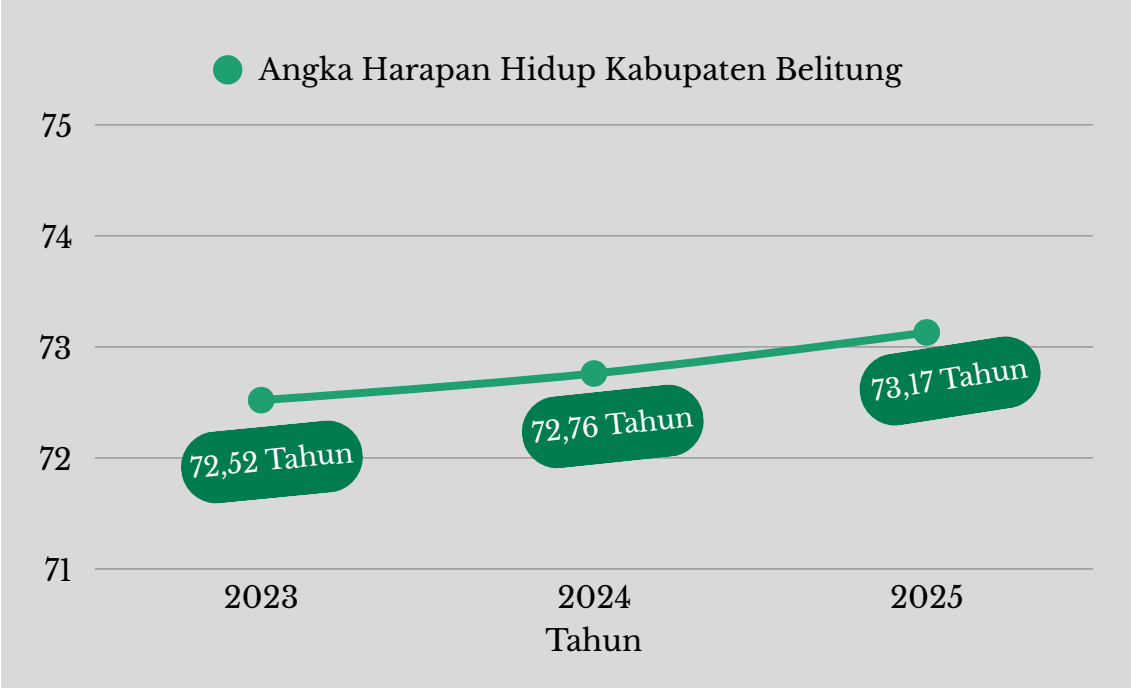

Grafik 1.2 Angka Harapan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2023-2025
Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka 2026, BPS Kabupaten Belitung

Grafik menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Belitung mengalami tren peningkatan selama periode 2023–2025. Pada tahun 2023, AHH tercatat sebesar 72,52 tahun, kemudian meningkat menjadi 72,76 tahun pada tahun 2024, dan kembali mengalami kenaikan menjadi 73,17 tahun pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, tren peningkatan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Belitung menunjukkan arah pembangunan kesehatan yang positif, namun tetap memerlukan penguatan kebijakan lintas sektor agar peningkatan kualitas hidup penduduk dapat terus berlanjut dan berkelanjutan.

1.5.9 PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN, DAN PERIKANAN

Produksi sayur-sayuran tahun 2025 tertinggi adalah komoditi kangkung dan cabai rawit yaitu mencapai 5.573 kuintal dan 5.199 kuintal dan produksi buah-buahan tahun 2025 tertinggi adalah komoditi pepaya dan rambutan yaitu 20.271 kuintal dan 5.129 kuintal. Kemudian, lahan padi sawah tahun 2025 terluas berada di Kecamatan Membalong, yaitu 200,30 hektar dengan luas panen 210,30 hektar dan produksi padi sebanyak 655,4 ton. Produksi palawija tertinggi di Kabupaten Belitung adalah ubi kayu atau singkong, yaitu 1232,06 ton dimana Kecamatan dengan produksi tertinggi adalah Kecamatan Tanjungpandan, yaitu 593 ton.

Populasi ternak besar tahun 2025 untuk hampir semua jenis ternak mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya kecuali jenis ternak kuda dan kambing. Ternak sapi tercatat sebanyak 864 ekor. Kerbau tercatat sebanyak 10 ekor. Kuda tercatat sebanyak 1 ekor. Kambing tercatat sebanyak 347 ekor. Babi tercatat sebanyak 1.048 ekor. Produksi telur tahun 2025 secara umum mengalami penuruunan kecuali jenis unggas ayam kampung. Produksi unggas mengalami penurunan pada ayam pedaging, ayam petelur dan itik/itik manila, sedangkan ayam kampung mengalami kenaikan.

Sementara itu, pada tahun 2025, areal tanaman perkebunan terluas adalah komoditi kelapa sawit dan lada, yaitu 7.302,55 hektar dan 3.831,82 hektar. Luas areal tanaman kopi dan kelapa sawit mengalami kenaikan, sedangkan karet, kelapa, lada, dan aren mengalami penurunan.

Terakhir, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Belitung tahun 2025 tercatat sebesar 40.558,05 ton. Jumlah rumah tangga perikanan budidaya di Kabupaten Belitung pada tahun 2025 tercatat sekitar 264 dengan luas areal budidaya ikan sebesar 74,91 hektar.

1.5.10 PARIWISATA

Sebagai wilayah kepulauan, wisata bahari merupakan salah satu sumber dalam meningkatkan pendapatan daerah, di samping objek wisata lainnya, seperti objek wisata sejarah dan acara adat khas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

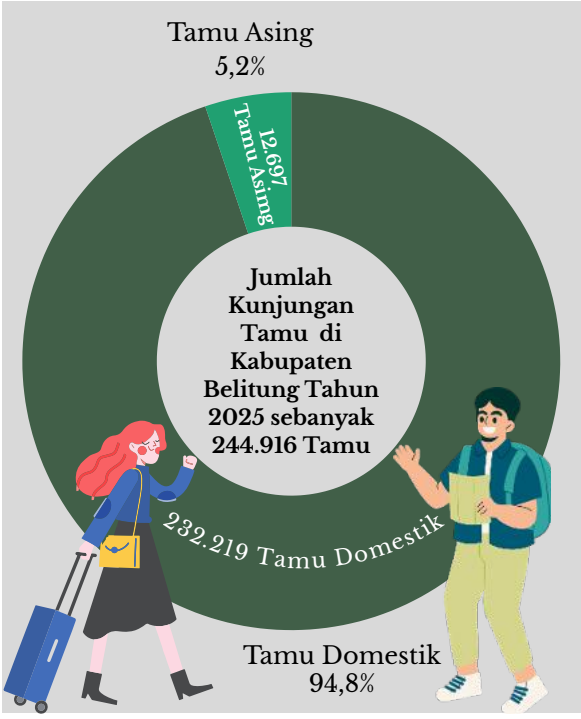

Grafik 1.3 Jumlah Kunjungan Tamu di Kabupaten Belitung Tahun 2025
Sumber:Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung 2025

Dari 244.916 kunjungan tamu di Kabupaten Belitung, 94,82 persen adalah tamu domestik dan 5,2 persen tamu asing.

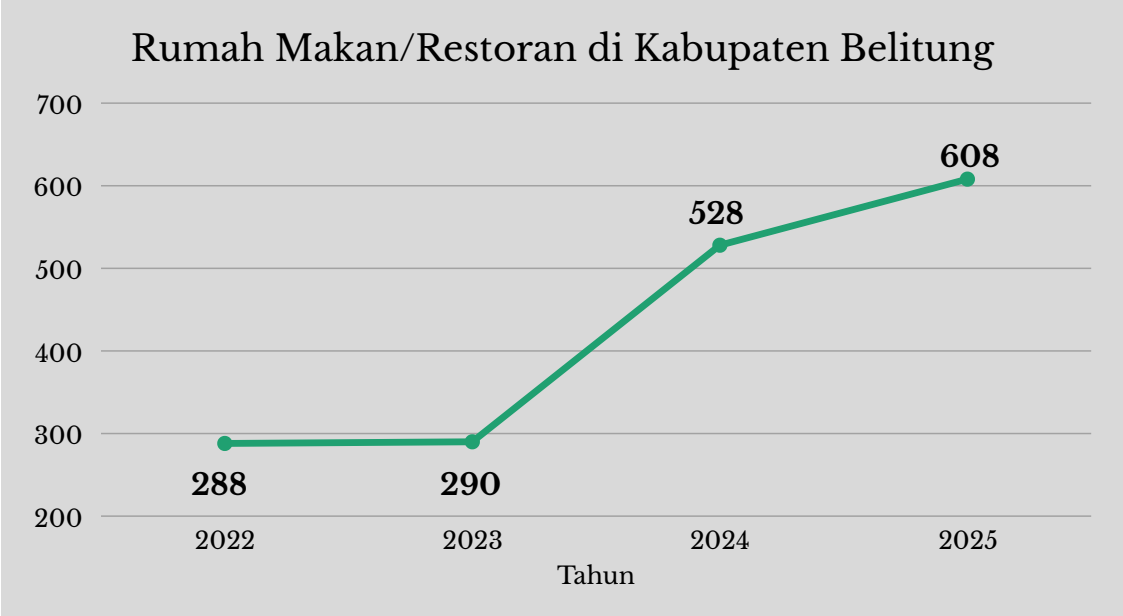

Grafik 1.4 Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Belitung Tahun 2022-2025
Sumber:Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung 2025

Perkembangan jumlah rumah makan dan restoran di Kabupaten Belitung menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2022–2025. Pada tahun 2022, jumlah rumah makan dan restoran tercatat sebanyak 288 unit, kemudian meningkat menjadi 290 unit pada tahun 2023. Peningkatan yang sangat tajam terjadi pada tahun 2024 dengan jumlah mencapai 528 unit, dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 608 unit.

Selain sebagai fasilitas pendukung pariwisata, pertumbuhan rumah makan dan restoran juga berkontribusi terhadap perekonomian daerah melalui penyerapan tenaga kerja dan pengembangan usaha lokal. Dengan meningkatnya jumlah usaha kuliner, sektor ini berperan strategis dalam menggerakkan ekonomi masyarakat serta memperkuat keterkaitan antara pariwisata, UMKM, dan sektor pendukung lainnya.

1.5.11 PERTUMBUHAN EKONOMI

Manfaat penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) antara lain dapat mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah, melalui indikator pertumbuhan ekonomi. Angka PDRB dihitung berdasarkan dua pendekatan yaitu produksi dan pengeluaran.

PDRB pendekatan produksi dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah bruto (NTB) yang dihasilkan oleh seluruh pelaku ekonomi dalam suatu wilayah tertentu. PDRB pengeluaran dihitung dengan menjumlahkan semua komponen permintaan akhir yang terdiri

dari : konsumsi rumah tangga; konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Berdasarkan publikasi Kabupaten Belitung dalam Angka Tahun 2026 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung sesuai dengan klasifikasi lapangan usaha, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Belitung tahun 2025 ditopang oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Industri Pengolahan. Kedua kategori lapangan usaha ini memberikan kontribusi masing-masing sebesar 28,01 persen dan 12,68 persen.

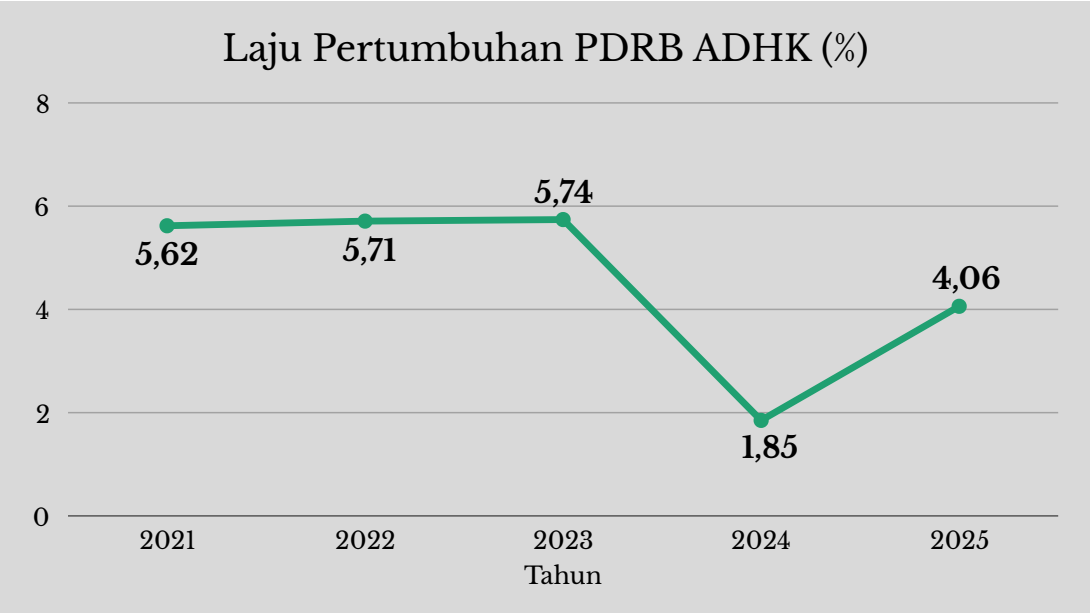

Grafik 1.5 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) di Kabupaten Belitung
Sumber:Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung 2025

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) di Kabupaten Belitung menunjukkan dinamika pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan PDRB tercatat sebesar 5,62 persen, kemudian meningkat menjadi 5,71 persen pada tahun 2022 dan mencapai 5,74 persen pada tahun 2023. Kondisi ini mencerminkan fase pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, di mana laju pertumbuhan PDRB menurun menjadi 1,85 persen. Penurunan ini mengindikasikan adanya tekanan terhadap aktivitas ekonomi daerah, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi nasional dan global, penurunan aktivitas sektor unggulan, maupun dinamika permintaan dan investasi.

Pada tahun 2025, laju pertumbuhan PDRB kembali menunjukkan perbaikan dengan meningkat menjadi 4,06 persen. Meskipun belum kembali pada tingkat pertumbuhan sebelum tahun 2024, peningkatan ini menandakan adanya upaya pemulihan ekonomi daerah serta mulai membaiknya kinerja sektor-sektor pendorong pertumbuhan.

1.5.12 PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan manusia merupakan proses untuk memperluas pilihan dan meningkatkan kualitas hidup penduduk melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Pembangunan manusia tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi menempatkan manusia sebagai subjek dan tujuan utama pembangunan. Kabupaten Belitung terus berupaya melakukan pembangunan manusia yang diwujudkan melalui peningkatan layanan pendidikan, perbaikan derajat kesehatan masyarakat, serta penguatan perekonomian yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan penduduk. Berbagai kebijakan dan program pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu berpartisipasi secara produktif dalam pembangunan daerah.

Untuk mengukur capaian pembangunan manusia secara komprehensif, digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator utama. IPM menjadi indikator strategis karena mampu mencerminkan hasil dari berbagai kebijakan lintas sektor yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup penduduk. Perubahan nilai IPM menunjukkan sejauh mana pembangunan manusia telah memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan perumusan kebijakan pembangunan ke depan.

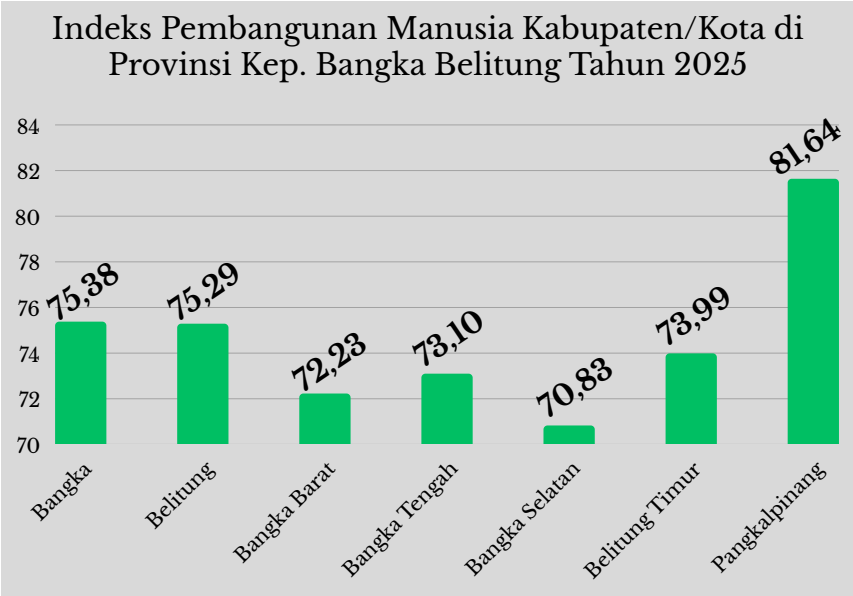

Grafik 1.6 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2025

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka 2026, BPS Kabupaten Belitung

Berdasarkan grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, capaian pembangunan manusia menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antarwilayah. Nilai IPM tertinggi dicapai oleh Kota Pangkalpinang dengan angka 81,64.

Pada posisi berikutnya, Kabupaten Bangka mencatat IPM sebesar 75,38, sedikit lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Belitung yang berada pada urutan ketiga dengan IPM 75,29. Selanjutnya, Kabupaten Belitung Timur menempati urutan keempat dengan IPM sebesar 73,99, diikuti oleh Kabupaten Bangka Tengah dengan IPM 73,10. Pada urutan berikutnya adalah Kabupaten Bangka Barat dengan IPM sebesar 72,23, sedangkan nilai IPM terendah tercatat di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 70,83.

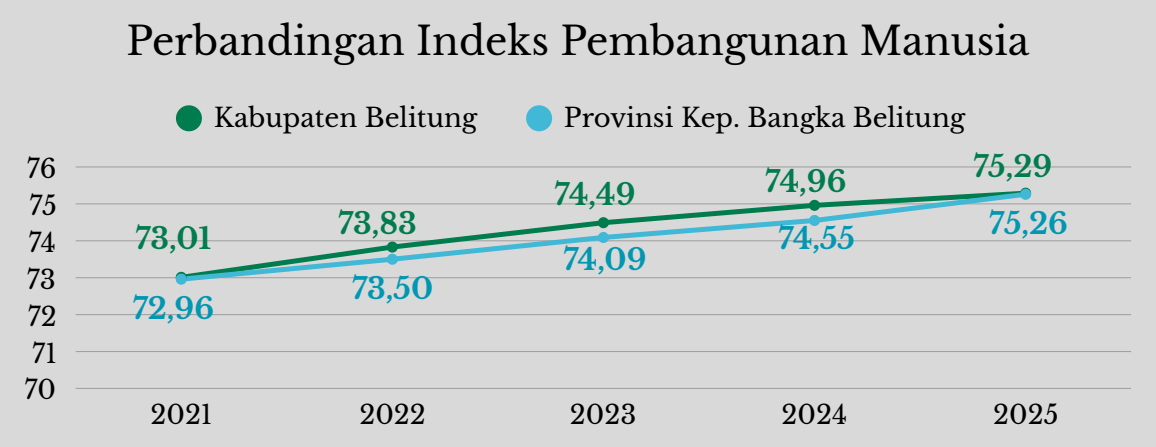

Grafik 1.7 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung dengan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2021-2025
Sumber:Kabupaten Belitung Dalam Angka 2026, BPS Kabupaten Belitung

Berdasarkan grafik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan tren kenaikan yang konsisten selama periode 2021–2025. Setiap tahun terjadi peningkatan tanpa adanya penurunan, yang mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat. Kabupaten Belitung selalu mencatatkan nilai sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi, meskipun selisihnya cenderung semakin mengecil dari tahun ke tahun.

Khusus pada tahun 2025, IPM Kabupaten Belitung mencapai 75,29, sementara IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada angka 75,26. Keduanya mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024, namun peningkatannya relatif kecil dibandingkan kenaikan pada awal periode. Selisih antara kabupaten dan provinsi pada tahun 2025 sangat tipis, hanya sekitar 0,03 poin, menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia di tingkat provinsi hampir menyamai Kabupaten Belitung.

1.5.13 STRUKTUR EKONOMI

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha dalam menghasilkan barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari kontribusi nilai tambah masing-masing lapangan usaha mencerminkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sektor-sektor tertentu dalam mendukung aktivitas produksi dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.8 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2021-2025

Lapangan Usaha		2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,22	26,90	26,49	27,15	28,01
B	Pertambangan dan Penggalian	6,21	5,47	4,92	4,86	5,42
C	Industri Pengolahan	12,33	13,15	12,99	12,57	12,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	0,15	0,14	0,14	0,14
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	12,59	11,72	12,15	11,70	10,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,22	10,93	10,61	10,33	10,72
H	Transportasi dan Pergudangan	5,37	7,61	8,26	8,12	7,67
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,80	4,03	4,13	4,23	4,29
J	Informasi dan Komunikasi	3,31	3,34	3,52	3,71	3,71
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,24	2,31	2,46	2,38	2,32
L	Real Estat/*Real Estate*	3,25	3,13	3,06	3,07	2,97
M,N	Jasa Perusahaan	0,30	0,33	0,35	0,36	0,36
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	7,12	6,30	6,17	6,46	5,95

P	Jasa Pendidikan	28,22	26,90	26,49	27,15	28,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,01	1,89	1,92	1,89	1,87
R,S, T,U	Jasa Lainnya	0,78	0,79	0,83	0,88	0,91
Produk Domestik Regional Bruto		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka 2026, BPS Kabupaten Belitung

Berdasarkan distribusi persentase PDRB Kabupaten Belitung atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2025, struktur perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,01 persen. Besarnya peranan sektor ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Kabupaten Belitung masih sangat bergantung pada sektor primer sebagai penopang utama pembentukan nilai tambah daerah.

Kontributor terbesar berikutnya adalah Industri Pengolahan sebesar 12,68 persen, diikuti oleh Konstruksi sebesar 10,84 persen serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,72 persen. Keempat sektor tersebut menjadi pilar utama perekonomian daerah karena secara kumulatif memberikan sumbangan lebih dari separuh total PDRB. Selain itu, sektor Transportasi dan Pergudangan juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan, yaitu sebesar 7,67 persen, yang mencerminkan peran penting mobilitas barang dan jasa dalam mendukung aktivitas ekonomi.

Sementara itu, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib menyumbang 5,95 persen, diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 5,42 persen. Sektor-sektor jasa lainnya seperti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (4,29 persen), Informasi dan Komunikasi (3,71 persen), Real Estat (2,97 persen), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (2,32 persen) turut memberikan kontribusi dalam pembentukan struktur ekonomi, meskipun dengan porsi yang lebih kecil.

Adapun sektor dengan kontribusi paling rendah pada tahun 2025 adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (1,87 persen), Jasa Lainnya (0,91 persen), Jasa Perusahaan (0,36 persen), Pengadaan Listrik dan Gas (0,14 persen), serta Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (0,03 persen).

Secara keseluruhan, struktur ekonomi Kabupaten Belitung tahun 2025 menunjukkan dominasi sektor primer yang didukung oleh sektor industri, konstruksi, perdagangan, dan transportasi sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi.

1.5.14 STRUKTUR ORGANISASI

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung telah diatur dalam Perda nomor 4 Tahun 2019. Organisasi Pemerintah Kabupaten Belitung terdiri dari Kepala Daerah yaitu Bupati dan Wakil Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Perangkat daerah dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 1.9 Uraian Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah (Unit)	Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Sekretariat	2	1. Sekretariat Daerah	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024
			2. Sekretariat DPRD	
2	Inspektorat	1	Inspektorat	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024
3	Dinas	17	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024
			2. Dinas Pemuda dan Olahraga	
			3. Dinas Pariwisata	
			4. Dinas Kesehatan	
			5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
			6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			8. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peridustrian	

3	Dinas	17	9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024
			10. Dinas Komunikasi dan Informatika	
			11. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
			12. Dinas Perhubungan	
			13. Dinas Lingkungan Hidup	
			14. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			15. Dinas Perikanan	
			16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
			17. Satuan Polisi Pamong Praja	
4	Badan	6	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024
			2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	
			5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
5	Kecamatan	5	1. Kecamatan Tanjungpandan	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024
			2. Kecamatan Sijuk	
			3. Kecamatan Badau	
			4. Kecamatan Membalong	
			5. Kecamatan Selat Nasik	

Sumber: Data diolah

1.5.15 KEPEGAWAIAN

Kepegawaian merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sumber daya manusia aparatur memiliki peran strategis dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi berbagai program dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan kepegawaian yang baik menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan.

Secara umum, kondisi kepegawaian mencerminkan komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian, tingkat pendidikan, golongan ruang, jabatan, serta sebaran unit kerja. Komposisi ini menggambarkan kapasitas dan kapabilitas organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi secara optimal. Selain itu, aspek pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai.

Dalam upaya mendukung reformasi birokrasi, pengelolaan kepegawaian diarahkan pada penerapan sistem merit, peningkatan disiplin dan kinerja, serta penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Dengan manajemen kepegawaian yang terencana dan berkelanjutan, diharapkan tercipta aparatur yang profesional, responsif, dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

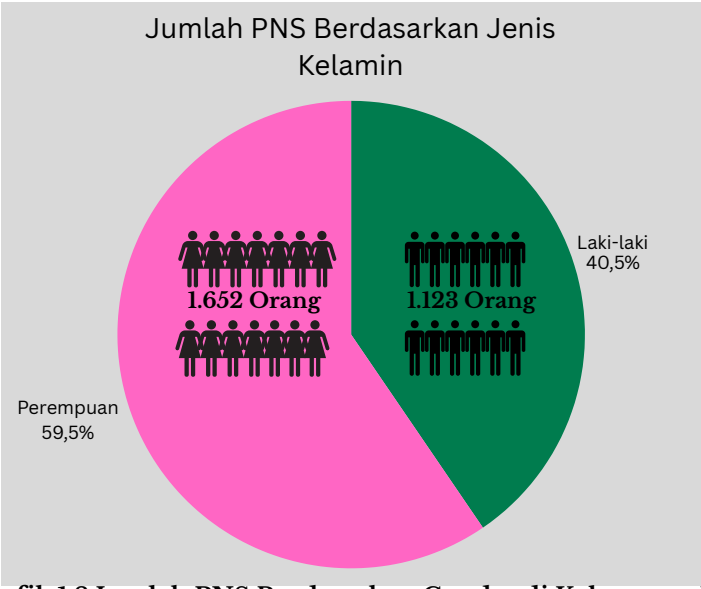

Grafik 1.8 Jumlah PNS Berdasarkan Gender di Kabupaten Belitung Tahun 2025
Sumber: BKPSDM 2025

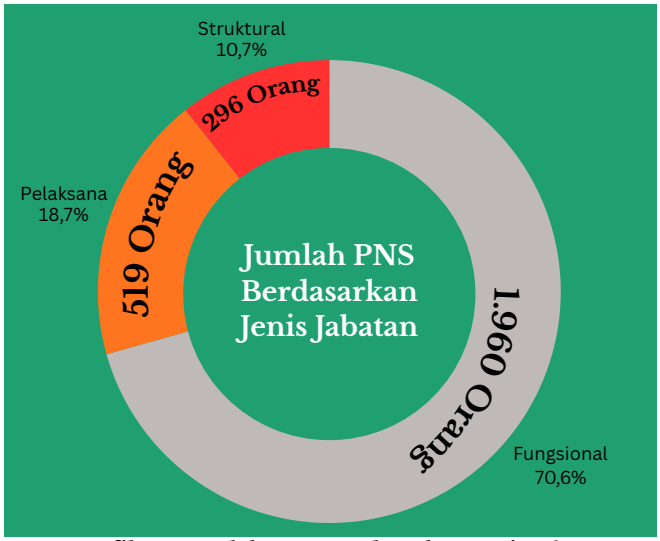

Grafik 1.9 Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Jabatan di Kabupaten Belitung Tahun 2025
Sumber: BKPSDM 2025

Tabel 1.10 Jumlah PNS Berdasarkan Eselon di Kabupaten Belitung Tahun 2025

ESELON	JUMLAH
II.A	1
II.B	19
III.A	40
III.B	80
IV.A	109
IV.B	47

Sumber: BKPSDM 2025

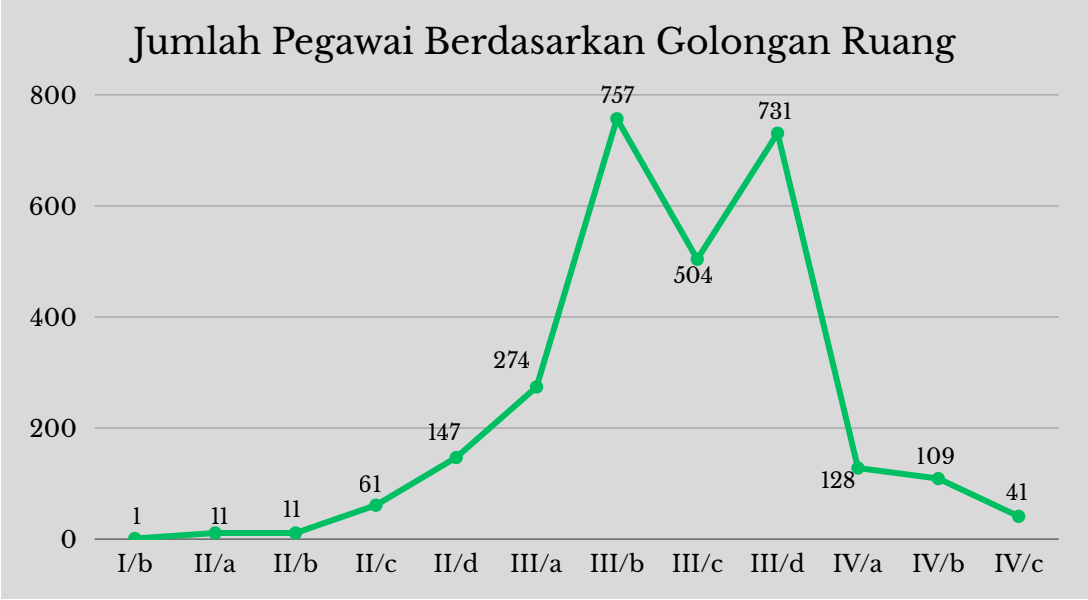

Grafik 1.10 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang di Kabupaten Belitung Tahun 2025
Sumber: BKPSDM 2025

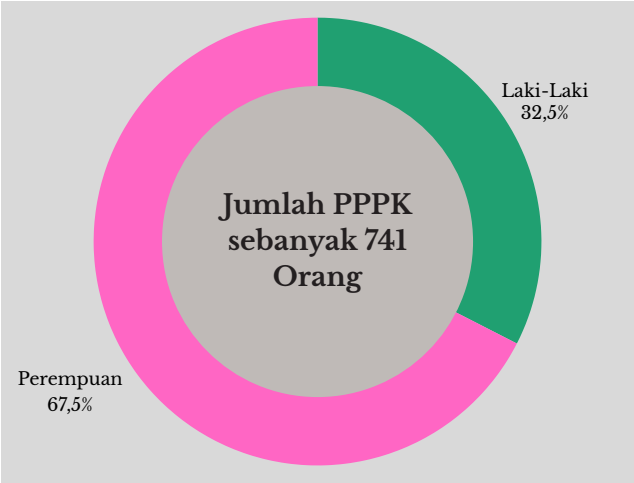

Grafik 1.10 Jumlah PPPK Berdasarkan Gender di Kabupaten Belitung Tahun 2025
Sumber: BKPSDM 2025

Struktur aparatur sipil negara di Kabupaten Belitung Tahun 2025 menunjukkan dominasi aparatur perempuan, baik pada PNS maupun PPPK. Dari total PNS, sebanyak 1.652 orang (59,5 persen) merupakan perempuan dan 1.123 orang (40,5 persen) laki-laki. Komposisi serupa juga terlihat pada PPPK yang berjumlah 741 orang, dengan proporsi perempuan mencapai 67,5 persen, sedangkan laki-laki sebesar 32,5 persen.

Berdasarkan jenis jabatan, sebagian besar PNS menempati jabatan fungsional sebanyak 1.960 orang (70,6 persen), diikuti jabatan pelaksana 519 orang (18,7 persen) dan jabatan struktural 296 orang (10,7 persen). Struktur ini menunjukkan arah kebijakan kepegawaian yang menekankan penguatan peran fungsional dan profesional ASN dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Dilihat dari jenjang jabatan struktural, PNS didominasi oleh pejabat eselon IV, khususnya eselon IV/a sebanyak 109 orang dan IV/b sebanyak 47 orang, sedangkan jumlah pejabat eselon II relatif terbatas. Sementara itu, berdasarkan golongan ruang, PNS paling banyak berada pada golongan III, terutama III/b sebanyak 757 orang dan III/d sebanyak 731 orang, yang mencerminkan dominasi ASN pada jenjang karier menengah.

1.5.16 ISU STRATEGIS DAERAH

Isu strategis daerah merupakan kondisi atau permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pembangunan daerah karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Penentuan isu strategis dilakukan melalui analisis terhadap kondisi pembangunan daerah, capaian indikator pembangunan, serta berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu, perumusan isu strategis juga memperhatikan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung serta kebijakan pembangunan nasional. Berikut ini adalah beberapa isu strategis yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Belitung sebagai berikut :

1. Kualitas Pendidikan Masyarakat Masih Rendah

Penguatan harmoni sosial memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai masalah sosial dan pembangunan, termasuk kualitas pendidikan, kesehatan, literasi digital, stunting, dan kemiskinan. Masalah-masalah ini saling mempengaruhi dan menciptakan siklus yang menghambat kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan dan literasi digital yang rendah cenderung sulit berpartisipasi penuh dalam masyarakat modern. Mereka lebih rentan terhadap misinformasi, yang bisa memicu konflik dan perpecahan, sehingga merusak harmoni sosial. Ketika masyarakat hidup dalam harmoni, lingkungan belajar menjadi lebih kondusif. Kerja sama dan toleransi antar individu dari berbagai latar belakang bisa meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua orang. Sebaliknya, konflik sosial dapat mengganggu proses belajar-mengajar dan menghambat akses pendidikan, terutama bagi kelompok rentan.

Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat merupakan salah satu isu strategis utama yang dihadapi Kabupaten Belitung. Meskipun capaian rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi pendidikan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat tantangan besar dalam hal pemerataan kualitas pendidikan, akses pendidikan tinggi, serta penguatan kapasitas literasi dan numerasi dasar masyarakat. Hal ini menjadi penting karena pendidikan merupakan fondasi peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM), yang pada gilirannya sangat menentukan keberhasilan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola daerah.

Dalam dokumen RPJMN 2025–2029, penguatan kualitas pendidikan menjadi bagian dari agenda pembangunan manusia Indonesia unggul, yang salah satu targetnya adalah peningkatan kualitas SDM berbasis teknologi, pendidikan karakter, dan kesetaraan akses. Hal ini sejalan dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang juga menempatkan isu rendahnya capaian pendidikan dan keterampilan tenaga kerja sebagai salah satu tantangan utama di daerah. Provinsi menggarisbawahi perlunya pengembangan pendidikan vokasional, literasi digital, dan perluasan akses pendidikan tinggi yang berbasis kebutuhan dunia kerja.

Sementara itu, RPJPD Kabupaten Belitung 2025–2045 menetapkan peningkatan kualitas dan daya saing SDM sebagai prioritas jangka panjang. Strategi ini mencakup pembangunan pendidikan sepanjang hayat, penguatan

pendidikan vokasional, serta peningkatan partisipasi pendidikan yang inklusif. Pencapaian tujuan tersebut sangat bergantung pada sistem pendidikan daerah yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan dinamis terhadap kebutuhan wilayah maritim dan sektor unggulan Belitung.

Dari sudut pandang lingkungan dan sosial, KLHS RPJMD Kabupaten Belitung menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pilar sosial pembangunan berkelanjutan. Isu pendidikan dikaitkan dengan ketimpangan akses, rendahnya literasi dasar, dan keterbatasan fasilitas pendidikan yang berwawasan lingkungan. KLHS juga mendorong integrasi prinsip inklusivitas, kesetaraan gender, dan pendidikan berbasis nilai-nilai lokal dalam sistem pembelajaran, agar pembangunan SDM berjalan adil dan berkelanjutan.

2. Derajat Kesehatan Masyarakat Masih Rendah

Derajat kesehatan masyarakat yang masih rendah merupakan tantangan krusial dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Belitung. Masalah-masalah kesehatan seperti tingginya prevalensi stunting, keterbatasan akses layanan kesehatan yang berkualitas, serta beban ganda penyakit (menular dan tidak menular) menunjukkan bahwa pembangunan sektor kesehatan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Kondisi ini berdampak langsung pada produktivitas, kualitas hidup, dan kapasitas pembangunan manusia secara keseluruhan.

Peningkatan kualitas layanan kesehatan juga menjadi prioritas nasional dalam rangka memperkuat ketahanan sosial dan membangun manusia Indonesia yang sehat. RPJMN menargetkan penguatan layanan primer, percepatan penurunan stunting, peningkatan cakupan JKN, serta penanggulangan penyakit menular dan tidak menular secara terpadu. Arah ini menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat sistem kesehatan berbasis masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

Dalam RPJPD Kabupaten Belitung 2025–2045, pembangunan kesehatan diarahkan pada penguatan sistem layanan dasar yang merata dan berkelanjutan. Strategi jangka panjang mencakup perluasan cakupan layanan kesehatan dasar, peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga kesehatan, serta pembangunan sistem kesehatan daerah yang adaptif terhadap perubahan demografi dan lingkungan. Arah ini berpadu dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dan penanganan penyakit kronis.

Sementara itu, KLHS RPJMD Kabupaten Belitung mengidentifikasi isu kesehatan dalam pilar sosial dan lingkungan. Derajat kesehatan rendah tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas layanan medis, tetapi juga oleh kondisi lingkungan hidup yang buruk seperti sanitasi tidak layak, pencemaran air, dan ketahanan pangan yang lemah. KLHS menekankan pentingnya intervensi lintas sektor yang mengintegrasikan kesehatan lingkungan, ketersediaan air bersih, pengendalian limbah, serta edukasi kesehatan masyarakat untuk mendukung derajat kesehatan yang lebih baik.

Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan menjadi bagian integral dalam pengembangan sistem pelayanan dasar wilayah di dalam dokumen RTRW. Pembangunan diarahkan juga untuk fasilitas kesehatan secara merata di pusat-pusat pelayanan lokal dan wilayah, termasuk puskesmas, rumah sakit, dan klinik kesehatan terpadu. Ketersediaan ruang pelayanan kesehatan ini mendukung terwujudnya pelayanan yang mudah dijangkau, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan spasial masyarakat.

Telaah tersebut menunjukkan bahwa isu rendahnya derajat kesehatan masyarakat adalah tantangan multidimensi yang perlu ditangani secara komprehensif melalui RPJMD 2025–2029. Pendekatan yang diperlukan adalah peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan dasar, integrasi kesehatan lingkungan, penguatan sistem pembiayaan dan manajemen kesehatan, serta peran aktif masyarakat dalam mendorong gaya hidup sehat. Dengan integrasi lintas dokumen perencanaan, pembangunan kesehatan dapat diarahkan untuk mencapai masyarakat Belitung yang lebih sehat, tangguh, dan sejahtera secara berkelanjutan.

3. Tingkat Literasi Digital Masyarakat Masih Rendah

Rendahnya tingkat literasi digital masyarakat Kabupaten Belitung menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong percepatan transformasi digital daerah. Literasi digital yanglemah berdampak langsung terhadap keterbatasan masyarakat dalam mengakses informasi, layanan publik digital, peluang kerja berbasis teknologi, serta penguatan partisipasi dalam era masyarakat informasi. Rendahnya literasi digital juga dapat memperlebar kesenjangan sosial dan memperlambat adaptasi masyarakat terhadap inovasi pembangunan berbasis digital.

Dalam RPJMN 2025–2029, transformasi digital menjadi salah satu prioritas strategis nasional, dengan menekankan perluasan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta penguatan literasi digital masyarakat sebagai prasyarat

keberhasilan agenda transformasi ekonomi dan birokrasi. Literasi digital dianggap penting tidak hanya sebagai sarana meningkatkan efisiensi, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengangkat pentingnya peningkatan kapasitas SDM, termasuk dalam aspek penguasaan teknologi dan digitalisasi. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "literasi digital," namun arah kebijakan provinsi menunjukkan perlunya adaptasi teknologi dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, pelayanan publik, dan sektor ekonomi kreatif.

Adapun dalam RPJPD Kabupaten Belitung 2025–2045 secara lebih eksplisit menekankan pengembangan SDM unggul dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan digital. Tantangan rendahnya literasi digital diidentifikasi sebagai salah satu hambatan dalam memanfaatkan peluang ekonomi baru, khususnya dalam sektor pariwisata digital, UMKM berbasis daring, serta pendidikan berbasis teknologi. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital diarahkan untuk mendukung transformasi sosial dan ekonomi masyarakat Belitung dalam jangka panjang.

Isu rendahnya literasi digital masyarakat di Kabupaten Belitung memiliki relevansi yang tinggi dengan arah pembangunan nasional dan daerah, terutama dalam aspek SDM, transformasi ekonomi, dan tata kelola digital. Namun, pengarusutamaan literasi digital sebagai prioritas daerah masih perlu diperkuat secara eksplisit dalam RPJMD agar mampu menjembatani kesenjangan digital dan mendorong peningkatan kapasitas adaptif masyarakat terhadap perubahan teknologi yang semakin cepat

4. Prevalensi Stunting Masih Tinggi dan Menjadi Tantangan Pembangunan Kesehatan

Stunting masih menjadi persoalanserius dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Belitung. Prevalensi stunting yang tinggi mencerminkan tidak hanya masalah gizi kronis, tetapi juga akumulasi dari berbagai persoalansistemik, seperti kemiskinan, sanitasi yang buruk, pola asuh yang kurang tepat, danakses layanan kesehatan ibu dan anak yang belum merata. Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi yang berlangsung lama, yang artinya anak tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dan berkualitas sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun. Ini adalah masa 1000 HariPertama Kehidupan yangsangat krusial, Keterkaitanutamanya adalah ketidakmampuan keluarga untuk menyediakan makanan yang cukup, bergizi, dan beragam. Ketika sebuah rumah tangga mengalami

kerawanan pangan, ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan menjadi terganggu. Akibatnya, anak-anak tidak mendapatkan nutrisi esensial seperti protein, vitamin, dan mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan optimal, Bahkan jika ketersediaan pangan secara kuantitas cukup, kurangnya pengetahuan tentang gizi seimbang dan pola asuh yang salah bisa menyebabkan anak tetap kekurangan gizi. Misalnya, pola makanyang didominasi karbohidrat tanpa protein dan sayuran yang memadai.Kondisi ini menjadi tantangan strategis karena berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat di masa depan.

Percepatan penurunan stunting merupakan salah satu prioritas nasional, dengan target penurunan yang signifikan melalui pendekatan konvergensi lintas sektor, mulai dari intervensi spesifik (kesehatan dan gizi) hingga intervensi sensitif (air bersih, sanitasi, pendidikan, perlindungan sosial, dan ketahanan pangan keluarga). Stunting tidak hanya dilihat sebagai masalah kesehatan, tetapi juga masalah pembangunan yang kompleks.

Arah yang sejalanjuga ditemukan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang menempatkan penurunan angkastunting sebagai salah satu indikator utama dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Provinsi mendorong penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemberdayaan keluarga melalui edukasi gizi, serta perbaikan sanitasi lingkungan sebagai bagian dari strategi penurunan stunting yang komprehensif.

Dalam RPJPD Kabupaten Belitung 2025–2045, pembangunan manusia menjadi salah satu pilar utama. Penurunan stunting secara eksplisit menjadi salah satu arah kebijakan dalam memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak, dan memastikan generasi masa depan yang sehat dan produktif. Pendekatan jangka panjang diarahkan pada penguatan intervensi sejak 1.000 hari pertama kehidupan, edukasi gizi keluarga, serta integrasi layanan kesehatan dan sosial di tingkat desa.

KLHS RPJMD Kabupaten Belitung menyoroti stunting dalam pilar sosial sebagai salah satu indikator ketimpangan kesejahteraan. KLHS menekankan pentingnya integrasi pendekatan lingkungan dansosial, karena banyak faktor penyebab stunting yang bersumber dariburuknya lingkungan hidup, seperti keterbatasan air bersih, pengelolaan limbah rumah tangga yang tidak memadai, dankerentanan terhadap bencana. Oleh karena itu, intervensi yang berkelanjutan harus menggabungkan perbaikan layanan dasar, penguatan ketahanan pangan rumah tangga, dan pelibatan masyarakat secara aktif.

Stunting merupakan isu yang secara konsisten muncul dan diperkuat dalam hampirseluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun nasional. RPJMD Kabupaten Belitung 2025–2029 perlu menempatkan isuini sebagai prioritas strategis yang ditangani secara lintas sektor, berorientasi keluarga dan komunitas, serta berbasis data dan evaluasi kinerja secara berkala. Penurunan stunting bukan sekadar indikator keberhasilan sektor kesehatan, tetapi juga cermin dari efektivitas tata kelola pembangunan daerah secara menyeluruh.

5. Masih Banyak Penduduk yang Berpenghasilan di Bawah Garis Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Belitungyang berdampak pada berbagai aspek sosial, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Meskipun tren penurunan angka kemiskinan secara umum menunjukkan perbaikan, namun masih terdapat kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dan belum sepenuhnya tersentuh oleh program perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi. Ketimpangan pendapatan, terbatasnya kesempatan kerja, serta akses terbatas terhadap layanan dasar turut memperkuat struktur kemiskinan yang ada.

Pengurangan kemiskinan merupakan agenda utama dalam pembangunan manusia dan penguatan perlindungan sosial nasional. Pemerintah pusat menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem hingga 0% pada akhir periode perencanaan. Strategi nasional mencakup perluasan program bantuan sosial berbasis data terpadu, integrasi layanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, serta penguatan akses pembiayaan dan kewirausahaan.

Pada perencanaan pembangunan di provinsi juga mengidentifikasi kemiskinan sebagai isu prioritas, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses dan ketimpangan pembangunan. Program-program provinsi diarahkan untuk mendorong inklusi keuangan, pelatihan keterampilan kerja, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan ekonomi lokal yang melibatkan kelompok rentan. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari sisi pendapatan, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam pembangunan.

Selaras dengan itu, RPJPD Kabupaten Belitung 2025–2045 menekankan pembangunan inklusif danpengurangan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok sosial. Kemiskinan diidentifikasi sebagai hambatan utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang merata. Strategi jangka panjang meliputi peningkatan daya saing tenaga kerja

lokal, penguatan ekonomi kerakyatan, dan transformasi program bantuan menjadi intervensi berbasis pemberdayaan.

Dalam perspektif keberlanjutan, KLHS RPJMD Kabupaten Belitung memasukkan isu kemiskinan sebagai bagian dari pilar sosial. KLHS menyoroti bahwa kerentanan ekonomi masyarakat sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan, kualitas lingkungan, dan ketimpangan akses layanan dasar. Oleh karena itu, pengurangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan tunai, melainkan harus melalui peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh, terutama bagi kelompok marginal seperti perempuan kepala keluarga, lansia miskin, dan penyandang disabilitas.

Secara spasial, RTRW Kabupaten Belitung 2014–2034 tidak menyebut kemiskinan secara langsung, namun arah pengembangan wilayah ke pusat-pusat kegiatan lokal dan penguatan konektivitas antarwilayah mendukung terbukanya akses terhadap layanan dan peluang ekonomi. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, pasar rakyat, dan pusat layanan publik menjadi pondasi penting dalam menciptakan ruang tumbuh ekonomi lokal yang pro-masyarakat miskin.

Upaya pengurangan jumlah penduduk yang berpenghasilan di bawah garis kemiskinan harus menjadi prioritas utama RPJMD Kabupaten Belitung 2025–2029. Intervensi yang dilakukanperlu bersifat lintas sektor, menyasar akar penyebab struktural kemiskinan, serta diarahkan pada peningkatan produktivitas, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pembangunan ekosistem kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.

6. Nilai Investasi Daerah Masih Rendah dan Belum Optimal Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Rendahnya nilai investasi daerah menjadi salah satu tantangan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung. Kondisi ini ditandai oleh terbatasnya realisasi penanaman modal, minimnya diversifikasi sektor investasi, serta belum optimalnyakemudahan berusaha (*ease of doing business*) dan ekosistem investasi yang kompetitif. Padahal, investasi merupakan pendorong penting bagi penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Sejalan dengan Kabupaten Belitung, pemerintah provinsi mendorong penguatan infrastruktur pendukung investasi, promosi potensi unggulan daerah (termasuk tambang, pariwisata, dan perikanan), serta harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Di samping itu, penguatan kapasitas daerah dalam pelayanan perizinan dan pemberian insentif menjadi bagian penting dari strategi peningkatan investasi.

RTRW Kabupaten Belitung memberikan landasan spasial penting bagi peningkatan investasi daerah. Dokumen RTRW menetapkan kawasan-kawasan strategis ekonomi yang layak dikembangkan sebagai lokasi investasi, seperti kawasan agrowisata, kawasan pariwisata Tanjung Kelayang, kawasan pelabuhan, serta kawasan budidaya perikanan dan pertanian. RTRW juga mengarahkan penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, bandara, serta jaringan energi dan TIK yang mendukung kegiatan investasi. Dengan demikian, isu rendahnya investasi daerah memiliki relevansi tinggi terhadap seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional. RPJMD Kabupaten Belitung 2025–2029 harus merespons isu ini dengan kebijakan dan program strategis yang memperkuat iklim investasi, mendorong kepastian berusaha, meningkatkan promosi potensi unggulan daerah, dan memastikan investasi yang masuk memberikan manfaat ekonomi, sosial, danlingkungan secara berkelanjutan.

7. Kurangnya Diversifikasi Sektor Ekonomi yang Berbasis Potensi Lokal

Ketergantungan ekonomi Kabupaten Belitung pada sektor-sektor tertentu seperti pariwisata, pertambangan, dan perikanan tangkap menjadikan perekonomian daerah rentan terhadap fluktuasi pasar, krisis global, dantekanan lingkungan. Diversifikasi ekonomi yang belum berkembang optimal menjadi hambatan dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah lokal, danmenciptakan struktur ekonomi yang tangguh dan inklusif. Sementara potensi lokal seperti pertanian organik, ekonomi kreatif, pengolahan hasil laut, dan produk berbasis kearifan lokal belum tergarap secara maksimal.

Pemerintah daerah telah memberikan dukungan spasial yang sangat relevan dengan agenda diversifikasi ekonomi yang tertuang di dalam RTRW. Beberapa kawasan budidaya telah ditetapkan untuk mendukung pengembangan pertanian, perikanan, agrowisata, dan industri rumah tangga.Pengembangan kawasan wisata terpadu, pelabuhan perikanan, dan sentra produksi pangan menjadi bagian daristrategi struktur ruang yang mendukung transformasi ekonomi daerah.

Dengan demikian, kurangnya diversifikasi sektor ekonomi menjadi isu strategis yang perlu segera dijawab oleh RPJMD Kabupaten Belitung 2025–2029. Pembangunan ekonomi tidak cukup hanya bertumpu pada sektor unggulan lama, tetapi perlu mendorong tumbuhnya sektor-sektor baru berbasis potensi lokal, teknologi, dan keberlanjutan.

Langkah ini penting untuk meningkatkan resiliensi ekonomi daerah, memperluas basis penerimaan daerah, serta menciptakan peluang kerja yangmerata dan berkeadilan.

8. Belum Optimalnya Pengembangan Potensi Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Belitung yang telah diakui secara nasional, bahkan ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang dan masuk dalam jaringan *geopark* UNESCO. Namun demikian, pengembangan sektor ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum meratanya infrastruktur pendukung, rendahnya kapasitas SDM pariwisata, kurangnya promosi terpadu, serta belum optimalnya integrasi dengan sektor lain seperti UMKM, pertanian, dan budaya lokal. Hal ini menyebabkan potensi pariwisata yang besar belum sepenuhnya memberikan dampak ekonomi yang signifikan dan inklusif bagi masyarakat.

Sektor pariwisata menjadi salah satu pendorong utama transformasi ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah pusat menekankan pentingnya pembangunan destinasi pariwisata unggulan, penguatan konektivitas antar destinasi, serta pengembangan pariwisata berkualitas tinggi berbasis alam, budaya, dan digital. Selaras dengan itu, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memprioritaskan pengembangan pariwisata sebagai pengganti sektor pertambangan, dengan strategi peningkatan kualitas destinasi, promosi, dan ekosistem usaha pariwisata.

RPJPD Kabupaten Belitung 2025–2045 menempatkan pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi jangka panjang, dengan visi mewujudkan Belitung sebagai pusat maritim barat yang berdaya saing. Pembangunan pariwisata diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta memperkuat identitas budaya lokal. Di sisi lain, KLHS RPJMD menekankan pentingnya mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan secara lingkungan, sosial, dan budaya, dengan menghindari kerusakan ekosistem akibat pembangunan yang tidak terkendali. KLHS juga mendorong agar pariwisata dirancang untuk memperkuat nilai-nilai lokal dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat desa dan kelompok rentan.

Dari perspektif spasial, RTRW Kabupaten Belitung mendukung pengembangan kawasan pariwisata strategis, termasuk KEK Tanjung Kelayang, kawasan pantai, *geopark*, dan kawasan perdesaan wisata. Dokumen RTRW juga mengarahkan konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan pariwisata dengan infrastruktur pendukung, seperti

pelabuhan, bandara, jalan kolektor, dan kawasan permukiman.Integrasi spasialini menjadi penting untuk menjamin keberlanjutan destinasi dan kenyamanan pengunjung.

Belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Belitung merupakan akibat dari belum kuatnya koordinasi lintas sektor dan dokumen perencanaan yang ada. RPJMD 2025–2029 perlu merespons isu ini dengan menyusun strategi penguatan tata keloladestinasi, peningkatan kapasitas SDM, integrasi pariwisata dengan sektor ekonomi lokal, sertapendekatan pembangunan berbasis kelestarian lingkungan dan kearifan budaya. Dengan langkah tersebut, pariwisata dapat menjadi motor utama pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

9. Pelaksanaan SPBE Belum Berjalan Secara Ideal

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, termasuk pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), merupakan pilar penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien,transparan, dan akuntabel. Di Kabupaten Belitung, pelaksanaan SPBE masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum terintegrasinya sistem informasi lintas perangkat daerah, rendahnya kapasitas SDM aparatur dalam memanfaatkan teknologi, serta infrastruktur TIK yang belum merata. Hal ini menyebabkan proses layananpublik masih belum sepenuhnya digital dan berdampak pada rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Penguatan transformasi digital birokrasi menjadi salah satu agenda strategis nasional. Pemerintah pusat mendorong implementasi SPBE secara menyeluruh melalui integrasi data, interoperabilitas sistem, serta penyederhanaan layanan berbasis digital yang mudah diakses olehmasyarakat. Tujuannya adalah mendorong layanan publik yangadaptif, akuntabel, dan menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah kepulauan seperti Belitung.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jugamenekankan pentingnya tata kelola pemerintahan berbasis digital sebagai prasyarat peningkatan kualitaslayanan publik dan kinerja birokrasi. Namun, pelaksanaan SPBE di tingkat kabupaten/kotamasih bervariasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan SDM TIK, serta sinkronisasi platform digital untuk mempercepat pencapaian target reformasi birokrasi digital di seluruh wilayah provinsi.

Dalam RPJPD Kabupaten Belitung 2025–2045, transformasi tata kelola pemerintahan digital termasuk dalam agenda pembaruan birokrasi daerah. Visi jangka panjang menekankan pelayanan publik yang adaptif terhadap teknologi, dengan dukungan infrastruktur digital, manajemen data daerah yang terintegrasi, dan penguatan pengawasan berbasis sistem informasi. Namun tantangan di lapangan adalah bagaimana memastikan implementasi SPBE berjalan merata di seluruh OPD dan menjangkau masyarakat secara luas.

Kelemahan dalam pelaksanaan SPBE di Kabupaten Belitung menunjukkan masih perlunya integrasi antara infrastruktur, SDM, sistem informasi, dan tata kelolakelembagaan. RPJMD 2025–2029 perlu merespons isu ini melalui strategi penguatan kapasitas birokrasi digital, penyediaan infrastruktur TIK yang merata, serta pemanfaatan data danteknologi untuk mendukung perencanaan dan pelayanan publik. Dengan SPBE yang terintegrasi dan inklusif, Kabupaten Belitung dapat bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

10. Manajemen SDM Aparatur Belum Sepenuhnya Menciptakan ASN yang Profesional

Profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) merupakan prasyarat mutlak dalam mewujudkan birokrasi yang melayani, adaptif, dan berdaya saing. Namun, manajemen SDM aparatur di Kabupaten Belitung masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari belum optimalnya perencanaan kebutuhan pegawai, rendahnya penguasaan teknologi dan literasi digital, hingga kelemahan dalam penerapan sistem merit dan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Kondisi ini berpengaruh pada rendahnya efektivitas pelayanan publik serta lambatnya respons birokrasi terhadap dinamika perubahan sosial dan teknologi.

Dalam RPJMN 2025–2029, reformasi manajemen ASN menjadi bagian penting dari agenda transformasi birokrasi nasional. Pemerintah pusat mendorong sistem merit yang kuat, manajemen talenta, dan penguatan budaya kerja berorientasi pelayanan. Ditekankan pula pentingnya pelatihan berbasis kompetensi, transformasi digital ASN, serta promosi berdasarkan kinerja dan integritas. Dengan demikian, SDM aparatur tidak hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam pembangunan daerah.

Kekurangan dalam manajemen ASN perlu dijawab secara strategis dalam RPJMD 2025–2029 melalui transformasi sistem kepegawaian yang modern dan berbasis kompetensi. Langkah-langkah seperti pelatihan berkelanjutan, digitalisasi manajemen ASN, serta penguatan sistem rekrutmen dan promosi berbasis

merit menjadi keharusan untuk mewujudkan birokrasi Kabupaten Belitung yang profesional,responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

11. Tata Kelola Pendapatan Daerah Belum Optimal

Optimalisasi pendapatan daerah merupakan faktor penting dalam membangun kemandirian fiskal dan mendukung keberlanjutan program pembangunan di Kabupaten Belitung. Namun demikian,struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat, sementara kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) relatif kecil. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan basis penerimaan daerah, lemahnya sistem intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi, serta belum optimalnya digitalisasi layanan perpajakan dan pengelolaan aset daerah.

Dalam RPJMN 2025–2029, arah kebijakan fiskal nasional mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah melalui inovasi pendapatan dan penguatan tata kelola pendapatan daerah. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi digital menjadi landasan utama dalam reformasi pendapatan daerah. RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turut mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan rasio PAD terhadap total APBD melalui penyederhanaan perizinan, digitalisasi sistem pelayanan pajak daerah, serta sinergi antar sektor dalam pengelolaan potensi fiskal.

Dalam konteks Kabupaten Belitung, RPJPD 2025–2045 menekankan pentingnya pembangunan ekonomi lokal yang kuat sebagai basis pertumbuhan PAD. Pengembangan sektor unggulan seperti pariwisata, perikanan, dan ekonomi kreatif diharapkan dapat membuka peluang peningkatan PAD yang berkelanjutan. Di sisi lain, dokumen KLHS mengingatkan agar peningkatan pendapatan daerah tidak mengorbankan kelestarian lingkungan atau menimbulkan ketimpangan sosial. Sementara itu, RTRW mendukung upaya ini dengan mengarahkan pemanfaatan ruang secaraproduktif dan berkelanjutan, termasuk pengembangan kawasan yang memilikipotensi ekonomi. Oleh karena itu, RPJMD 2025–2029 perlu memuat strategi penguatan kelembagaan pajak daerah, reformasi sistem informasi fiskal, serta integrasi kebijakan pembangunan ekonomi dan fiskal untuk meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan secara berkelanjutan.

12. Infrastruktur Kewilayahan Masih Belum Memadai untuk Mendukung Pelayanan Dasar dan Perekonomian

Ketersediaan infrastruktur kewilayahan yang memadai merupakan prasyarat penting dalam pemerataan pembangunan, konektivitas antarwilayah, serta penguatan pelayanan dasar dan ekonomi lokal. Namun di Kabupaten Belitung, masih terdapat ketimpangan kualitas dan jangkauan infrastruktur antarwilayah, terutama di wilayah-wilayah perdesaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.Permasalahan mencakup keterbatasan jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan, minimnya sarana transportasi publik, serta keterbatasan infrastruktur penunjang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi rakyat.

Penguatan infrastruktur wilayah menjadi prioritas nasional dalam mendorong transformasi ekonomi dan penurunan kesenjangan antarwilayah. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk menjamin konektivitas nasional, integrasi kawasan pertumbuhan baru, serta mendukung pengembangan wilayah pesisir dan kepulauan. RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berbasis potensi lokal, termasuk peningkatan konektivitas darat, laut, danudara untuk mendukung pariwisata, perikanan, dan pertanian.

Selaras dengan itu, RPJPD Kabupaten Belitung 2025–2045 memuat agenda pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan kawasan, pemerataan layanan dasar, serta mitigasi risiko bencana. Dalam dokumen tata ruang Kabupaten Belitung diarahkan pada pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer dan sekunder, penguatan simpul transportasi (pelabuhan, bandara), serta infrastruktur air bersih, sanitasi, dan energi. Sementara KLHS mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan daya dukung lingkungan, integrasi spasial, serta inklusi sosial agar tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Dengan demikian, RPJMD perlu memastikan pembangunan infrastruktur kewilayahan dilakukan secara adil, efisien, dan berkelanjutan, serta mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Belitung.

13. Aksesibilitas dan Konektivitas Antarwilayah Masih Rendah

Rendahnya aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Belitung menjadi salah satu hambatan utama dalam pemerataan pembangunan, mobilitas masyarakat, serta distribusi barang dan jasa. Banyakwilayah perdesaan dankawasan pesisir yang masih sulit dijangkau, baik karena kondisi infrastruktur jalan yang rusak maupun belum tersambungnya jalur transportasi yang layak. Akibatnya, keterisolasian wilayah-wilayah tertentu masih tinggi dan berdampak pada rendahnya

akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar lokal.

Konektivitas yang rendah juga berdampak langsung pada lambatnya pertumbuhan ekonomi lokal, terutama sektor-sektor berbasis potensi wilayah seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Wilayah yang memiliki keunggulan komparatif belum mampu mengakses rantai pasok dan pasar secara efisien, sehingga potensi ekonomi yang dimiliki belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Keterbatasan sarana transportasi publik, minimnya integrasi antarmoda, serta kurangnya dukungan logistik menjadi faktor penghambat utama.

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan upaya sistematis dalam memperkuat konektivitas fisik antarwilayah melalui pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan jalan, jembatan, pelabuhan, dan infrastruktur pendukung lainnya. Selain itu, konektivitas digital juga perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan, agar wilayah-wilayah terpencil tidak tertinggal dalam era transformasi informasi dan ekonomi digital. Akses yang merata akan membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan memperkuat kohesi sosial antarwilayah dalam kerangka pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

14. Rendahnya Kesadaran dan Pengelolaan Lingkungan secara Berkelanjutan

Kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hidup masih tergolong rendah di Kabupaten Belitung. Masihbanyak aktivitas yang tidak memperhatikan dampak ekologis jangka panjang, seperti pembuangan sampah sembarangan, alih fungsi lahan tanpa pengendalian, penangkapan ikan yang merusak, dan penggunaan sumber daya alam secara berlebihan. Kurangnya edukasi lingkungan dan minimnyapenerapan nilai-nilai kelestarian dalam keseharian menjadi faktor penyebab utama rendahnya kesadaran tersebut.

Selain kesadaran, aspek kelembagaan dan tata kelola lingkungan juga masih belum optimal. Koordinasi antar sektor dalam pengelolaan kawasan lindung, konservasi sumber daya, dan pengendalian pencemaran seringkali lemah. Pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan belum dilakukan secara konsisten, dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan masih rendah. Hal ini berisiko mempercepat degradasi lingkungan, menurunkan daya dukung wilayah, dan mengancam keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.

Meningkatkan kesadaran dan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan harusmenjadi bagian integral dari pembangunan daerah. Upaya ini dapat dilakukan melalui edukasi publik, kampanye perilaku ramah lingkungan, pemberdayaan komunitas lokal dalam pengelolaan kawasan, serta insentif bagi praktik ekonomi hijau dan biru. Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat pengelola lingkungan, dan pemanfaatan teknologi pemantauan juga menjadi langkah penting. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan semua pihak, pembangunan daerah dapat berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan yang menjadi pondasinya.

Rendahnya kesadaran dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan memiliki keterkaitan langsung dengan buruknya pengelolaan sampah dan limbah, yang pada gilirannya menurunkan ketahanan terhadap bencana. Ketiga isu ini saling terkait dalam sebuah siklus negatif yang dapat memperburuk kondisi lingkungan dan sosial. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang benar seperti memilah, mendaur ulang, dan mengurangi limbah mengakibatkan tumpukan sampah dilingkungan. Sampah yang tidak terkelola dengan baik ini menyumbat saluran air, mencemari sungai danlaut, serta menjadi sumber penyakit. Buruknya pengelolaan sampah dan limbah secara langsung menurunkan ketahanan terhadap bencana, terutama bencana hidrometeorologi seperti banjir. Penguatan kesadaran dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan adalah kunci untuk memutus siklus negatif ini. Ketika masyarakat sadar bahwa tindakan mereka berdampak besar pada lingkungan, mereka akan lebih termotivasi untuk mengurangi limbah dengan menggunakan produk yang ramah lingkungan dan mengurangi konsumsi. Memilah sampah dengan memisahkan sampah organik, anorganik, dan berbahaya untuk memudahkan daur ulang. Mendukung kebijakan lingkungan dengan Berpartisipasi dalam program-program pemerintah atau komunitas yang bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN KINERJA

Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat, yang mencakup berbagai perubahan dari struktur sosial dengan tetap mengejar pertumbuhan ekonomi dalam penanganan ketimpangan pendapatan, serta dalam penanganan kemiskinan pembangunan harus selaras dengan tujuan nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaannya diawali dengan penyusunan perencanaan melalui siklus perencanaan pembangunan. Pada perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Tahun 2025 ini merupakan tahun transisi kepemimpinan Bupati terpilih untuk periode 2025-2029, oleh sebab itu dalam pelaksanaanya masih menggunakan Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, dan juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang ditetapkan pada 19 Agustus 2025. Berikut dapat dijelaskan target kinerja tahun 2025 masing-masing periode RPD dan RPJMD untuk masing-masing periode.Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 berpedoman pada Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Daerah ini merupakan tahapan ke-4 dari 4 (empat) tahapan pencapaian visi jangka panjang dalam Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung tahun 2005-2025.

Tahap ke-4 ini masih melanjutkan pencapaian tahap ke-3, dimana fokus pada bidang ekonomi, Sumber Daya Manusia dan penguatan birokrasi diarahkan untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Belitung 2005-2025 yaitu **"Terwujudnya kabupaten Belitung yang mandiri dan produktif dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, terpadu dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat"**. Visi tersebut akan diwujudkan dengan misi sebagai berikut :

1. Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah; dan
3. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan.

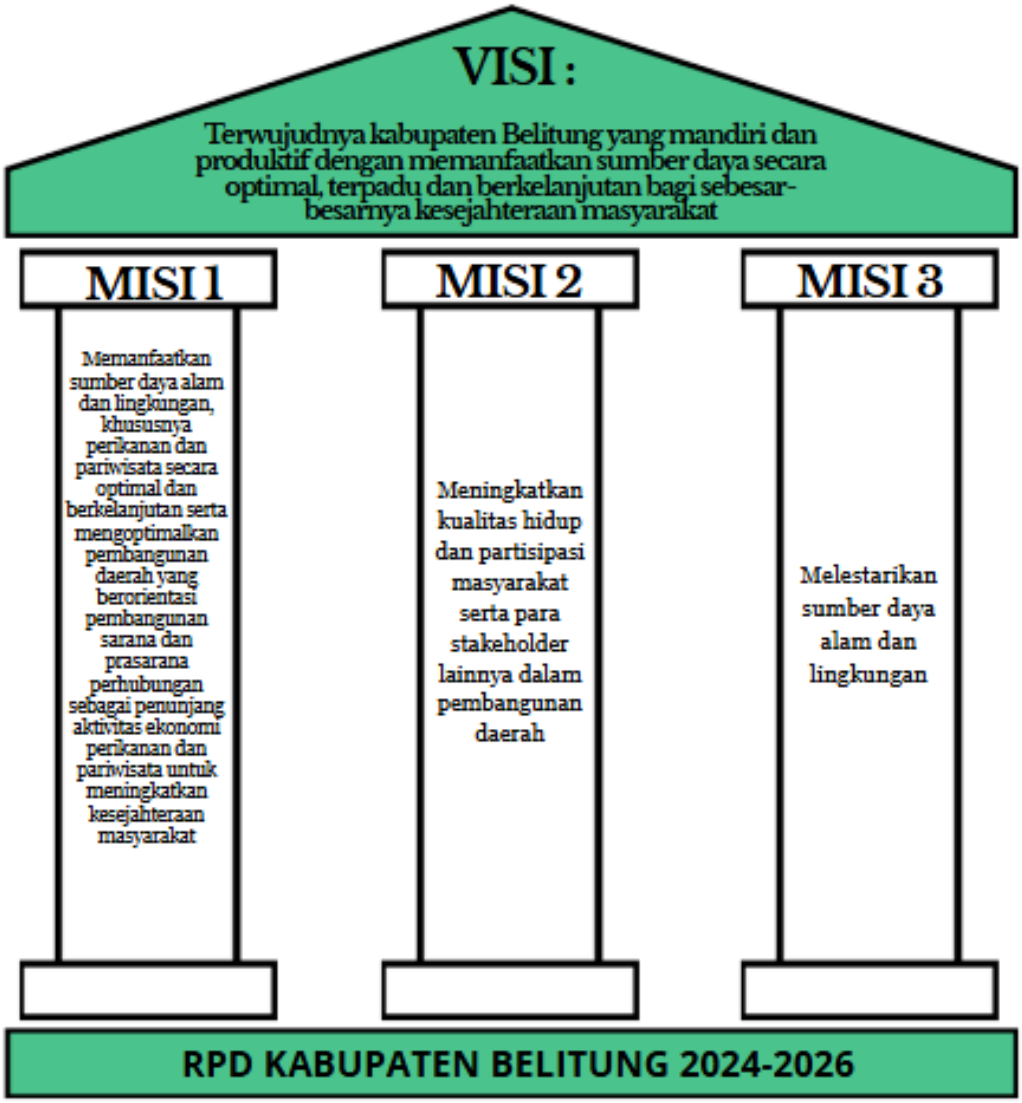

Gambar 2.1 Visi & Misi berdasarkan RPD Kabupaten Belitung 2024-2026

Sumber: Diolah dari Dokumen RPD Kab. Belitung 2024-2026

Tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Belitung adalah untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab yang berorientasi kepada kelestarian sumber daya alam dan lingkungan berbasis pada sektor perikanan dan pariwisata yang didukung ketersediaan fasilitas perhubungan yang memadai.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan arah pembangunan yang jelas dan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kabupaten Belitung. Secara umum, arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Belitung 2005-2025 dilaksanakan melalui 5 (lima) strategi makro, yaitu :

1. Pembangunan dan pengembangan ekonomi berbasis potensi ekonomi lokal;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Reformasi birokrasi;
4. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; dan
5. Pemerataan pembangunan.

Prioritas pembangunan daerah jangka panjang Kabupaten Belitung pada tahap keempat dalam mencapai visi dan misi yang diharapkan dimana fokus pembangunan lebih diarahkan dalam memantapkan pada perkembangan sektor ekonomi, sumber daya manusia dan penguatan birokrasi.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 dilakukan melalui pendekatan teknokratik dan partisipatif yang holistik. Perumusan tujuan dan sasaran tersebut merupakan penjabaran visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam upaya pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025.

Dengan memperhatikan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap keempat dan isu strategis yang aktual, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dengan 3 (tiga) sasaran:
   a) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
   b) Menurunnya Kemiskinan Penduduk
   c) Meningkatnya infrastruktur kewilayahan

2. Meningkatnya kualitas Sumber daya Manusia, dengan 2 (dua) sasaran :
   a) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
   b) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

3.Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan, dengan 2 (dua) sasaran:
   a) Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel
   b) Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional

4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, dengan 1 (satu) sasaran:
   a) Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Oleh karenanya setiap instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama dan menjadikannya sebagai prioritas utama. Indikator Kinerja Utama juga merupakan salah satu upaya memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk maksud tersebut diterbitkanlah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkukngan Instansi Pemerintah.

Penetapan IKU Pemerintah Kabupaten mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, melalui Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
Misi 1 : Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkugan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembagunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat			
1	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Rasio gini	Poin
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Laju pertumbuhan ekonomi	Persentase
3	Menurunnya kemiskinan penduduk	Tingkat kemiskinan	Persentase
4	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase Pemenuhan infrastruktur kewilayahan	Persentase
Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah			
5	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun

7	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	Tahun
8	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, professional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat
9	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	1. Opini BPK	Predikat
		2. Nilai SAKIP	Predikat
10	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Skala
Misi 3 : Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan			
11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin

Visi merupakan penjabaran atas keadaan atau kondisi daerah yang diinginkan untuk dapat terwujud sebagai hasil dari proses pembangunan dalam suatu tahapan perencanaan. Visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun berdasarkan Visi kepala daerah terpilih serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Visi RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2025-2029 adalah **"Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera".**

Cita-cita pembangunan daerah yang telah tertuang di dalam Visi Pembangunan tidak akan dapat tercapai tanpa adanya rangkaian upaya yang terstruktur. Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya tersebut yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Berikut merupakan Misi yang tersusun atas Visi Kabupaten Belitung :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dalam mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya saing berbasis sektor unggul dan potensial;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih dan Bermartabat; dan
4. Membangun Infrastruktur yang Berkualitas secara merata dan Berkelanjutan.

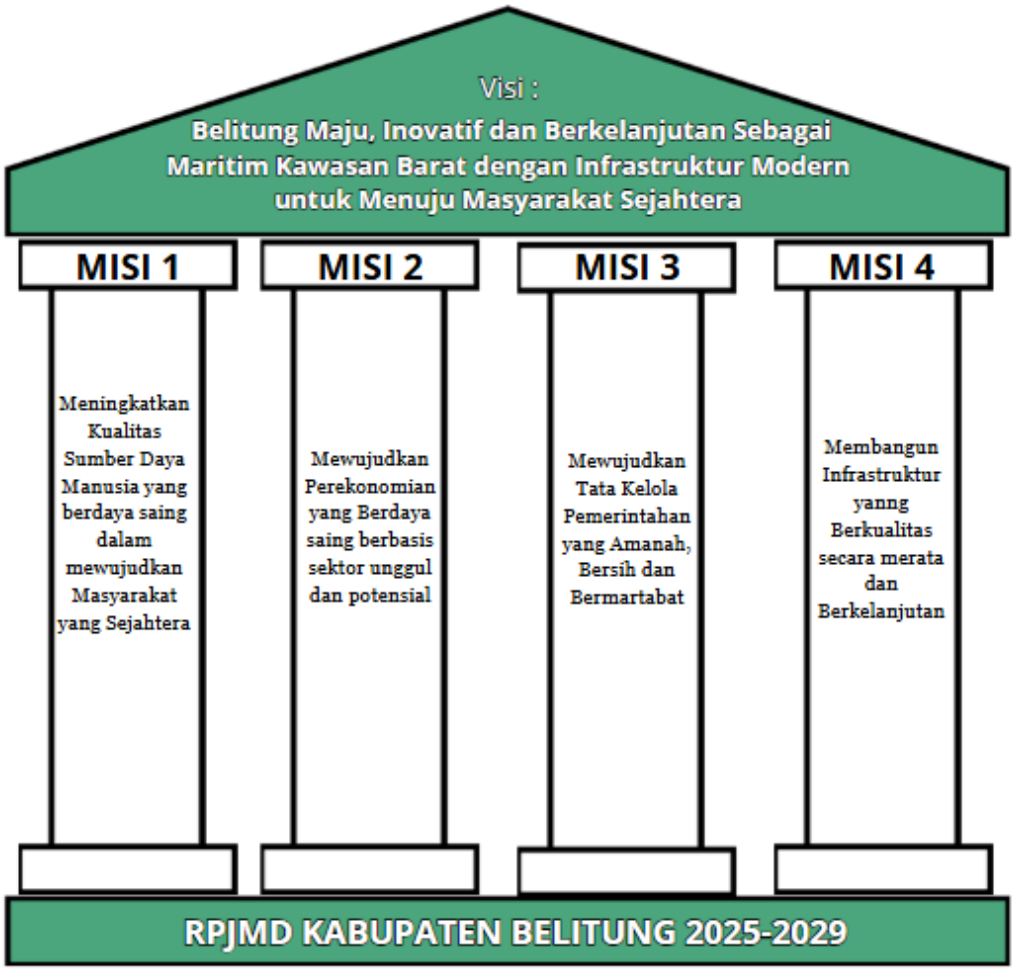

Gambar 2.2 Visi & Misi berdasarkan RPJMD Kabupaten Belitung 2025-2029
Sumber: Diolah dari Dokumen RPJMD Kab. Belitung 2025-2029

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia , dengan 4 (empat) sasaran :
   a). Meningkatnya Kualitas Pendidikan
   b). Meningkatnya Kualitas Kesehatan
   c). Menurunnya prevelensi stunting
   d). Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat
2. Meningkatnya daya saing ekonomi sektor unggulan dan potensial, dengan 3 (tiga) sasaran:
   a). Meningkatnya investasi daerah
   b). Meningkatnya pertumbuhan sektor prima
   c). Meningkatnya kualitas dan daya saing pariwisata serta budaya daerah
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dengan 3 (tiga) sasaran:
   a). Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel berbasis digital
   b). Terwujudnya profesionalitas ASN
   c). Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
4. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan, dengan 3 (tiga) sasaran:
   a) Tersedianya infrastruktur yang inklusif dan berkualitas
   b) Berkurangnya kesenjangan Pembangunan antar wilayah
   c) Meningkatnya kelestarian lingkungan

Selanjutnya Penetapan IKU Pemerintah Kabupaten mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029, ditetapkan melalui Peraturan Bupati Belitung Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2029, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Berdasarkan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
Misi 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera			
1	Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	1. Indeks Modal Manusia	Nilai
		2. Tingkat kemiskinan	Persentase
2	Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah	Tahun
		2. Harapan lama sekolah	Tahun
3	Meningkatnya kualitas kesehatan	Usia harapan hidup	Tahun
4	Menurunnya prevalensi stunting	Prevalensi stunting	Persentase
5	Meningkatnya pemerataan dan pendapatan masyarakat	1. Pengeluaran per kapita	Juta Rupiah
		2.Tingkat pengangguran terbuka	Persentase
		3. Indeks Gini	Nilai
Misi 2 : Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing berbasis sektor unggul dan potensial			
6	Meningkatnya daya saing ekonomi sektor unggulan dan potensial	Laju pertumbuhan ekonomi	Persentase
7	Meningkatnya investasi daerah	Nilai investasi (tahun berkenaan) (dalam juta rupiah) (PMDN dan PMA)	Juta Rupiah
8	Meningkatnya pertumbuhan sektor prima	Pertumbuhan sektor Prima	Persentase

9	Meningkatnya kualitas dan daya saing pariwisata serta budaya daerah	Indeks Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kota	Nilai
Misi 3 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)			
10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, adaptif dan Kolaboratif)	Indeks reformasi birokrasi	Nilai
11	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel berbasis digital	1. Indeks pemerintah digital	Nilai
		2. Nilai SAKIP	Nilai
		3. Indeks pengelolaan keuangan daerah	Nilai
		4. Indeks pelayanan publik	Nilai
		5. Tingkat Maturitas SPIP	Angka
12	Terwujudnya profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	Nilai
13	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian fiskal	Nilai

Misi 4 : Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan			
14	Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai
		2. Penurunan intensitas Emisi GRK	Persentase
15	Tersedianya Infrastruktur yang inklusif dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai
16	Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	Indeks Kesulitan geografis	Nilai
17	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai
		2. Indeks Resiko Bencana	Nilai

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat/ dampak kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja Tahun 2025, disusun prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung. Diperjanjiakan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehigga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Dalam penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja bertujuan :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan untuk dicapai pada tahun 2025 tersebut diatas selanjutnya dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bupati yang ditetapkan setelah disahkannya APBD Kabupaten Belitung Tahun 2025. Didalam dokumen Penetapan kinera tercantum sasaran strategis, dan target setiap indikator kineja dimaksud baik bersifat kualitatif fan kuantitatif sehingga dapat diukur tingkat capaian kinerjanya pada akhir tahun. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 dan pada bulan November terdapat perubahan Perjanjian Kinerja yang mana menyesuaikan perubahan perencanaan dengan adanya penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang ditetapkan pada 19 Agustus 2025 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung Tahun 2025 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Rasio gini	0.247 - 0.252 poin
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Laju pertumbuhan ekonomi	4,60%
3	Menurunnya kemiskinan penduduk	Tingkat kemiskinan	6,30%
4	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase Pemenuhan infrastruktur kewilayahan	65,85%
5	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74.77 (Poin)
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	71.42 Tahun
7	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	8.80 Tahun
8	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, professional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	B
9	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	1. Opini BPK	WTP
		2. Nilai SAKIP	BB
10	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Indeks Profesionalitas ASN	71 – 80 (Skala)
11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69.26 (Poin)

Tabel 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung Tahun 2025 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	1. Indeks Modal Manusia	0,55 (Nilai)
		2. Tingkat kemiskinan	52%
2	Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah	9,16 Tahun
		2. Harapan lama sekolah	12,42 Tahun
3	Meningkatnya kualitas kesehatan	Usia harapan hidup	74.15 (Tahun)
4	Menurunnya prevalensi stunting	Prevalensi stunting	1.694%
5	Meningkatnya pemerataan dan pendapatan masyarakat	1. Pengeluaran per kapita	14.651.000
		2.Tingkat pengangguran terbuka	3,74 Persentase
		3. Indeks Gini	0,241 (Nilai)
6	Meningkatnya daya saing ekonomi sektor unggulan dan potensial	Laju pertumbuhan ekonomi	2,11 Persentase
7	Meningkatnya investasi daerah	Nilai investasi (tahun berkenaan) (dalam juta rupiah) (PMDN dan PMA)	1.200.000 Juta Rupiah
8	Meningkatnya pertumbuhan sektor prima	Pertumbuhan sektor Prima	38%
9	Meningkatnya kualitas dan daya saing pariwisata serta budaya daerah	Indeks Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kota	3,8 (Nilai)

10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, adaptif dan Kolaboratif)	Indeks reformasi birokrasi	80 (BB)
11	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel berbasis digital	1. Indeks pemerintah digital	1,80(Nilai)
		2. Nilai SAKIP	65,84 (B)
		3. Indeks pengelolaan keuangan daerah	76,8121 (Nilai)
		4. Indeks pelayanan publik	4,1 (Nilai)
		5. Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (3,541)
12	Terwujudnya profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	79,80 (Nilai)
13	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian fiskal	23,94%
14	Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Baik (85,35)
		2. Penurunan intensitas Emisi GRK	54,55 (%)
15	Tersedianya Infrastruktur yang inklusif dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	67,28 (Nilai)
16	Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	Indeks Kesulitan geografis	32,52 (Nilai)
17	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan	1.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,81 (Nilai)
		2.Indeks Resiko Bencana	117,14 (Nilai)

2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun 2025 diarahkan dan difokuskan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan. Untuk mewujudkan hal terserbut, pada tahun anggaran 2025, semula Pemerintah Kabupaten Belitung mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp. 1.068.887.632.449,00 berkurang sebesar Rp. 30.615.057.345,30 sehingga menjadi Rp. 1.038.272.575.103,70 terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 886.763.318.616,70 Belanja Modal sebesar Rp. 43.619.973.682,00 Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 1.550.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 106.339.282.805,00. Alokasi anggaran yang ada untuk membiayai program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Tabel 2.5 Rencana Anggaran Kabupaten Belitung Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN
Belanja Operasional	Rp. 886.763.318.616,70
Belanja Modal	Rp. 43.619.973.682,00
Belanja Tak Terduga	Rp. 1.550.000.000,00
Belanja Transfer	Rp. 106.339.282.805,00
TOTAL BELANJA	Rp. 1.038.272.575.103,70

Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Per-sasaran Strategis Tahun 2025

SASARAN	RENCANA ANGGARAN
Tujuan 1: Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	
Meningkatnya kualitas pendidikan	Rp 78.083.610.969,00
Meningkatnya kualitas kesehatan	Rp 36.877.093.140,00
Menurunnya prevalensi stunting	Rp 4.408.207.844,00
Meningkatnya pemerataan dan pendapatan masyarakat	Rp 566.863.726,00
Tujuan 2: Meningkatnya daya saing ekonomi sektor unggulan dan potensial	
Meningkatnya investasi daerah	Rp 1.598.829.291,00
Meningkatnya pertumbuhan sektor prima	Rp 7.680.215.131,00
Meningkatnya kualitas dan daya saing pariwisata serta budaya daerah	Rp 28.031.562.282,00
Tujuan 3: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, adaptif dan Kolaboratif)	
Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel berbasis digital	Rp 133.894141398,00
Terwujudnya profesionalitas ASN	Rp 633.045.413.925,66
Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rp 2.361.887.025,00
Tujuan 4: Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan	
Tersedianya Infrastruktur yang inklusif dan Berkualitas	Rp 61.538.588.955,04
Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	Rp 62.366.861.439,00
Meningkatnya Kelestarian Lingkungan	Rp 27.636.345.295,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Tanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja diperolehdengan menggunakan formulir Capaian Indikator Kinerja Utama. Formulir Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan formulir isian data kinerja Target dan Realisasi Tahun 2025, yang diisi oleh Perangkat Daerah berdasarkan kewenangannya.

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

a.Spesifik;
b.Dapat dicapai;
c.Relevan;
d.Menggambarkan keberhasilan sesuatuyang diukur;
e.Dapat dihitung dan diukur.

Pengumpulan data kinerja merupakan tanggungjawab Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung yang memiliki fungsi pemantauan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah.

Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung dilakukan secara berkala secara triwulanan dan tahunan dengan sistem *desk* timbal balik yang dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan. Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui pembandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 serta menggali informasi terkait upaya apa yang sudah dilakukan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target, termasuk kendala yang dihadapi dan strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan melalui inovasi.

Tingkat pencapaian kinerja diklasifikasikan dalam skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tabel Kriteria Status Capaian Kinerja Berdasarkan Persentase Realisasi

Persentase	Tingkat	Kode Warna
< 100%	BELUM TEREALISASI (BT)	
=100%	TEREALISASI (T)	
> 100%	MELEBIHI TARGET (MT)	

Selanjutnya untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja dari program dan kegiatan serta indikator makro, diberlakukan nilai dan disertai makna dari nilai tersebut dengan pendekatan sebagai berikut :

Tabel 3.2. Tabel Kriteria Tingkat Keberhasilan Kinerja Berdasarkan Rata-Rata Persentase Capaian

KATEGORI	RATA-RATA % CAPAIAN
Sangat Berhasil (SB)	>90
Berhasil (B)	75.00 – 89.00
Cukup (C)	50.00 – 74.99
Kurang (K)	0.00 – 49.00

Pencapaian kinerja kemudian dianalisa dan dievaluasi dengan memaparkan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Perhitungan pencapaian kinerja indikator sasaran menggunakan asumsi : Jika semakin tinggi realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin rendah/jelek adalah :

$$\text{PRESENTASE TINGKAT CAPAIAN KINERJA} : \frac{\text{REALISASI}}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

$$\text{PRESENTASE TINGKAT CAPAIAN KINERJA} : \frac{\text{RENCANA} - (\text{REALISASI} - \text{RENCANA})}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

$$\text{PRESENTASE TINGKAT CAPAIAN KINERJA} : \frac{((2\text{x}\text{RENCANA}) - \text{REALISASI})}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

Gambar 3.1. Formula Perhitungan Persentase Capaian Kinerja atas Persentase Capaian

Sedangkan apabila semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian sasaran kinerja semakin rendah/jelek, atau sebaliknya realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin baik menggunakan perumusan diatas.

Pencapaian kinerja kemudian dianalisa dan dievaluasi dengan memaparkan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuannya, demi mengukur peningkatan kinerja, serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal pertama yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan kinerja utama dari instansi pemerintah bersangkutan. Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU jadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan.

Dalam rangka untuk memperoleh informasi kinerja, ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, maka setiap instasi pemerintah harus menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk periode 2024 – 2026, Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Kabupaten Belitung dan tingkat Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026.

Adapun Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung pada Tahun 2025 sesuai dengan RPD 2024-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Rasio gini	0.247 - 0.252 poin	0,205	114,94
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Laju pertumbuhan ekonomi	4,60%	4,06	88,26
3	Menurunnya kemiskinan penduduk	Tingkat kemiskinan	6,30%	6,44	97,78
4	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase Pemenuhan infrastruktur kewilayahan	65,85%	49,68	75,44

5	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74.77 (Poin)	75,29	100,7
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	71.42 Tahun	73,13	102,39
7	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	8.80 Tahun	9,11	103,52
8	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, professional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	B	A	121,47
9	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	1. Opini BPK	WTP	WTP	100
		2. Nilai SAKIP	BB	B	93,54
10	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Indeks Profesionalitas ASN	71 – 80 (Skala)	81,29 Tinggi	101,61
11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69.26 (Poin)	75,77	109,4

Selanjutnya pada Triwulan IV Tahun 2025 penetapan IKU Pemerintah Kabupaten mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029, ditetapkan melalui Peraturan Bupati Belitung Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2029, Hasil pengukuran atas IKU Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 sesuai dengan RPJMD 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 terhadap Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	Indeks Modal Manusia	Nilai	0,55	n.a	n.a
2	Tingkat Kemiskinan	Persentase	5,2	6,44	76,15
3	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,16	9,11	99,45
4	Harapan lama sekolah	Tahun	12,42	12,1	97,42
5	Usia harapan hidup	Tahun	74,15	73,13	98,62
6	Prevalensi stunting	Persentase	16,94	8,82	147,93
7	Pengeluaran per kapita	Juta Rupiah	14.651.000	14.550.000	99,31
8	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase	3,74	3,64	102,67

9	Indeks Gini	Nilai	0,241	0,205	114,94
10	Laju pertumbuhan ekonomi	Persentase	2,11	4,06	192,42
11	Nilai investasi (tahun berkenaan) (dalam juta rupiah) (PMDN dan PMA)	Skala	1.200.000 Juta Rupiah	730.000 Juta Rupiah	60,83
12	Pertumbuhan sektor Prima	Persentase	3,8	3,78	99,47
13	Indeks Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kota	Nilai	3,8	3,14	82,63
14	Indeks reformasi birokrasi	Nilai	80 (BB)	85,03	106,29
15	Indeks pemerintah digital	Nilai	1,8	Indeks SPBE 4,15	n.a
16	Nilai SAKIP	Nilai	65,84 (B)	65,49	99,47
17	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Nilai	76,8121	70,4597	91,73
18	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,1	4,06	99,02
19	Tingkat Maturitas SPIP	Level	Level3 (3,541)	Level2 (2,449)	69,16
20	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	79,8	81,29	101,87
21	Rasio kemandirian fiskal	Persentase	23,94	29,38	122,72
22	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	Baik (85,35)	72,5	84,94

23	Penurunan intensitas Emisi GRK	Persentase	54,55	54,4	99,73
24	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	67,28	70,3	104,49
25	Indeks Kesulitan geografis	Nilai	32,52	32,72	99,39
26	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	76,81	75,77	98,65
27	Indeks Resiko Bencana	Nilai	117,14	98,97	117,3

Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing misi sebagai berikut :

1. Misi 1 : **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dalam mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera,** dapat dilihat pada indikator :
   1). Indeks Modal Manusia, capaian n.a
   2).Tingkat kemiskinan, capaian 76,15%
   3).Rata-rata lama sekolah, capaian 99,45 %
   4).Harapan lama sekolah, capaian 97,42%
   5).Usia harapan hidup, capaian 98,62%
   6).Prevalensi stunting, capaian 147,92%
   7).Pengeluaran per kapita, capaian 99,37%
   8).Tingkat pengangguran terbuka, capaian 102%
   9).Indeks Gini, capaian 114,94%

2. Misi 2 : **Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya saing berbasis sektor unggul dan potensial**, dapat dilihat pada indikator :
   1). Laju pertumbuhan ekonomi, capaian 192,42 %
   2). Nilai investasi, capaian 60,83 %
   3). Pertumbuhan sektor prima, capaian 99,47 %
   4). Indeks Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kota, capaian 82,63%

3. Misi 3 : **Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)**, dapat dilihat pada indikator :
   1). Indeks Reformasi Birokrasi, capaian 106,29 %
   2). Indeks pemerintahan digital, capaian n.a
   3). Nilai SAKIP, capaian 99,47%
   4). Indeks pengelolaan keuangan daerah, capaian 91,73%
   5). Indeks pelayanan publik, capaian 99,02%
   6). Tingkat Maturitas SPIP, capaian 69,16%
   7). Indeks profesionalitas ASN, capaian 101,87%
   8). Rasio kemandirian fiskal, capaian 122,72%

4. Misi 4 : **Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan**, dapat dilihat pada indikator :
   1). Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur 84,94 %
   2). Penurunan intensitas Emisi GRK, capaian 99,73%
   3). Indeks Pembangunan Infrastruktur, capaian 104,49%
   4). Indeks Kesulitan Geografis, capiaan 99,39 %
   5). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, capaian 98,65%
   6). Indeks Resiko Bencana, capaian 117,30%

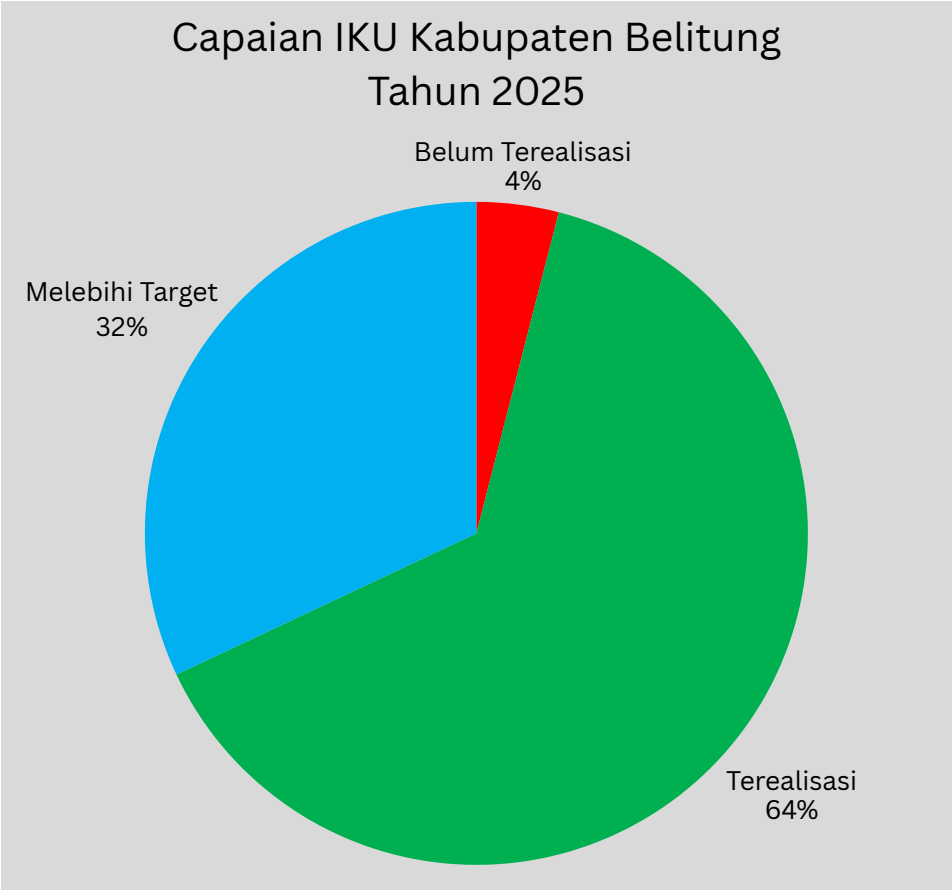

Grafik 3.1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025

Secara umum pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Belitung telah dapat melaksanakan seluruh tugas dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025 – 2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

3.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

3.2.1 PERJANJIAN KINERJA 2025

Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026, pencapaian kinerja kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Belitung untuk mewujudkan pencapaian misi secara terukur diuraikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung.

Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2025 yang tergambar dalam laporan ini merupakan gambaran penilaian tingkat pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPD. Berdasarkan RPD Kabupaten Belitung tahun 2024 – 2026, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan, 8 (delapan) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja (*outcomes*) yang menjadi Indikator Kinerja Utama, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Jumlah Indikator Kinerja

Tujuan/Sasaran Strategis		Jumlah Indikator
Tujuan 1	**Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi**	**1 Indikator**
Sasaran 1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	1 Indikator
Sasaran 2	Menurunnya kemiskinan penduduk	1 Indikator
Sasaran 3	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	1 Indikator
Tujuan 2	**Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia**	**1 Indikator**
Sasaran 4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1 Indikator
Sasaran 5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1 Indikator
Tujuan 3	**Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih inovatif, professional, akuntabel dan transparan**	**1 Indikator**
Sasaran 6	Terciptanya Birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	2 Indikator
Sasaran 7	Terciptanya Birokrasi yang inovatif dan professional	1 Indikator
Tujuan 4	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**	**1 Indikator**
Sasaran 8	Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	1 Indikator

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 secara rinci dapat dillihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6.Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 sesuai RPD Tahun 2024-2026

No.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Rasio gini	Poin	0.247 -0.252	0,205	114,94
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Laju pertumbuhan ekonomi	Persentase	4,6	4,06	88,26
3	Menurunnya kemiskinan penduduk	Tingkat kemiskinan	Persentase	6,3	6,44	97,78
4	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase Pemenuhan infrastruktur kewilayahan	Persentase	65,85	49,68	75,44
5	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	74,77	75,29	100,7
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	71,42	73,13	102,39
7	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,80	9,11	103,52
8	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, professional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	A	121,47
9	Terciptanya Birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100
		Nilai SAKIP	Predikat	BB	B	92,54
10	Terciptanya Birokrasi yang inovatif dan professional	Indeks Profesionalitas ASN	Skala	71 – 80 Sedang	81,29 Tinggi	101,87
11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	69,26	75,77	109,40

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja di atas dapat digambarkan Kategori Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 sesuai RPD Tahun 2024-2026

No.	KATEGORI	RATA-RATA % CAPAIAN	JUMLAH INDIKATOR
1	Sangat Berhasil (SB)	>90	10
2	Berhasil (B)	75.00 – 89.00	2
3	Cukup (C)	50.00 – 74.99	0
4	Kurang (K)	0.00 – 49.00	0
JUMLAH			**12**

Adapun kategori pencapaian indikator kinerja kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8. Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 sesuai RPD Tahun 2024-2026

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA SASARAN	0.00–49.00 (KURANG)	50.00–74.99 (CUKUP)	75.00 – 89.00 (BERHASIL)	>90 (SANGAT BERHASIL)
MISI 1 : Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkugan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembagunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat							
1	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Rasio gini	114,94%				✓
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Laju pertumbuhan ekonomi	88,26			✓	
3	Menurunnya kemiskinan penduduk	Tingkat kemiskinan	97,78%				✓
4	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase Pemenuhan infrastruktur kewilayahan	75,44%			✓	
MISI 2 : Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah							
5	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	100,70%				✓

6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	102,39%				✓
7	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	103,52%				✓
8	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, professional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	121,47%				✓
9	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	1. Opini BPK	100%				✓
		2. Nilai SAKIP	93,54				✓
10	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Indeks Profesionalitas ASN	101,61%				✓
MISI 3 : Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan							
11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	109,40%				✓
JUMLAH				**0**	**0**	**2**	**10**

TUJUAN 1 : Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Capaian kinerja tujuan **"Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi"** diukur melalui pencapaian indikator Rasio Gini. Capaian kinerja tujuan dengan rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9. Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Belitung Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	2025			Kategori	Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Rasio Gini	Poin	0,237	0.248-0.253	0,205	114,94	SANGAT BERHASIL	0,246-0,251

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2025. Capaian kinerja Rasio Gini sebesar 114,94% dengan kategori **SANGAT BERHASIL**. Nilai Rasio Gini Kabupaten Belitung tahun 2025 berada di angka 0,205. Angka tersebut menunjukkan pengeluaran penduduk Kabupaten Belitung pada tahun 2025 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah karena Rasio Gini atau Indeks Gini merupakan suatu indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada suatu daerah. Semakin tinggi atau besar Rasio Gini, semakin tinggi pula tingkat ketidakmerataannya (distribusi pendapatannya tidak merata) dan sebaliknya jika semakin kecil Rasion Gini semakin rendah tingkat ketidak merataannya (distribusi pendapatannya semakin merata).

Distribusi pendapatan merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu daerah. Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan suatu daerah seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Rasio Gini Kabupaten Belitung berfluktuasi dari 0,195 pada tahun 2021 naik menjadi 0,237 tahun 2022, kemudian meningkat hingga mencapai angka 0,253 pada tahun 2023 dan turun menjadi 0,248 pada tahun 2024. Pada tahun 2025 menurun menjadi 0,205.

Sementara itu, guna terus menekan angka capaian rasio gini, Pemerintah Kabupaten Belitung berupaya memperkuat usaha mikro. Karena UKM menjadi pilar penting dalam membangun perekonomian masyarakat. Sejumlah program seperti pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) dan pengembangan UMKM dilakukan untuk mencapai hal tersebut.

Pemerintah Kabupaten Belitung juga berupaya menekan angka capaian indeks gini melalui pemberian bantuan kepada masyarakat dari segi pengeluaran seperti dalam sektor pendidikan, pemberian beasiswa Pendidikan dan program beasiswa simpor, kemudian ada bantuan-

bantuan sosial dan sejenisnya. Dan menjamin akses-akses barang kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dengan program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Ketimpangan ekonomi pada dimensi distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat. Fenomena ini telah menjadi perhatian publik, sehingga upaya evaluasi yang sangat mendesak dilakukan. Dari hasil evaluasi diharapkan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya juga akan membawa konsekuensi berkurangnya tingkat ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dapat sejalan dengan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Apabila ketimpangan ini dibiarkan semakin melebar maka akan semakin mendistorsi hasil pembangunan.

Oleh karena itu upaya mengetahui besaran ketimpangan pengeluaran antar golongan penduduk maupun secara spasial perlu dilakukan. Indeks Gini (*gini ratio*) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk atau Indeks Gini di Kabupaten Belitung berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Dengan Indeks Gini sebesar 0,205, Kabupaten Belitung masuk dalam kategori pemerataan pengeluaran yang relatif tinggi antar penduduk atau kesenjangan pendapatan antar penduduk sangat rendah bila dibandingkan dengan provinsi dan nasional. Indeks Gini yang menurun menunjukkan pendapatan antar kelompok masyarakat semakin merata. Struktur ekonomi Kabupaten Belitung yang mempengaruhi nilai gini ratio adalah Sektor Agraris, dimana Lebih dari 27,10 persen perekonomian didukung oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Bahwa ketimpangan di wilayah agraris lebih kecil dibandingkan dengan wilayah industri karena rendahnya level penghasilan yang diterima oleh individu di wilayah agraris tersebut. Adapun tingkat ketimpangan mengalami peningkatan pada wilayah dengan struktur perekonomian yang bercorak industri.

Berdasarkan Perkembangan rasio gini Kabupaten Belitung antara Tahun 2023 s/d 2025 cendrung fluktuatif, maka upaya yang dilakukan antara lain :

1. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian untuk mengejar ketertinggalan dari sektor lainnya;
2. Perlu adanya upaya untuk mendorong transfer surplus tenaga kerja di sektor pertanian ke sektor ekonomi kreatif dengan mengadakan pelatihan maupun kursus keterampilan termasuk penguatan pangsa pasar;

3. Hampir separuh dari tenaga kerja yang ada berlatar belakang tingkat pendidikan menengah ke bawah. Oleh karena itu, perlu dibuat program untuk menjaga tingkat APM (Angka Partisipasi Murni) agar tidak turun dan meningkatkan target APM untuk level Sekolah Menengah;
4. Dalam jangka pendek, intervensi terhadap kelompok pengeluaran terbawah dapat dilakukan dengan melanjutkan program raskin maupun bantuan tunai. Namun demikian kebijakan ini perlu selalu dimonitor dan dievaluasi mengingat dalam jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan dan inefisiensi anggaran;
5. Perlu dibuatkan program pengelolaan ekonomi (pariwisata) berbasis komunitas dengan mengedepankan modal sosial (kultur sosial). Program tersebut harus mengutamakan keterlibatan dari kelompok masyarakat.

Tabel 3.10. Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 1

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 1 Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	**Sasaran 1** Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	• Meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan. • |Meningkatkan produksi pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi desa, dan mendukung pembangunan kepariwisataan. • Meningktnya pengembangan perikanan tangkap dan budidaya. Meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro. • Meningkatkan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan perindustrian. • Memperkuat ekonomi desa dan kawasan pedesaan . • Meningkatkan pengendalian, pengawasan ekonomi dan pembangunan
	Sasaran 2 Menurunya kemiskinan penduduk	Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja Mengurangi beban pengeluaran
	Sasaran 3 Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah Peningkatan sarana dan prasaarana permukiman yang layak huni

SASARAN 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan salah satu indikator kinerja utama RPD dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan target 4,6 %. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Tabel 3.11. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	2025			Kategori	Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,71%	4,60%	4,06%	88,26%	B	4,90%

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja tujuan tidak bisa mencapai target yang ditetapkan dalam RPD. Target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Belitung tahun 2025 adalah 4,6 dan terealisasi hanya sebesar 4,06 dengan capaian kinerja sebesar 88,26% dengan kategori **BERHASIL**.

Kemampuan ekonomi suatu daerah memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi untuk berinvestasi di derah tersebut. Investasi yang masuk tentunya akan menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi peningkatan daya saing daerah. Salah satu tolok ukur kemampuan ekonomi suatu daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menunjukkan tingkat daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa yang memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi daya beli masyarakat, maka akan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Laju Pertumbuhan Ekonomi dihitung berdasarkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu.

Penyusunan PDRB menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi, pada Laporan ini, menggunakan PDRB dari sisi lapangan usaha. Rendahnya ekonomi maka pendapatan akan menurun drastis.

Bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Belitung tahun 2025 ditopang oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Industri Pengolahan. Kedua kategori lapangan usaha ini memberikan kontribusi masing-masing sebesar 28,01 persen dan 12,68 persen.

PDRB ADHB Kabupaten Belitung tahun 2025 adalah 15.243,01 milliar rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang nilainya 14.124,70 milliar rupiah. Demikian juga dengan PDRB ADHK juga mengalami peningkatan dari 7.638,90 milliar rupiah di tahun 2024, menjadi 7.948,69 milliar rupiah di tahun 2025.

Secara detail perkembagnan PDRB Kabupaten Belitung selama kurun waktu 2023 – 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12. PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitung 2022 – 2024, (milyar rupiah) ADHK 2010

LAPANGAN USAHA	2023	2024*	2025**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 917,39	1 989,95	2 063,29
Pertambangan dan Penggalian	503,81	495,33	556,21
Industri Pengolahan	873,94	852,74	869,9
Pengadaan Listrik dan Gas	10,38	10,92	11,2
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,28	2,37	2,44
Konstruksi	908,5	889,29	881,99
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	815,16	809,68	854,2
Transportasi dan Pergudangan	517,22	513,16	528,83
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	28.837	30.084	325,06
Informasi dan Komunikasi	388,69	427,72	468,08
Jasa Keuangan dan Asuransi	189,47	190,08	193,77

Real Estat	244,05	255,04	264,69
Jasa Perusahaan	24,62	26,93	28,79
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	442,99	478,02	477,56
Jasa Pendidikan	146,22	162,05	172,23
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	167,08	169,64	179,04
Jasa Lainnya	60,18	65,13	71,41
Produk Domestik Bruto	7.500,36	7.638,90	7.948,69

*Catatan : *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara*
Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2026

Dapat diuraikan bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terjadi peningkatan kontribusi beberapa lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Belitung dan beberapa lapangan usaha lain mulai berkurang. Lapangan usaha yang menunjukkan penurunan antara lain pertambangan dan penggalian, konstrusi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Keuangan dan Asuransi, jasa kesehatan dan kegiatan social .

Hal ini mengindikasikan bahwa mulai terjadi pergeseran kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Belitung, dari ketergantungan terhadap alam menuju masyarakat yang mengandalkan jasa. Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Belitung untuk mempersiapkan SDM nya dan membekali masyarakat dengan keahlian.

Pada tahun 2025 LPE Kabupaten Belitung sebesar 4,06%, meningkat jika dibandingkan LPE tahun 2024 sebesar 1,84%. Perlambatan LPE ini tentunya dipengaruhi oleh laju pertumbuhan per lapangan usaha. Berikut gambaran laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Belitung dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 3.13 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2023–2025

LAPANGAN USAHA	2023	2024*	2025**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,77	3,78	3,69
Pertambangan dan Penggalian	-0,04	-1,68	12,29
Industri Pengolahan	4,91	-2,43	2,01
Pengadaan Listrik dan Gas	2,52	5,2	2,6
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,77	3,84	2,69
Konstruksi	9,19	-2,11	-0,82
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,78	-0,67	5,5
Transportasi dan Pergudangan	10,51	-0,78	3,05
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,23	4,32	8,05
Informasi dan Komunikasi	13,97	10,04	9,44
Jasa Keuangan dan Asuransi	15,28	0,32	1,94
Real Estat	4,25	4,51	3,78
Jasa Perusahaan	[illegible]	9,37	6,93
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,85	7,91	-0,1
Jasa Pendidikan	11,04	10,83	6,28
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,19	1,53	5,54
Jasa Lainnya	11,35	8,23	9,63
Produk Domestik Bruto	**5,74**	**1,85**	**4,06**

*Catatan : *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara*
Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2026

Pada tahun 2025 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh 1,85%.

Berikut gambaran laju pertumbuhan ekonomi menurut Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu tiga tahun terakhir :

Tabel 3.14. Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten di Prov. Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2025

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN		
		2023	2024	2025
1	Bangka	4,44	-0,44	4,96
2	**Belitung**	**5,75**	**1,85**	**4,06**
3	Bangka Barat	2,50	5,47	1,72
4	Bangka Tengah	5,16	-0,34	6,06
5	Bangka Selatan	3,69	0,90	3,83
6	Belitung Timur	4,72	-0,03	4,30
7	Pangkalpinang	5,32	-2,30	4,54
Provinsi Bangka Belitung		3,32	4,40	4,09

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2026

Dari deskripsi di atas dapat tergambar bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung Tahun 2025 mengalami peningkatan. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi melalui langkah-langkah dan program-program strategis sebagai upaya pencapaian tujuan sesuai dengan RPD dan RPJMD. Adapun faktor pendukung laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

- Pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi berasal dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan sektor andalan Kabupaten Belitung dalam menunjang pertumbuhan ekonomi;
- Iklim usaha yang kondusif bagi usaha perdagangan dan industri yang sudah ada maupun bagi investasi baru, sektor industri dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui nilai tambah yang dihasilkan;
- Meningkatnya pangsa sektor industri pengolahan di pasar domestik;
- Meningkatnya penerapan standarisasi produk industri sebagai penguat daya saing produk industri;

- Penetapan Kabupaten Belitung sebagai salah satu dari 10 Destinasi Wisata Nasional menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi investor terutama yang begerak di sektor industri pariwisata;
- Stabilitas sosial, politik dan keamanan yang terjaga;
- Bonus demografi yang dimiliki Kabupaten Belitung.

Sedangkan faktor penghambat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

- Tingkat inflasi yang masih tinggi;
- Rendahnya daya tarik investasi dan kurangnya kemandirian fisKal yang mempengaruhi pendapatan yang mampu diperoleh daerah untuk menjalankan perekonomian, termasuk penyediaan barang publik;
- Kualitas SDM yang belum memadai, rendahnya angka partisipasi murni dan lama sekolah mempengaruhi kualitas SDM yang akhirnya mempengaruhi produktivitas.

Setelah memperhatikan faktor pendukung dan faktor penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran di masa yang akan datang, upaya peningkatannya sebagai berikut :

- Upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, dan industri;
- Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan;
- Mendorong peningkatan investasi yang sesuai dengan potensi daerah dengan memberi kemudahan-kemudahan seperti proses perijinan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- Mendorong pengembangan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan memberi kesempatan sektor swasta untuk berinovasi sehingga memberikan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah;
- Meningkatkan kuaitas SDM dengan program-program pelatihan.

SASARAN 2 : Menurunnya Kemiskinan Penduduk

Menurunnya Kemiskinan Penduduk merupakan salah satu indikator kinerja utama RPD dengan indikator Tingkat kemiskinan dengan target 6,30 %. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Menurunnya Kemiskinan Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Tabel 3.15. Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Kemiskinan Penduduk

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	2025			Kategori	Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Tingkat Kemiskinan	Persentase	6,45%	6,30%	6,44%	97,78%	SB	6,20%

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja tujuan melebihi target yang ditetapkan dalam RPD. Target Tingkat Kemiskinan Kabupaten Belitung tahun 2025 adalah 6,3 dan terealisasi sebesar 6,44 dengan capaian kinerja sebesar 97,78% dengan kategori **SANGAT BERHASIL.**

Persentase penduduk miskin menurut BPS adalah persentase penduduk yang berada di Bawah Garis Kemiskinan (GK). Persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 berfllluktuasi dan cenderung meningkat. Dengan angka kemiskinan pada tahun 2023 yaitu 6,46 kemudian turun menjadi 6,11% pada tahun 2024 dan meningkat ditahun 2025 yaitu 6,44.

Sama halnya di tingkat provinsi juga berfluktuatif dan juga cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir namun di tahun 2025 mengalami kenaikan dengan selisih 0,5% menjadi 5,00% di tahun 2025. Meski demikian persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung masih berada di bawah nasional yaitu sebesar 8,47% pada tahun 2025. Sebagaimana tampak pada gambar perkembangan persentase penduduk miskin (%) Kabupaten Belitung Tahun 2023-2025.

Tabel 3.16. Perkembangan persentase Penduduk Miskin (%) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2025

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN	
		2024	2025
1	Bangka	4,24	4,71
2	**Belitung**	**6,11**	**6,44**
3	Bangka Barat	2,59	2,92
4	Bangka Tengah	5,94	6,70
5	Bangka Selatan	3,74	4,17
6	Belitung Timur	6,36	6,69
7	Pangkalpinang	4,04	4,50
Provinsi Bangka Belitung		4,55	5,00

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2026

Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Belitung selama tiga tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 terus mengalami peningkatan. Garis kemiskinan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di suatu daerah. Garis kemiskinan merupakan tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu daerah. Pada tahun 2024 garis kemiskinan Kabupaten Belitung mencapai Rp. 937.759,- atau bertambah sebesar Rp. 18.387,- dari tahun 2024 yang sebesar Rp. 919.372,-. Hal ini dapat diartikan bahwa seseorang yang tinggal di wilayah Kabupaten Belitung akan dikategorikan sebagai penduduk miskin jika total pengeluaran untuk konsumsi makanan dan non makanan setiap bulannya kurang dari Rp. 937.759,-. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, garis kemiskinan Kabupaten Belitung tergolong tinggi, bahkan jauh melebihi garis kemiskinan nasional yang hanya sebesar Rp. 641.443,- pada tahun 2025 atau memiliki selisih Rp. 296.316,- dan selisih Rp. 19.074,- dari garis kemiskinan Provinsi Kep. Bangka Belitung yang meningkat sebesar Rp. 956.833,- di tahun yang sama.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan secara parsial namun perlu kolaborasi dan sinergi atau secara holistik, intergratif dan spasial antar stakeholder maupun pemangku kepentingan. Beberapa hal yang dapat upayakan untuk peningkatan tahun berikutnya yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya pemutakhiran data penduduk miskin yang telah diverifikasi dan validasi;
2. Perlu adanya inovasi bagi perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan penanggulangan kemiskinan;
3. Mengevaluasi kembali program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk melihat efektivitas dan keberhasilan program-program tersebut dalam rangka penanggulangan kemiskinan;
4. Penanggulangan kemiskinan perlu didukung dengan kebijakan yang menekankan perubahan dalam perumusan kebijakan, pengelolaan anggaran, serta penataan kelembagaan penanggulangan kemiskinan;
5. Kinerja Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah perlu ditingkatkan.

SASARAN 3 : Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan

Meningkatnya infrastruktur kewilayahan merupakan salah satu indikator kinerja utama RPD dengan indikator Meningkatnya infrastruktur kewilayahan dengan target 65,85 %. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatnya infrastruktur kewilayahan Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Tabel 3.17.Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya infrastruktur kewilayahan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	2025			Kategori	Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase infrastruktur kewilayahan	Persentase	58,85	65,85	49,68	75,44	B	69,01

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran meningkatnya infrastuktur kewilayahan yaitu indikator kinerja Pemenuhan Infrastruktur Kewilayahan tahun 2025 sebesar 48,93 % dari target sebesar 65,85 %, dengan capaian kinerja sebesar 75,44 % berkategori **BERHASIL**.

Pencapaian kinerja sasaran persentase infrastruktur kewilayahan dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut :

infrastruktur kewilayahan =
(0,5 x (infrastruktur ke-PU-an dan permukiman))+ (0,5 x infrastruktur perhubungan)

Dimana :

Infrastruktur ke-PU-an dan permukiman =
(0,5 x Persentase pemenuhan infrastruktur ke PU-an) + (0,5 x Rata-rata pemenuhan PSU Pemukiman)

Infrastruktur perhubungan =
(0,5 x persentase pemenuhan pelabuhan) + (0,5 x sarpras keselamatan jalan)

Pencapaian kinerja meningkatnya infrastruktur kewilayahan dicapai melalui strategi yaitu meningkatnya aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman yang layak huni.

Ada 13 (tiga belas) arah kebijakan strategi meningkatkan aksebilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah, yaitu 1) meningkatkan kebijakan perencanaan tata ruang; 2) meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang; 3) peningkatan standar jalan kabupaten; 4) peningkatan jalan non status menjadi jalan kabupaten; 5) meningkatkan legalitas dan pengelolaan sumber daya air; 6) meningkatkan pengendalian sumber daya air; 7) meningkatkan kanektivitas transportasi antar moda; 8) peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; 9) peningkatan pelayanan keselamatan transportasi darat; 10) peningkatan manajemen rekayasa lalulintas; 11) meningkatkan konektivitas antar pulau; 12) meningkatkan pelayanan pelabuhan; dan 13) meningkatkan pemenuhan persyaratan kebutuhan pembangunan pelabuhan.

Dan ada 8 (delapan) arah kebijakan strategi peningkatan sarana dan prasarana permukiman layak huni, yaitu 1) pemenuhan rumah layak huni korban bencana; 2) pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah; 3) Rehabilitasi rumah layak huni untuk MBR: 4) Meningkatnya aksesibilitas lingkungan dan permukiman; 5) Pengurangan kawasan kumuh; 6) Meningkatkanpelayanan air minum/ air bersih; 7) Meningkatkan sarana dan prasarana air limbah; 8) Meningkatkan sarana dan prasarana drainase lingkungan.

Hasil pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung atas sasaran strategis terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang yang dijabarkan dalam indikator pemenuhaninfrastruktur ke-PU-an dan permukiman, menunjukkan bahwa indikator kinerja sebesar 49,68% telah mencapai target.

Hal ini disebabkan adanya pencapaian yang cukup signifikan dari pemenuhan PSU Permukiman, yang sampai triwulan IV untuk sebagian kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sudah selesai dilaksanakan.

Tabel 3.18. Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Capaian	Capaian (%)
1	Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an	Pemenuhan infrastruktur ke-Pu-an	Persen	27,57	25,65	92,93

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2025

Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an =
(0,25 x jalan standar kabupaten) + (0,25 x rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman) + (0,25 x rumah dengan layanan SPALD) + (0,25 x sumber daya air yang terkelola dengan baik)

Dimana :

$$\textbf{Persentase Jalan Standar} = \frac{\text{Panjang Jalan Standar Kabupaten}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\ \%$$

$$= \frac{183{,}18}{666{,}02} \times 100\ \% = 27{,}50\%$$

Realisasi Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten adalah sebesar 27,50% dengan perhitungan Panjang jalan standar kabupaten sebesar 183,18 km dibagi dengan Panjang jalan kabupaten yaitu 666,02 km dikali seratus persen.

$$\textbf{Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Yang Aman} = \frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman}}{\text{Jumlah rumah tangga di Kabupaten Belitung}} \times 100\ \%$$

$$= \frac{11.431}{61.297} \times 100\ \%$$

$$= 18{,}65\ \%$$

Realisasi Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman adalah sebesar 18,65 % dengan perhitungan Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman sebesar 11.431 rumah tangga dibagi dengan jumlah rumah tangga di Kabupaten Belitung yaitu 61.297 rumah tangga dikali seratus persen.

$$\textbf{Persentase rumah dengan layanan SPALD} = \frac{\text{Jumlah Rumah Dengan SPALD}}{\text{Jumlah Rumah di Kabupaten Belitung}}$$

$$= \frac{2.935}{38.153}$$

$$= 7{,}69\ \%$$

Realisasi Persentase rumah dengan layanan SPALD adalah sebesar 7,69 % dengan perhitungan jumlah rumah denga SPALD sebesar 2.935 rumah dibagi dengan jumlah rumah di Kabupaten Belitung yaitu 38.153 rumah dikali seratus persen.

Persentase Sumber Daya Air Yang Terkelola Dengan Baik	=	(0,4 x Persentase Luas Sawah Fungsional terlindungi infrastruktur) + (0,6 x Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai yang terlindungi Infrastruktur)
	=	(0,4 x 55,82%) + (0,6 x 44,04%)
	=	**48,75 %**

Realisasi Persentase sumber daya air yang terkelola dengan baik adalah sebesar 48,75% dengan perhitungan 40% Persentase Luas Sawah Fungsional terlindungi infrastruktur dan 60% Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai yang terlindungi Infrastruktur.

Belum Optimalnya standar lebar jalan lokal kabupaten (lokal primer maupun lokal sekunder) dikarenakan ketersediaan lahan untuk pembangunan jalan masih amat kurang. Pembangunan Infrastruktur terutama bidang jalan baik itu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Daerah memerlukan ketersediaan lahan yang cukup. Kesiapan lahan menjadi salah satu *readiness criteria* agar Pemerintah Pusat melalui dana APBN dapat melaksanakan kegiatannya di daerah.

Gambar 3.2. Kegiatan Penyelengaraan Jalan Kabupaten Tahun 2025

Penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah kegiatan tahun 2025 hanya untuk operasional dan pemeliharaan baik itu irigasi maupun saluran air. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) didukung oleh 2 kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

Gambar 3.3. Kegiatan pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Untuk mewujudkan pencapaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung melaksanakan 1 (satu) kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota dengan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
2. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
3. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan

Dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota, telah terpasang 375 Sambungan Rumah (SR) selama tahun 2025 sehingga terdapat penambahan sekitar 521 Rumah Tangga yang terlayani air minum yang layak.

Gambar 3.4. Kegiatan Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tahun 2025

Pelaksanaan pencapaian kinerja pelayanan air minum didorong oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah adanya Pelayanan air minum yang dilaksanakan melalui UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung dengan berbagai pelayanan diantaranya; pendistribusian air melalui sambungan rumah (SR), pelayanan air kemasan, dan pendistribusian air melalui mobil tangki. Pendistribusian air melalui mobil tangki merupakan pelayanan SPM air minum terhadap masyarakat yang tempat tinggalnya belum terlayani dengan jaringan perpipaan. Selain itu, pelayanan dengan mobil tangki dimaksudkan untuk mendukung pelayanan air minum yang bersifat insidental, seperti pelayanan pasca bencana serta sebagai komitmen Dinas PUPR Kabupaten Belitung untuk mendukung program Pemerintah Daerah dalam sektor pariwisata. Selain pelayanan air minum ke rumah-rumah penduduk, UPT PAM dinas PUPR juga mendistribusikan air minum ke hotel-hotel di Kawasan KSPN dan kelompok nelayan pelabuhan perikanan Tanjungpandan.

Berikut adalah jumlah pelangan aktif UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung tahun 2025 :

Tabel 3.19. Jumlah Pelanggan Aktif UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung Tahun 2025

No.	Nama SPAM	Jumlah pelanggan
1	SPAM Juru Seberang	108
2	SPAM IKK Sijuk	332
3	SPAM IKK Membalong	199
4	SPAM Desa Bantan	249
5	SPAM IKK Badau	257
6	PAM Kws, PPN Tanjungpandan	25
7	Mobil Tangki	0
8	Air Kemasan/Galon	92
9	SPAM Kws. Tanjung batu	272
10	SPAM IKK Selat Nasik	350
JUMLAH		**1952**

Sumber : UPT PAM, Dinas PUPR Kab. Belitung, 2025

Gambar 3.5. Sosialisasi Perda Retribusi serta Penarikan Retribusi

Gambar 3.6. Pengambilan Sampling Air

Gambar 3.7. Sosialisasi Edukasi Air dari SMA Anugerah Belitung dan Kegiatan UPT PAM Tahun 2025

Pencapaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah didukung oleh Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota serta 2 (dua) sub kegiatan yaitu sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman.

Gambar 3.8. Kegiatan Pembangunan SPALD

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase didukung Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota serta 2 (dua) sub kegiatan yaitu sub kegiatan pembangunan sistem darinase perkotaan serta sub kegiatan pembangunan sistem darinase lingkungan. Pada Tahun 2024 panjang drainase yang sudah dibangun adalah sepanjang 1.046 meter.

Gambar 3.9. Kegiatan Pengembangan Sistem Darinase

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang didukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota serta Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu :

1. Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan pada tahun 2025.
2. Mengoptimalkan sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sarana prasarana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan evaluasi setiap triwulan terkait dengan pelaksanaan kegiatan serta pencapaian kinerja

Capaian kinerja yang tidak mencapai target disebabkan antara lain :

1. Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan untuk lokasi dimaksud sudah dilaksnakan oleh pihak lain yaitu BPIW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Tidak adanya anggaran untuk mendukung terhadap ketercapaian indikator kinerja dikarenakan adanya keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2025 atau untuk memperbaiki kinerja di tahun 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kebupaten Belitung akan melakukan :

1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk pencapaian kinerja.
2. Melakukan evaluasi dan monitoring setiap triwulan untuk mengetahui pencapaian dari indikator kinerja yang sudah ditentukan.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak lain sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Tabel 3.20.Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Infrastruktur Permukiman

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Capaian	Capaian (%)
1	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Pemenuhan PSU Permukiman	Persen	64,52	65,14	100,96

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2025

Sasaran ini merupakan sasaran strategis untuk urusan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pencapaian sasaran Meningkatnya Infrastruktur Permukiman diukur dengan menggunakan indikator kinerja Pemenuhan PSU Permukiman.

Uraian kinerja atas indikator kinerja meningkatnya infrastruktur ke-PU-an adalah **Pemenuhan PSU Permukiman**, target kinerja pada tahun 2025 untuk indikator pemenuhan PSU Permukiman sebesar 64,52%.

Pada Tahun 2025, indikator pemenuhan PSU permukiman yang terealisasi sebesar 65,14% atau mencapai 100,96% dari target tahun 2024, dengan ringkasan sebagaimana disajikan berikut:

Tabel 3.21 Realisasi Pemenuhan PSU Permukiman Tahun 2025

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Pemenuhan PSU Permukiman	64,52	65,14

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2025

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja meningkatnya infrastruktur permukiman dengan capaian sebesar 65,14% diperoleh dari :

Pemenuhan PSU Permukiman = (0,25 x jalan lingkungan) + (0,25 x RTH) + (0,25 x RLH korban bencana) + (0,25 x RLH korban relokasi program pemerintah)

Keterangan :

- Persentase jalan lingkungan didapatkan dengan :

$$\textbf{Persentase jalan lingkungan} = \frac{\text{Panjang jalan lingkungan yang tertangani}}{\text{Panjang jalan lingkungan yang direncanakan}} \times 100\ \%$$

- Persentase Ruang Terbuka Hijau berdasarkan persentase yang ada di RTRW;
- RLH Korban Bencana yaitu teranggarkannya program terkait dengan RLH korban bencana;

- RLH Korban Relokasi Program Pemerintah yaitu rumah layak huni yang dibangun.

Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Permukiman didukung dengan pelaksanaan 3 (dua) program yaitu program perumahan dan kawasan permukiman kumuh, program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) serta program pengembangan perumahan.

Untuk sasaran strategis meningkatnya infrastruktur permukiman merupakan sasaran strategis tahun pertama untuk Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung periode 2024-2026.

Tabel 3.22 Target, Realisasi dan Capaian Program untuk Sasaran Pemenuhan PSU Permukiman

No.	Program	Indikator Kinerja	Target		Capaian		Capaian Kinerja (%)	Notifikasi
1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Penanganan dan pencegahan permukiman kumuh diluar kawasan kumuh	99,8	%	99,8	%	100	tercapai
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU yang dikelola	66,02	%	48,42	%	73,34	belum tercapai
3	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Mendapat Rumah Layak Huni	100	%	0	%	0	belum tercapai

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2025

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh mencapai tingkat capaian kinerja 100% sehingga target yang direncanakan sudah memenuhi target. Kegiatan yang mendukung program ini adalah perbaikan rumah tidak layak huni, dimana untuk tahun 2025 sebanyak 8 (delapan) unit rumah rumah tidak layak huni yang diperbaiki.

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mencapai tingkat capaian kinerja sebesar 73,34% yaitu dari target sebesar 66,02% yang terealisasi sebesar 48,42%, penyebab tidak terealisasinya target kinerja program adalah jalan lingkungan serta prasarana, sarana dan utilitas umum yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang direncanakan didalam Rencana Strategis. Untuk prasarana, sarana dan utilitas umum, kendala yang dihadapi adalah masih banyaknya pihak dari Developer perumahan yang belum menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sehingga berpengaruh ke capaian program.

Program Pengembangan Perumahan merupakan program untuk mendukung sistem palayanan minimal (SPM), untuk capaiannya sebesar 0,00% dikarenakan untuk program ini merupakan untuk program penanggulangan bencana sementara di Kabupaten Belitung sepanjang tahun 2025 tidak terjadi bencana.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu :

1. Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan pada tahun 2025.
2. Mengoptimalkan sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sarana prasarana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan evaluasi setiap triwulan terkait dengan pelaksanaan kegiatan serta pencapaian kinerja.

Capaian kinerja yang mencapai target disebabkan oleh :

- Adanya pengalokasian anggaran untuk mendukung program-program pemerintah seperti program stunting dan pengentasan kemiskinan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2025 atau untuk memperbaiki kinerja di tahun 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kebupaten Belitung akan melakukan :

1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk pencapaian kinerja.
2. Melakukan evaluasi dan monitoring setiap triwulan untuk mengetahui pencapaian dari indikator kinerja yang sudah ditentukan.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak lain sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Gambar 3.10.Kegiatan untuk Mendukung Sasaran Strategis Pemenuhan PSU Permukiman

Tabel 3.23 Pembangunan PSU di Kabupaten Belitung Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Realisasi Output			
		Panjang	Satuan	Lebar Rata-rata	Satuan
	1 Program Penyelenggaraan PSU Perumahan				
	- Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				
	- Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian				
1	- Pemeliharaan Jalan Setapak di Kecamatan Tanjungpandan (Paket 1) (Sisa Dana Insentif Fiskal Tahun 2023)	**258,0**	M	1,2 s.d 2,5	M
	1 a. Gang Rambutan, Kampong damai	118,0	M		M
	2 b. RT04/RT05 Perbatasan (Jalan Kik Bujang)	140,0	M		M
2	- Pemeliharaan Jalan Setapak di Kecamatan Tanjungpandan (Paket 2) (Sisa Dana Insentif Fiskal Tahun 2023)	**249,0**	M	1,0 s.d 2,0	M
	3 a. Gang Depan Kantor Pos, Jl. Merdeka	200,0	M		M
	4 b. Gang Kelinci, Kel. Kota	49,0	M		M
3	- Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Setapak di Kelurahan Parit	**339,0**	M	1,2 s.d 2,2	M
	5 a. Jalan Veteran Lingkungan RT 03 (Dekat Nafisa)	123,0	M		M
	6 b. Jalan Depan Toko Mas Hero	216,0	M		M
4	- Peningkatan Jalan Lingkungan di Kecamatan Tanjungpandan (Dana Insentif Fiskal Tahun 2024)	**419,0**	M	3,0	M
	7 a. Jalan Mualim Dalam	419,0	M		M
5	- Pemeliharaan Jalan Lingkungan Paket 1 (Dana Insentif Fiskal Tahun 2024)	**890,0**	M	3,0	M
	8 a. Jalan Petemakan	310,0	M		M
	9 b. Jalan Lingkar Dusun	580,0	M		M
6	- Peningkatan Jalan Lingkungan Handayani P2IP/Haryani (Lanjutan)	**100,0**	M	4,0	M
	10 a. Jalan Handayani P2IP/Haryani	100,0	M		M
7	- Peningkatan Jalan Lingkungan di Kecamatan Tanjungpandan	**1.725,8**	M	3,0 s.d 4,0	M
	11 a. Jalan Kenanga	177,0	M		M
	12 b. Gang Duren	96,0	M		M
	13 c. Jalan Berlian	371,0	M		M
	14 d. Jalan Jerat Nangka	481,0	M		M
	15 e, Jalan Mualim Dalam	148,8	M		M
	16 f. Jalan Bina Insani	452,0	M		M
8	- Peningkatan jalan Lingkungan Kecamatan Sijuk	**879,0**	M	3,0 s.d 4,0	M
	17 a. Jalan Padat Karya	265,0	M		M
	18 b. Jalan Kik Janggau	292,0	M		M
	19 c. Jalan Aik Dulang (Pesantren Putra)	322,0	M		M
	Jumlah	**4.859,8**	**M**		
	Total Panjang Jalan Lingkungan	**4.013,8**	**M**		

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2025

Pada Sasaran strategis terwujudnya konektivitas antar wilayah bidang perhubungan dengan indikator rasio konektivitas didapatkan dengan :

Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

Dimana :

IK 1 (Angkutan Jalan) = $\frac{\text{(Jumlah trayek yang dilayani pada Kabupaten/Kota X Bobot Trayek)}}{\text{Jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten/Kota tersebut}}$

Dan :

IK 2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) = $\frac{\text{(Jumlah Lintas Penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten/Kota X Bobot Lintas)}}{\text{Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/Kota}}$

Keterangan:

1. IK1 (Angkutan Jalan)

- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP
- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu

2. IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)

- Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil
- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu

Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan adalah sebagai berikut :

1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)
2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)
3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)
4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas

Sedangkan sasaran strategis dari meningkatnya sistem transportasi daerah dengan indikator Kinerja lalu lintas, memiliki formulasi dari Rata-Rata Volume kapasitas jalan/Kapasitas Jalan. Indikator Survey Kepuasan Masyarakat memiliki formulasi Jumlah dari Nilai rata rata tertimbang/ Nilai unsur pelayanan. Berikut ini adalah data konektivitas antar wilayah bidang perhubungan :

Tabel 3.24 Data Trayek Penumpang Angkutan Jalan Kabupaten Belitung Tahun 2025

No	Trayek		Jarak	Jumlah Trayek	
	Dari	Ke		Kebutuhan	Ketersediaan
1	Tanjungpandan	Teluk Gembira	67	1	1
2	Tanjungpandan	Tanjung Rusa	55	1	-
3	Membalong	Tanjung Rusa	22	1	-
4	Selat Nasik	Petaling	17	1	-
5	Selat Nasik	Tanjung Nyato	10,5	1	-
6	Tanjungpandan	Tanjung Tinggi -via Tanjung Binga	37	1	1
7	Tanjungpandan	Tanjung Kelayang	37	1	1
8	Tanjungpandan	Tanjung Tinggi –via Sijuk	37	1	1
9	Tanjungpandan	Air Batu	42	1	1
10	Tanjungpandan	Tanjung Ru	30	1	1
11	Tanjungpandan	Badau (Batu Mentas)	27	1	1
12	Tanjungpandan	Ibul	27	1	1
13	Dalam Kota Tanjungpandan 1	-	15	1	1
14	Dalam Kota Tanjungpandan 2	-	15	1	1
15	Tanjungpandan	Bandara H.AS. Hanandjoeddin	14	1	-
16	Bandara H.AS Hanandjoeddin	Tanjung Kelayang	35	1	1
17	Bandara H.AS. Hanandjoeddin	Tanjung Ru	43	1	-
Jumlah				**17**	**11**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Belitung 2025

Perhitungan Indikator Kinerja Angkutan Jalan:

- Bobot Trayek atau lintas adalah dengan frekuensi tinggi (> 5 X dalam seminggu) sehingga bobot =1
- Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten/kota dikali bobot Trayek dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut (11 x 1) /17 = 0,65

Tabel 3.25 Data Lintas Komersil dan Lintas Perintis Kabupaten Belitung Tahun 2025

No	Lintas Komersil	Kebutuhan	Tersedia	Persentase
1	Tanjung Ru-Nyato	1 Lintasan	1 Lintasan	100%
2	Tanjung Ru-Selat Nasik	1 Lintasan	1 Lintasan	100%
3	Tanjung Pakuk (Teluk Gembira) – Seliu	1 Lintasan	1 Lintasan	100%
4	Tanjung Kelayang – Lengkuas	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
5	Tanjung Pakuk (Teluk Gembira) – Pulau Sumedang	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
6	Tanjungpandan- Selat Nasik	1 Lintasan	1 Lintasan	100%
7	Tanjungpandan- Pulau Gersik	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
8	Tanjung pandan- Pulau Kuil	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
9	Tanjungpandan- Pulau Sumedang	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
10	Tanjungpandan- Buntar	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
TOTAL		**10 Lintasan**	**4 Lintasan**	

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Belitung 2025

- Bobot Trayek atau lintas adalah dengan frekuensi tinggi (> 5 X dalam seminggu) sehingga bobot =1
- Jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)
- (4X1)/10 = 0,40

Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

- Untuk bobot angkutan jalan atau sungai, danau dan penyeberangan di Kabupaten Belitung adalah Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)

- Sehingga perhitungan rasio konektivitas adalah :

Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota

$$= ((11 \times 1/17) \times 50) + ((4 \times 1/10) \times 50)$$
$$= (0{,}65 \times 50) + (0{,}40 \times 50)$$
$$= 32{,}50 + 20{,}00$$
$$= \mathbf{52{,}50}$$

Nilai **52,50** ini menunjukan bahwa tingkat konektivitas di Kabupaten Belitung berada pada kondisi kurang baik sehingga masih diperlukan penambahan terhadap lintas trayek. Adapun dukungan kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.26 Rekapitulasi Data Kendaraan Lulus Uji Tahun 2025

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Sub Jenis	Jumlah Kendaraan Lulus Ujian
1	M. Penumpang Umum	Sedan/ Non Sedan	0
2	Mobil Bus		81
3	Mobil Barang	Pick Up	405
		Box Pick Up	84
		Truck	313
		Box Truck	71
		Tangki	35
		B.Khusus	3
4	Kereta Tempelan		0
5	Kereta Gandengan		0
Total			**992**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Belitung 2025

Keterangan:
Jumlah Kendaraan di Uji Tahun 2025 : 1.222 Unit
Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji Tahun 2025 : 992 Unit

Tabel 3.27 Rekapitulasi Data KendaraanTidak Lulus Uji Tahun 2025

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Sub Jenis	Jumlah Kendaraan Tidak Lulus Ujian
1	M. Penumpang Umum	Sedan/ Non Sedan	0
2	Mobil Bus		26
3	Mobil Barang	Pick Up	45
		Box Pick Up	26
		Truck	78
		Box Truck	39
		Tangki	14
		B.Khusus	2
4	Kereta Tempelan		0
5	Kereta Gandengan		0
Total			**230**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Belitung 2025

Keterangan:
Jumlah Kendaraan di Uji Tahun 2025 : 1.222 Unit
Jumlah Kendaraan yang Tidak Lulus Uji Tahun 2025 : 230 Unit

Tabel 3.28 Data Fasilitas Perlengkapan dan Keselamatan Jalan Tahun 2025

No	Jenis Sarana Prasarana/ Faskes	Kebutuhan s/d 2024		Capaian 2019		2020		2021		2022		2023		2024	
1	Rambu Lalu Lintas	2937	Unit	3847	Unit	1967	Unit	1967	Unit	2027	Unit	2067	Unit	2083	Unit
2	Trafic Light	39	Titik	7	Titik	27	Titik	33	Titik	33	Titik	33	Titik	33	Titik
3	Warning Light	91	Titik	15	Titik	21	Titik	79	Titik	81	Titik	82	Titik	84	Titik
4	Deliniator	2601	Unit	20	Unit	1946	Unit	1946	Unit	1946	Unit	1947	Unit	1947	Unit
5	Guard Rail	15	Titik	7	Titik	8	Titik	8	Titik	8	Titik	8	Titik	8	Titik
6	RPJ	200	Unit	120	Unit	132	Unit	132	Unit	138	Unit	138	Unit	138	Unit
7	Pita Penggaduh	36	Titik	18	Titik	23	Titik	23	Titik	23	Titik	23	Titik	23	Titik
8	Paku Marka	8	Titik	8	Titik	8	Titik	8	Titik	8	Titik	8	Titik	8	Titik
9	Cermin Tikungan	50	Titik	0	Titik	10	Titik	10	Titik	35	Titik	46	Titik	73	Titik
10	Marka Jalan	25	Titik	20	Titik	20	Titik	20	Titik	20	Titik	20	Titik	20	Titik
11	Zebra Cross	60	Titik	45	Titik	45	Titik	45	Titik	45	Titik	45	Titik	46	Titik
12	Papan Nama Jalan	300	Unit	116	Unit	170	Unit	170	Unit	206	Unit	206	Unit	206	Unit
13	RPA	11	trayek	9	trayek	10	trayek	11	trayek	11	trayek	11	trayek	11	trayek
14	Trayek	150	Unit	110	Unit	110	Unit	110	Unit	110	Unit	110	Unit	110	Unit
15	Bus,Teminal,Halte	35	Unit	24	Unit	24	Unit	24	Unit	24	Unit	24	Unit	24	Unit
16	Penerangan Jalan Umum	5,519	Unit	3,433	Unit	4,015	Unit	4,080	Unit	5,014	Unit	7,471	Unit	7,471	Unit

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Belitung 2025

Dari total kebutuhan sampai tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 persentase yang tercapai untuk fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan adalah sebesar 73,45 %.

Pengukuran Pencapaian Kinerja terwujudnya konektivitas antar wilayah bidang perhubungan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2025 terdapat

keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Terwujudnya konektivitas antar wilayah bidang perhubungan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Tahun 2024 secara keseluruhan berjalan dengan baik, namun masih terdapat adanya kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya. Untuk itu, melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung mengupayakan langkah strategis untuk meningkatkan keberhasilan kinerja pada tahun berikutnya dengan melihat beberapa permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja, antara lain dengan melakukan beberapa strategi yaitu :

- Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan, termasuk pelatihan tentang keselamatan berlalu lintas, manajemen lalu lintas, dan pengelolaan sistem transportasi yang berkelanjutan;
- Fokus pada peningkatan kualitas dan pemeliharaan infrastruktur transportasi, seperti perbaikan jalan dan perbaikan fasilitas umum;
- Meningkatkan kerja sama dengan lembaga terkait, seperti kepolisian, Dinas Pekerjaan Umum, serta pihak swasta untuk mempercepat implementasi proyek dan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor transportasi.

TUJUAN 2 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Capaian kinerja tujuan **"Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia"** diukur melalui pencapaian indikator Indeks Pembangunan Manusia. Capaian kinerja tujuan dengan rincian pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.29 Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	2025			Kategori	Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,38	74,77	75,29	100,7	SB	74,95

Dari tabel di atas terlihat bahwa kedua indikator kinerja tujuan melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2025. Capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia sebesar 100,70% dengan kategori **SANGAT BERHASIL**.

IPM merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan *(knowledge)*, dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Usia Harapan Hidup pada saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi pengetahuan diukur menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS menggambarkan rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS menggambarkan lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan/dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari nilapengeluaran per kapita dan paritas daya beli *(purchasing power parity)*.

IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kecepatan dan status pencapaian.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah. IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang.

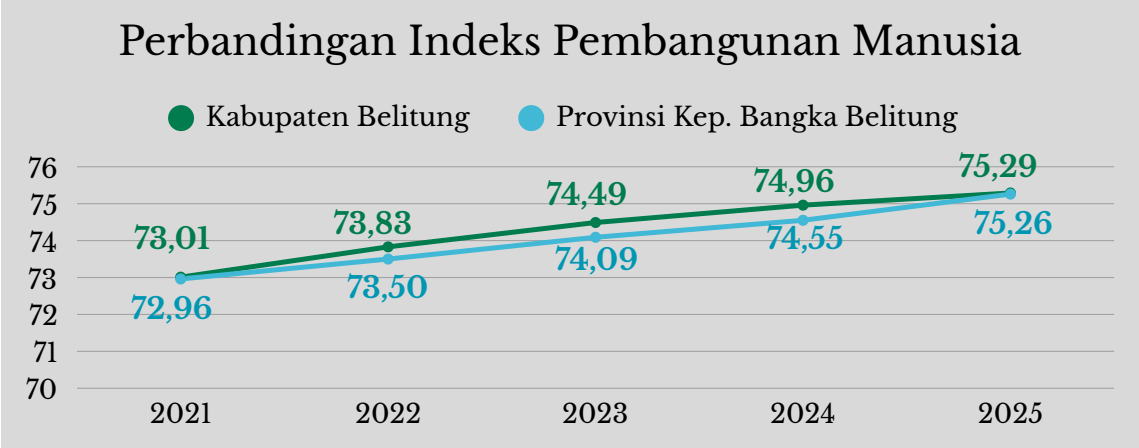

Grafik 3.2 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung dengan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2021-2025

Sumber:Kabupaten Belitung Dalam Angka 2026, BPS Kabupaten Belitung

Capaian Nilai IPM Kabupaten Belitung selama tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif dan terus mengalami peningkatan mulai dari 74,49 pada tahun 2023 hingga mencapai 75,29 atau berada pada capaian "tinggi" (70<IPM<80; berdasarkan kriteria dari United Nations Development Programme (UNDP)) pada tahun 2023. Nilai capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,33 poin bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 dengan nilai 74,96. Dibandingkan dengan level IPM Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung yang pada tahun 2025 tercapai sebesar 75,29, nilai IPM Kabupaten Belitung tercapai lebih tinggi 0,03 poin.

Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, IPM Kabupaten Belitung tertinggi ketiga setelah Kota Pangkalpinang yang memiliki nilai IPM 81,64 kategori Sangat Tinggi dan Kabupaten Bangka dengan nilai IPM 75,38. Namun Nilai IPM Kabupaten Belitung berada dibawah nilai IPM Nasional yang pada tahun ini juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang semula 75,02 menjadi 75,90 dengan capaian pertumbuhan IPM 0,88 poin. Berikut nilai IPM Kabupaten Belitung dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam periode tahun 2023 - 2025 :

Tabel 3.30 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2023 – 2025

URAIAN	TAHUN		
	2023	2024	2025
Indonesia	74,39	75,02	75,9
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	72,85	74,55	75,26
Pangkal Pinang	80,45	80,9	81,64
Bangka	74,49	74,66	75,38
Belitung	74,49	74,96	75,29
Belitung Timur	73,31	73,62	73,99
Bangka Tengah	72,36	72,54	73,1
Bangka Barat	71,13	71,36	72,23
Bangka Selatan	69,67	70,01	70,83

Sumber:Kabupaten Belitung Dalam Angka 2026, BPS Kabupaten Belitung

Peningkatan IPM Kabupaten Belitung ini tidak terlepas dari kinerja 3 (tiga) dimensi dasar yang merupakan komponen pembentuk IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dimensi kesehatan diukur melalui umur panjang dan hidup sehat dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), dengan arti bahwa umur yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi pendidikan diukur dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang (dalam tahun), sedangkan rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata lamanya

(dalam tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara dimensi ekonomi diukur dengan standar hidup layak, yaitu pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Selama kurun waktu 2023 – 2025, peningkatan 3 (tiga) dimensi dasar IPM Kabupaten Belitung yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut ditampilkan perkembangan ketiga dimensi IPM Kabupaten Belitung periode 2023 – 2025.

Tabel 3.31 Komponen Penyusun IPM Kabupaten Belitung Tahun 2023 – 2025

NO	URAIAN	TAHUN		
		2023	2024	2025
1	Umur Harapan Hidup	72,52	72,76	73,13
2	Harapan Lama Sekolah	11,9	12,09	12,1
3	Rata-rata Lama Sekolah	8,98	9,05	9,11
4	Pengeluaran per Kapita	14.365.000	14.449.000	14.559.000

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung 2026

Pada tahun 2025, capaian masing-masing dimensi dasar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Angka Harapan Hidup/Usia Harapan Hidup (AHH/UHH) sebesar 73,13, naik 0,37 tahun dari sebelumnya, Harapan Lama Sekolah sebesar 12,10 tahun naik sebesar 0,01 tahun, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 9,11 tahun, naik 0,06 tahun dari tahun sebelumnya, Pengeluaran Per Kapita meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 14.449.000,- per tahun, meningkat menjadi Rp 14.559.000,- per tahun. Dalam RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026, upaya pencapaian Tujuan 2 **"Meningkatnya kualitas sumber daya manusia"**, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 7 (tujuh) strategi sebagaimana terinci pada tabel berikut :

Tabel 3.32 Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 2

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 2 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Sasaran 4 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
	Sasaran 5 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan akses pendidikan

SASARAN 4 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat"** merupakan salah indikator kinerja utama RPD dengan indikator Angka Harapanan Hidup dengan target " **71,42** ". Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Tabel 3.33 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPD	2025			Kategori	Akhir RPD 2026 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,31	71,42	73,13	102,39	SB	72

Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat digunakan Angka Harapan Hidup (AHH), yang merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir hingga suatu tahun tertentu. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan keberhasilan dimana tahun 2025 dari target 71,42 tahun, terealisasi umur harapan hidup penduduk Belitung mencapai 73,13 tahun atau 102,39% dari target kinerja.

Tren Angka Harapan Hidup di Kabupaten Belitung cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada tabel perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2023-2025.

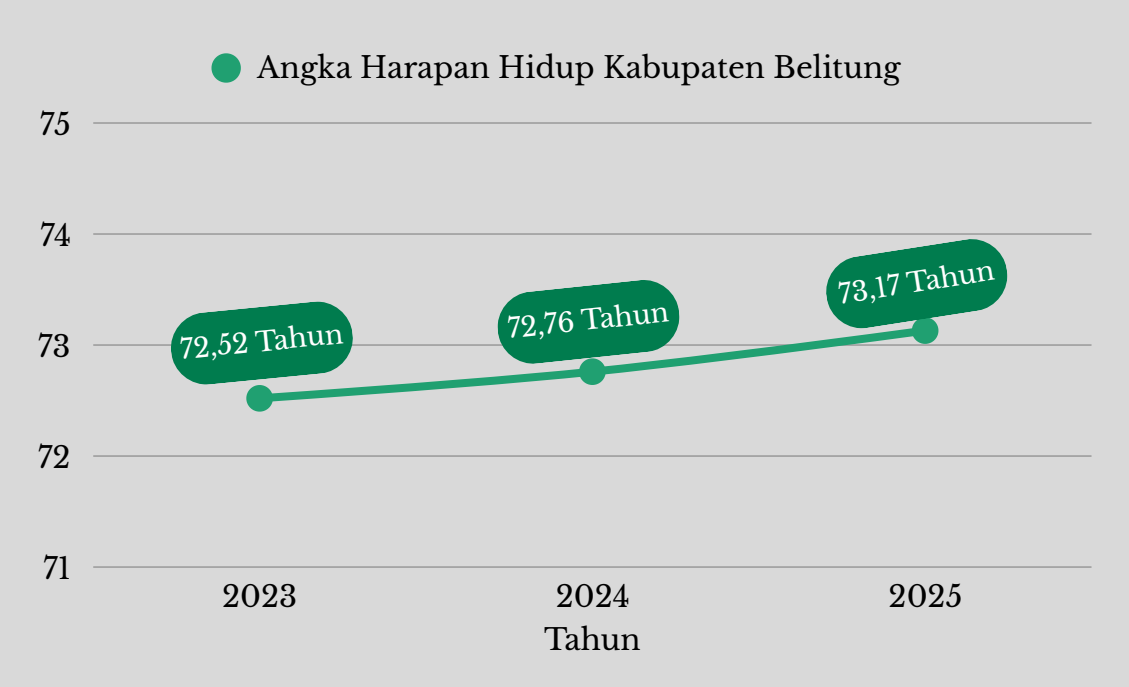

Grafik 3.3 Angka Harapan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2023-2025
Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka 2026, BPS Kabupaten Belitung

Angka Harapan Hidup (AHH) mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Tingginya pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) juga menjadi salah satu penanda penting keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan.

Tabel 3.34 Perkembangan Angka Harapan Hidup Wilayah Bangka Belitung Tahun 2023 – 2025

Wilayah Babel	TAHUN		
	2023	2024	2025
Prov. Kep. Bangka Belitung	71,23	71,49	74,46
Bangka	71,6	71,8	73,56
Belitung	71,54	71,75	73,13
Bangka Barat	70,43	70,59	72,35
Bangka Tengah	72,11	72,36	74,11
Bangka Selatan	68,98	69,24	72,07
Belitung Timur	72,59	72,85	74,12
Pangkal Pinang	73,96	74,24	75,64

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kep. Bangka Belitung

Peningkatan AHH menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat relatif membaik yang memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia. Peningkatan AHH juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, angka kematian, peningkatan gizi masyarakat dan akses serta mutu pelayanan kesehatan. Kepedulian tinggi pemerintah dan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu:

1. Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang merupakan upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui deteksi dini faktor risiko dan penyakit tidak menular maupun menular. Kegiatan ini dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan dengan melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama serta lintas sektor terkait.
2. Pembinaan dan pengawasan terhadap mutu layanan puskesmas melalui Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB).
3. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Gerakan Masyarakat (Germas).
4. Optimalisasi pengelola program di pelayanan dengan peningkatan SDM

Tabel 3.35 Hasil kinerja upaya kesehatan masyarakat untuk 12 jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2025

NO	KINERJA BIDANG KESEHATAN	Target	Realisasi (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	82,4
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	100	94,8
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	95,07
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	90,18
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	100
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100	86,45
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100	92,74
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100	97,62
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	100	98,4
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga TB	100	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100	87,03

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2025

Meningkatnya angka harapan hidup merupakan tantangan kompleks yang melibatkan berbagai aspek, termasuk kesehatan masyarakat, pendidikan, ekonomi, dan aksesibilitas layanan kesehatan. Angka harapan hidup yang tinggi tidak hanya mencerminkan kesehatan individu tetapi juga mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan yang holistic dan terintegrasi diperlukan untuk mengatasi berbagai factor yang mempengaruhi angka harapan hidup. Rekomendasi/solusi untuk permasalahan tersebut adalah pertama-tama penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan. Investasi dalam infrastruktur kesehatan, pelatihan tenaga medis, dan penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Sistem kesehatan yang efisien dan terjangkau harus menjadi prioritas, termasuk program imunisasi, pencegahan penyakit menular dan perawatan primer.

Selain itu, pendidikan kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran akan gaya hidup sehat, pola makan yang baik dan kebersihan pribadi. Program edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye publik. Kurikulum sekolah, dan kampanye komunitas untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup sehat. Dalam menghadapi kompleksitas tentang ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil adalah kunci. Hanya dengan kerjasama yang kuat dan komitmen bersama, kita dapat mencapai peningkatan berkelanjutan dalam rangka harapan hidup dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan berkelanjutan.

SASARAN 5 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Pembangunan dibidang pendidikan terus dilaksanakan di Kabupaten Belitung dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan mendukung Nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa. Pemerataan akses pendidikan yang berkeadilan menjadi salah satu faktor pendukung majunya pendidikan suatu bangsa. Jika kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya Belitung mampu mencapai kualitas maksimal, tidak menutup kemungkinan akan menjadikan Belitung sebagai daerah maju. Pendidikan merupakan faktor penting sebagai dasar pembentukan kepribadian manusia.

Mutu pendidikan di Kabupaten Belitung masih terbilang cukup rendah. Kabupaten Belitung masih harus banyak melakukan pembangunan dalam sektor pendidikan agar mampu memberikan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh warganya, antara lain dengan mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan non formal dan meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah.

Capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat"** diukur melalui Indikator Sasaran Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah. Target 2025 yang ditetapkan adalah 8,80 tahun. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.36 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPD	2025			KATEGORI	TARGET AKHIR RPD 2026
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,74	8,8	9,11	103,52	SB	8,82

Indikator dari sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Berdasarkan penghitungan dari BPS, realisasi RLS Kabuapten Belitung tahun 2025 sebesar 9,11 tahun. Realisasi ini melampaui target sebesar 3,52%. Berikut disajikan data capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Belitung dan Provinsi Bangka Belitung dari tahun 2023 sampai 2025.

Tabel 3.37 Perkembangan Capaian RLS Kabupaten Belitung terhadap Prov. Kep. Babel Tahun 2023 - 2025

Wilayah Babel	TAHUN		
	2023	2024	2025
Prov. Kepulauan Bangka Belitung	8,25	8,33	8,65
Bangka	8,32	8,45	8,77
Belitung	**8,98**	**9,05**	**9,11**
Bangka Barat	7,47	7,48	7,8
Bangka Tengah	7,23	7,24	7,33
Bangka Selatan	6,91	6,93	7,25
Belitung Timur	8,9	8,99	9,03
Pangkal Pinang	10,5	10,67	10,9

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kep.Bangka Belitung 2025

Dari grafik terlihat bahwa selama kurun waktu 2023 – 2025, capaian RLS Kabupaten Belitung sudah di atas provinsi Bangka Belitung dan juga jika dibandingkan dengan capaian RLS nasional, RLS Kabupaten Belitung berada sedikit lebih tinggi. Pada tahun 2024, capaian RLS Kabupaten Belitung 9,11 tahun, melampaui RLS Provinsi Kep Babel yang sebesar 8,65 tahun, dan capaian nasional sebesar 9,07 tahun.

Peningkatan pembangunan urusan pendidikan di Kabupaten Belitung terus dilakukan karena telah memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pendidikan daerah yang ditunjukkan dengan kenaikan angka rata-rata lama sekolah. Berbagai upaya tersebut antara lain melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan akses pembiayaan pendidikan, peningkatan tata kelola dan kualitas sumber daya manusia pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mencapai capaian indikator kinerja “Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat” dilakukan

melalui strategi **"Meningkatkan Akses Pendidikan"** dengan 10 (sepuluh) arah kebijakan, yaitu:

1. Meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah;
2. Meningkatkan akreditasi sekolah (PAUD, SD dan SMP dan pendidikan kesetaraan);
3. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
4. Meningkatnan penyelenggaraan PAUD;
5. Meningkatkan mutu pembelajaran dengan penguatan karakter dan akhlak;
6. Menigkatkan kualitas SDM pendidikan dan tenaga kependidikan;
7. Meningkatkan pemerataan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan;
8. Memberikan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan berprestasi;
9. Meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi pada anak usia sekolah; dan
10. Meningkatkan literasi pada anak usia sekolah dan masyarakat.

Untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah pada anak usia sekolah dilakukan de ngan menggunakan 3 (tiga) indikator, yaitu; Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Putus Sekolah (APTs).

❋ Angka Partisipasi Kasar (APK)

Salah satu tolok ukur partisipasi penduduk ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK). APK bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun nonformal. Sehingga seluruh anak usia sekolah dasar dan menengah baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak yang memerlukan perhatian khusus dapat memperoleh pendidikan. APK juga menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya dan merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Berikut angka partisipasi kasar (SD/MI + Paket A, SMP/Mts + Paket B) di Kabupaten Belitung Tahun 2025 :

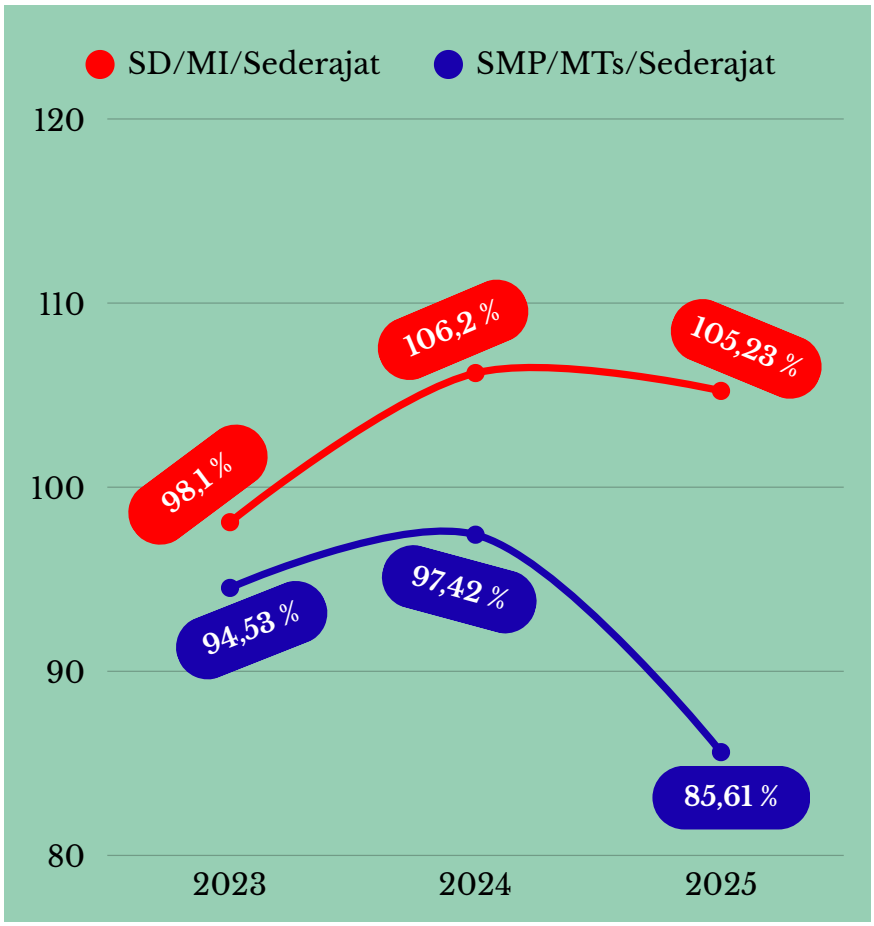

Grafik 3.4 Perkembangan APK Tahun 2023-2025
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, 2026

Terlihat bahwa APK SD/MI di Kabupaten Belitung berfluktuatif cenderung menurun. Hal tersebut perlu mendapatkan evaluasi yang komprehensif oleh pemerintah daerah sehingga perencanaan dan intervensi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah anak-anak yang bersekolah di SD/MI/Paket A di Kabupaten Belitung terus meningkat. Sama halnya dengan APK jenjang SD, pada APK jenjang SMP/MTs mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meurun. Ini menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan dan intervensi di dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang SMP/MTs/Paket B memberikan kesempatan kepada anak-anak usia SMP/MTs untuk bias melanjutkan pendidikan mereka. Pemenuhan sarana dan prasarana belajar disekolah juga mendorong semakin banyak anak-anak usia SMP yang bias bersekolah di lingkungan tempat tinggal mereka.

✹ Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *under estimate* karena adanya siswa di luar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun.

Berikut angka partisipasi murni (SD/MI + Paket A, SMP/Mts + Paket B) di Kabupaten Belitung tahun 2025.

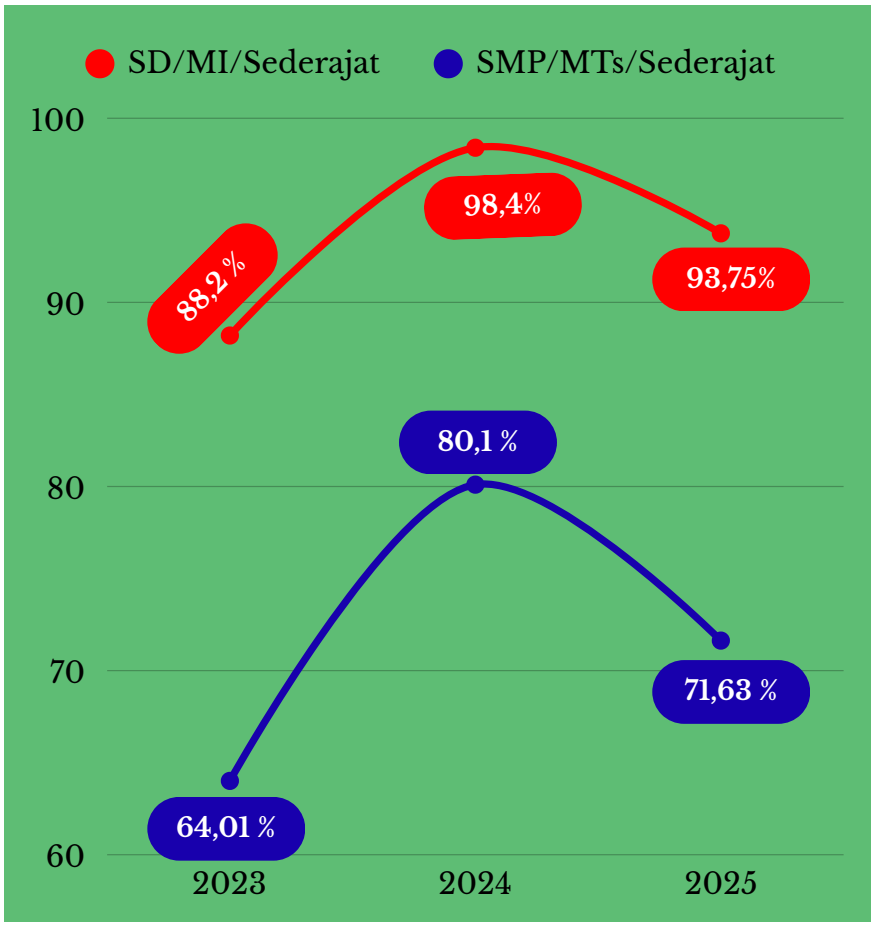

Grafik 3.5 Perkembangan APM Tahun 2023-2025
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, 2026

Tren penurunan APM yang terjadi baik pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs dipengaruhi berbagai faktor, antara lain ketidakmerataan infrastruktur pendidikan hingga danya regulasi terkait zonasi sekolah yang telah diberlakukan memberikan dampak terhadap turunnya APM SD. Angka APM kurang dari 100% berarti terdapat anak usia SD maupun SMP yang bersekolah sebelum usia berdasarkan ketentuan atau ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Anak usia sekolah yang tidak bersekolah dimungkinkan karena anak yang difabel, yang tidak bisa sekolah melalui sekolah formal, anak usia sekolah bersekolahnya dengan cara *home shoolling,* anak *drop out* sekolah.

Oleh karena itu, diperlukan penelusuran lebih lanjut penyebab APM belum mencapai 100%, agar dapat dirumuskan kebijakan yang tepat untuk menanggapi *gap* yang ada.

✹ Angka Putus Sekolah (APTs)

Angka Putus Sekolah adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7 - 12 tahun, 13 - 15 tahun dan 16 - 18 tahun. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

Di Kabupaten Belitung, APTs mengalami penurunan terutama di tingkat SD/MI + Paket A dan SMP/Mts + Paket B. Sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini :

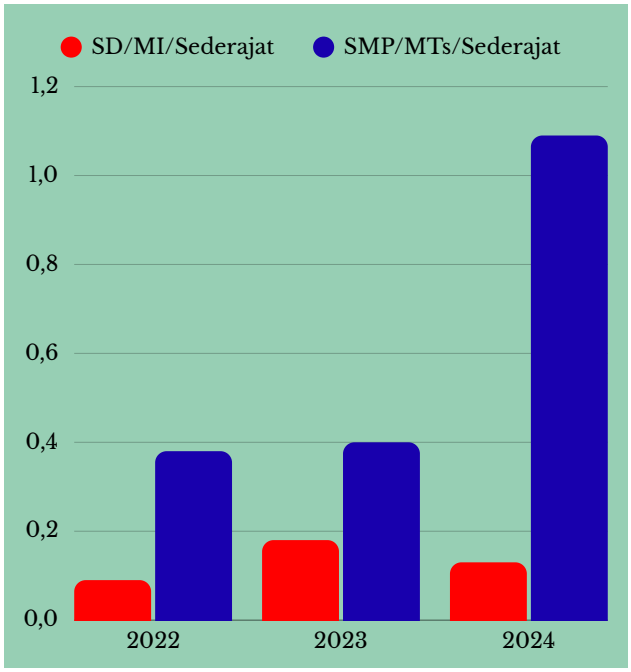

Grafik 3.6 Perkembangan APM Tahun 2022-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, 2025

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu:

1. Melakukan Pembinaan secara Intensif ke sekolah serta interaksi dengan pemangku kepentingan setempat seperti pemerintah Desa, untuk dukungan mencegah siswa putus sekolah
2. Melalui bidang Teknis Melakukan pendampingan kepada sekolah sebagai tindakan rensponsif jika ditemukan laporan siswa yang putus sekolah.

Untuk meningkatkan kinerja tahun 2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan :

1. Melakukan Pembinaan secara intensif kepada sekolah untuk melakukan antisipasi dan pemetaan terhadap siswa yang rentan putus sekolah.
2. Meningkatkan komunikasi intensif dengan pemangku kepentingan setempat untuk mencegah angka putus sekolah melalui kesadaran kolektif masyarakat.

Tabel 3.38. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid jenjang TK/PAUD di Kabupaten Belitung Tahun 2024/2025 - 2025/2026

Kecamatan	Sekolah		Guru		Murid	
	2024/2025	2025/2026	2024/2025	2025/2026	2024/2025	2025/2026
Membalong	7	7	26	29	255	252
Tanjungpandan	21	20	113	117	1369	1371
Badau	4	4	19	20	118	139
Sijuk	9	10	45	39	312	335
Selat Nasik	1	1	5	5	28	31
Belitung	**42**	**42**	**208**	**210**	**2082**	**2128**

Sumber: : Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2026 BPS Kabupaten Belitung

Tabel 3.39. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid jenjang SD di Kabupaten Belitung Tahun 2024/2025 - 2025/2026

Kecamatan	Sekolah		Guru		Murid	
	2024/2025	2025/2026	2024/2025	2025/2026	2024/2025	2025/2026
Membalong	30	30	263	230	2.449	2.423
Tanjungpandan	45	45	585	541	10.737	10.751
Badau	17	17	147	131	1.561	1.581
Sijuk	22	22	207	186	2.908	2.870
Selat Nasik	7	7	55	43	496	479
Belitung	**121**	**121**	**1 257**	**1 131**	**18.151**	**18.104**

Sumber: : Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2026 BPS Kabupaten Belitung

Tabel 3.40. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid jenjang SMP di Kabupaten Belitung Tahun 2024/2025 - 2025/2026

Kecamatan	Sekolah		Guru		Murid	
	2024/2025	2025/2026	2024/2025	2025/2026	2024/2025	2025/2026
Membalong	5	5	73	73	972	970
Tanjungpandan	15	15	272	263	4.875	4.863
Badau	3	3	47	52	751	706
Sijuk	4	4	82	79	1.293	1.319
Selat Nasik	2	2	22	21	217	190
Belitung	**29**	**29**	**496**	**488**	**8.108**	**8.148**

Sumber: : Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2026 BPS Kabupaten Belitung

Dari tabel-tabel di atas dapat dilihat bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir terjadi peningkatan sebaran guru-guru pada jenjang SD di tiap kecamatan, peningkatan dan penurunan sebaran guru-guru ini terjadi karena adanya penerimaan PNS untuk kategori guru TK/ PAUD, SD dan SMP dan guru yang memasuki masa pensiun. Peningkatan yang tinggi sebaran guru-guru di Kecamatan Tanjungpandan karena mutasi dari kecamatan lain di Kabupaten Belitung. Sedangkan jumlah sekolah tidak mengalami peningkatan. Khusus untuk jumlah sekolah diprioritaskan pada peningkatan kualiltas gedung sekolah dengan perbaikan-perbaikan ruang kelas, penambahan ruang kelas, serta penambahan kelengkapan sarana pendidikan.

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Belitung juga berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui program inovatif yang diusung Bupati dan Wakil Bupati, yaitu: Program Pelayanan Pendidikan Bagi Siswa Kurang Mampu dan Siswa Berprestasi (SIMPOR). Program ini merupakan upaya untuk mencegah putus sekolah bagi siswa kurang mampu yang rentan putus sekolah. Program SIMPOR menyasar Siswa SD dan SMP yang kurang mampu dan rentan putus sekolah, tetapi tidak mendapat bantuan pada Program Indonesia Pintar (PIP). Program SIMPOR dilaksanakan sejak tahun 2019 sampai dengan 2025 dirasakan sangat efektif dalam rangka menekan angka putus sekolah serta meningkatkan angka melanjutkan sekolah di Kabupaten Belitung. Penerima manfaat dari Program SIMPOR adalah Peserta Didik Jenjang SD dan SMP yang berlatar belakang dari keluarga kurang mampu yang masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Upaya pencapaian indikator sasaran ini bisa berjalan baik karena adanya faktor pendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Ketersediaan anggaran yaitu tersedianya anggaran yang cukup untuk meringankan beban orangtua siswa melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan komitmen pimpinankarena pendidikan merupakan dasar utama manusia untuk maju dan berkembang.

2. Program pusat yaitu Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 yang berkaitan dengan wajib belajar dan pengentasan kemiskinan yang mendukung pelaksanaan kegiatan;
3. Melakukan Komunikasi dan Pembinaan Kepada pihak sekolah dalam upaya menekan angka putus sekolah serta meningkatkan angka melanjutkan sekolah dan pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan manusia.
4. Program Inovatif daerah "SIMPOR" dapat berjalan dengan baik.

Adapun faktor Penghambat Pencapaian Kinerja antara lain :

1. Akses pendidikan kurang merata. Hal tersebut dapat ditandai dengan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar, sehingga dengan kurangnya akses pendidikan tersebut berpengaruh terhadap angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Belitung;
2. Cukup tingginya APTs di Kabupaten Belitung. Kurangnya pembinaan secara intensif ke sekolah serta interaksi dengan pemangku kepentingan setempat seperti pemerintah Desa, untuk dukungan mencegah siswaa putus sekolah.
3. Masih adanya anggapan masyarakat bahwa Pendidikan anak usia dini biayanya mahal, dan tidak penting karena untuk mengikuti pendidikan SD tidak wajib lulus PAUD.

Memperhatikan faktor pendukung dan penghambat di atas beberapa hal yang harus dilakukkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan terutama untuk daerah terpencil;
2. Meningkatkan kemampuan pembelajaran. Pemerintah Kabupaten Belitung harus dapat memastikan bahwa siswa setidaknya mencapai standar minimal pembelajaran dan pengembangan diri siswa di setiap jenjang sistem pendidikan.
3. Meningkatkan prasarana dan sarana
4. Meningkatkan kompetensi dasar dan memperbaiki sikap yang harus dimiliki pembelajar/guru. Tanpa pengajaran yang lebih baik secara konsisten, siswa di Kabupaten Belitung tidak akan memperoleh fondasi yang kuat untuk belajar di tahap selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Belitung harus dapat memastikan bahwa Kabupaten Belitung memiliki jumlah guru berkualifikasi tinggi di tempat yang membutuhkan, khususnya di sekolah-sekolah yang berprestasi rendah, terpencil, dan di daerah pedesaan, serta memastikan para guru tersebut berkinerja sesuai kemampuan terbaiknya.
5. Menjalin hubungan sekolah dengan masyarakat dan pemanfaatan lingkungan untuk meningkatkan peran dan kapabilitas orang tua siswa dan masyarakat dalam meningkatkan motivasi belajar anak.

TUJUAN 3 : Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang Bersih, Inovatif, Profesional, Akuntabel dan Transparan

Capaian kinerja tujuan terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan diukur melalui pencapaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.41. Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang Bersih, Inovatif, Profesional, Akuntabel dan Transparan

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPD	2025			KATEGORI	TARGET AKHIR RPD 2026
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	BB	B	A	121,47	SB	BB

Pada tahun 2025 secara resmi Kementerian PANRB RI mengeluarkan rilis resmi sesuai surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN RB tanggal 10 April 2026 Nomor B/295/RB.06/2026 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025.

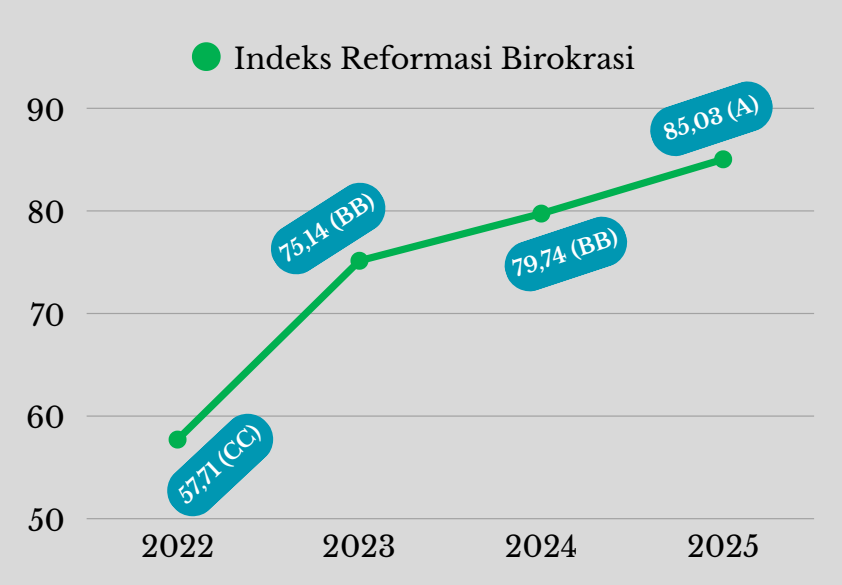

Grafik 3.7 Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Belitung Tahun 2022-2025

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*. Sejak tahun 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah melakukan penajaman evaluasi reformasi birokrasi dengan lebih mengukur indeks reformasi birokrasi dari sisi dampak kinerja dibandingkan dengan sisi proses yang cenderung bersifat administratif yang disebut dengan reformasi birokrasi tematik yang terdiri dari empat

tema yaitu: pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual presiden (peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi).

Evaluasi reformasi birokrasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari siklus pengelolaan reformasi birokrasi. Dalam Pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 50 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023-2024. Komitmen melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung ditunjukkan dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor : 188.45/001/VIII/2025 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025. Berikut Kategori, Nilai angka dan Persepsi Indeks Reformasi Birokrasi :

Tabel 3.42. Kategori, Nilai angka dan Persepsi Indeks Reformasi Birokrasi

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Istimewa
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
7	D	0-30	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

Pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi pada tahun 2025 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024. Berikut ini adalah hasil evaluasi yang didasarkan pada hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB diuraikan sebagai berikut Tahun 2023-2025 :

Tabel 3.43. Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Belitung Tahun 2023-2025 (Komponen dan Sub Komponen)

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Tahun 2023		
				Bobot	Skor	Skor Index
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	1,88	1,88
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	100	4,39

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Tahun 2023		
				Bobot	Skor	Skor Index
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Persentase Penyderhanaan Struktur Organisasi	2	99,62	1,99
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	2	0,80
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	3,20	2,56
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3,5	1,5	1,5
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	63,52	2,54
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,5	1	0,50
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,5	93,22	2,33
10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2,5	3	1,5
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Kualitas Kebijakan	2,5	0	0
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Reformasi Hukum	2,5	45,61	1,14
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,5	2,12	1,06
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	72,4	1,81
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Sistem Merit	4	252,5	2,46
16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Pelayanan Publik	1,5	3,89	1,17
17	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	88,87	1,33
18	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	3,11	5,60
19	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	2	98	1,96

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Tahun 2023		
				Bobot	Skor	Skor Index
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
20	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Non Makro	8,00	57,14	2,90
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Opini BPK	5	5	5
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	80,1	3,2
23	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Indeks BerAkhlak	4	61,60	2,46
24	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Survei Penilaian Integritas	10	76,61	7,66
25	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Survei Kepuasan Masyarakat	8	89,33	71,50
26	RB General	Koefisien	Koefisien	10		
27	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	4	0,28	0,28
28	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	4	0,28	0,28
29	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	4		
30	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan))	4	0,4	0,4
31	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan))	4	0,27	0,27
32	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	6	54,61	0,23
33	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Output)	6	-	-
34	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)	6	-	-
35	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	6	100	0,42

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Tahun 2023		
				Bobot	Skor	Skor Index
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
36	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Output)	6	-	-
37	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	1,5	1,5
38	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1,61	1,61
39	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	-	-
40	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2,8	2,8
41	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	2,46	2,46

Lanjutan. Tabel 3.43. Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Belitung Tahun 2023-2025 (Komponen dan Sub Komponen) (Tahun 2024)

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Tahun 2024		
				Bobot	Skor	Skor Index
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,21	2,21
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	87	4,49
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Persentase Penyderhanaan Struktur Organisasi	-	-	-
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyderhanaan Birokrasi	3	4	2,4
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	3,54	2,83

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Tahun 2024		
				Bobot	Skor	Skor Index
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3,5	0,5	0,5
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	64,68	2,59
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,5	1	0,5
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,5	92,36	2,31
10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2,5	3	1,5
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Kualitas Kebijakan	2,5	0	0
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Reformasi Hukum	2,5	97,84	2,45
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,5	2,62	1,31
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	73,66	1,84
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Sistem Merit	4	252,50	2,46
16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Pelayanan Publik	2	4,02	1,61
17	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	2	93,07	1,86
18	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	3,35	6,03

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Tahun 2024		
				Bobot	Skor	Skor Index
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
19	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	4	98,79	3,95
20	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Non Makro	6	78,21	3,04
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Opini BPK	5	3	5
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	77,38	3,10
23	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Indeks BerAkhlak	4	63,26	2,53
24	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Survei Penilaian Integritas	10	76,55	7,66
25	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Survei Kepuasan Masyarakat	8	89,71	7,18
26	RB General	Koefisien	Koefisien	10	-	-
27	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	1	0,6	0,6
28	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	1	0,86	0,86
29	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	1	0,61	0,61
30	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan))	1	0,69	0,69
31	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan))	1	0,5	0,5

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Tahun 2024		
				Bobot	Skor	Skor Index
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
32	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	-	-	-
33	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Output)	-	-	-
34	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)	-	-	-
35	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	-	-	-
36	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Output)	-	-	-
37	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	1,98	1,98
38	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1,53	1,53
39	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	0,75	0,75
40	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2,87	2,87
41	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	0	0

Lanjutan. Tabel 3.43. Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Belitung Tahun 2023-2025 (Komponen dan Sub Komponen) (Tahun 2025)

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Tahun 2025			
				Bobot	Target Terbaik	Skor	Skor Index
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3,00		2,30	2,30
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7,00		100,00	5,37
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	3,00	4,01	4,00	2,40
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas SPIP	4,00	3,00	2,45	1,96
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	3,50	2,50	0,50	0,50
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	4,00	60,01	65,49	2,62
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	25,00	3,00	2,00	1,00
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Digitalisasi Arsip	25,00	60,01	94,27	2,36
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	25,00	4,00	4,00	2,00
10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan	25,00	65,00	88,67	2,22
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Hukum	25,00	70,01	99,40	2,48
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pembangunan Statistik	25,00	70,01	2,62	1,31
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan	25,00	70,01	75,77	1,89

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Tahun 2025			
				Bobot	Target Terbaik	Skor	Skor Index
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Merit	4,00	2,50	2,53	2,46
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	2,00	3,51	4,06	1,62
16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	2,00	78,00	93,07	1,86
17	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks SPBE	9,00	2,60	4,15	7,47
18	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Opini BPK	5,00	3,00	3,00	5,00
19	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	4,00	75,00	80,66	3,23
20	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks BerAkhlak	4,00	50,00	63,26	2,53
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Penilaian Integritas	10,00	77,50	78,62	7,86
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Kepuasan Masyarakat	8,00	76,61	90,06	7,20
23	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Makro	4,00		100,00	4,00
24	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Non Makro	6,00	90,00	87,50	3,44
25	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	1,00		0,68	0,68
26	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	1,00		0,85	0,85

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Tahun 2025			
				Bobot	Target Terbaik	Skor	Skor Index
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
27	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	1,00		0,61	0,61
28	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	1,00		0,69	0,69
29	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan)	1,00		0,50	0,50
30	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3,00		1,50	1,50
31	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3,00		1,50	1,50
32	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3,00		0,75	0,75
33	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3,00		2,87	2,87
34	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	Penilaian mengacu pada Tahun 2023 & 2024			
35	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Percepatan Hilirisasi	1,00	-	-	0,00
36	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Ketahanan Pangan	1,00	-	-	0,00
37	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	1,00	-	-	0,00
38	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan	1,00	-	-	0,00

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana level mikro melaksanakan reformasi birokrasi dalam Dimensi Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa Kegiatan Utama dan telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, serta bersifat *mandatory*, Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Belitung melaksanakan 21 kegiatan utama dalam reformasi birokrasi general menetapkan 5 (lima) tema dalam reformasi birokrasi tematik Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), dan Pengendalian Inflasi. Serta Menyusun Rencana Aksi untuk 4 tema baru yang mendukung Visi Misi Presiden RB Berdampak utuk Kesejahteraan Rakyat yaitu, RB Mendorong Hilirisasi, RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional, RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan.

Faktor Pendukung

Tuntutan pelayanan prima dari segenap masyarakat menjadi pemicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar semakin adaptif dan lincah. Adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dipilah secara tematik diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih fokus.

Faktor Penghambat

Kurangnya kesadaran dan komitmen bersama diantara seluruh elemen pemerintahan menjadi penghambat dalam rangka menciptakan kesuksesan Reformasi Birokrasi, karena Reformasi Birokrasi merupakan tanggungjawab bersama segenap elemen pemerintahan. Beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu :

1. Rencana aksi belum sepenuhnya relevan untuk mencapai target sasaran kegiatan utama dan belum menggambarkan intervensi terhadap permasalahan utama;
2. Masih terdapat indikator output atas rencana aksi yang belum cukup menggambarkan sasaran dan targetnya;
3. Secara umum capaian pelaksanaan kebijakan dengan 3 (tiga) indikator nilainya belum baik yaitu Tingkat Maturitas SPIP, Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI, Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE, serta Tematik Pengendalian Inflasi untuk strategi pembangunan dan capaian indikator dampak yang belum maksimal.

Setelah memperhatikan faktor pendukung dan penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran dimasa yang akan datang diperlukan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga pengampu untuk peningkatan nilai indeks indikator penilaian dalam RB General khususnya untuk indeks yang masih dinilai buruk. Karena secara umum, indeks indikator penialaian dalam RB General khususnya untuk indeks penilaian Pemerintah Kabupaten Belitung di Tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami peningkatan. Perbaikan dalam strategi penyusunan kegiatan dalam rencana aksi juga perlu dilakukkan agar relevan untuk mencapai target sasaran dalam kegiatan utama. Pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung tahun 2025 melalui pelaksanaan program dan kegiatan terkait 21 kegiatan utama telah menghasilkan dan mendukung pencapaian kondisi yang cukup baik sebagaimana telah diuraikan. Dalam rangka mengetahui sejauh mana keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam melaksanakan reformasi birokrasi sesuai yang diamanatkan, perlu untuk melakukan evaluasi baik internal maupun eksternal baik dalam RB general maupun dalam RB tematik.

Dalam RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026, upaya pencapaian Tujuan 2 "Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan", telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 7 (tujuh) strategi sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 3.44. Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 3

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 2 Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, professional, akuntabel dan transparan	Sasaran 6 Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan kinerja pemerintah daerah Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatkan pengelolaan system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Meningkatkan statistik sektoral Meningkatkan kualitas pelayanan publik Meningkatkan stabilitas politik, keamanan ketertiban masyarakat yang kondusif.
	Sasaran 7 Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Meningkatnya kapabilitas aparatur

SASARAN 6 : Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel

Capaian kinerja sasaran "Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel" merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama RPD Kabupaten Belitung tahun 2024 – 2026. Capaian kinerja tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.45. Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPD	2025			Kategori	Akhir RPD 2026 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Opini BPK *)	Predikat	WTP	WTP	WTP	100	SB	WTP
2	Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	Predikat	B	BB	B	93,54	SB	BB

**) Indikator sasaran Opini BPK masih menunggu hasil audit BPK*

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan yakni Akuntabilitas, Transparansi, dan Pelayanan yang berkualitas. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa penyelenggara pemerintah harus memperhatikan azas umum penyelenggaraan negara, antara lain : 1) Azas Kepastian Hukum, 2) Azas Tertib.

Pencapaian kinerja sasaran Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel melalui 2 (dua) indikator, yaitu Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan nilai SAKIP Kabupaten Belitung dengan target BB. Dari dua indikator tersebut, indikator Opini BPK belum dapat diukur dikarenakan masih menunggu hasil audit BPK dan indikator Nilai SAKIP Kabupaten Bellitung juga belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu dari target BB di dapatkan Hasil Evaluasi AKIP dari Kementerian PAN dan RB Tahun 2025 yaitu B dengan nilai 65,49 dengan capaian kinerja sebesar 93,54%.

Opini BPK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada BPK RI paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sampai saat ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung tahun 2025 sedang dalam proses

penyusunan dan Opini BPK RI terhadap Laporan Keungan akan diterima setelah proses pemeriksaan oleh BPK RI selesai.

Gambar 3.11.Penerimaan Penghargaan atas Opini BPK

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (2) kecukupan pengungkapan *(adequate disclosures)*; (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Berikut opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung :

Tabel 3.46. Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung

TAHUN	OPINI BPK RI
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2024	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2025	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 adalah Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung. Pencapaian kinerja sasaran 5 melalui 3 (tiga) strategi, yaitu: meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah. Setiap strategi memiliki arah kebijakan masing-masing yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program-program kegiatan dalam upaya pencapaian kinerja sasaran.

Terdapat 3 (tiga) arah kebijakan dari strategi meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, yaitu :

1. Meningkatkan pengelolaan keuangan;
2. Meningkatkan barang milik daerah (BMD); dan

3. Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu adanya reformasi birokrasi. Permasalahan mengenai pengelolaan aset dan SDM pengelolanya perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Belitung. Oleh karena itu perlu peningkatan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah ini diarahkan pada peningkatan tata kelola aset, pelaporan keuangan dan peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggunakan teknologi informasi. Selain itu dengan menerapkan *e-budgeting* yang terintegrasi dengan perencanaan dan pelaporan keuangan daerah.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Belitung meningkat. Hal ini terlihat dari ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen pengeleloaan keuangan daerah, di mana pemerintah berusaha untuk menyusun dokumen keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal ini sejalan dengan diraihnya predikat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang masih harus dibenahi adalah berkenaaan dengan penataan aset di perangkat daerah hal ini terus dilakukan untuk tetap terus mempertahankan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Belitung dan mempertahankan predikat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, serta langkah upaya yang kuat dalam rangka mempertahankan predikat WTP dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung. Sedangkan Faktor penghambat capaian kinerja adalah perubahan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang terus terjadi, dan juga transisi peralihan sistem informasi keuangan dari SIMDA ke SIPD. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, akan melakukan :

1. Mendukung upaya untuk mempertahankan predikat WTP dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung.
2. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang baik antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban APBD.
3. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan instansi vertikal terkait pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah .

Nilai SAKIP Kabupaten Belitung

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instasi yang bersangkutan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten.Penerapan reformasi birokrasi berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Ada 5 komponen penilaian SAKIP, pertama perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja dengan bobot 35. Kedua, pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran dengan bobot 20. Ketiga, pelaporan kinerja, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, diberi bobot 15. Keempat, evaluasi kinerja, terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, diberi bobot 10. Kelima, pencapaian kinerja, bobotnya 20, terdiri dari kinerja yang dilaporkan (*output dan outcome*), dan kinerja lainnya.

Perubahan penilaian AKIP tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana terdapat 4 komponen penilaian SAKIP, pertama perencanaan kinerja, kedua pengukuran kinerja, ketiga pelaporan kinerja, keempat evaluasi kinerja.

Untuk melihat perkembangan capaian kinerja nilai SAKIP Kabupaten Belitung dari tahun 2023 – 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.47. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023-2025

KOMPONEN	BOBOT	2023	% kinerja komponen terhadap bobot	2024	% kinerja komponen terhadap bobot	2025	% kinerja komponen terhadap bobot
Perencanaan Kinerja	30	22,4	74,67	22,28	74,26	22,45	74,83
Pengukuran Kinerja	30	16,16	53,87	16,27	54,23	16,39	54,63
Pelaporan Kinerja	15	10,25	68,33	10,48	69,87	10,88	72,53
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,71	58,84	15,65	62,6	15,77	63,08
Nilai Hasil Evaluasi	100	63,52		64,68		65,49	
Kategori		B		B		B	

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung

Nilai SAKIP Kabupaten Belitung pada tahun 2025 sebesar 65,49, dengan kategori B (Baik) sesuai dengan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KementerianPANRB Nomor B/170/AA.05/2025 tanggal 26 Desember 2025. Tahun 2024 dengan kategori yang sama B, ada kenaikan di tahun 2025 sebesar 0,81 poin.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa evaluasi pada tahun 2025 didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun level perangkat daerah.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah Meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. Pada November 2024 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Dan penetapan Peraturan Bupati Belitung Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029.

Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan renstra dan juga perjanjian kinerja dan seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala, Laporan capaian kinerja Tahunan, Triwulanan, Laporan Dalev Pelaksanaan RKPD dan Laporan Evaluasi RENJA setiap perangkat daerah, ditambahkan dengan Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan setiap perangkat daerah melalui *website* monev.belitung.go.id yang telah diintegrasikan dengan sakip.belitung.go.id.

Namun dari data capaian nilai SAKIP di atas yang menjadi catatan penting adalah predikat akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dari hasil evaluasi atas penerapan SAKIP yang masih berada di kategori B atau nilai dalam *range* 60 – 70. Ini dapat diartikan bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Kabupaten Belitung masih rendah dan diindikasikan adanya potensi terjadinya inefisiensi. Inefisiensi ini dapat terjadi karena tujuan dan sasaran tidak berorientasi hasil, ukuran kinerja tidak jelas (tidak ada keterkaitan antara program dan kegiatan), kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

Kondisi ini tentunya kurang sejalan dengan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Sementara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yakni Akuntabilitas, Transparansi, dan Pelayanan yang berkualitas. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa penyelenggara pemerintah harus memperhatikan azas umum penyelenggaraan negara, antara lain; (1) Azas Kepastian Hukum; (2) Azas Tertib Penyelenggaraan Negara; (3) Azas Kepentingan Umum; (4) Asas Keterbukaan; (5) Asas Proporsionalitas; (6) Asas Profesionalitas; dan (7) Asas Akuntabilitas.

Menyempurnakan rumusan sasaran strategis yang belum berorientasi hasil dan indikator kinerja yang belum SMART, terutama pada perangkat daerah dan kepala bidang merupakah hal yang harus dilakukan Pemkab Belitung untuk menindaklanjuti salah satu rekomendasi yang di berikan oleh Kementerian PAN RB dalam evaluasinya.

Upaya pencapaian kinerja sasaran Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel terus dilakukan dengan dukungan dari berbagai faktor. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain:

Komitmen Pimpinan untuk meraih Opini WTP, Indeks RB dan meningkatkan nilai SAKIP. Namun demikian dalam upaya pencapaian kinerja sasaran terdapat faktor penghambat pencapaian kinerja, yaitu:

- Belum optimalnya reviu dan perbaikan dokumen perencanaan yang telah dilakukan sehingga masih terdapat indikator yang belum berorientasi hasil pada level perangkatdaerah dan melakukan penyempurnaan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
- Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang belum optimal;
- Belum optimalnya pembinaan, peringatan dini dan manajemen resiko penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas aparatur pengawasan intern pemerintah yang belum optimal.

Kualitas dan profesionalitas SDM aparatur masih rendah, dikarenakan:

- Integritas dan kompetensi aparatur masih kurang, belum optimalnya pengelolaan sistem manajemen aparatur;
- Sistem manajemen pemerintahan yang belum terlaksana dengan baik.

Belum optimalnya Pelayanan publik, dikarenakan:

- Kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik masih belum optimal;
- Keterbukaan informasi publik yang masih kurang;
- Pelayanan publik yang belum optimal.

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan di masa datang dalam upaya meningkatkan kinerja sasaran birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel di masa yang akan datang sebagai berikut :

- Terus melakukan upaya monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
- Meningkatkan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah terkait perencanaan, pengukuran kinerja, pencapaian kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja;
- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

SASARAN 7 : Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional

Capaian kinerja sasaran "Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional" merupakan salah indikator kinerja utama RPD dengan indikator Indeks Profesional ASN dengan target **"71-80"** Sedang. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Tabel 3.48. Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPD	2025			Kategori	Akhir RPD 2026 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks Profesional ASN	Skala	75,44	71-80	81,29	101,61	SB	71-80

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permenpan RB No. 38 Tahun 2019). Indeks Profesionalitas ASN merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif yang hasilnya digunakan untuk menilai dan mengevaluasi tingkat profesionalitas ASN. Adapun indikator profesionalitas ASN adalah pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik, organisasinya semakin modern dan memiliki disiplin yang tinggi.

Indeks Profesionalitas ASN dikeluarkan dan ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara selaku Pembina Kepegawaian Nasional. Sumber Data yang digunakan untuk mengukur IP ASN adalah data SAPK yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Negara. Adapun unsur-unsur yang dinilai yaitu Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi (kediklatan), Kinerja dan Disiplin dengan kategori sebagai berikut:

- Nilai 91% - 100% : Sangat Tinggi
- Nilai 81% - 90% : Tinggi
- Nilai 71% - 80% : Cukup/Sedang
- Nilai 61% - 70% : Rendah
- Nilai < 60% : Sangat Rendah

Indikator yang digunakan untuk mengukur Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) adalah :

- Kualifikasi, dengan nilai maksimal 25
- Kompetensi, dengan nilai maksimal 40
- Kinerja, dengan nilai maksimal 30
- Disiplin, dengan nilai maksimal 5
- Total nilai maksimal 100

Kualifikasi, meliputi data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah, Kompetensi, meliputi data dan informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas. Indikator yang digunakan adalah Diklat kepemimpinan, Diklat fungsional, Diklat teknis, Seminar/workshop/magang/kursus/sejenisnya, dalam 2 (dua) tahun terakhir. Kinerja, meliputi data dan informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat serta perilaku PNS.

Disiplin, meliputi data dan informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.Indikator : hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, hukuman disiplin berat. Data hukuman disiplin tersebut telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir).

Realisasi kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2024 berdasarkan perhitungan dalam portal https://myasn.bkn.go.id dari Badan Kepegawaian Negara adalah 81,29 (tinggi).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.49. Penilaian IP ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024

Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai	Kategori
20,78	30,49	25,02	5	81,29	Tinggi

Sumber :Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab Belitung Tahun 2025

Penjelasan : Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari unsur: Kualifikasi 20,78 dari 25; Kompetensi 30,49 dari 40; Kinerja 25,02 dari 30 dan Disiplin 5 dari 5. Dengan Jumlah PNS sebanyak 2.734 orang dan Jumlah PPPK sebanyak 293 orang.

Tabel 3.50. Tabel Perbandingan IP ASN Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024

Tahun	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai	Kategori	Sumber Data
2021	12,69	18,52	23,23	5	59,44	Sangat Rendah	Hasil Penilaian BKN No: 870/B-BH.02.01/SD/C/2022 Tanggal 13 Januari 2022
2022	21,04	21,14	24,38	5	71,56	Sedang	Hasil Penilaian BKN No: 470/B-BM.02/SD/KR.VII/2023 Tanggal 18 Oktober 2023
2023	20,86	28,5	24,26	5	78,63	Sedang	Hasil Penilaian BKN No: 435/B-BM.02/SD/KR.VII/2024 tanggal 07 Oktober 2024
2024	20,78	30,49	25,02	5	81,29	Tinggi	Hasil Perhitungan pada portal https://myasn.bkn.go.id

Sumber :Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab Belitung Tahun 2025

Adapun faktor pendorong peningkatan nilai IP ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 adalah Tersedianya *database* pegawai pada aplikasi Simpeg dengan tujuan terciptanya sistem informasi dan database kepegawaian yang dapat menampung, mengolah, menyimpan dan menemukan kembali data kepegawaian. Adanya pengembangan *e-SKP* sesuai dengan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, dimana pada Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 memiliki ruang lingkup yang lebih luas yakni ASN (PNS dan PPPK) dengan perilaku kinerja *Core Values* ASN yang merupakan pengembangan PP Nomor 30 Tahun 2019 yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif.

Dengan demikian, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah strategi dalam rangka memperbaiki nilai IP ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 untuk meningkatkan nilai dimensi kompetensi:

- Berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya untuk memaksimalkan kegiatan pengembangan kompetensi ASN;
- Melaporkan hasil pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN beserta bukti dukung kepada BKPSDM Kabupaten Belitung;
- Melaksanakan Melaksanakan Sosialisasi atau seminar *online* kepegawaian dengan target peserta massal.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung harus senantiasa ditingkatkan untuk secara pro-aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Dan upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah agar dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan tidak hanya dilakukan oleh internal organisasi perangkat daerah, melainkan juga terkait dengan pemerintah pusat (dalam hal ini Kementerian PAN dan RB serta Badan Kepegawaian Negara) dan juga pihak-pihak lainnya.

TUJUAN 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, upaya pencapaian Tujuan 4 " **Meningkatkan kualitas lingkungan hidup** " telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) strategi, sebagaimana terinci pada tabel berikut :

Tabel 3.51 Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 4

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Sasaran 8 Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Meningkatkan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup
		Meningkatkan Pengelolaan sampah

Lingkungan hidup berkesinambungan diangkat dari suatu pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan, perlu adanya pelestarian dari pemanfaatan sumber daya alam, dan upaya untuk melindungi, memulihkan pemanfaataan ekosistem dan upaya untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya Kehadiran Pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak pembangunan.

Capaian kinerja tujuan **"Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup"** merupakan salah satu indikator kinerja utama RPD dengan indikator Indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2025 dengan target 69,26 poin. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2025 :

Tabel 3.52 Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	2025			Kategori	Akhir RPD 2026 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,25	69,26	75,77	109,4	SB	69,27

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator dari tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yaitu indeks kualitas lingkungan hidup, telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan realisasi kinerja sebesar 75,77 poin melampaui target dengan kategori **SANGAT BERHASIL**. Dari realisasi IKLH Tahun 2025 sebesar 75,77 poin nilai IKLH Kabupaten Belitung pada posisi dan kategori Baik.Kondisi tersebut perlu dipertahankan untuk terus meningkatkan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang merupakan komponen terpenting dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Belitung.

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam proses perhitungannya sudah mempergunakan Aplikasi Pelaporan dan Perhitungan IKLH PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan rumus sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Rumusannya sebagai berikut :

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) = (0.376×IKA) + (0.405×IKU) + (0.219×IKL)

Keterangan :
IKA : Indeks Kualitas Air
IKU : Indeks Kualitas Udara
IKL : Indeks Kualitas Lahan

Untuk perhitungan nilai IKLH sebagai berikut :

Indeks Kualitas Air (IKA) = 74,59
Indeks Kualitas Udara (IKU) = 82,53
Indeks Tutupan Lahan (IKL) = 65,28

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
= (0.376×IKA) + (0.405×IKU) + (0.219×IKL)
= (0.376 x 74,59) + (0.405 x 82,53) + (0.219 x 65,28)
= 28,046 + 33,425 + 14,296
= 75,77

Untuk melihat perbandingan antara nilai IKLH dari tahun 2022 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.53 Perbandingan Nilai IKLH Tahun 2022 sampai dengan 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,25	68,9	69,84	75,77

Sumber :Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, 2025

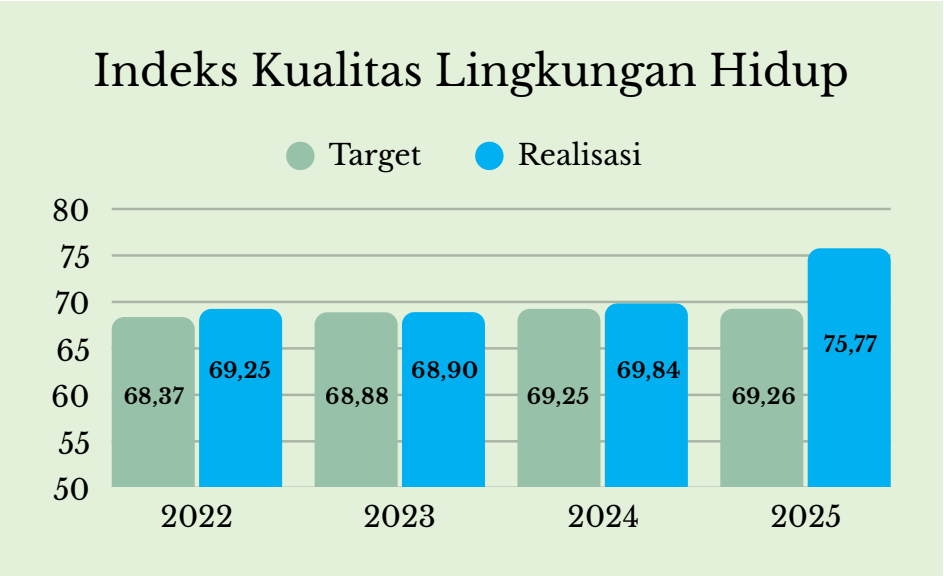

Grafik 3.8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2022-2025
Sumber :Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, 2025

Pada grafik IKLH tersebut dapat dilihat bahwa nilai IKLH pada tahun 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beberapa alternatif kebijakan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai IKLH diantaranya adalah:

1. Pembuatan kebijakan yaitu peraturan daerah mengenai pengendalian pencemaran air, pengelolaan pengendalian pencemaran udara serta pengendalian kerusakan lahan.
2. Sosialisasi lebih lanjut dan intens kepada masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di area sempadan sungai serta menggunakan air sungai untuk aktivitas sehari-hari agar dapat menjaga perilaku hidup bersih dan sehat.
3. Sosialisasi dan peningkatan pelayanan IPAL domestik kepada masyarakat dan usaha-usaha kecil.
4. Peningkatan pengawasan dan pembinaan industri terkait pengelolaan limbah dan emisi udara yang dihasilkan.
5. Penambahan lokasi titik pantau kualitas udara agar dapat mewakili semua kecamatan yang ada di Kabupaten Belitung dan pelaksanaan pemantauan secara kontinyu menggunakan *Air Quality Monitoring System* (AQMS).
6. Peningkatan inventarisasi data Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan data vegetasi lainnya, baik data primer maupun sekunder serta melakukan penetapan Kawasan area terbuka hijau melalui kebijakan peraturan daerah.
7. Peningkatan program pemulihan kualitas lingkungan atau kegiatan inovasi lainnya bersama masyarakat dan pemangku kepentingan.
8. Penyebarluasan informasi dan publikasi terkait ruang terbuka hijau dan tutupan hutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan hutan.
9. Sosialisasi dan publikasi terkait dengan pengelolaan kualitas lingkungan hidup terhadap *stakeholder* terkait

SASARAN 8 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Air, Udara dan Tutupan Lahan

Capaian kinerja sasaran **"Meningkatkan Kualitas Lingkungan Air, Udara dan Tutupan Lahan"** merupakan salah satu indikator kinerja utama dengan indikator Indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2025 dengan target 69,26. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Tabel 3.54 Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	2025			Kategori	Akhir RPD 2026 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,25	69,26	75,77	109,4	SB	69,27

Dalam perhitungan nilai IKLH Tahun 2025 dipengaruhi oleh nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL). Adapun nilai IKA, IKU dan IKL Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indeks Kualitas Air (IKA)

Nilai IKA pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 77,99 sedangkan realisasi kinerja tahun 2025 ialah 74,59 dengan tingkat capaian sebesar 95,64%. Nilai IKA tahun 2025 diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air sungai pada titik-titik yang merepresentasikan hulu, tengah dan hilir sungai di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau, Kecamatan Membalong dan Kecamatan Selat Nasik. Titik yang dipantau yang terlapor sejumlah 24 (Dua puluh empat) titik yang terdiri dari 18 (delapan belas) titik air sungai dan 6 (enam) air danau/Kolong/SPAM. Nilai IKA pada tahun 2025 memenuhi target sebagaimana yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh :

1. Perubahan lokasi titik pantau untuk mendapatkan keterwakilan pemantauan air sungai berdasarkan lokasi hulu, tengah dan hilir sungai.
2. Penambahan nilai IKA yang terhitung dari lokasi yang diuji oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 1 (satu) lokasi di Sungai Air Batu Buding yang diukur sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 4 (empat) titik.
3. Adanya pengaruh dari kondisi cuaca pada triwulan akhir yang memengaruhi besarnya debit air sehingga terdapat beberapa parameter yang mengalami penurunan kualitas terutama kandungan oksigen dalam air / *Dissolve oxygen* (DO). Selain itu, sifat tanah di Kabupaten Belitung yang bersifat asam memengaruhi parameter Ph air menjadi asam.
4. Nilai IKA yang terhitung ialah perhitungan berdasarkan aplikasi IKLH yang dikeluarkan oleh KLHK. Perhitungan dilakukan berdasarkan 8 (delapan) parameter wajib. Data yang terverifikasi sejumlah 103 (seratus tiga) dari 104 (seratus empat) titik air sungai dan danau yang terinput dengan persentase titik yang memenuhi baku mutu sebanyak 39 titik (37,5%), dan cemar ringan sebanyak 64 titik (62,13%). Terlihat bahwa terdapat perbedaan jumlah yang cukup signifikan antara persentase titik yang memenuhi baku mutu dengan titik yang tercemar ringan.

Untuk melihat perbandingan antara nilai IKA 3 (tiga) Tahun Terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini :

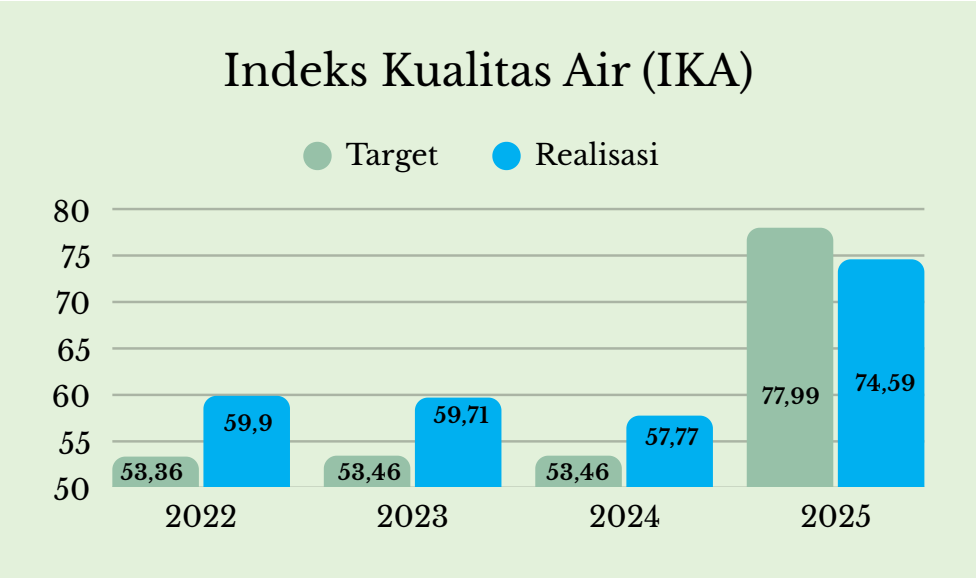

Grafik 3.9 Indeks Kualitas Air Kabupaten Belitung Tahun 2022-2025

Sumber :Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, 2026

Indeks Kualitas Udara (IKU)

Nilai IKU Tahun 2025 ditargetkan 82,49 sedangkan realisasi kinerja Tahun 2025 sebesar 82.53 dengan tingkat capaian sebesar 100.05%. Indeks kualitas udara diketahui dengan melakukan pemantauan kualitas udara menggunakan metode *Passive Sampler* yang dilakukan 2 (dua) kali setahun (dalam hal ini per-semester) selama 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari pada 4 (empat) titik lokasi, yaitu area transportasi, industri, Kawasan perkantoran dan pemukiman. Data yang diukur berupa konsentrasi rata-rata tahunan untuk parameter pencemar udara SO_2 dan NO_2.

Pada tahun 2025, terdapat parameter baru yang dimasukkan dalam perhitungan IKU, yaitu PM2.5 dengan melakukan pengambilan contoh uji selama 24 jam dengan metode manual aktif atau dengan menggunakan citra satelit yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang. Untuk Kabupaten Belitung, nilai PM2.5 didapatkan dari pencitraan satelit yang dilakukan oleh Badan Riset Inovasi Nasional. Lokasi sampling ditemukan berdasarkan 4 (empat) kriteria Lokasi, antara lain:

1. Kepadatan Transportasi
   Untuk kepadatan transportasi dilakukan sampling di lokasi Terminal Bis Tanjungpandan Jalan Jendral Sudirman.
2. Kepadatan Permukiman
   Untuk kepadatan pemukiman dilakukan sampling di lokasi Kantor Desa Aik Pelempang Jaya Jalan Nusantara RT.04 RW.02.
3. Lokasi Perkantoran
   Untuk kepadatan perkantoran dilakukan sampling di Area Perkantoran dekat Dinas Lingkungan Hidup Kab.Belitung.
4. Lokasi Industri
   Untuk kepadatan industri dilakukan sampling di Kawasan Industri Suge Jalan TS RUU, Desa Pegantungan, Kecamatan Badau.

Untuk melihat perbandingan antara nilai IKU 3 (tiga) Tahun Terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini :

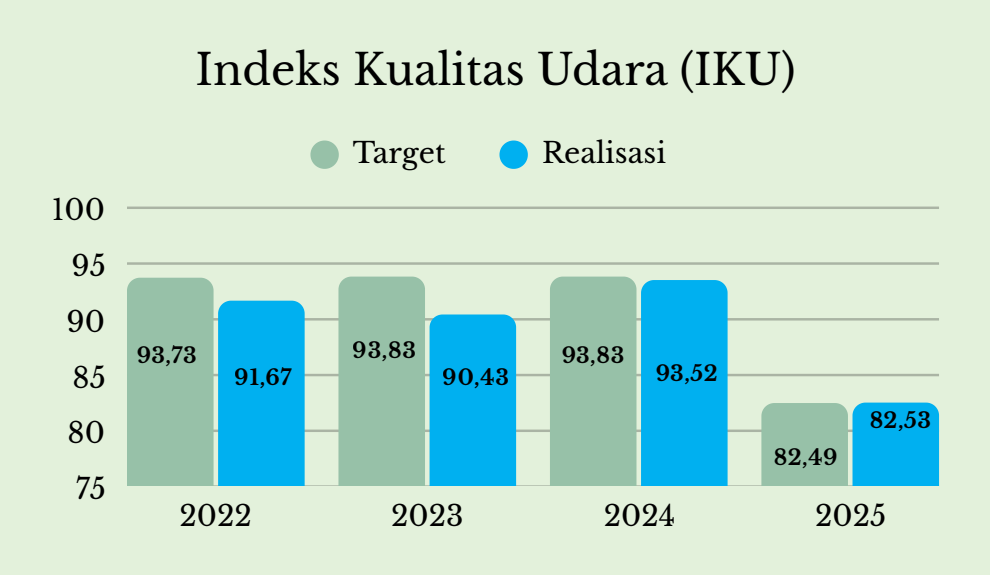

Grafik 3.10 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Belitung Tahun 2022-2025

Sumber :Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, 2026

Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Nilai IKL pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 64,28 sedangkan realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 65,28 dengan tingkat capaian sebesar 101,56%. Nilai IKL dihitung berdasarkan data yang diinput oleh Kementerian Lingkungan dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidupdalam aplikasi IKLH. Kabupaten menginput data yang tersedia berupa data Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang didapat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Belitung dan data Taman Kehati oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung serta Data Vegetasi Lainnya yang didapat dari verifikasi lapangan reklamasi yang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Belitung.

Pengambilan data tutupan lahan secara garis besar diperoleh dari metode penginderaan jauh yaitu menggunakan citra satelit (citra satelit resolusi tinggi maupun citra satelit resolusi menengah). Hasil pengelolahan data penginderaan jauh tersebut selanjutnya dianalisis secara multi temporal (waktu yang berbeda) dan multi tingkat (skala atau tingkatan yang berbeda). Dua puluh dua (22) data kelas tutupan lahan diperoleh dari Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan dan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan, Kementerian Kehutanan. Sedangkan data tutupan lahan berupa ruang terbuka hijau (kebun raya) diperoleh dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan (taman kehati) diperoleh dari Direktorat JenderalKonservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Kehutanan serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Adapun data rehabilitasi hutan dan lahan diperoleh dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Kehutanan serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, data luas wilayah administrasi diperoleh dari Badan Informasi Geospasial (BIG) apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian data dari hasil analisis citra satelit maka perlu dilakukan verifikasi data hasil klasifikasi (penafsiran) dengan cara :

1. Peninjauan langsung ke lapangan (pengecekan lapangan);
2. Merujuk citra lain yang memiliki resolusi lebih tinggi (memiliki Tingkat akurasi atau nilai kebenaran yang lebih baik);
3. Merujuk pada data sekunder lain yang memiliki Tingkat akurasi yang lebih tinggi.

Untuk melihat perbandingan antara nilai IKU 3 (tiga) Tahun Terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini :

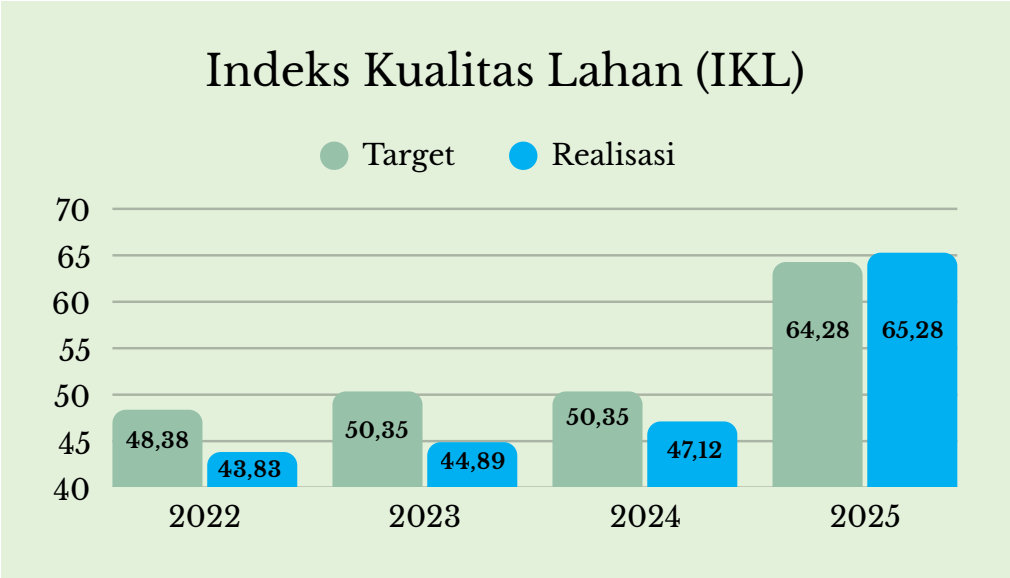

Grafik 3.11 Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Belitung Tahun 2022-2025

Sumber :Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, 2026

Faktor Pendukung

Faktor Pendukung untuk sasaran strategis **Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan**, adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 Tahun 2020.
- Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Domestik.
- Setiap kegiatan usaha wajib memliki izin lingkungan dan persetujuan teknis lingkungan.
- Monitoring dan pengawasan kegiatan setiap industri atau kegiatan usaha yang melakukan kegiatan wajib melaksanakan pencegahan dan pengurangan dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

- SDM sudah didukung oleh pejabat fungsional yaitu pengawas lingkungan hidup, pengendali dampak lingkungan dan penyuluh lingkungan hidup.
- Sudah didukung oleh Laboratorium Lingkungan Hidup yang sudah terakreditasi oleh lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Faktor Penghambat

Faktor Penghambat untuk sasaran strategis **Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan**, adalah sebagai berikut :

- Nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dipengaruhi adanya perubahan iklim.
- Masih rendahnya Indeks Tutupan Lahan (IKL) dikarenakan rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- Masih kurangnya pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup, pengendali dampak lingkungan dan penyuluh lingkungan hidup.

Solusi

Adapun solusi dari permasalahan yang menghambat atau menjadi masalah pada pencapaian sasaran strategis **Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan**, adalah sebagai berikut :

- Untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (IKL) perlu pembuatan kebijakan yaitu peraturan daerah mengenai pengendalian pencemaran air dan pengelolaan pengendalian pencemaran udara.
- Peningkatan inventarisasi data Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan data vegetasi lainnya, baik data primer maupun sekunder serta melakukan penetapan Kawasan area terbuka hijau melalui kebijakan peraturan daerah.
- Menambah SDM fungsional pengawas lingkungan hidup, pengendali dampak lingkungan dan penyuluh lingkungan hidup.

3.2.2 PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA 2025

Selanjutnya pada Triwulan IV Tahun 2025 penetapan IKU Pemerintah Kabupaten mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029, ditetapkan melalui Peraturan Bupati Belitung Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2029, Hasil pengukuran atas IKU Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 sesuai dengan RPJMD 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.55 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 terhadap Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	Indeks Modal Manusia	Nilai	0,55	n.a	n.a
2	Tingkat Kemiskinan	Persentase	5,20%	6,44%	76,15
3	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,16	9,11	99,15
4	Harapan lama sekolah	Tahun	12,42	12,10	97,42
5	Usia harapan hidup	Tahun	74,15	73,13	98,62
6	Prevalensi stunting	Persentase	16,94%	8,82%	147,93
7	Pengeluaran per kapita	Juta Rupiah	14.651.000	14.559.000	99,37
8	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase	3,74%	3,64%	102,67
9	Indeks Gini	Nilai	0,241	0,205	114,94
10	Laju pertumbuhan ekonomi	Persentase	2,11%	4,06%	192,42
11	Nilai investasi (tahun berkenaan) (dalam juta rupiah) (PMDN dan PMA)	Skala	1.200.000 Juta Rupiah	730.000 Juta Rupiah	60,83

12	Pertumbuhan sektor Prima	Persentase	3,80%	3,78%	99,47
13	Indeks Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kota	Nilai	3,8	3,14	82,63
14	Indeks reformasi birokrasi	Nilai	80(BB)	85,03	106,29
15	Indeks pemerintah digital	Nilai	1,8	n.a 4,15 (Indeks SPBE)	n.a
16	Nilai SAKIP	Nilai	65,84 (B)	65,49	99,47
17	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Nilai	76,8121	70,4597	91,73
18	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,1	4,06	99,02
19	Tingkat Maturitas SPIP	Level	Level3 (3,541)	Level2 (2,449)	69,16
20	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	79,8	81,29	101,87
21	Rasio kemandirian fiskal	Persentase	23,94%	29,38%	122,72
22	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	Baik (85,35)	70,66	84,94
23	Penurunan intensitas Emisi GRK	Nilai	67,28%	54,4% (Tahun 2024)	99,73
24	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	67,28	70,3	104,49
25	Indeks Kesulitan geografis	Nilai	32,52	32,72	99,39

26	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	76,81	75,77	98,65
27	Indeks Resiko Bencana	Nilai	117,14	98,97	117,3

Adapun kategori pencapaian indikator kinerja kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.56 Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 sesuai RPJMD 2025-2029

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA SASARAN	0.00–49.00 (KURANG)	50.00–74.99 (CUKUP)	75.00 – 89.00 (BERHASIL)	>90 (SANGAT BERHASIL)
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dalam mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera							
1	Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	1. Indeks Modal Manusia	n.a				
		2. Tingkat kemiskinan	76,15%			✓	
2	Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah	99,45%				✓
		2. Harapan lama sekolah	97,42%				✓
3	Meningkatnya kualitas kesehatan	Usia harapan hidup	98,62%				✓
4	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	147,93%				✓
5	Meningkatnya pemerataan dan pendapatan masyarakat	1. Pengeluaran per kapita	99,37%				✓
		2. Tingkat pengangguran terbuka	102,67%				✓
		3. Indeks Gini	114,94%				✓

MISI 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya saing berbasis sektor unggul dan potensial							
6	Meningkatnya daya saing ekonomi sektor unggulan dan potensial	Laju pertumbuhan ekonomi	192,42%				✓
7	Meningkatnya investasi daerah	Nilai investasi (tahun berkenaan) (dalam juta rupiah) (PMDN dan PMA)	60,83%		✓		
8	Meningkatnya pertumbuhan sektor prima	Pertumbuhan sektor Prima	99,47%				✓
9	Meningkatnya kualitas dan daya saing pariwisata serta budaya daerah	Indeks Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kota	82,63%			✓	
MISI 3 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)							
10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, adaptif dan Kolaboratif)	Indeks reformasi birokrasi	106,29%				✓
11	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel berbasis digital	Indeks pemerintah digital	n.a				
		Nilai SAKIP	99,47%				✓
		Indeks pengelolaan keuangan daerah	91,73%				✓
		Indeks pelayanan publik	99,02%				✓

		Tingkat Maturitas SPIP	69,16%		✓		
12	Terwujudnya profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	101,87%				✓
13	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian fiskal	122,72%				✓
MISI 4 : Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan							
14	Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	84,94%			✓	
		2. Penurunan intensitas Emisi GRK	99,73%				✓
15	Tersedianya Infrastruktur yang inklusif dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	104,49%				✓
16	Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	Indeks Kesulitan geografis	99,39%				✓
17	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan	1.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	98,65%				✓
		2.Indeks Resiko Bencana	117,30%				✓
JUMLAH (Ket. 2 Capaian n.a)				**0**	**2**	**3**	**20**

TUJUAN 1 : Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Tujuan pembangunan yang pertama adalah meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber daya manusia. Tujuan tersebut merupakan penjabaran dari misi pembangunan yang pertama yaitu "Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia yang berdaya saing dalam mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera". Kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang dimaksud dilihat dari perspektif pembangunan manusia dari segi pemenuhan pendidikan dan kesehatan terhadap produktivitasnya di masa mendatang. Sehingga diharapkan setiap Masyarakat yang ada di Kabupaten Belitung dapat mencapai puncak produktivitasnya di masa mendatang. Dengan gambaran kondisi yang diharapkan tersebut maka ditetapkan dua indikator kinerja yang representatif yaitu Indeks Modal Manusia dan Tingkat Kemiskinan.

Capaian kinerja tujuan "**Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia**" diukur melalui pencapaian indikator Indeks Modal Manusia dan Tingkat kemiskinan . Capaian kinerja tujuan dengan rinci terpapar pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.57 Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2025			Kategori	Akhir RPJMD 2030 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks Modal Manusia	Nilai	n.a	0,55	n.a	n.a	n.a	0,6
2	Tingkat Kemiskinan	Persentase	6,11	5,2	6,44	76,15	B	2,59

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator pertama kinerja tujuan pertama yaitu Indeks Modal Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2025 masih dalam tahap perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Belitung bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung. Sedangkan perhitungan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2025 adalah 75,29 tahun.

Perkembangan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung selama periode 2023–2025 sebagaimana telah ditunjukkan pada grafik 3.2 yang memperlihatkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Nilai IPM Kabupaten Belitung meningkat dari 74,49 pada tahun 2023 menjadi 74,96 pada tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 75,29 pada tahun 2025. Dengan capaian tersebut, IPM Kabupaten Belitung berada pada kategori "tinggi" (70 ⩽ IPM < 80) berdasarkan klasifikasi *United Nations Development Programme* (UNDP).

Peningkatan nilai IPM tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Belitung yang tercermin dari peningkatan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Selain itu, merujuk kembali pada tabel 3.30 apabila dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 yang sebesar 75,26, nilai IPM Kabupaten Belitung tercatat sedikit lebih tinggi dengan selisih sebesar 0,03 poin.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.31 sebelumnya, komponen penyusun IPM Kabupaten Belitung yang meliputi umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita selama periode 2023–2025 menunjukkan tren peningkatan.

Peningkatan kualitas pembangunan manusia pada dasarnya memiliki keterkaitan erat dengan berbagai indikator kesejahteraan masyarakat lainnya, salah satunya adalah tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, karena menggambarkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Oleh karena itu, selain melihat perkembangan kualitas pembangunan manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perlu pula dikaji perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Belitung sebagai salah satu indikator yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Belitung selama periode 2023–2025 menunjukkan tren peningkatan. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap jumlah maupun persentase penduduk miskin, mengingat garis kemiskinan merupakan batas minimum pengeluaran yang digunakan untuk menentukan seseorang termasuk dalam kategori penduduk miskin.

Selain itu, apabila dibandingkan dengan beberapa wilayah lain, garis kemiskinan Kabupaten Belitung tergolong relatif lebih tinggi, baik dibandingkan dengan garis kemiskinan nasional maupun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan minimum masyarakat di Kabupaten Belitung untuk memenuhi kebutuhan dasar cenderung lebih besar.

Kemiskinan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Belitung yang berdampak pada berbagai aspek sosial, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Meskipun tren penurunan angka kemiskinan secara umum menunjukkan perbaikan, namun masih terdapat kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dan belum sepenuhnya tersentuh oleh program perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi.

Ketimpangan pendapatan, terbatasnya kesempatan kerja, serta akses terbatas terhadap layanan dasar turut memperkuat struktur kemiskinan yang ada. Pengurangan kemiskinan merupakan agenda utama dalam Pembangunan manusia dan penguatan perlindungan sosial nasional. Pemerintah pusat menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem hingga 0% pada akhir periode perencanaan. Strategi nasional mencakup

perluasan program bantuan sosial berbasis data terpadu, integrasi layanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, serta penguatan akses pembiayaan dan kewirausahaan.

Pada perencanaan pembangunan di provinsi juga mengidentifikasi kemiskinan sebagai isu prioritas, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses dan ketimpangan pembangunan. Program-program provinsi diarahkan untuk mendorong inklusi keuangan, pelatihan keterampilan kerja, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan ekonomi lokal yang melibatkan kelompok rentan. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari sisi pendapatan, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam pembangunan.

Selaras dengan itu, RPJPD Kabupaten Belitung 2025–2045 menekankan pembangunan inklusif dan pengurangan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok sosial. Kemiskinan diidentifikasi sebagai hambatan utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang merata. Strategi jangka Panjang meliputi peningkatan daya saing tenaga kerja lokal, penguatan ekonomi kerakyatan, dan transformasi program bantuan menjadi intervensi berbasis pemberdayaan.

Dalam perspektif keberlanjutan, KLHS RPJMD Kabupaten Belitung memasukkan isu kemiskinan sebagai bagian dari pilar sosial. KLHS menyoroti bahwa kerentanan ekonomi masyarakat sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan, kualitas lingkungan, dan ketimpangan akses layanan dasar. Oleh karena itu, pengurangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan tunai, melainkan harus melalui peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh, terutama bagi kelompok marginal seperti perempuan kepala keluarga, lansia miskin, dan penyandang disabilitas. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, pasar rakyat, dan pusat layanan publik menjadi pondasi penting dalam menciptakan ruang tumbuh ekonomi lokal yang pro-masyarakat miskin.

Upaya pengurangan jumlah penduduk yang berpenghasilan di bawah garis kemiskinan harus menjadi prioritas utama RPJMD Kabupaten Belitung 2025–2029. Intervensi yang dilakukan perlu bersifat lintas sektor, menyasar akar penyebab struktural kemiskinan, serta diarahkan pada peningkatan produktivitas, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pembangunan ekosistem kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Belitung memerlukan kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan secara holistik, integratif, dan spasial. Beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan pada tahun-tahun mendatang juga telah diuraikan pada bagian tersebut.

Tabel 3.58 Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 1

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 1 Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Strategi Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	1. Penguatan sumber daya manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar Pendidikan 2. Peningkatan pelayanan dasar kesehatan serta perilaku hidup bersih dan sehat 3. Meningkatkan layanan intervensi spesifik, sensitif dan koordinatif dalam penanganan stunting 4. Memperluas kesempatan kerja melalui pemberdayaan masyarakat

SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas pendidikan

Capaian kinerja sasaran "**Meningkatnya Kualitas Pendidikan**" diukur melalui Indikator Sasaran Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah. Target 2025 yang ditetapkan adalah 9,16 tahun. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.59 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2025			Kategori	Akhir RPJMD 2030 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,05	9,16	9,11	99,45	SB	9,7
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,09	12,42	12,10	97,42	SB	13,22

Indikator pertama dari sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Berdasarkan penghitungan dari BPS, realisasi RLS Kabuapten Belitung tahun 2025 sebesar 9,11 tahun. Realisasi ini belum bisa melampaui target yang ditetapkan.

Sebagaimana telah diuraikan pada tabel 3.37 bagian sebelumnya, capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Belitung selama periode 2023–2025 menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel sebelumnya, capaian RLS Kabupaten Belitung tidak hanya mengalami peningkatan secara konsisten, tetapi juga berada di atas capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas pendidikan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya rata-rata lama penduduk dalam menempuh pendidikan formal.

Peningkatan capaian RLS ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat. Upaya tersebut antara lain melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan akses pembiayaan pendidikan bagi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan, serta penguatan tata kelola penyelenggaraan pendidikan. Berbagai upaya tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan masyarakat di Kabupaten Belitung.

Dengan adanya peningkatan capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah tersebut, diharapkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Belitung dapat terus meningkat sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing masyarakat di masa yang akan datang.

Indikator kedua dari sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat, yaitu Harapan Lama Sekolah. angka harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. AHLS menjadi indikator yang menunjukkan peluang seorang anak dalam menempuh pendidikan, realisasi HLS Kabuapten Belitung tahun 2025 sebesar 12,1 tahun. Realisasi ini belum bisa melampaui target yang ditetapkan.

Penguatan harmoni sosial memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai masalah sosial dan pembangunan, termasuk kualitas pendidikan, kesehatan, literasi digital, stunting, dan kemiskinan. Masalah-masalah ini saling mempengaruhi dan menciptakan siklus yang menghambat kemajuan Masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan dan literasi digital yang rendah cenderung sulit berpartisipasi penuh dalam masyarakat modern. Mereka lebih rentan terhadap misinformasi, yang bisa memicu konflik dan perpecahan, sehingga merusak harmoni sosial. Ketika masyarakat hidup dalam harmoni, lingkungan belajar menjadi lebih kondusif. Kerja sama dan toleransi antar individu dari berbagai latar belakang bisa meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua orang. Sebaliknya, konflik sosial dapat mengganggu proses belajar-mengajar dan menghambat akses pendidikan, terutama bagi kelompok rentan.

Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat merupakan salah satu isu strategis utama yang dihadapi Kabupaten Belitung. Meskipun capaian rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi pendidikan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat tantangan besar dalam hal pemerataan kualitas pendidikan, akses pendidikan tinggi, serta penguatan kapasitas literasi dan numerasi dasar masyarakat. Hal ini menjadi penting karena Pendidikan merupakan fondasi peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM), yang pada gilirannya sangat menentukan keberhasilan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola daerah.

Peningkatan pembangunan urusan pendidikan di Kabupaten Belitung terus dilakukan karena telah memberikan kontribusi positif terhadap

kualitas pendidikan daerah yang ditunjukkan dengan kenaikan angka rata-rata lama sekolah. Berbagai upaya tersebut antara lain melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan akses pembiayaan pendidikan, peningkatan tata kelola dan kualitas sumber daya manusia pendidikan.

SASARAN 2 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan

Peningkatan kualitas layanan kesehatan juga menjadi prioritas nasional dalam rangka memperkuat ketahanan sosial dan membangun manusia Indonesia yang sehat. RPJMN menargetkan penguatan layanan primer, percepatan penurunan stunting, peningkatan cakupan JKN, serta penanggulangan penyakit menular dan tidak menular secara terpadu. Arah ini menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat sistem kesehatan berbasis masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

Capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya kualitas kesehatan"** merupakan salah indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Usia Harapan Hidup dengan target " 74,15 " tentu sama halnya dengan indikator yang tertuang di dalam RPD 2024-2026. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Tabel 3.60 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2025			Kategori	Akhir RPJMD 2030 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Umur Harapan Hidup	Tahun	72,76	74,15	73,13	98,62	SB	75,84

Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.3 sebelumnya, capaian indikator sasaran **"Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat"** yang diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH) atau Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan kinerja yang baik. Pada tahun 2025, dari target yang ditetapkan sebesar 71,42 tahun, realisasi umur harapan hidup penduduk Kabupaten Belitung mencapai 73,13 tahun atau sebesar 102,39 persen dari target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya pembangunan di bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Perkembangan umur harapan hidup di Kabupaten Belitung selama periode 2023–2025 juga menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat yang didukung oleh meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat, serta berbagai program pembangunan di bidang kesehatan yang terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Dengan meningkatnya umur harapan hidup tersebut, diharapkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Belitung dapat terus membaik sehingga mampu mendukung terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan berdaya saing di masa yang akan datang.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2025 untuk mendukung 12 (dua belas) pencapaian kinerja SPM yang telah dicapai sebagaimana telah di jelaskan pada tabel 3.35 adalah sebagai berikut :

- Memaksimalkan kegiatan/program yang mendapat dukungan dana dan melaksanakan kegiatan dengan membuat evaluasi pertemuan untuk pemahaman Definisi Operasional (DO) dan melakukan peningkatan skrining. Kegiatan lebih banyak didanai oleh Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk puskesmas yang bersumber dari APBN. Pemanfaatan yang lebih efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.
- Melakukan kerjasama lintas sektor/lintas program dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
- Meningkatkan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) kepada masyarakat melalui promosi kesehatan
- Meningkatkan kapasitas petugas sehingga capaian SPM menjadi lebih berkualitas
- Melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala per bulan/per triwulan pada pengelola program agar dapat melakukan pengumpulan data tepat waktu.
- Mengefisienkan kegiatan dan memilah dan memprioritaskan pada kegiatan yang menunjang SPM.

Meningkatnya angka harapan hidup merupakan tantangan kompleks yang melibatkan berbagai aspek, termasuk kesehatan masyarakat, pendidikan, ekonomi, dan aksesibilitas layanan kesehatan. Angka harapan hidup yang tinggi tidak hanya mencerminkan kesehatan individu tetapi juga mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan terintegrasi diperlukan untuk mengatasi berbagai faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup. Rekomendasi/ solusi untuk permasalahan tersebut adalah pertama-tama penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan. Investasi dalam infrastruktur kesehatan, pelatihan tenaga medis, dan penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Sistem kesehatan yang efisien dan terjangkau harus menjadi prioritas, termasuk program imunisasi, pencegahan penyakit menular dan perwatan primer.

Selain itu, pendidikan kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran akan gaya hidup sehat, pola makan yang baik dan kebersihan pribadi. Program edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye publik. Kurikulum sekolah, dan kampanye komunitas untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup sehat. Dalam menghadapi kompleksitas tentang ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil adalah kunci. Hanya dengan kerjasama yang kuat dan komitmen bersama, kita dapat mencapai peningkatan berkelanjutan dalam rangka harapan hidup dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan berkelanjutan.

SASARAN 3 : Menurunnya Prevalensi Stunting

Stunting masih menjadi persoalan serius dalam pembangunan Kesehatan di Kabupaten Belitung. Prevalensi stunting yang tinggi mencerminkan tidak hanya masalah gizi kronis, tetapi juga akumulasi dari berbagai persoalan sistemik, seperti kemiskinan, sanitasi yang buruk, pola asuh yang kurang tepat, dan akses layanan kesehatan ibu dan anak yang belum merata.

Capaian kinerja sasaran "**Menurunnya prevalensi stunting**" merupakan salah indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Prevalensi stunting dengan target "16,94". Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Prevalensi stunting Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Tabel 3.61 Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Prevalensi Stunting

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2025			Kategori	Akhir RPJMD 2030 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Prevalensi Stunting	Persentase	18,1	16,94	8,82	147,93	SB	11,78

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator sasaran Menurunnya prevalensi stunting, yaitu Prevalensi Stunting menunjukkan dimana tahun 2025 dari target 16,94 % terealisasi melebihi target yang diharapkan Dimana Prevalensi Stunting Belitung Tahun 2025 mencapai 8,82% tahun atau 147,93% dari target kinerja.

Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi yang berlangsung lama, yang artinya anak tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dan berkualitas sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun. Ini adalah masa 1000 Hari Pertama Kehidupan yang sangat krusial, Keterkaitan utamanya adalah ketidakmampuan keluarga untuk menyediakan makanan yang cukup, bergizi, dan beragam. Ketika sebuah rumah tangga mengalami kerawanan pangan, ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan menjadi terganggu. Akibatnya, anak-anak tidak mendapatkan nutrisi esensial seperti protein, vitamin, dan mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan optimal, Bahkan jika ketersediaan pangan secara kuantitas cukup, kurangnya pengetahuan tentang gizi seimbang dan pola asuh yang salah bisa menyebabkan anak tetap kekurangan gizi. Misalnya, pola makan yang didominasi karbohidrat tanpa protein dan sayuran yang memadai.Kondisi ini menjadi tantangan strategis karena berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat di masa depan.

Pada tahun 2025 prevalensi stunting Kabupaten Belitung berhasil di tekan hingga 8,82%, hal ini tidak terlepas dari Percepatan penurunan stunting Kabupaten Belitung yangmerupakan salah satu prioritas nasional, dengan target penurunan yang signifikan melalui pendekatan konvergensi lintas sektor, mulai dari intervensi spesifik (kesehatan dan gizi) hingga intervensi sensitive (air bersih, sanitasi, pendidikan, perlindungan sosial, dan ketahanan pangan keluarga). Stunting tidak hanya dilihat sebagai masalah kesehatan, tetapi juga masalah pembangunan yang kompleks.

Gambar 3.12.Dokumentasi kegiatan skrining HIV di tempat hiburan dan pada ibu hamil Dinas Kesehatan Kab. Belitung

Tabel 3.62 Inovasi di lingkungan Dinas Kesehatan untuk mendukung Penurunan Prevalensi Stunting Kabupaten Belitung Tahun 2025

No	Unit Kerja/Instansi	Inovasi	Penjelasan	Ket.
1	Dinas Kesehatan	AMBONG	Program pelayanan kesehatan bagi balita kurus (wasting) dan ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) melalui pemberian makanan tambahan (PMT) serta konsultasi dan pendampingan oleh petugas kesehatan kepada keluarga sasaran guna meningkatkan status gizi dan menurunkan angka stunting dan wasting.	
		PELANDUK	Program pelayanan kesehatan yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat Kabupaten Belitung dalam memperoleh pelayanan gawat darurat dan perawatan kesehatan secara terpusat, terintegrasi, serta dilaksanakan secara cepat, profesional, dan bermutu.	
		SEHATI	Program pelayanan kesehatan terintegrasi yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat Kabupaten Belitung dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan rujukan pasien melalui Loket SEHATI yang beroperasi 24 jam.	
2	Puskesmas Tanjungpandan	URISAN (Pengukuran dan Pemeriksaan Kesehatan)	Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui pemenuhan standar pelayanan kesehatan bagi usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, dan penderita diabetes melitus, sehingga dapat menjamin peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.	
		BEDULANG (Besame Posyandu Lancar Nimbang)	Program pemantauan status gizi yang dilaksanakan melalui kegiatan posyandu dengan melakukan penimbangan bayi dan balita serta pemberian konsultasi gizi bagi ibu hamil dan keluarga, sehingga permasalahan gizi dapat terdeteksi sejak dini dan segera dilakukan upaya pencegahan.	
		KOPIASIK (Skrining Kelompok Beresiko Bila Ketemu Kasus Segera Terapi Jaga Privasi ODHIV Kawal Pengobatan)	Program skrining kesehatan untuk menjaring kelompok berisiko seperti ibu hamil, LSL, waria, WPS, pasien TB, dan penasun melalui kegiatan pemeriksaan, pengobatan, serta pemantauan guna memastikan penanganan kesehatan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.	

2	Puskesmas Tanjungpandan	PELANGI (Pasien Lama di kunjungi Kembali)	Program mitigasi penyakit Tuberkulosis (TB) melalui kunjungan rumah kepada pasien TB yang telah sembuh dalam kurun waktu 1–3 tahun serta keluarga yang pernah melakukan kontak erat, guna melakukan skrining dan pemantauan sebagai upaya pencegahan penularan.	
3	Puskesmas Air Saga	. Marisahak (Mari Periksa Dahak)	Program pengendalian Tuberkulosis (TB) yang bertujuan menurunkan angka kesakitan dan kematian melalui pemutusan rantai penularan dengan meningkatkan penemuan kasus secara aktif, meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat, serta melakukan skrining dan pengambilan sampel dahak melalui kerja sama lintas program dan lintas sektor.	
		. Ketan bu Jian (Periksa Kesehatan Ibu-ibu Pengajian)	Program skrining kesehatan untuk mendeteksi secara dini penyakit tidak menular pada ibu-ibu pengajian melalui pemeriksaan tinggi badan, lingkar perut, tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat.	
		. Pindang Patin (Pemeriksaan dan Edukasi Gigi pada Calon Pengantin)	Program pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi calon pengantin melalui pemeriksaan dan edukasi kesehatan gigi di UPT Puskesmas Air Saga sebagai upaya meningkatkan kesadaran pentingnya kesehatan gigi dan mulut dalam persiapan menuju kehamilan yang sehat.	
		Pasar Berehun (Puskesmas Air Saga Bersama Pantau SPM Tahunan)	Program monitoring dan evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara berkelanjutan melalui pengumpulan data, pemantauan, dan evaluasi bersama oleh pengelola program, Kepala Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan lintas sektor.	
		KEREMUNTING (Kegiatan Rembuk Terpadu Menurunkan Stunting)	Program terpadu untuk memperkuat upaya penanggulangan stunting melalui berbagai kegiatan promotif dan preventif seperti edukasi gizi, pemberian tablet tambah darah, pemberian makanan tambahan, pemantauan pertumbuhan balita, serta kunjungan rumah bagi kelompok berisiko, dengan melibatkan kerja sama lintas program dan lintas sektor	
		SIDAK KOPI (Diskusi Dadakan Kondisi Sepi)	Program edukasi kesehatan melalui media digital berupa podcast yang disebarkan melalui media sosial untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas, sekaligus sebagai sarana promosi kesehatan dan penguatan personal branding Puskesmas.	

4	Puskesmas Perawas	Silansing (Sistem Pelayanan Vaksinasi Keliling)	Program pelayanan vaksinasi melalui kunjungan rumah bagi masyarakat yang mengalami kendala mengakses layanan di fasilitas kesehatan atau pos pelayanan, guna meningkatkan cakupan vaksinasi	
		Segar Manis (Sehat Bugar Bersama Program Penyakit Kronis)	Program pembinaan bagi peserta BPJS yang menderita penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes melitus melalui kegiatan penyuluhan kesehatan dan aktivitas bersama secara berkala guna meningkatkan pengetahuan, menjaga kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup penderita.	
		Mukat (Melakukan Investigasi Kontak TB)	Program penelusuran dan skrining terhadap kontak penderita tuberkulosis untuk meningkatkan penemuan kasus secara dini serta mencegah penularan TB di masyarakat melalui keterlibatan kader kesehatan dan pelayanan yang dapat dilakukan di fasilitas kesehatan maupun melalui kunjungan lapangan.	
5	Puskesmas Badau	Jerami (Jelajah Rumah Terintegrasi)	Program kunjungan rumah secara terpadu untuk memantau kondisi kesehatan keluarga serta melakukan intervensi sesuai permasalahan kesehatan yang ditemukan guna meningkatkan Indeks Keluarga Sehat (IKS)	
		. Siskamling MRT (Skrining Kesehatan Masyarakat Keliling Masjid dan RT)	Program skrining kesehatan bagi masyarakat usia produktif dan lansia melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan secara berkala di masjid dan lingkungan RT guna meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat.	
		Dara Keriting (Dapur Keluarga Untuk Kelola Stunting)	Program edukasi bagi ibu rumah tangga, khususnya keluarga dengan risiko stunting dan ibu hamil, melalui pelatihan dan demonstrasi pengolahan menu keluarga bergizi guna mendukung pencegahan dan penanganan stunting.	
		. Sabu Saja (Satu Bulan , Satu Jamban)	Program edukasi kesehatan melalui media digital berupa podcast yang disebarkan melalui media sosial untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas, sekaligus sebagai sarana promosi kesehatan dan penguatan personal branding Puskesmas.	
		Penjaga Di Hati (Penjaringan dan Pengendalian Penyakit Diabetes dan Hipertensi)	Program skrining dan pemantauan kesehatan bagi penderita hipertensi dan diabetes melalui pemeriksaan rutin, cek darah, serta konseling pengobatan dan gizi guna mengendalikan penyakit dan mencegah komplikasi.	

6	Puskesmas Sijuk	Lumpia Sijuk	Program pemberian sertifikat kepada balita yang telah menyelesaikan pemantauan pertumbuhan hingga usia 5 tahun sebagai bentuk apresiasi sekaligus untuk meningkatkan minat orang	
		Markisa Sijuk	Program pengelolaan sampah melalui kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan di wilayah kerja Sijuk untuk mengurangi penumpukan sampah dan menciptakan lingkungan	
		Gorong Batik	Program pencegahan penyakit DBD melalui kegiatan gotong royong memberantas jentik dengan melakukan PSN 3M Plus guna mengurangi kejadian kesakitan di masyarakat.	
		Masdarini	Program pembinaan kesehatan untuk membentuk kebiasaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga melalui kunjungan rumah dan pendampingan masyarakat	
		Penyuk Baja	Program penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan di tempat kerja untuk melakukan skrining kesehatan pekerja, termasuk pemeriksaan tekanan darah, diabetes, dan lain-lain, yang	
		Bersahabat	Program skrining kesehatan untuk masyarakat yang berobat, dengan tujuan mendeteksi batuk sejak dini agar dapat mencegah risiko TBC dan menghindari penyakit yang lebih parah.	
		Doger Pedes	Program home visit yang melaksanakan kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan kemandirian, pengetahuan, serta hubungan antara tenaga medis dan	
		Ngenjugak	Program skrining dan kunjungan rumah untuk mendeteksi dini penyakit tidak menular, memberikan pelayanan standar bagi penderita hipertensi dan diabetes melitus, serta	
		Batu Bedil	Program pembentukan grup calon pendonor darah bagi ibu hamil berisiko tinggi, sehingga darah siap tersedia sewaktu-waktu saat dibutuhkan untuk mendukung keselamatan ibu	

7	Puskesmas Tanjung Binga	Healthy Traveling by SIMPKI (Wisata Sehat oleh Keluarga Simpor Laki)	Program pembinaan dan skrining kesehatan bagi pelaku dan objek wisata di wilayah UPT Puskesmas Tanjung Binga, termasuk pemeriksaan tekanan darah, berat badan, lingkar pinggang, kolesterol, gula darah, asam urat, serta IVA test, sekaligus memastikan penerapan protokol kesehatan dan standar layanan kesehatan di sektor wisata.	
		Plesir Simpki SEHATI (Patroli Ambulans Air SIMPKI SEHATI)	Program patroli ambulans air untuk memberikan pertolongan cepat pada kondisi sakit atau kecelakaan bagi wisatawan dan pelaku wisata di Pantai Tanjung Kelayang dan pulau sekitarnya, dengan koordinasi lanjutan ke UGD UPT Puskesmas Tanjung Binga untuk rujukan jika diperlukan.	
		Pelayanan Akupresur dan Pijat Relaksasi	Program layanan kesehatan tradisional yang memberikan akupresur dan pijat relaksasi kepada pasien yang dirujuk oleh dokter sebagai bagian dari pengobatan dan pemulihan kesehatan.	
		Kerapu Asam Garam (Kreasi ramuan jamu dan asuhan mandiri TOGA Masyarakat)	Program pelayanan kesehatan tradisional yang menyajikan ramuan jamu (Ramuan Seleraja) kepada pasien dan pengunjung UPT Puskesmas Tanjung Binga, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara kesehatan melalui asuhan mandiri TOGA dan layanan akupresur yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien.	
		Galeri SIMPKI	Program promosi dan pembinaan bagi pelaku UMKM, menampilkan serta menjual produk industri rumah tangga pangan, industri kreatif, dan ramuan tradisional/jamu binaan Puskesmas kepada seluruh pengunjung.	
		TANJAK Si SIMPKI (Tanya Jawab Kesehatan Streaming bersama Simpor Laki)	Program penyuluhan kesehatan berbasis media sosial yang menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat secara daring	

		Cempedak Masak (Cek Penyakit Tidak Menular di Hari Bemasak)	Program skrining kesehatan usia 15–59 tahun yang dilaksanakan secara terpadu di lokasi pesta atau kenduri, meliputi pemeriksaan fisik, laboratorium sederhana, konseling kesehatan, dan rujukan bila diperlukan, dengan tujuan meningkatkan pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular berbasis peran serta masyarakat.	
		Peyek Ikan (Penyuluhan Edukasi dan Informasi di Rawat Jalan)	Program penyuluhan bagi pasien rawat jalan untuk memberikan informasi dan edukasi kesehatan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat.	
		Mutik Sahang (Mutik Saran dan Harapan Pengunjung)	Program pengumpulan saran dan harapan dari pasien maupun pengunjung Puskesmas Tanjung Binga untuk meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas.	
		Mempelam (Menu GERMAS untuk Pasien Melampun)	Program penyajian makanan sehat sesuai prinsip GERMAS bagi 20 pasien antrian pertama di rawat jalan UPT Puskesmas Tanjung Binga, dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan dan mempromosikan pola hidup sehat.	
		PELUK MESRA SIMPKI (Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Serentak oleh Keluarga Simpor Laki)	Program kunjungan lapangan lintas program untuk seluruh siklus hidup masyarakat, meliputi pemeriksaan tekanan darah, berat dan tinggi badan, skrining kesehatan, pemeriksaan darah, serta edukasi kesehatan, dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal dan mandiri.	
8	Puskesmas Membalong	. Begadai (Begalor Bujang Dayang)	Program skrining dan edukasi kesehatan bagi remaja usia 10–18 tahun di wilayah kerja Puskesmas Membalong melalui Posyandu Remaja, meliputi pemeriksaan tekanan darah, berat dan tinggi badan, lingkar perut, lingkar lengan, cek Hb, serta pemberian informasi, edukasi, dan komunikasi (KIE) terkait kesehatan reproduksi untuk mencegah pernikahan dini dan kenakalan remaja.	
		. Ceklis Rupa (Ceklis 10 indikator Rumah Tangga)	Program pemantauan rumah tangga di wilayah kerja Puskesmas Membalong untuk menilai dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalani Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui kunjungan rumah dan pemeriksaan 10 indikator PHBS.	

		Bekemas (Bejamban Kerjasama Lintas sektor)	Program peningkatan akses jamban sehat bagi seluruh rumah tangga di wilayah kerja Puskesmas Membalong untuk mengurangi penyakit berbasis lingkungan akibat BAB sembarangan dan mendukung penerapan PHBS.	
		SIBIRU (Sweeping Ibu Hamil Baru	Program penyuluhan bagi pasien rawat jalan untuk memberikan informasi dan edukasi kesehatan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat.	
		Sirih Merah (Cek tensi dan Gula darah dari rumah ke rumah)	Program skrining kesehatan rumah ke rumah bagi masyarakat usia 15–59 tahun untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular melalui pemeriksaan tekanan darah, berat dan tinggi badan, lingkar perut, gula darah, serta pemberian edukasi kesehatan (KIE).	
		Kawal Imunisasi (Kartu jadwal Imunisasi Bayi dan Baduta)	Program pemberian kartu jadwal imunisasi bagi orang tua bayi dan balita di posyandu, untuk memudahkan pengingat waktu imunisasi sesuai usia, meningkatkan cakupan imunisasi, dan mencegah penyakit PD3I.	
		Perawan Ceking (Peduli Rahim wanita dengan cek IVA keliling)	Program skrining dini kanker leher rahim bagi wanita usia subur yang sudah menikah melalui pemeriksaan IVA menggunakan asam cuka, dengan tujuan meningkatkan capaian IVA test dan deteksi dini kanker leher rahim.	
		. Gerubak (Gerakan orang tua peduli 1000 hari kehidupan)	Program edukasi bagi ibu hamil K1 dan peserta kelas ibu hamil untuk meningkatkan pelayanan preventif terkait stunting, melalui penyuluhan (KIE) dengan tujuan menurunkan angka stunting.	
9	Puskesmas Simpang Rusa	SANGU KETAN (Sambil nunggu antrian nonton video kesehatan)	Program penyuluhan kesehatan di ruang tunggu pasien melalui pemutaran video tentang kesehatan dan pencegahan penyakit, bertujuan meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga selama menunggu antrian.	
		MARTABAK (Mari Akselerasi Pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis)	Program pencegahan TBC bagi masyarakat sehat yang memiliki kontak erat dengan penderita positif TBC, melalui investigasi kontak, pemeriksaan tuberkulin, dan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis sesuai risiko untuk menurunkan beban penyakit TBC.	

		CEMARA (Cek Kesehatan Masyarakat Ramai)	Program skrining kesehatan bagi masyarakat usia 15–59 tahun untuk mendeteksi faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) melalui wawancara, pengukuran antropometri, tekanan darah, pemeriksaan penglihatan dan pendengaran, skrining PUMA untuk perokok, pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, konseling, serta rujukan bila diperlukan, dengan tujuan meningkatkan perilaku CERDIK dan mengendalikan PTM.	
		DUTA HP (hiDUp Tanpa Hipertensi)	Program edukasi digital tentang hipertensi melalui media sosial, khususnya YouTube, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya hipertensi dan cara pencegahannya dengan penyampaian materi secara visual dan audio yang mudah dipahami.	
10	Puskesmas Selat Nasik	Asyira	Program peningkatan kebugaran dan pola hidup sehat bagi semua kelompok usia anak-anak, remaja, usia produktif, dan lansia, melalui senam bersama, penyuluhan, dan pemeriksaan kesehatan untuk menurunkan angka kesakitan akibat penyakit tidak menular.	
11	RSUD dr.H.Marsidi Judono	Belungkak	Program pelayanan administrasi untuk membantu pasien atau keluarga yang melahirkan di UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono memperoleh akta kelahiran bayi baru lahir tanpa harus datang ke Dinas Dukcapil, dengan proses pengurusan melalui koordinasi langsung dengan Disdukcapil setempat dalam waktu ±7 hari kerja.	
		Simino	Program pendaftaran rawat jalan online melalui aplikasi SIMINO atau website resmi UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono, yang memudahkan pasien memonitor antrian dan jadwal dokter sehingga dapat datang langsung pada hari pelayanan tanpa antre panjang.	Awal Tahun 2026 kemungkinan layanan sudah dialihkan ke Aplikasi BPJS Kesehatan
		Sehati	Program pelayanan administrasi yang mempermudah pasien atau keluarga peserta BPJS PBI dalam proses perujukan rawat jalan maupun rawat inap ke luar daerah Kabupaten Belitung, sehingga memberikan keringanan dan kemudahan akses layanan kesehatan.	

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, 2025

Stunting merupakan isu yang secara konsisten muncul dan diperkuat dalam hampir seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun nasional. RPJMD Kabupaten Belitung 2025–2029 perlu menempatkan isu ini sebagai prioritas strategis yang ditangani secara lintas sektor, berorientasi keluarga dan komunitas, serta berbasis data dan evaluasi kinerja secara berkala. Penurunan stunting bukan sekadar indikator keberhasilan sektor kesehatan, tetapi juga cermin dari efektivitas tata kelola pembangunan daerah secara menyeluruh.

SASARAN 4 : Meningkatnya Pemerataan dan Pendapatan Masyarakat

Kemiskinan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Belitung yang berdampak pada berbagai aspek sosial, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Meskipun tren penurunan angka kemiskinan secara umum menunjukkan perbaikan, namun masih terdapat kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dan belum sepenuhnya tersentuh oleh program perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi. Ketimpangan pendapatan, terbatasnya kesempatan kerja, serta akses terbatas terhadap layanan dasar turut memperkuat struktur kemiskinan yang ada.

Capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya pemerataan dan pendapatan masyarakat"** merupakan salah indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator pertama Pengeluaran per kapita dengan target Rp. 14.651.000, indikator kedua Tingkat pengangguran terbuka target 3,74 %, Indeks Gini dengan target 0,241. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Prevalensi stunting Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Tabel 3.63 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemerataan dan Pendapatan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2025			Kategori	Akhir RPJMD 2030 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Pengeluaran per Kapita	Rupiah	14.449.000	14.651.000	14.559.000	99,37	SB	15.664.605
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	3,88	3,74	3,64	102,67	SB	2,82
3	Indeks Gini	Nilai	0,248	0,241	0,205	114,94	SB	0,21

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian sasaran Meningkatnya pemerataan dan pendapatan masyarakat,dengan indikator sasaran pertama yaitu Pengeluaran per kapita menunjukkan dimana tahun 2025 dari target Rp.14.449.000 belum terealisasi sesuai target yang diharapkan Dimana Pengeluaran per kapita Kabupaten Belitung Tahun 2025 sebesar Rp. 14.559.000 atau 99,37% dari target kinerja.

Tabel 3.64 Perkembangan Capaian Pengeluaran per kapitaKabupaten Belitung terhadap Kab/Kota di Prov. Kep. Babel dan Nasional Tahun 2025

PROV/KAB/KO	PENGELUARAN PER KAPITA (RIBU RUPIAH)		
	2023	2024	2025
KEP. BANGKA BELITUNG	**13.589**	**13.667**	**13.837**
Bangka	13.146	13.205	13.411
Belitung	**14.365**	**14.449**	**14.559**
Bangka Barat	13.105	13.199	13.380
Bangka Tengah	13.643	13.677	13.768
Bangka Selatan	12.627	12.718	12.920
Belitung Timur	12.536	12.610	12.694
Pangkal Pinang	16.734	16.750	16.856
Nasional	**11.899**	**12.341**	**12.802**

Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Bangka Belitung, 2026

Dari tabel terlihat bahwa pada tahun 2025, capaian Pengeluaran per kapitaKabupaten Belitung terus meningkat, berada diatas pengeluasran per kapita provinsi Bangka Belitung dan juga diatas capaian pengeluaran per kapita nasional. Pada tahun 2025, capaian Pengeluaran per kapita Kabupaten Belitung Rp. 14.559.000, sedangkan Pengeluaran per kapita Provinsi Kep Babel yang sebesar Rp.13.873.000, sedangkan capaian nasional sebesar Rp. 12.802.000.

Tingginya pengeluaran per kapita ini dipengaruhi oleh tingkat inflasi, walaupun pada November 2025, berdasar catatan BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tingkat inflasi y-on-y terendah terjadi di Tanjungpandan sebesar 1,67 persen dengan IHK sebesar 107,05. Namun inflasi y-on-y nflasi y-on-y Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi di Tanjungpandan sebesar 1,67 persen dengan IHK sebesar 107,05. Namun inflasi y-on-y nflasi y-on-y Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks beberapa kelompok

pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,30 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,15 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,31 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,08 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,78 persen; kelompok transportasi sebesar 0,56 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,54 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,92 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,93 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks atau mengalami deflasi yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,29 persen dan kelompok pendidikan sebesar 12,85 persen.

Rata-rata pengeluaran dan tingkat inflasi yang tinggi ini merupakan masalah yang harus dihadapai masyarakat Kabupaten Belitung. Masyarakat Kabupaten Belitung tentunya harus memiliki pendapatan per bulan dari hasil kegiatan ekonomi mereka yang lebih tinggi dari pengeluaran tersebut. Hal ini sangat bergantung pada kondisi ketengakerjaan Kabupaten Belitung.

Kemudian dari tabel capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pemerataan dan Pendapatan Masyarakat dengan indikator sasaran kedua yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka dapat diketahui bahwa capaian sasaran tahun 2025 dari target 3,74% terealisasi sesuai target yang diharapkan Dimana Pengeluaran per kapita Kabupaten Belitung Tahun 2025 sebesar 3,64% atau 102,67% dari target kinerja.

Tabel 3.65 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota, 2024 - 2025 di Prov. Kep. Babel

KABUPATEN/KOTA /PROVINSI	TPT/UR		TPAK/LFPR	
	2024	2025	2024	2025
Bangka	4,91	4,75	67,92	67,93
Belitung	**3,88**	**3,64**	**68,18**	**69,18**
Bangka Barat	4,88	4,49	70,36	71,28
Bangka Tengah	4,23	4,21	70,22	70,26
Bangka Selatan	4,94	4,48	69,12	71,80
Belitung Timur	2,63	3,05	70,56	69,10
Pangkalpinang	5,98	5,73	66,99	67,10
Kep. Bangka Belitung	**4,63**	**4,45**	**68,87**	**69,38**

Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Bangka Belitung, 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belitung tahun 2025 sebesar 3.64 menurun dari tahun 2024 sebesar 0,24%. Dilihat dari sisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), TPAK Kabupaten Belitung tahun 2025 sebesar 69,18% artinya sebesar 69,18 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. TPAK Kabupaten Belitung tahun 2025 ini meningkat dari tahun 2024 yang sebesar 68,18% Sementara TPAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 sebesar 69,38%.

Perluasan Kesempatan Kerja dengan 4 (empat) arah kebijakan, yaitu: meningkatkan keterampilan pencari kerja di bidang pariwisata, meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat miskin, meningkatkan serapan tenaga kerja lokal dan meningkatkan pemuda yang mandiri dan kreatif. Melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja di bidang pariwisata dilakukan pembekalan sektor kepariwisataan terhadap Sumber Daya Manusia Peserta Pembekalan sektor Kepariwisataan.

Selanjutnya dari tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pemerataan dan pendapatan Masyarakat dengan indikator sasaran ketiga yaitu Indeks Gini dapat diketahui bahwa capaian sasaran tahun 2025 dari target 0,241 terealisasi sesuai target yang diharapkan Dimana Indeks Gini Kabupaten Belitung Tahun 2025 sebesar 0,205 atau 114,94% dari target kinerja.

Nilai Rasio Gini Kabupaten Belitung tahun 2025 berada di angka 0,205. Angka tersebut menunjukkan pengeluaran penduduk Kabupaten Belitung pada tahun 2025 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah karenaRasio Gini atau Indeks Gini merupakan suatu indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada suatu daerah. Semakin tinggi atau besar Rasio Gini, semakin tinggi pula tingkat ketidakmerataannya (distribusi pendapatannya tidak merata) dan sebaliknya jika semakin kecil Rasion Gini semakin rendah tingkat ketidak merataannya (distribusi pendapatannya semakin merata).

Distribusi pendapatan merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu daerah. Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan suatu daerah seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Rasio Gini Kabupaten Belitung berfluktuasi dari 0,195 pada tahun 2021 naik menjadi 0,237 tahun 2022, kemudian meningkat hingga mencapai angka 0,253 pada tahun 2023 dan turun menjadi 0,248 pada tahun 2024. Pada tahun 2025 menurun menjadi 0,205.

Sementara itu, guna terus menekan angka capaian rasio gini, Pemerintah Kabupaten Belitung berupaya memperkuat usaha mikro. Karena UKM menjadi pilar penting dalam membangun perekonomian masyarakat. Sejumlah program seperti pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) dan pengembangan UMKM dilakukan untuk mencapai hal tersebut.

Pemerintah Kabupaten Belitung juga berupaya menekan angka capaian indeks gini melalui pemberian bantuan kepada masyarakat dari segi pengeluaran seperti dalam sektor pendidikan, pemberian beasiswa Pendidikan dan program beasiswa simpor, kemudian ada bantuan-bantuan sosial dan sejenisnya. Dan menjamin akses-akses barang kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dengan program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Ketimpangan ekonomi pada dimensi distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat. Fenomena ini telah menjadi perhatian publik, sehingga upaya evaluasi yang sangat mendesak dilakukan. Dari hasil evaluasi diharapkan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya juga akan membawa konsekuensi berkurangnya tingkat ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dapat sejalan dengan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Apabila ketimpangan ini dibiarkan semakin melebar maka akan semakin mendistorsi hasil pembangunan.

Oleh karena itu upaya mengetahui besaran ketimpangan pengeluaran antar golongan penduduk maupun secara spasial perlu dilakukan. Indeks Gini (G*ini Ratio*) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Data Indeks gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung dan Nasional tahun 2023 sampai tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.66 Perbandingan Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2025

Provinsi/Kab/ Nasional	Perbandingan Gini Ratio		
	2023	2024	2025
KEP. BANGKA BELITUNG	0,245	0,235	0,214
Belitung	**0,253**	**0,248**	**0,205**
Nasional	0,388	0,381	0,363

Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Bangka Belitung, 2026

Berdasarkan data Indeks Gini Kabupaten Belitung untuk tahun 2023 hingga 2025, terlihat adanya tren fluktuasi ketimpangan pendapatan selama lima tahun berturut-turut. Indeks Gini Kabupaten Belitung pada tahun 2023 berada di angka 0,253 dan mengalami kontraksi di tahun 2022 menjadi 0,248, kemudian di tahun 2025 kesenjangan pendapatan di kalangan masyarakat Kabupaten Belitung menurun dengan angka 0,205 yang berarti adanya perbaikan tingkat kesenjangan pendapatan tersebut.

Capaian ketimpangan pendapatan di Kabupaten Belitung ini terlihat berada di bawah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2025. Namun pada tahun 2022 hingga 2024, ketimpangan pendapatan di Kabupaten, yang mengartikan tingkat kesenjangan pendapatan di Kabupaten Belitung masih berada dibawah kesenjangan pendapatan rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk atau Indeks Gini di Kabupaten Belitung berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Dengan Indeks Gini sebesar 0,205, Kabupaten Belitung masuk dalam kategori pemerataan pengeluaran yang relatif tinggi antar penduduk atau kesenjangan pendapatan antar penduduk sangat rendah bila dibandingkan dengan provinsi dan nasional. Indeks Gini yang menurun menunjukkan pendapatan antar kelompok masyarakat semakin merata.

Struktur ekonomi Kabupaten Belitung yang mempengaruhi nilai gini ratio adalah Sektor Agraris, dimana Lebih dari 27,10 persen perekonomian didukung oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Bahwa ketimpangan di wilayah agraris lebih kecil dibandingkan dengan wilayah industri karena rendahnya level penghasilan yang diterima oleh individu di wilayah agraris tersebut. Adapun tingkat ketimpangan mengalami peningkatan pada wilayah dengan struktur perekonomian yang bercorak industri.

Berdasarkan Perkembangan rasio gini Kabupaten Belitung cendrung fluktuatif, maka upaya yang dilakukan antara lain :

1. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian untuk mengejar ketertinggalan dari sektor lainnya;
2. Perlu adanya upaya untuk mendorong transfer surplus tenaga kerja di sektor pertanian ke sektor ekonomi kreatif dengan mengadakan pelatihan maupun kursus keterampilan termasuk penguatan pangsa pasar;
3. Hampir separuh dari tenaga kerja yang ada berlatar belakang tingkat pendidikan menengah ke bawah. Oleh karena itu, perlu dibuat program untuk menjaga tingkat APM (Angka Partisipasi Murni) agar tidak turun dan meningkatkan target APM untuk level Sekolah Menengah;

4. Dalam jangka pendek, intervensi terhadap kelompok pengeluaran terbawah dapat dilakukan dengan melanjutkan program raskin maupun bantuan tunai. Namun demikian kebijakan ini perlu selalu dimonitor dan dievaluasi mengingat dalam jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan dan inefisiensi anggaran;
5. Perlu dibuatkan program pengelolaan ekonomi (pariwisata) berbasis komunitas dengan mengedepankan modal sosial (kultur sosial). Program tersebut harus mengutamakan keterlibatan dari kelompok masyarakat.

TUJUAN 2 : Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Sektor Unggulan dan Potensial

Capaian kinerja tujuan **"Meningkatnya daya saing ekonomi sektor unggulan dan potensial"** diukur melalui pencapaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi. Capaian kinerja tujuan dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.67 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Sektor Unggulan dan Potensial

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2025			Kategori	Akhir RPJMD 2030 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	1,84	2,11	4,06	192,42	SB	6,46

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja tujuan melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD. Target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Belitung tahun 2025 adalah 2,11 dan terealisasi sebesar 4,06 dengan capaian kinerja sebesar 192,42% dengan kategori **SANGAT BERHASIL**.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari kontribusi sektor-sektor utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta Industri Pengolahan. Kedua sektor ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Kabupaten Belitung pada tahun 2025, dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 28,01% dan sektor industri pengolahan sebesar 12,68%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tradisional yang berbasis sumber daya alam masih menjadi pilar utama dalam perekonomian daerah.

PDRB ADHK (Pada Tabel 3.12) yang mengalami peningkatan dari Rp 7.638,90 milyar di tahun 2024 menjadi Rp 7.948,69 milyar di tahun 2025. Begitu pula dengan pencapaian PDRB ADHB Kabupaten Belitung pada tahun 2025 mencapai Rp 15.243,01 milyar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 14.124,70 milyar.

Tabel 3.68 Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitung 2023 – 2025, ADHB

LAPANGAN USAHA	2023	2024*	2025**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,46	27,15	28,01
Pertambangan dan Penggalian	4,92	4,86	5,42
Industri Pengolahan	12,99	12,57	12,68
Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,14	0,14
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03
Konstruksi	12,15	11,7	10,48
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,61	10,33	10,72
Transportasi dan Pergudangan	8,26	8,12	7,67
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,13	4,23	4,29
Informasi dan Komunikasi	3,52	3,71	3,71
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,46	2,38	2,32
Real Estat	3,06	3,07	2,97
Jasa Perusahaan	0,35	0,36	0,36
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,17	6,46	5,95
Jasa Pendidikan	1,98	2,12	2,12
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,92	1,89	1,87
Jasa Lainnya	0,83	0,88	0,91

*Catatan : *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara*
Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2026

Gambar 3.13. Pelaksanaan Pemberian bantuan Sarana dan Prasarana Penangkapan ikan

Gambar 3.14. Pelaksanaan Pemberian bantuan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan

Gambar 3.15. Pelaksanaan Penguatan daya saing sektor Perikanan

Gambar 3.16. Pelaksanaan Bimtek dan Pembinaan pelaku usaha perikanan

Gambar 3.17. Pelaksanaan Bazar Ikan

Gambar 3.18. Pelaksanaan operasional kapal perikanan dalam rangka pengendalian SDP

Gambar 3.19. Pendampingan Penanaman Padi di Desa Cerucuk

Gambar 3.20. Distribusi Bantuan Sapi dan penyaluran bantuan vaksin pada Kelompok Tani Sumber Jaya Makmur Desa Bantan Kecamatan Membalong

Gambar 3.21. Pembagian Bibit Lada Bersertifikat ke Gapoktan Maju Bersama Kecamatan Membalong

Gambar 3.22. Pelaksanaan CPCL Padi Gogo di Kecamatan Membalong

Adapun faktor pendukung laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

- Pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi berasal dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan sektor andalan Kabupaten Belitung dalam menunjang pertumbuhan ekonomi;
- Iklim usaha yang kondusif bagi usaha perdagangan dan industri yang sudah ada maupun bagi investasi baru, sektor industri dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui nilai tambah yang dihasilkan;
- Meningkatnya pangsa sektor industri pengolahan di pasar domestik;
- Meningkatnya penerapan standarisasi produk industri sebagai penguat daya saing produk industri;
- Penetapan Kabupaten Belitung sebagai salah satu dari 10 Destinasi Wisata Nasional menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi investor terutama yang begerak di sektor industri pariwisata;
- Stabilitas sosial, politik dan keamanan yang terjaga;
- Bonus demografi yang dimiliki Kabupaten Belitung.

Sedangkan faktor penghambat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

- Tingkat inflasi yang masih tinggi;
- Rendahnya daya tarik investasi dan kurangnya kemandirian fisKal yang mempengaruhi pendapatan yang mampu diperoleh daerah untuk menjalankan perekonomian, termasuk penyediaan barang publik;
- Kualitas SDM yang belum memadai, rendahnya angka partisipasi murni dan lama sekolah mempengaruhi kualitas SDM yang akhirnya mempengaruhi produktivitas.

Setelah memperhatikan faktor pendukung dan faktor penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran di masa yang akan datang, upaya peningkatannya sebagai berikut :

- Upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, dan industri;
- Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan;
- Mendorong peningkatan investasi yang sesuai dengan potensi daerah dengan memberi kemudahan-kemudahan seperti proses perijinan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- Mendorong pengembangan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan memberi kesempatan sektor swasta untuk berinovasi sehingga memberikan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah;

- Meningkatkan kuaitas SDM dengan program-program pelatihan

Tabel 3.69 Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 2

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 2 Meningkatnya daya saing ekonomi sektor unggulan dan potensial	Strategi Misi 2 Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Unggul dan Potensial	1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif 2. Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kesejahteraan pelaku sektor unggulan 3. Pengembangan destinasi, promosi, pelestarian budaya, penguatan sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur

SASARAN 5 : Meningkatnya Investasi Daerah

Investasi sangat dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, maka perlu perbaikan kecepatan pelayanan dan kemudahan berusaha. Capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya Investasi Daerah"** merupakan salah satu indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Nilai Investasi dengan target Rp 1.200.000.000.000,00. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran meningkatnya investasi Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Tabel 3.70 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Investasi Daerah (juta rupiah) Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2025			Kategori	Akhir RPJMD 2030 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Nilai Investasi (juta rupiah)	Skala	1.116.727,00	1.200.000,00	730.000	60,83	C	2.200.000

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi indikator sasaran meningkatnya investasi yaitu nilai investasi tahun 2025 sebesar Rp 1.200.000.000.000,00 dengan capaian sebesar 60,83 % atau berkategori CUKUP.

Rendahnya nilai investasi daerah menjadi salah satu tantangan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung. Kondisi ini ditandai oleh terbatasnya realisasi penanaman modal, minimnya diversifikasi sektor investasi, serta belum optimalnya kemudahan berusaha *(ease of doing business)* dan ekosistem investasi yang kompetitif. Padahal, investasi merupakan pendorong penting bagi penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Sejalan dengan Kabupaten Belitung, pemerintah provinsi mendorong penguatan infrastruktur pendukung investasi, promosi potensi

unggulan daerah (termasuk tambang, pariwisata, dan perikanan), serta harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Di samping itu, penguatan kapasitas daerah dalam pelayanan perizinan dan pemberian insentif menjadi bagian penting dari strategi peningkatan investasi.

Berikut ini tersaji tabel perbandingan rekapitulasi investasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 :

Tabel 3.71 Perbandingan Rekapitulasi Investasi Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Jenis Penanaman Modal	Nilai Investasi Tahun 2025 (Rp)	Nilai Investasi Tahun 2024 (Rp)
1	Penanaman Modal Asing (PMA)	412.763.720.540	68.004.736.430
2	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	316.998.475.725	1.048.722.376.075
JUMLAH		729.762.196.265	1.116.727.112.505

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian 2026

Tingginya dukungan pemerintah daerah dalam menjaring investor yang menanamkan usahanya di Kabupaten Belitung, hal ini dibuktikan dengan berjalannya program KERISI (Kios, Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Terintegrasi) yang menjadi tanggungjawab Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung untuk mempermudah pelayanan informasi perizinan investasi menyasar sampai dengan seluruh desa di Kabupaten Belitung.

Gambar 3.23. Penandatanganan Komitmen Program "KERISI" (Kios, Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Terintegrasi)

Adapun faktor penghambat Nilai Investasi Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

- Belum tersebarnya investasi ke seluruh Kabupaten Belitung;
- Sektor/lapangan usaha yang diminati investor untuk menanamkan usahanya banyak berada pada sektor tersier;
- Belum optimalnya perencanaan penanaman modal;
- Belum optimalnya pelaksanaan kemitraan antara investor besar dengan pelaku usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil.

- Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu belum spenuhnya diikuti dengan perubahan-perubahan regulasi, baik regulasi terkait langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan maupun OPD Teknis yang terkait perizinan dan non perizinan. Hal tersebut mengakibatkan perizinan dan non perizinan kurang efektif, karena regulasi seperti SOP, SPP, SPM yang menjadi dasar pemberian pelayanan lintas OPD Teknis belum ada.;
- Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara online (*Online Single Submission*) terkendala oleh pemenuhan komitmen dari OPD Teknis. Pemenuhan komitmen OSS sebagian besar belum dilakukan secara online.
- Masih rendahnya kesadaran investor untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjaga capaian kinerja sasaran dimasa yang akan datang, upaya peningkatannya sebagai berikut:

- Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal dengan melibatkan seluruh *stakeholder*
- Memberikan kemudahan berinvestasi di kabupaten belitung dengan meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan bagi calon investor *(Ease of Doing Business)*
- Meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi yang lebih efisien dan efektif guna mendorong pesebaran investasi di Kabupaten dengan mempertimbangkan karakter dan kondisi geografis daerah
- Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor dengan melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi penanganan permasalahan investasi bagi perusahaan PMA/PMD.
- Meningkatkan promosi investasi daerah;

SASARAN 6 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Prima

Tabel 3.72 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Prima Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2025			Kategori	Akhir RPJMD 2030 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Pertumbuhan sektor prima (Pertanian, Perkebunan, Perikanan)	Persentase	3,78	3,8	3,78	99,47	SB	4,41

Ketergantungan ekonomi Kabupaten Belitung pada sektor-sektor tertentu seperti pariwisata, pertambangan, dan perikanan tangkap menjadikan perekonomian daerah rentan terhadap fluktuasi pasar, krisis global, dan tekanan lingkungan. Diversifikasi ekonomi yang belum berkembang optimal menjadi hambatan dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah lokal, dan menciptakan struktur ekonomi yang tangguh dan inklusif. Sementara potensi lokal seperti pertanian organik, ekonomi kreatif, pengolahan hasil laut, dan produk berbasis kearifan lokal belum tergarap secara maksimal.

Capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya pertumbuhan sektor prima"** merupakan salah satu indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Pertumbuhan sektor prima (Pertanian, Perkebunan, Perikanan)dengan target 3,80%. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatnya pertumbuhan sektor prima Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi indikator sasaran Pertumbuhan sektor prima (Pertanian, Perkebunan, Perikanan) yaitu nilai investasi tahun 2025 sebesar 3,80% dengan realisasi 3,78 % capaian sebesar 99,47 % atau berkategori **SANGAT BERHASIL.**

Pemerintah daerah telah memberikan dukungan spasial yang sangat relevan dengan agenda diversifikasi ekonomi. Beberapa kawasan budidaya telah ditetapkan untuk mendukung pengembangan pertanian, perikanan, agrowisata, dan industri rumah tangga. Pengembangan kawasan wisata terpadu, pelabuhan perikanan, dan sentra produksi pangan menjadi bagian dari strategi struktur ruang yang mendukung transformasi ekonomi daerah.

Dengan demikian, kurangnya diversifikasi sektor ekonomi menjadi isu strategis yang perlu segera dijawab oleh RPJMD Kabupaten Belitung 2025–2029. Pembangunan ekonomi tidak cukup hanya bertumpu pada sektor unggulan lama, tetapi perlu mendorong tumbuhnya sektor-sektor baru berbasis potensi lokal, teknologi, dan keberlanjutan. Langkah ini penting untuk meningkatkan resiliensi ekonomi daerah, memperluas basis penerimaan daerah, serta menciptakan peluang kerja yang merata dan berkeadilan.

Berikut kontribusi sektor pertanian, kehutanan, perikanan terhadap PDRB Kabupaten Belitung, selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

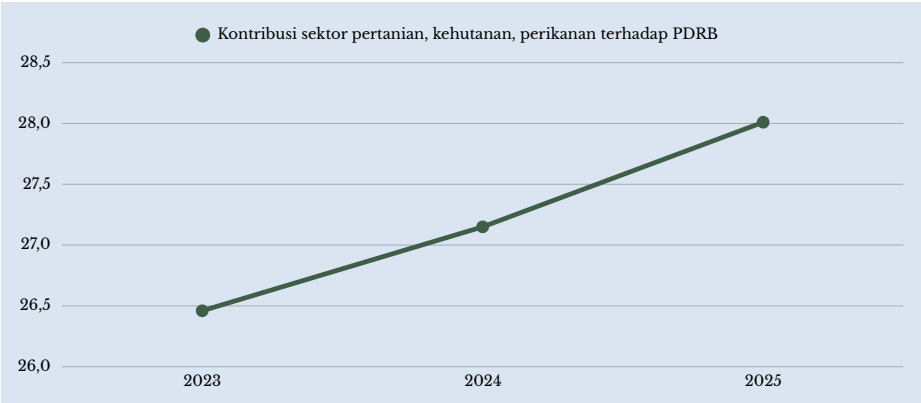

Grafik 3.12 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pertumbuhan sektor prima Tahun 2025

Sumber : BPS Kabupaten Belitung 2026

Sektor Pertanian memiliki peran yang penting terhadap kontribusi PDRB di Kabupaten Belitung, karena merupakan kontributor terbesar. Selama kurun waktu 2023–2025, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memperlihatkan kecenderungan mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 27,15%, pada tahun 2024 meningkat menjadi 28,01%. Mengingat sektor ini merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Kabupaten Belitung, maka perlu strategi dn kebijakan khusus untuk meningkatkan kinerjanya.

Produksi tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis tanaman selama kurun waktu 2 (dua) tahun, tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.73 Produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim menurut jenis tanaman di Kabupaten Belitung (kuintal) tahun 2024–2025

JENIS TANAMAN	2024	2025
Bawang Daun	1012,65	1289,37
Bawang Merah	30,00	8,70
Bayam	3416,34	3866,16
Buncis	1879,40	1216,10
Cabai Keriting	4509,86	4632,10
Cabai Rawit	7327,45	5198,98
Kacang Panjang	4341,50	4209,33
Kangkung	5360,31	5573,12
Ketimun	5561,05	4948,10
Petai	4175,99	4609,50
Terung	6057,92	4841,06
Tomat	1725,10	2113,50

Sumber : BPS Kab. Belitung - Kabupaten Belitung Dalam Angka 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim menurut jenis tanaman tahun 2025 tertinggi adalah kangkung yaitu 5.573,12 kuintal, dan terendah bawang merah yaitu 8,70 kuintal.

Produksi tanaman Biofarmaka Menurut Jenis tanaman di Kabupaten Belitung (kg) selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, tersaji seperti tabel berikut :

Tabel 3.74 Produksi tanaman Biofarmaka menurut jenis tanaman (kg) tahun 2023–2025

Jenis Tanaman	2023	2024	2025
Jahe	101.260	35.278	13.195
Kencur	45.606	17.398	7.533
Kunyit	67.337	37.664	17.308
Laos/Lengkuas	236.158	38.300	19.804

Sumber : BPS Kab. Belitung - Kabupaten Belitung Dalam Angka 2026

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Produksi tanaman Biofarmaka Menurut Jenis tanaman di kabupaten Belitung tahun 2025 tertinggi pada produksi laos/ lengkuas yaitu 19.804 kg dan produksi terendah pada kencur yaitu 7.533 kg.

Selain meningkatkan produksi pertanian yang berkualitas dan berkelanjutan, perlu juga meningkatkan produksi perkebunan. Adapun produksi perkebunan kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir 2024-2025 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.75 Produksi Perkebunan jenis tanaman (ton) tahun 2024 dan 2025

Jenis Tanaman	2024	2025
Kelapa Sawit	13.946,37	14.899,30
Kelapa	542,5	447,21
Karet	1.984,97	1.511,81
Kopi	1.050,00	1.230,00
Kakao	-	-
Tebu	-	-
Lada	4.321,86	3.831,82
Aren	687,2	688,75

Sumber : BPS Kab. Belitung - Kabupaten Belitung Dalam Angka 2026

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa Produksi Perkebunan Jenis tanaman kelapa sawit paling tinggi diantara komoditas lainnya dan mengalami peningakatan dari 13.946,37 ton di tahun 2024 menjadi 14.899,30 ton ditahun 2025; Produksi Perkebunan terendah ada pada produksi perkebunan kelapa yaitu hanya sebesar 447,21 ton di tahun 2025.

Tabel 3.76 Produksi Daging Ternak Besar Jenis ternak (kg) Tahun 2024 dan 2025

JENIS TERNAK	2024	2025
Sapi	395.365	443.235
Kambing	20.179	21.732
Babi	56.846	55.327

Sumber : BPS Kab. Belitung - Kabupaten Belitung Dalam Angka 2026

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa Produksi daging ternak besar (kg) paling tinggi tahun 2025 adalah Daging Sapi sebesar 443.235 kg.

Tabel 3.77 Produksi Unggas menurut Jenis Unggas (kg) Tahun 2024 dan 2025

JENIS TERNAK	2024	2025
Ayam Kampung	202.811	244.994
Ayam petelur	115.640	91.575
Ayam Pedaging	4.917.859	4.432.355
Itik/Itik Manila	12.072	10.705

Sumber : BPS Kab. Belitung - Kabupaten Belitung Dalam Angka 2026

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa Produksi unggas menurut jenis unggas r (kg) paling tinggi tahun 2025 adalah Ayam Pedaging sebesar 4.432.355. kg.

Tabel 3.78 Jumlah Produksi dan Barang Keluar Perikanan Tangkap dan Budidaya Menurut Komoditas di Kabupaten Belitung (ton/bulan) Tahun 2025

JENIS	2024	2025
Tuna/ Cakalang/ Tongkol	-	108.354,20
Kakap	-	253.144,00
Cucut	-	1.750,00
Bawal	0,41	57.619,90
Teri	-	170.195,00
Lemuru	-	223.554,00
Tenggiri	-	687.738,50
Lele	89,89	-
Patin	26,69	-

Nila	9,1	
Kerapu	7,93	
Gurami	0,09	
Udang	316,31	722.928,00
Rajungan dan Kepiting		15.090,00
Kekerangan		31.021,00
Cumi-cumi sotong, dan Gurita		2.004.760,80
Kuwe		3.010,00
Baronang		200
Ekor kuning		903.867,40
Selar		41.300,00
Manyung		367.865,70
Pari		225.154,40
Lainnya		1.172.774,30

Sumber : BPS Kab. Belitung - Kabupaten Belitung Dalam Angka 2026

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa Produksi perikananan tangkap dan budidaya dengan komoditas paling tinggi (ton/bulan) tahun 2025 adalah komoditas udang sebesar 316,31 ton/bulan dan Jumlah barang keluar paling tinggi pada komoditas Cumi-cumi, Sotong dan Gurita sebesar 2.004.760,80.

Upaya pemerintah Kabupaten Belitung dalam meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani dalam bentuk persentase sebagai indikator kesejahteraan petani. Nilai tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. Nilai Tukar Petani (NTP) juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Dalam penentuan Nilai Tukar Petani (NTP) dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya luas lahan, harga jual, harga pupuk dan jumlah tanggungan keluarga.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu :

1. Dilaksanakannya kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang meliputi sarana produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan Penerapan Pertanian Terpadu;
2. Dilaksanakannya kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme kewenangan kabupaten/kota yang meliputi pembibitan tanaman secara kultur jaringan;
3. Dilaksanakannya kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota yang meliputi pengelolaan ternak dan peningkatan mutu bibit ternak melalui Inseminasi Buatan;
4. Dilaksanakannya kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain yang meliputi saprodi ternak unggas baik ayam elba maupun ayam pedaging;
5. Dilaksanakannya kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian yang meliputi pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B;
6. Dilaksanakannya kegiatan Pembanguan Prasarana Pertanian yang meliputi pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pendukung pertanian antara lain: jaringan usaha tani, jalan usaha tani, prasarana lainnya (Bank Pakan, Puskeswan, jalan produksi);
7. Dilaksanakannya kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi pengobatan, vaksinasi, surveilans, lalu lintas ternak di Kabupaten Belitung;
8. Dilaksanakannya kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi operasional puskeswan;
9. Dilaksanakannya kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang meliputi pelatihan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
10. Dilaksanakannya kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian guna mendampingi petani dalam usaha budidaya pertanian secara terpadu.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Tahun 2025 atau untuk memperbaiki kinerja tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung akan melakukan:

1. Pembinaan, pendampingan kepada petani hortikultura, khususnya timun dan nanas serta petani tanaman pangan seperti padi dan ubi kayu dalam mengelola usaha taninya agar dapat meningkatkan produksi yang nantinya akan mempercepat peningkatan NTP dengan program bantuan input usaha tani dibarengi dengan diseminasi teknologi;

2. Sinergitas lebih diperkuat lagi antara pemerintah dan petani untuk memelihara sawah dan bisa meningkat produktivitasnya dari tahun ke tahun;
3. Meningkatkan produksi sektor pertanian sekaligus menjaga kestabilan harga jual produk pertanian.

Sebagaimana yang kita ketahui adalah Pembangunan ekonomi adalah suatu proses peningkatan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan pertumbuhan penduduk dan perubahan dalam struktur ekonomi serta pemerataan pendapatan di suatu negara, karena dalam jangka panjang partumbuhan ekonomi akan menyebabkan perubahan struktur ekonomi. Jika dibandingkan perekonomian negara maju dan negara berkembang, biasanya negara-negara maju lebih mengutamakan untuk mengurangi pengangguran karena sektor industri dan jasa berperan besar dalam peningkatan pendapatan nasional dan penyediaan kesempatan kerja, sedangkan negara-negara berkembang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi berupa perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Salah satu subsektor pertanian penyumbang PDRB adalah perikanan. Secara teoritis, meningkatnya partumbuhan ekonomi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan asumsi telah terjadi peningkatan PDRB.

Dengan demikian juga dapat diartikan kalau semakin tinggi nilai persentase PDRB Sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Belitung dapat diartikan bahwa semakin tinggi juga pengaruh sektor perikanan dalam meningkatkan ekonomi Kabupaten Belitung yang didalamnya diperoleh banyak kesempatan bekerja bagi masyarakat dalam hal ini nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku sektor perikanan lainnya. Kesempatan kerja yang tinggi ini akan meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya perekonomian pelaku sektor perikanan juga semakin baik.

Upaya upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu:

1. Meningkatkan Produksi sektor perikanan baik produksi perikanan tangkap, Produksi perikanan budidaya dan produksi pengolahan hasil perikanan;
2. Meningkatkan Ketersediaan sarana dan prasarana sektor perikanan yang memadai;
3. Kemudahan dalam perizinan dan persediaan bahan baku operasional bagi pelaku sektor perikanan;
4. Meningkatkan SDM sektor perikanan yang berkualitas;
5. Melakukan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan yang baik.

Melihat dari realisasi tahun 2025 capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung/disebabkan antara lain oleh:

1. Produksi perikanan tangkap, Budidaya dan Pengolahan hasil perikanan yang masih relatif tinggi;

2. Ketersediaan sarana dan prasarana sektor perikanan yang memadai;
3. Kemudahan dalam perizinan dan persediaan bahan baku operasional;
4. SDM sektor perikanan yang berkualitas;
5. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan yang baik.

Upaya upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2025 untuk mendukung arah kebijakan meningkatkan produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan antara lain :

- Ketersediaan BBM, kebutuhan pokok untuk melaut dan keperluan lainnya yang mudah diperoleh nelayan sehingga operasional melaut dapat terpenuhi dengan baik;
- Beberapa kelompok nelayan mendapatkan bantuan dari Pemkab Belitung berupa Kapal penangkap ikan, alat bantu dan alat penangkap ikan untuk memudahkan nelayan dalam menangkap ikan;
- Penggunaan teknologi penangkapan ikan yang sudah diaplikasikan oleh beberapa nelayan seperti penggunaan GPS dan Fish Finder dalam aktivitas penangkapan ikan;
- Pembinaan dan penyuluhan yang dilaksanakan rutin kepada nelayan dan kelompok usaha bersama terkait penggunaan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan, serta kesadaran untuk melaporkan hasil produksi perikanan tangkap.

SASARAN 7 : Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pariwisata serta Budaya Daerah

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Belitung yang telah diakui secara nasional, bahkan ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus 300 (KEK) Tanjung Kelayang dan masuk dalam jaringan geopark UNESCO. Namun demikian, pengembangan sektor ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum meratanya infrastruktur pendukung, rendahnya kapasitas SDM pariwisata, kurangnya promosi terpadu, serta belum optimalnya integrasi dengan sektor lain seperti UMKM, pertanian, dan budaya lokal. Hal ini menyebabkan potensi pariwisata yang besar belum sepenuhnya memberikan dampak ekonomi yang signifikan dan inklusif bagi masyarakat.

Capaian kinerja sasaran "**Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pariwisata serta Budaya Daerah**" merupakan salah satu indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Indeks Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kota dengan target 3,8. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Tabel 3.79 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pariwisata serta Budaya Daerah Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2025			Kategori	Akhir RPJMD 2030 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kota	Nilai	3,28	3,8	3,14	82,63	B	5,39

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa target indikator sasaran Indeks Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kota tahun 2025 sebesar 3,8 dengan realisasi 3,92 capaian sebesar 103,16 atau berkategori SANGAT BERHASIL.

Sektor pariwisata menjadi salah satu pendorong utama transformasi ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah pusat menekankan pentingnya pembangunan destinasi pariwisata unggulan, penguatan konektivitas antar destinasi, serta pengembangan pariwisata berkualitas tinggi berbasis alam, budaya, dan digital. Selaras dengan itu, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memprioritaskan pengembangan pariwisata sebagai pengganti sektor pertambangan, dengan strategi peningkatan kualitas destinasi, promosi, dan ekosistem usaha pariwisata.

Pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi jangka panjang, dengan visi mewujudkan Belitung sebagai pusat maritim barat yang berdaya saing. Pembangunan pariwisata diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta memperkuat identitas budaya lokal. Pentingnya mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan secara lingkungan, sosial, dan budaya, dengan menghindari kerusakan ekosistem akibat pembangunan yang tidak terkendali.

Pemerintah Daerah juga mendorong agar pariwisata dirancang untuk memperkuat nilai-nilai lokal dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat desa dan kelompok rentan. Kabupaten Belitung mendukung pengembangan kawasan pariwisata strategis, termasuk KEK Tanjung Kelayang, kawasan pantai, geopark, dan kawasan perdesaan wisata. Dokumen RTRW juga mengarahkan konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan pariwisata dengan infrastruktur pendukung, seperti pelabuhan, bandara, jalan kolektor, dan Kawasan permukiman. Integrasi spasial ini menjadi penting untuk menjamin keberlanjutan destinasi dan kenyamanan pengunjung.

Belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Belitung merupakan akibat dari belum kuatnya koordinasi lintas sektor dan dokumen perencanaan yang ada. Untuk itu diperlukan strategi penguatan tata kelola destinasi, peningkatan kapasitas SDM, integrasi pariwisata dengan sektor ekonomi lokal, serta pendekatan Pembangunan berbasis kelestarian lingkungan dan kearifan budaya. Dengan langkah tersebut, pariwisata dapat menjadi motor utama pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

TUJUAN 3 : Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang BERAKHLAK Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)

Capaian kinerja tujuan Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) diukur melalui pencapaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.80 Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2025			Kategori	Akhir RPJMD 2030 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	79,74 (BB)	80 (BB)	85,03 (A)	106,29	SB	85 (A)

Pada tahun 2025 secara resmi Kementerian PAN RB RI mengeluarkan rilis resmi sesuai surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN RB tanggal 10 April 2026 Nomor B/295/RB.06/2026 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sejak tahun 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah melakukan penajaman evaluasi reformasi birokrasi dengan lebih mengukur indeks reformasi birokrasi dari sisi dampak kinerja dibandingkan dengan sisi proses yang cenderung bersifat administratif yang disebut dengan reformasi birokrasi tematik yang terdiri dari empat tema yaitu: pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual presiden (peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi).

Evaluasi reformasi birokrasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari siklus pengelolaan reformasi birokrasi. Dalam Pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 50 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023-2024. Komitmen melaksanakan reformasi birokrasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung ditunjukkan dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 188.45/001/VIII/2025 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025.

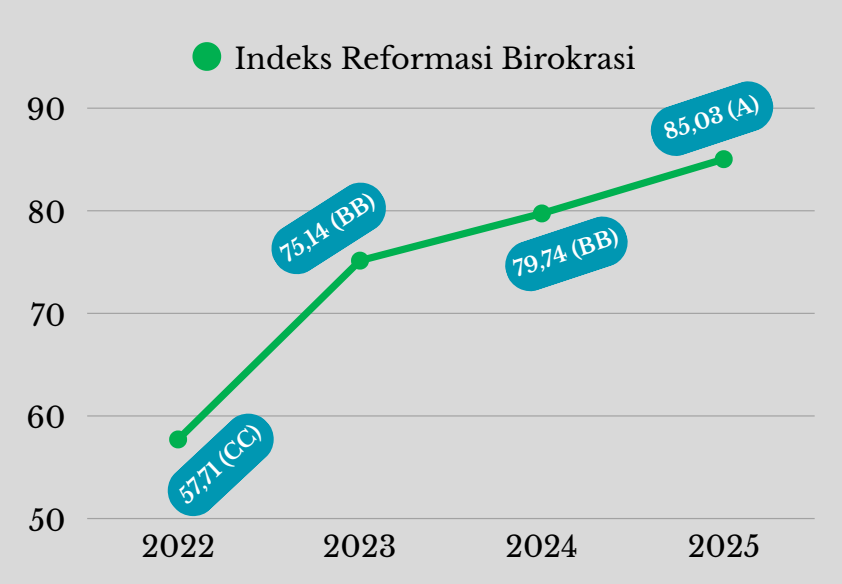

Pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi pada tahun 2025 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah. Namun demikian, hingga penyusunan laporan ini dilakukan, hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung Tahun 2025 masih belum dirilis oleh Kementerian PANRB. Oleh karena itu, hasil evaluasi yang digunakan dalam analisis kinerja masih mengacu pada hasil evaluasi yang disampaikan oleh Kementerian PANRB untuk periode penilaian Tahun 2024. Berikut hasil evaluasi yang didasarkan pada hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB diuraikan sebagai berikut Tahun 2023-2025 :

Tabel 3.81 Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Belitung Tahun 2023-2025 (Komponen dan Sub Komponen)

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Tahun 2023		
				Bobot	Skor	Skor Index
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	1,88	1,88
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	100,00	4,39
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Persentase Penyderhanaan Struktur Organisasi	2	99,62	1,99
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyderhanaan Birokrasi	2	2,00	0,80
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	3,20	2,56
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3,50	1,50	1,50

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Tahun 2023		
				Bobot	Skor	Skor Index
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4,00	63,52	2,54
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,50	1,00	0,50
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,50	93,22	2,33
10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2,50	3,00	1,50
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Kualitas Kebijakan	2,50	0	0
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Reformasi Hukum	2,50	45,61	1,14
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,50	2,12	1,06
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,50	72,4	1,81
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Sistem Merit	4,00	25,25	2,46
16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Pelayanan Publik	1,50	3,89	1,17
17	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,50	88,87	1,33
18	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9,00	3,11	5,60
19	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	2	98	1,96

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Tahun 2023		
				Bobot	Skor	Skor Index
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
20	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Non Makro	8,00	57,14	2,90
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Opini BPK	5	5	5
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	80,1	3,2
23	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Indeks BerAkhlak	4	61,60	2,46
24	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Survei Penilaian Integritas	10	76,61	7,66
25	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Survei Kepuasan Masyarakat	8	89,33	71,50
26	RB General	Koefisien	Koefisien	10		
27	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	4	0,28	0,28
28	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	4	0,28	0,28
29	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	4		
30	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan))	4	0,4	0,4
31	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan))	4	0,27	0,27
32	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	6	54,61	0,23
33	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Output)	6	-	-

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Tahun 2023		
				Bobot	Skor	Skor Index
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
34	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)	6	-	-
35	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	6	100	0,42
36	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Output)	6	-	-
37	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	1,5	1,5
38	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1,61	1,61
39	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	-	-
40	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2,8	2,8
41	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	2,46	2,46

Lanjutan. Tabel 3.81. Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Belitung Tahun 2023-2025 (Komponen dan Sub Komponen) (Tahun 2024)

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Tahun 2024		
				Bobot	Skor	Skor Index
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,21	2,21
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	87	4,49

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Tahun 2024		
				Bobot	Skor	Skor Index
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Persentase Penyderhanaan Struktur Organisasi	-	-	-
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyderhanaan Birokrasi	3	4	2,4
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	3,54	2,83
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3,5	1,5	1,5
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	63,52	2,54
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,5	1	0,50
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,5	93,22	2,33
10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2,5	3	1,5
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Kualitas Kebijakan	2,5	0	0
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Reformasi Hukum	2,5	45,61	1,14
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,5	2,12	1,06
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	72,4	1,81
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Sistem Merit	4	252,5	2,46
16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Pelayanan Publik	2	4,02	1,61

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Tahun 2024		
				Bobot	Skor	Skor Index
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
17	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	2	93,07	1,86
18	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	3,35	6,03
19	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	4	98,79	3,95
20	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Non Makro	6	78,21	3,04
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Opini BPK	5	3	5
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	77,38	3,10
23	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Indeks BerAkhlak	4	63,26	2,53
24	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Survei Penilaian Integritas	10	76,55	7,66
25	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Survei Kepuasan Masyarakat	8	89,71	7,18
26	RB General	Koefisien	Koefisien	10	-	-
27	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	1	0,6	0,6
28	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	1	0,86	0,86
29	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	1	0,61	0,61
30	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan))	1	0,69	0,69

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Tahun 2024		
				Bobot	Skor	Skor Index
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
31	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan))	4	0,27	0,27
32	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	6	54,61	0,23
33	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Output)	6	-	-
34	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)	6	-	-
35	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	6	100	0,42
36	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Output)	6	-	-
37	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	1,5	1,5
38	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1,61	1,61
39	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	-	-
40	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2,8	2,8
41	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	2,46	2,46

Lanjutan. Tabel 3.81. Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Belitung Tahun 2023-2025 (Komponen dan Sub Komponen) (Tahun 2025)

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Tahun 2025			
				Bobot	Target Terbaik	Skor	Skor Index
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3,00		2,30	2,30
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7,00		100,00	5,37
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	3,00	4,01	4,00	2,40
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas SPIP	4,00	3,00	2,45	1,96
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	3,50	2,50	0,50	0,50
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	4,00	60,01	65,49	2,62
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	25,00	3,00	2,00	1,00
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Digitalisasi Arsip	25,00	60,01	94,27	2,36
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	25,00	4,00	4,00	2,00
10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan	25,00	65,00	88,67	2,22
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Hukum	25,00	70,01	99,40	2,48
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pembangunan Statistik	25,00	70,01	2,62	1,31
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan	25,00	70,01	75,77	1,89

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Tahun 2025			
				Bobot	Target Terbaik	Skor	Skor Index
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Merit	4,00	2,50	2,53	2,46
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	2,00	3,51	4,06	1,62
16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	2,00	78,00	93,07	1,86
17	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks SPBE	9,00	2,60	4,15	7,47
18	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Opini BPK	5,00	3,00	3,00	5,00
19	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	4,00	75,00	80,66	3,23
20	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks BerAkhlak	4,00	50,00	63,26	2,53
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Penilaian Integritas	10,00	77,50	78,62	7,86
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Kepuasan Masyarakat	8,00	76,61	90,06	7,20
23	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Makro	4,00		100,00	4,00
24	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Non Makro	6,00	90,00	87,50	3,44
25	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	1,00		0,68	0,68
26	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	1,00		0,85	0,85

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Tahun 2025			
				Bobot	Target Terbaik	Skor	Skor Index
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
27	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	1,00		0,61	0,61
28	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	1,00		0,69	0,69
29	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan)	1,00		0,50	0,50
30	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3,00		1,50	1,50
31	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3,00		1,50	1,50
32	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3,00		0,75	0,75
33	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3,00		2,87	2,87
34	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	Penilaian mengacu pada Tahun 2023 & 2024			
35	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Percepatan Hilirisasi	1,00	-	-	0,00
36	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Ketahanan Pangan	1,00	-	-	0,00
37	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	1,00	-	-	0,00
38	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan	1,00	-	-	0,00

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana level mikro melaksanakan reformasi birokrasi dalam Dimensi Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa Kegiatan Utama dan telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, serta bersifat mandatory, Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Belitung melaksanakan 21 kegiatan utama dalam reformasi birokrasi general menetapkan 5 (lima) tema dalam reformasi birokrasi tematik Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), dan Pengendalian Inflasi. Serta Menyusun Rencana Aksi untuk 4 tema baru yang mendukung Visi Misi Presiden RB Berdampak utuk Kesejahteraan Rakyat yaitu, RB Mendorong Hilirisasi, RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional, RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan.

Faktor Pendukung

Tuntutan pelayanan prima dari segenap masyarakat menjadi pemicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar semakin adaptif dan lincah. Adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dipilah secara tematik diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih fokus.

Faktor Penghambat

Kurangnya kesadaran dan komitmen bersama diantara seluruh elemen pemerintahan menjadi penghambat dalam rangka menciptakan kesuksesan Reformasi Birokrasi, karena Reformasi Birokrasi merupakan tanggungjawab bersama segenap elemen pemerintahan. Beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu :

1. Rencana aksi belum sepenuhnya relevan untuk mencapai target sasaran kegiatan utama dan belum menggambarkan intervensi terhadap permasalahan utama;
2. Masih terdapat indikator output atas rencana aksi yang belum cukup menggambarkan sasaran dan targetnya;
3. Secara umum capaian pelaksanaan kebijakan dengan 3 (tiga) indikator nilainya belum baik yaitu Tingkat Maturitas SPIP, Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI, Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE, serta Tematik Pengendalian Inflasi untuk strategi pembangunan dan capaian indikator dampak yang belum maksimal.

Setelah memperhatikan berbagai faktor pendukung dan penghambat tersebut, maka untuk menjaga serta meningkatkan capaian kinerja sasaran pada masa yang akan datang diperlukan penguatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga pengampu, khususnya dalam rangka peningkatan nilai indeks pada indikator penilaian dalam Reformasi Birokrasi (RB) General, terutama pada komponen indeks yang masih memperoleh penilaian relatif rendah. Upaya koordinasi tersebut diharapkan dapat memberikan arahan dan pembinaan yang lebih komprehensif dalam rangka peningkatan kualitas implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Secara umum, indeks indikator penilaian dalam RB General Pemerintah Kabupaten Belitung pada Tahun 2025 menunjukkan kecenderungan peningkatan apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya pembenahan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah mulai memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah.

Pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 melalui berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan 21 kegiatan utama reformasi birokrasi telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian kondisi tata kelola pemerintahan yang cukup baik sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendorong terwujudnya birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025–2029, upaya pencapaian Tujuan 3 yaitu "Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)" telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) strategi utama yang menjadi arah kebijakan pembangunan daerah dalam memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Rincian sasaran dan strategi tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.82. Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 3

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 3 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)	Strategi Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih dan Bermartabat	1. Penguatan implementasi teknologi informasi digital dalam pengelolaan pemerintahan 2. Meningkatkan integritas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan 3. Penguatan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) manajemen ASN perangkat daerah 4. Penguatan tata kelola pendapatan asli daerah

SASARAN 8 : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel Berbasis Digital

Capaian kinerja sasaran **"Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel Berbasis Digital"** merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2025 – 2029. Capaian kinerja tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.83. Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel berbasis digital

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2025			Kategori	Akhir RPJMD 2030 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks Pemerintahan Digital	Nilai	n.a	1,8	n.a	n.a	n.a	2,2
2	Nilai SAKIP	Nilai	64,68	65,84(B)	65,49 (B)	99,47	Sangat Baik	71,64(BB)
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	74,7644	76,8121	70,4597	91,73	Sangat Baik	82,5071
4	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	n/a	4,1	4,06	99,02	Sangat Baik	4,35
5	Tingkat Maturitas SPIP	Angka	Level 3	Level 3(3,541)	Level 2 (2,449)	69,16	Cukup	Level 3 (3,546)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa target indikator sasaran Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel berbasis digital yang pertama yaitu Indeks Pemerintahan Digital tahun 2025 sebesar 1,80 namun realisasi tahun 2025 masih menggunakan perhitungan Indeks SPBE. Dimana Indeks SPBE Kabupaten Belitung Tahun 2025 adalah 4,15. Sejalan dengan arah kebijakan nasional yang semakin dinamis, cakupan pemantauan ini akan bertransformasi dari Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi). Perubahan ini menandakan pergeseran fokus dari sekadar digitalisasi proses bisnis menuju ekosistem digital yang lebih holistik dan berorientasi pada pengguna.

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. BELITUNG | **4,15 (Sangat Baik)**

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

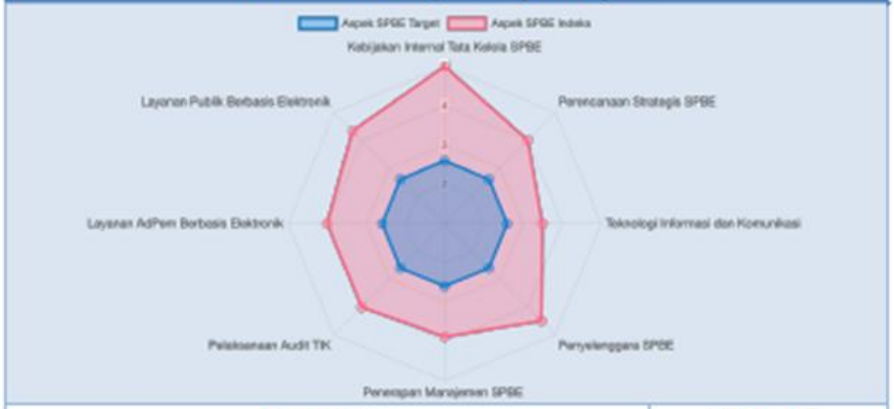

Nama Indeks	Nilai 2025
SPBE	**4,15**
Domain Kebijakan SPBE	5,00
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	*5,00*
Domain Tata Kelola SPBE	3,90
Perencanaan Strategis SPBE	*4,00*
Teknologi Informasi dan Komunikasi	*3,50*
Penyelenggara SPBE	*4,50*
Domain Manajemen SPBE	3,91
Penerapan Manajemen SPBE	*3,88*
Audit TIK	*4,00*
Domain Layanan SPBE	4,13
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	*4,00*
Layanan Publik Berbasis Elektronik	*4,33*

Gambar 3.24. Laporan Hasil Pemantauan Indeks SPBE Tahun 2025 KemenPANRB
Sumber : Diskominfo Kabupaten Belitung, 2025/ KemenPANRB 2025

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, termasuk pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), merupakan pilar penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Di Kabupaten Belitung, pelaksanaan SPBE masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum terintegrasinya sistem informasi lintas perangkat daerah, rendahnya kapasitas SDM aparatur dalam memanfaatkan teknologi, serta infrastruktur TIK yang belum merata. Hal ini menyebabkan proses layanan publik masih belum sepenuhnya digital dan berdampak pada rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Penguatan transformasi digital birokrasi menjadi salah satu agenda strategis nasional. Pemerintah pusat mendorong implementasi SPBE secara menyeluruh melalui integrasi data, interoperabilitas sistem, serta penyederhanaan layanan berbasis digital yang mudah diakses oleh masyarakat. Tujuannya adalah mendorong layanan publik yang adaptif, akuntabel, dan menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah kepulauan seperti Belitung.

Pemerintah daerah menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan berbasis digital untuk peningkatan kualitas layanan publik dan kinerja birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan SDM TIK, serta sinkronisasi platform digital untuk mempercepat pencapaian target reformasi birokrasi digital di seluruh wilayah provinsi. Transformasi tata Kelola pemerintahan digital termasuk dalam agenda pembaruan birokrasi daerah. Visi jangka panjang menekankan pelayanan publik yang adaptif terhadap teknologi, dengan dukungan infrastruktur digital, manajemen data daerah yang terintegrasi, dan penguatan pengawasan berbasis sistem informasi. Namun tantangan di lapangan adalah bagaimana memastikan implementasi SPBE berjalan merata di seluruh OPD dan menjangkau masyarakat secara luas.

Kelemahan dalam pelaksanaan SPBE di Kabupaten Belitung menunjukkan masih perlunya integrasi antara infrastruktur, SDM, sistem informasi, dan tata kelola kelembagaan. Pemerintah daerah menanggapi hal ini melalui upaya penguatan kapasitas birokrasi digital, penyediaan infrastruktur TIK yang merata, serta pemanfaatan data dan teknologi untuk mendukung perencanaan dan pelayanan publik. Dengan SPBE yang terintegrasi dan inklusif, Kabupaten Belitung dapat bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 3.84. Realisasi Terintegrasi Sistem Informasi Tahun 2025

NO	SISTEM INFORMASI	SUB DOMAIN	STATUS	TERINTEGRASI	OPD PENGAMPU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
I	**LAYANAN PUBLIK**				
1	Layanan Cloud Kabupaten Belitung	https://drive.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
2	Portal Aplikasi Kabupaten Belitung	https://aplikasi.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
3	Media Center Kabupaten Belitung	https://mediacenter.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
4	Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat	https://sipmas.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
5	Belitung Saluran Aspirasi dan Pengaduan	https://besadu.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
6	Layanan pendaftaran online (Simino)	https://rsud-marsidijudono.belitung.go.id/	1	1	RSUD dr. H. Marsidi Judono
7	Perijinan Terpadu Satu Pintu	https://dpmptspp.belitung.go.id	1	1	DPMPTSPP
8	Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan	https://bekawan.belitung.go.id	1	1	Disdukcapil
9	Sistem Informasi Bantuan Sosial Kemanusiaan	https://begalor.belitung.go.id/	1	1	DSPPA

10	Penerimaan Peserta Didik Baru	https://spmb.belitung.go.id/	1	1	Dinas Dikbud
11	Sistem Pemantauan Kualitas Air Online	http://siabel.belitungkab.go.id	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
12	Pelayanan Digital Laboratorium Lingkungan	https://petaling.belitung.go.id/	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
13	Besadu Rakyat Seputar Lingkungan	https://berasan.belitung.go.id	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
14	Aplikasi Persetujuan Lingkungan secara Online	https://pelilean.belitung.go.id/	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
15	Survey Kepuasan Masyarakat	http://skm.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
16	Belitung Smart City (BESTY)	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.diskominfo.belitungsmartcity&pcampaignid=web_share	1	1	Diskominfo
17	Sistem Informasi Pemesanan Mess Digital	https://sedaree.belitung.go.id	1	1	Bagian Umum Sekretariat Daerah
II	**ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN UMUM**				
1	Belitung Satu Data	https://data.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
2	Aplikasi Data Terkini	https://adat.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
3	Whistle Blowing System	http://wbs.belitung.go.id	1	1	Inspektorat
4	e-office Kabupaten Belitung	https://srikandi.arsip.go.id/	1	1	Dinas Perpustakan dan Kearsipan Daerah
5	Sistem Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik	https://spse.inaproc.id/belitung	1	1	Bagian PBJ Setda
6	Sistem Informasi Pelaporan Dan Evaluasi Program Pembangunan	http://sipelempang.belitung.go.id/	1	1	Bagian Admistrasi Pembangunan
7	Sistem Informasi Keuangan Desa	https://siskeudes.belitung.go.id	1	1	DPMKBPMD
8	Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa	https://siswaskeudes.belitung.go.id	1	1	Inspektorat
9	Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Belitung	https://simpai.belitung.go.id/	1	1	Bappeda
10	Sistem Informasi Tukang Berkarya	https://sikaya.belitung.go.id/	1	1	DPUPR
11	Sistem Utilitas Pengelolaan Aik Kite	https://sugak.belitung.go.id/	1	1	DPUPR
12	Sistem Informasi Rapat	https://sirapat.belitung.go.id/	1	1	Diskominfo
13	Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan Dan Evaluasi Kinerja	https://sakip.belitung.go.id/	1	1	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
14	Sistem Informasi Monitoring Manajemen Risiko Terintegrasi	https://simentari.belitung.go.id/	1	1	Inspektorat

III	ADMINISTRASI LEGISLASI				
1	JDIH Kabupaten Belitung	http://jdih.belitung.go.id	1	1	Bagian Hukum
2	JDIH DPRD Kabupaten Belitung	http://jdih.dprd.belitung.go.id	1	0	Setwan
IV.	MANAJEMEN PEMBANGUNAN				
1	e-Planning	https://sipd.kemendagri.go.id	1	1	Bappeda
2	e-Monev	https://monev.belitung.go.id	1	1	Bappeda
V.	SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH				
1	Simda BMD	Sistem Informasi Aset dan Barang Daerah	1	1	BPKAD
2	Simda Keuangan	Sistem Informasi Keuangan	1	1	BPKAD
3	Sim Gaji	Sistem Informasi Gaji	1	1	BPKAD
4	Simda Pendapatan	Sistem Informasi Pendapatan	1	1	BPPRD
V	MANAJEMEN KEPEGAWAIAN				
1	SIMPEG	http://simpeg.belitung.go.id	1	1	BKPSDM
2	ASN Digital	https://asndigital.bkn.go.id	1	1	BKPSDM
3	e-Absensi PNS	http://e-kinerja.belitung.go.id/absen	1	1	BKPSDM
4	e-TPP PNS	https://e-kinerja.belitung.go.id/tpp/v3/	1	1	BKPSDM
5	e-Arsip	http://earsip.belitung.go.id	1	1	BKPSDM
6	e-SIDAK	https://sidak.bkpsdm.belitung.go.id	1	1	BKPSDM
7	e-Lapkin	https://e-kinerja.belitung.go.id/lapkin/	1	1	BKPSDM
8	e-Cuti ASN	https://simpeg.belitung.go.id/cuti	1	1	BKPSDM
9	e-KGB	https://simpeg.belitung.go.id/kgb	1	1	BKPSDM
JUMLAH			48	47	

Sumber : Diskominfo Kabupaten Belitung, 2025

Realisasi terintegrasinya sistem informasi ini mengalami peningkatan tahun 2025 sebesar 47 sistem informasi yang terintegrasi dari 48 sistem informasi yang harus terintegrasi sesuai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu :

1. Penguatan kebijakan SPBE guna memastikan keberlangsungan layanan
2. Pemanfaatan aplikasi umum dan/atau aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah pusat untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis SPBE.

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung antara lain oleh :

1. Penerapan Aplikasi pusat dan sistem layanan digital yang terkelola dengan baik di seluruh perangkat daerah, hal ini berkontribusi signifikan terhadap optimalisasi layanan, karena memastikan integrasi sistem yang lancar, peningkatan efisiensi dan perlindungan data yang lebih baik.
2. Dukungan dari pimpinan dinas dalam mendorong adopsi teknologi digital yang sering menjadi kunci sukses dalam reformasi birokrasi.
3. Anggaran yang memadai untuk pengembangan aplikasi dan transformasi layanan menjadi lebih aman dan akurat.
4. Sinergi dengan OPD lain memfasilitasi integrasi layanan "satu pintu", meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Keberhasilan capaian kinerja dipengaruhi oleh :

1. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur teknologi informasi yang memadai.
2. Ketersediaan dana yang memadai untuk mendukung implementasi SPBE.

Selanjutnya target indikator sasaran Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel berbasis digital yang kedua yaitu Nilai SAKIP tahun 2025 sebesar 65,84 (B) dan terealisasi tahun 2025 sebesar 65,49 (B) dengan capaian sebesar 99,47%.

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instasi yang bersangkutan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten.Penerapan reformasi birokrasi berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Ada 5 komponen penilaian SAKIP, pertama perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja dengan bobot 35. Kedua, pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran dengan bobot 20. Ketiga, pelaporan kinerja, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, diberi bobot 15. Keempat, evaluasi kinerja, terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, diberi bobot 10. Kelima, pencapaian kinerja, bobotnya 20, terdiri dari kinerja yang dilaporkan (*output dan outcome*), dan kinerja lainnya.

Perubahan penilaian AKIP tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana terdapat 4 komponen penilaian SAKIP, pertama perencanaan kinerja, kedua pengukuran kinerja, ketiga pelaporan kinerja, keempat evaluasi kinerja.

Untuk melihat perkembangan capaian kinerja nilai SAKIP Kabupaten Belitung dari tahun 2023 – 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.85. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023-2025

KOMPONEN	BOBOT	2023	% kinerja komponen terhadap bobot	2024	% kinerja komponen terhadap bobot	2025	% kinerja komponen terhadap bobot
Perencanaan Kinerja	30	22,4	74,67	22,28	74,26	22,45	74,83
Pengukuran Kinerja	30	16,16	53,87	16,27	54,23	16,39	54,63
Pelaporan Kinerja	15	10,25	68,33	10,48	69,87	10,88	72,53
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,71	58,84	15,65	62,6	15,77	63,08
Nilai Hasil Evaluasi	100	63,52		64,68		65,49	
Kategori		B		B		B	

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung

Nilai SAKIP Kabupaten Belitung pada tahun 2025 sebesar 65,49, dengan kategori B (Baik) sesuai dengan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KementerianPANRB Nomor B/170/AA.05/2025 tanggal 26 Desember 2025. Tahun 2024 dengan kategori yang sama B, ada kenaikan di tahun 2025 sebesar 0,81 poin.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa evaluasi pada tahun 2025 didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun level perangkat daerah.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah Meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. Pada November 2024 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Dan penetapan Peraturan Bupati Belitung Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029.

Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan renstra dan juga perjanjian kinerja dan seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala, Laporan capaian kinerja Tahunan, Triwulanan, Laporan Dalev Pelaksanaan RKPD dan Laporan Evaluasi RENJA setiap perangkat daerah, ditambahkan dengan Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan setiap perangkat daerah melalui *website* monev.belitung.go.id yang telah diintegrasikan dengan sakip.belitung.go.id.

Namun dari data capaian nilai SAKIP di atas yang menjadi catatan penting adalah predikat akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dari hasil evaluasi atas penerapan SAKIP yang masih berada di kategori B atau nilai dalam *range* 60 – 70. Ini dapat diartikan bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Kabupaten Belitung masih rendah dan diindikasikan adanya potensi terjadinya inefisiensi. Inefisiensi ini dapat terjadi karena tujuan dan sasaran tidak berorientasi hasil, ukuran kinerja tidak jelas (tidak ada keterkaitan antara program dan kegiatan), kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

Kondisi ini tentunya kurang sejalan dengan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Sementara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yakni Akuntabilitas, Transparansi, dan Pelayanan yang berkualitas. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa penyelenggara pemerintah harus memperhatikan azas umum penyelenggaraan negara, antara lain; (1) Azas Kepastian Hukum; (2) Azas Tertib Penyelenggaraan Negara; (3) Azas Kepentingan Umum; (4) Asas Keterbukaan; (5) Asas Proporsionalitas; (6) Asas Profesionalitas; dan (7) Asas Akuntabilitas.

Menyempurnakan rumusan sasaran strategis yang belum berorientasi hasil dan indikator kinerja yang belum SMART, terutama pada perangkat daerah dan kepala bidang merupakah hal yang harus dilakukan Pemkab Belitung untuk menindaklanjuti salah satu rekomendasi yang di berikan oleh Kementerian PAN RB dalam evaluasinya.

Upaya pencapaian kinerja sasaran Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel terus dilakukan dengan dukungan dari berbagai faktor. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain:

Komitmen Pimpinan untuk meraih Opini WTP, Indeks RB dan meningkatkan nilai SAKIP. Namun demikian dalam upaya pencapaian kinerja sasaran terdapat faktor penghambat pencapaian kinerja yaitu Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah, dikarenakan belum optimalnya reviu dan perbaikan dokumen perencanaan yang telah dilakukan sehingga masih terdapat indikator yang belum berorientasi hasil pada level perangkatdaerah dan melakukan penyempurnaan perencanaan kinerja secara keseluruhan, Kualitas dan profesionalitas SDM aparatur masih rendah, dikarenakan,sistem manajemen pemerintahan yang belum terlaksana secara optimal.

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan di masa datang dalam upaya meningkatkan kinerja sasaran birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel di masa yang akan datang Adalah Terus melakukan upaya monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, meningkatkan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah terkait perencanaan, pengukuran kinerja, pencapaian kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Target indikator sasaran Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel berbasis digital yang ketiga yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2025 sebesar 65,84 (B) dan terealisasi tahun 2025 sebesar 65,49 (B) dengan capaian sebesar 99,47%.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu suatu ukuran yang ditetapkan untuk menilai kualitas tata kelola keuangan daerah agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. IPKD diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 dan bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan IPKD yaitu :

- Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
- Menjadikan pengelolaan keuangan daerah lebih transparan dan akuntabel.
- Menjamin penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang baik.

Selanjutnya, target indikator sasaran terwujudnya pemerintahan yang akuntabel berbasis digital yang keempat yaitu Indeks Pelayanan Publik tahun 2025 sebesar 4,1 dan terealisasi tahun 2025 sebesar 4,06 (A-) dengan capaian sebesar 99,02%.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan salah satu instrumen penting dalam menilai kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpanrb) Nomor 4 Tahun 2023, IPP dirancang sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan bahwa masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Selanjutnya Permen PANRB No. 4 Tahun 2023 menetapkan beberapa komponen utama dalam penyusunan IPP, yang mencakup berbagai aspek pelayanan publik, antara lain:

1. Kebijakan Pelayanan
   Kebijakan pelayanan mencakup regulasi, standar operasional prosedur (SOP), dan instrumen-instrumen yang digunakan untuk memastikan pelayanan publik dilaksanakan dengan baik. Aspek ini menilai sejauh mana kebijakan yang ada mendukung tercapainya layanan yang efisien dan tepat sasaran.
2. Profesionalisme SDM
   Kompetensi dan kinerja sumber daya manusia (SDM) yang memberikan pelayanan publik sangat menentukan kualitas layanan. Penilaian dalam aspek ini mencakup ketersediaan pelatihan, profesionalisme, dan etika dalam melayani masyarakat.
3. Sarana dan Prasarana Pelayanan
   Fasilitas fisik dan teknologi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga menjadi salah satu faktor yang dinilai. Ketersediaan sarana yang memadai, aksesibilitas, dan kemudahan penggunaan layanan adalah elemen penting dalam komponen ini.
4. Inovasi Pelayanan
   Dalam rangka meningkatkan efektivitas layanan, inovasi di bidang teknologi dan prosedur sangat diperlukan. Penilaian pada aspek ini menilai sejauh mana instansi pemerintah mampu mengadopsi inovasi untuk memperbaiki proses pelayanan publik.
5. Kepuasan Pengguna Layanan
   Salah satu indikator kunci dari keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Survei kepuasan pelanggan sering digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diterima.

Berikut ini grafik Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Belitung Tahun 2023-2025 :

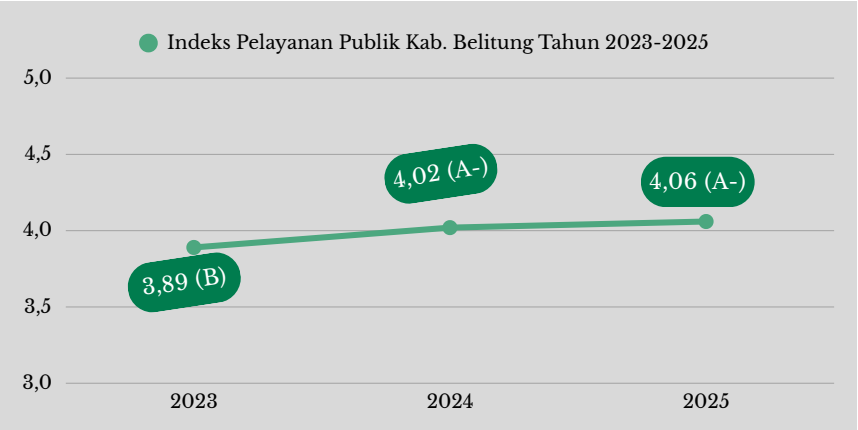

Grafik 3.12 Indeks Pelayanan Publik Kab. Belitung Tahun 2023-2025

Tantangan dalam Implementasi Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Belitung 2025:

1. Keterbatasan SDM dan Sumber Daya, Ketersediaan SDM yang kompeten serta keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik menjadi salah satu kendala dalam implementasi IPP.
2. Perbedaan Kualitas Layanan di Berbagai Perangkat Daerah, Kualitas pelayanan publik masih sangat bervariasi antara satu Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang infrastrukturnya belum memadai.
3. Tantangan Teknologi dan Inovasi, Meskipun inovasi menjadi salah satu aspek penting dalam IPP, tidak semua Perangkat Daerah memiliki kapasitas untuk mengadopsi teknologi terbaru dalam pelaksanaan layanan publik.

Sehingga penerapan Indeks Pelayanan Publik berdasarkan Permen PANRB No. 4 Tahun 2023 merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pemerintah dapat menyediakan layanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya penilaian yang komprehensif melalui IPP, pemerintah daerah dapat terus mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan publik, sekaligus memberikan dorongan kepada perangkat daerah untuk berinovasi dan meningkatkan profesionalisme. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, IPP berperan penting dalam membangun pemerintahan yang lebih responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Selanjutnya, target indikator sasaran Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel berbasis digital yang kelima yaitu Tingkat Maturitas SPIP tahun 2025 sebesar Level 3 (3,541) dan terealisasi tahun 2025 sebesar Level 2 (2,449) dengan capaian sebesar 69,16%.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan instrumen penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui SPIP, instansi pemerintah diharapkan mampu mengelola risiko, menjaga keandalan laporan keuangan, meningkatkan efektivitas program, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Salah satu aspek paling penting dari SPIP Terintegrasi adalah penilaian maturitas. Penilaian ini membantu instansi mengetahui sejauh mana

implementasi SPIP telah berjalan efektif, serta area mana yang masih perlu diperbaiki.

Berikut Perkembangan Tingkat Maturitas SPIP Kab. Belitung Tahun 2023-2025 :

Tabel 3.86.Perkembangan Tingkat Maturitas SPIP Kab. Belitung Tahun 2023-2025

Tahun	Tingkat Maturitas SPIP
2023	Level 3 (3,2)
2024	Level 3 (3,54)
2025	Level 2 (2,449)

Adanya penurunan Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2025 menjadai Level 2 (Berkembang/Developing) disebabkann oleh Beberapa aspek pengendalian sudah diterapkan, meski masih terbatas pada unit atau fungsi tertentu. Belum ada konsistensi antar bagian organisasi.

Meskipun bermanfaat, proses penilaian maturitas SPIP tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

- Kurangnya pemahaman pegawai, banyak pegawai yang masih menganggap SPIP sebagai beban administratif, bukan sebagai kebutuhan organisasi.
- Data yang tidak lengkap, dokumen dan bukti pelaksanaan seringkali sulit diperoleh atau belum terdokumentasi dengan baik.
- Keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah SDM, waktu, maupun anggaran, penilaian SPIP membutuhkan dukungan yang cukup.
- Resistensi terhadap perubahan, tidak semua pihak bersedia mengubah pola kerja lama menuju sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

Agar tingkat maturitas SPIP terus meningkat, Pemerintah Kabupaten Belitung perlu mengambil upaya strategis, antara lain:

- Meningkatkan pemahaman seluruh pegawai melalui sosialisasi dan pelatihan rutin.
- Membangun komitmen pimpinan sebagai role model penerapan SPIP.
- Memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pengendalian intern yang lebih efektif.
- Melakukan monitoring berkala agar perbaikan terus berjalan sesuai rekomendasi.
- Mengintegrasikan SPIP dengan manajemen risiko sehingga sistem lebih relevan dengan kebutuhan organisasi.

Penilaian maturitas SPIP Terintegrasi bukan hanya sekadar formalitas, melainkan langkah penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkualitas. Pemerintah Kabupaten Belitung akan lebih memahami proses penilaian, indikator yang digunakan, serta tantangan yang ada, sehingga kinerja dapat terus ditingkatkan.

SASARAN 9 : Terwujudnya Profesionalitas ASN

Capaian kinerja sasaran **"Terwujudnya profesionalitas ASN"** merupakan salah indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Indeks Profesional ASN dengan target "79,80". Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Terwujudnya profesionalitas ASN Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Tabel 3.87. Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Profesionalitas ASN

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2025			Kategori	Akhir RPJMD 2030 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks Profesional ASN	Skala	79,58	79,8	81,29	101,87	SB	82,56

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permenpan RB No. 38 Tahun 2019). Indeks Profesionalitas ASN merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif yang hasilnya digunakan untuk menilai dan mengevaluasi tingkat profesionalitas ASN. Adapun indikator profesionalitas ASN adalah pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik, organisasinya semakin modern dan memiliki disiplin yang tinggi.

Indeks Profesionalitas ASN dikeluarkan dan ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara selaku Pembina Kepegawaian Nasional. Sumber Data yang digunakan untuk mengukur IP ASN adalah data SAPK yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Negara. Adapun unsur-unsur yang dinilai yaitu Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi (kediklatan), Kinerja dan Disiplin dengan kategori sebagai berikut:

- Nilai 91% - 100% : Sangat Tinggi
- Nilai 81% - 90% : Tinggi
- Nilai 71% - 80% : Cukup/Sedang
- Nilai 61% - 70% : Rendah
- Nilai < 60% : Sangat Rendah

Indikator yang digunakan untuk mengukur Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) adalah :

- Kualifikasi, dengan nilai maksimal 25
- Kompetensi, dengan nilai maksimal 40
- Kinerja, dengan nilai maksimal 30
- Disiplin, dengan nilai maksimal 5
- Total nilai maksimal 100

Kualifikasi, meliputi data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah, Kompetensi, meliputi data dan informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas. Indikator yang digunakan adalah Diklat kepemimpinan, Diklat fungsional, Diklat teknis, Seminar/workshop/magang/kursus/sejenisnya, dalam 2 (dua) tahun terakhir. Kinerja, meliputi data dan informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat serta perilaku PNS.

Disiplin, meliputi data dan informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.Indikator : hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, hukuman disiplin berat. Data hukuman disiplin tersebut telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir).

Realisasi kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2024 berdasarkan perhitungan dalam portal https://myasn.bkn.go.id dari Badan Kepegawaian Negara adalah 81,29 (tinggi).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.88. Penilaian IP ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024

Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai	Kategori
20,78	30,49	25,02	5	81,29	Tinggi

Sumber :Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab Belitung Tahun 2025

Penjelasan : Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari unsur: Kualifikasi 20,78 dari 25; Kompetensi 30,49 dari 40; Kinerja 25,02 dari 30 dan Disiplin 5 dari 5. Dengan Jumlah PNS sebanyak 2.734 orang dan Jumlah PPPK sebanyak 293 orang.

Tabel 3.89. Perbandingan IP ASN Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024

Tahun	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai	Kategori	Sumber Data
2021	12,69	18,52	23,23	5	59,44	Sangat Rendah	Hasil Penilaian BKN No: 870/B-BH.02.01/SD/C/2022 Tanggal 13 Januari 2022
2022	21,04	21,14	24,38	5	71,56	Sedang	Hasil Penilaian BKN No: 470/B-BM.02/SD/KR.VII/2023 Tanggal 18 Oktober 2023
2023	20,86	28,5	24,26	5	78,63	Sedang	Hasil Penilaian BKN No: 435/B-BM.02/SD/KR.VII/2024 tanggal 07 Oktober 2024
2024	20,78	30,49	25,02	5	81,29	Tinggi	Hasil Perhitungan pada portal https://myasn.bkn.go.id

Sumber :Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab Belitung Tahun 2025

Adapun faktor pendorong peningkatan nilai IP ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 adalah Tersedianya *database* pegawai pada aplikasi Simpeg dengan tujuan terciptanya sistem informasi dan database kepegawaian yang dapat menampung, mengolah, menyimpan dan menemukan kembali data kepegawaian. Adanya pengembangan *e-SKP* sesuai dengan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, dimana pada Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 memiliki ruang lingkup yang lebih luas yakni ASN (PNS dan PPPK) dengan perilaku kinerja *Core Values* ASN yang merupakan pengembangan PP Nomor 30 Tahun 2019 yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif.

Dengan demikian, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah strategi dalam rangka memperbaiki nilai IP ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 untuk meningkatkan nilai dimensi kompetensi:

- Berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya untuk memaksimalkan kegiatan pengembangan kompetensi ASN;
- Melaporkan hasil pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN beserta bukti dukung kepada BKPSDM Kabupaten Belitung;
- Melaksanakan Melaksanakan Sosialisasi atau seminar *online* kepegawaian dengan target peserta massal.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung harus senantiasa ditingkatkan untuk secara pro-aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Dan upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah agar dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan tidak hanya dilakukan oleh internal organisasi perangkat daerah, melainkan juga terkait dengan pemerintah pusat (dalam hal ini Kementerian PAN dan RB serta Badan Kepegawaian Negara) dan juga pihak-pihak lainnya.

SASARAN 10 : Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

Capaian kinerja sasaran "Meningkatnya kemandirian keuangan daerah" merupakan salah indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Rasio Kemandirian Fiskal dengan target "23,94". Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatnya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Tabel 3.90. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2025			Kategori	Akhir RPJMD 2030 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Rasio Kemandirian Fiskal	Skala	23,67	23,94	29,38	122,72	SB	26,1

Kemandirian fiskal menjadi salah satu isu paling krusial dalam dinamika pembangunan daerah Indonesia beberapa tahun terakhir. Di tengah tekanan konsolidasi fiskal pemerintah pusat mulai dari efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) hingga perubahan struktur penganggaran nasional—setiap provinsi dan kabupaten/kota dituntut mampu memperkuat fondasi keuangannya sendiri. Kemandirian fiskal membuat daerah bisa membiayai pembangunan dan layanan publiknya tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat, daerah lebih bebas berinovasi, lebih cepat merespons kebutuhan warga, serta lebih tahan terhadap perubahan kebijakan nasional. Pada akhirnya, daerah yang mandiri secara fiskal cenderung lebih maju, lebih akuntabel, dan lebih mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Ketergantungan pada dana pusat memang tidak sepenuhnya dapat dihindari. Namun, tingkat kemandirian daerah dalam membiayai belanja publik menjadi indikator penting untuk menilai kapasitas, kualitas tata kelola, dan keberlanjutan pembangunan wilayah.Berikut perhitungan Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten Belitung Tahun 2025 :

$$\text{Rasio Kemandirian Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\ \%$$

Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Kabupaten Belitung menggambarkan kondisi kemandirian fiskal menuju kemandirian, nilai IKF yang rendah menunjukkan rapuhnya struktur fiskal Kabupaten Belitung serta tingginya risiko perlambatan program pembangunan ketika terjadi penghematan TKD, seperti yang terjadi saat keluarnya Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Optimalisasi pendapatan daerah merupakan faktor penting dalam membangun kemandirian fiskal dan mendukung keberlanjutan program pembangunan di Kabupaten Belitung. Namun demikian, struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat, sementara kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) relatif kecil. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan basis penerimaan daerah, lemahnya sistem intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi, serta belum optimalnya digitalisasi layanan perpajakan dan pengelolaan aset daerah.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

lama Pemda : Kabupaten Belitung

ata per Tanggal : 31 Desember 2025

Rekening				Uraian	Jumlah			
A	K	J	O		Anggaran	Realisasi	Selisih	%
4				**PENDAPATAN DAERAH**	**940,590,481,222.00**	**940,242,175,166.09**	**(348,306,055.91)**	**99.9**
4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH	202,354,324,639.00	213,489,413,556.09	11,135,088,917.09	105.5
4	1	01		Pendapatan Pajak Daerah	109,084,621,493.00	104,082,515,970.00	(5,002,105,523.00)	95.4
4	1	02		Pendapatan Retribusi Daerah	78,007,440,946.00	92,839,320,126.50	14,831,879,180.50	119.0
4	1	03		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,600,000,000.00	4,886,428,412.02	(713,571,587.98)	87.2
4	1	04		Lain-Lain PAD yang Sah	9,662,262,200.00	11,681,149,047.57	2,018,886,847.57	120.8
4	1	05		Zakat	-	-	-	0.0
4	2			PENDAPATAN TRANSFER	738,236,156,583.00	726,752,761,610.00	(11,483,394,973.00)	98.4
				Transfer Pemerintah Pusat - Dana	631,510,333,190.00	617,616,555,342.00	(13,893,777,848.00)	97.8
4	2	01		Dana Bagi Hasil	39,425,962,000.00	38,705,944,300.00	(720,017,700.00)	98.1
4	2	01		Dana Alokasi Umum	489,709,683,000.00	478,853,010,054.00	(10,856,672,946.00)	97.7
4	2	01		Dana Alokasi Khusus - Fisik	10,821,511,000.00	8,848,258,410.00	(1,973,252,590.00)	81.7
4	2	01		Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	91,553,177,190.00	91,209,342,578.00	(343,834,612.00)	99.6
				Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	62,201,505,000.00	61,207,455,600.00	(994,049,400.00)	98.4
4	2	02		Dana Insentif Daerah	-	-	-	0.0
4	2	02		Dana Otonomi Khusus	-	-	-	0.0
4	2	02		Dana Keistimewaan	-	-	-	0.0
4	2	02		Dana Desa	41,614,636,000.00	40,620,586,600.00	(994,049,400.00)	97.6
4	2	02		Insentif Fiskal	20,586,869,000.00	20,586,869,000.00	-	100.0
				Transfer Pemerintah Daerah	44,524,318,393.00	47,928,750,668.00	3,404,432,275.00	107.6
4	2	03		Dana Bagi Hasil	42,743,036,393.00	46,262,718,168.00	3,519,681,775.00	108.2
4	2	03		Bantuan Keuangan	1,781,282,000.00	1,666,032,500.00	(115,249,500.00)	93.5
4	3			LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	0.0
4	3	01		Hibah	-	-	-	0.0
4	3	02		Dana Darurat	-	-	-	0.0
4	3	03		Pendapatan Lainnya	-	-	-	0.0
5				**BELANJA DAERAH**	**1,039,613,857,103.70**	**943,425,589,981.53**	(96,188,267,122.17)	**90.7**
5	1			OPERASI	888,104,600,616.70	798,965,304,189.53	(89,139,296,427.17)	89.9
5	1	01		Pegawai	529,950,395,509.00	473,457,900,870.00	(56,492,494,639.00)	89.3
5	1	02		Barang dan Jasa	335,543,976,031.70	303,356,501,325.53	(32,187,474,706.17)	90.4
5	1	03		Bunga	-	-	-	0.0
5	1	04		Subsidi	648,688,228.00	540,823,627.00	(107,864,601.00)	83.3
5	1	05		Hibah	21,495,325,230.00	21,162,331,642.00	(332,993,588.00)	98.4
5	1	06		Bantuan Sosial	466,215,618.00	447,746,725.00	(18,468,893.00)	96.0
5	2			MODAL	43,619,973,682.00	38,838,268,692.00	(4,781,704,990.00)	89.0
5	2	01		Tanah	500,000,000.00	491,325,000.00	(8,675,000.00)	98.2
5	2	02		Peralatan dan Mesin	17,118,173,570.00	15,344,502,359.00	(1,773,671,211.00)	89.6
5	2	03		Gedung dan Bangunan	11,732,488,800.00	8,954,328,979.00	(2,778,159,821.00)	76.3
5	2	04		Jalan, Irigasi dan Jaringan	11,192,587,965.00	10,996,019,657.00	(196,568,308.00)	98.2
5	2	05		Aset Tetap Lainnya	3,037,603,347.00	3,013,197,697.00	(24,405,650.00)	99.2
5	2	06		Aset Lainnya	39,120,000.00	38,895,000.00	(225,000.00)	99.4
5	3			TIDAK TERDUGA	1,250,000,000.00	-	(1,250,000,000.00)	0.0
5	3	01		Tidak Terduga	1,250,000,000.00	-	(1,250,000,000.00)	0.0
5	4			TRANSFER, BANTUAN KEUANGAN, DAN BAGI	106,639,282,805.00	105,622,017,100.00	(1,017,265,705.00)	99.0
5	4	01		Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	11,811,046,305.00	11,787,830,000.00	(23,216,305.00)	99.8
5	4	02		Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi	-	-	-	0.0
5	4	03		Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	300,000,000.00	300,000,000.00	-	100.0
5	4	04		Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	94,528,236,500.00	93,534,187,100.00	(994,049,400.00)	98.9
5	4	05		Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Kepada	-	-	-	0.0
				SURPLUS/DEFISIT	**(99,023,375,881.70)**	**(3,183,414,815.44)**	**95,839,961,066.26**	**3.2**
6				**PEMBIAYAAN DAERAH (PEMBIAYAAN NETTO)**	**99,023,375,881.70**	**99,023,375,881.70**	-	**100.0**
6	1			PENERIMAAN PEMBIAYAAN	99,023,375,881.70	99,023,375,881.70	-	100.0
6	1	01		Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya	99,023,375,881.70	99,023,375,881.70	-	100.0
6	1	02		Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	0.0
6	1	03		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang	-	-	-	0.0
6	1	04		Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	-	-	-	0.0
6	1	05		Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	-	-	-	0.0
6	1	06		Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	0.0
6	1	07		Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan	-	-	-	0.0
6	1	08		Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi	-	-	-	0.0
6	1	09		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	0.0
6	1	10		Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	-	-	0.0
6	2			PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	0.0
6	2	01		Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	0.0
6	2	02		Penyertaan Modal/Investasi Daerah			-	0.0
6	2	03		Pembayaran Pinjaman - Pemerintah Pusat	-	-	-	0.0
6	2	04		Pembayaran Pinjaman - Pemerintah Daerah	-	-	-	0.0
6	2	05		Pembayaran Pinjaman - Lembaga Keuangan	-	-	-	0.0
6	2	06		Pembayaran Pinjaman - Lembaga Keuangan	-	-	-	0.0
6	2	07		Pembayaran Pinjaman - Masyarakat (Obligasi	-	-	-	0.0
6	2	08		Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	0.0
6	2	09		Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-	-	-	0.0
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**0.00**	**95,839,961,066.26**	**95,839,961,066.26**	
				RASIO KEMANDIRIAN		**29.38**		

Gambar 3.25. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Belitung Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Belitung menekankan pentingnya pembangunan ekonomi lokal yang kuat sebagai basis pertumbuhan PAD. Pengembangan sektor unggulan seperti pariwisata, perikanan, dan ekonomi kreatif diharapkan dapat membuka peluang peningkatan PAD yang berkelanjutan dan juga mengingatkan agar peningkatan pendapatan daerah tidak mengorbankan kelestarian lingkungan atau menimbulkan ketimpangan social dan juga mendukung upaya mengarahkan pemanfaatan ruang secara produktif dan berkelanjutan, termasuk pengembangan kawasan yang memiliki potensi ekonomi. Oleh karena itu, Upaya yang perlu dilakukan kedepannya adalah penguatan kelembagaan pajak daerah, reformasi sistem informasi fiskal, serta integrasi kebijakan pembangunan ekonomi dan fiskal untuk meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan secara berkelanjutan.

Gambar 3.26. Gebyar PBB-P2 Tahun 2025

Gambar 3.27. *High Level Meeting* Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Belitung 2025

Gambar 3.28. Sosialisasi Pajak Daerah 2025

Gambar 3.29. Sosialisasi Dan Pendataan Sarang Burung Walet 2025

Gambar 3.30. Pendataan Pbb-P2 2025

Gambar 3.31. Pelayanan Terpadu Samsat Setempoh Dan Pembayaran Pbb-P2 2025

Gambar 3.32.*High Level Meeting* **Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Belitung yang dipimpin oleh Bapak Bupati Belitung selaku Ketua TP2DD Kabupaten Belitung**

Gambar 3.33.Kunjungan Ke KPP Pratama Tanjungpandan terkait Optimalisasi Pajak Daerah Khususnya Pajak Sarang Burung Walet dan PBB P2

Gambar 3.34.*High Level Meeting (HLM)* **Edukasi Terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kabupaten Belitung dengan Bank Indonesia di pimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku Ketua Pelaksana Harian TP2DD Kabupaten Belitung**

Gambar 3.35. Monitoring Objek Pajak Terutang

TUJUAN 4 : Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan

Capaian kinerja tujuan Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan. Capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.91. Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2025			Kategori	Akhir RPJMD 2030 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	n.a	Baik (85,35)	70,66	84,94	B	Sangat Baik (93,63)
2	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Persentase	54,4	54,55	54,4	99,73	SB	65,54

Kabupaten Belitung melalui survei Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI), pada tahun 2025 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dengan capaian 84,94. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah indikator baru yang ada di Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Belitung Tahun 2025.

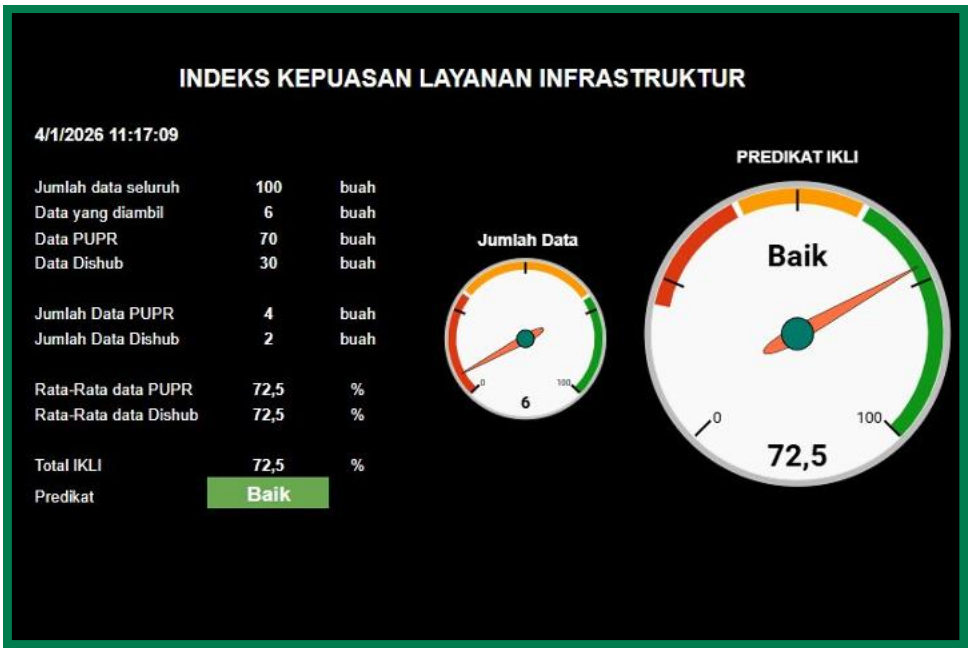

Gambar 3.36 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Belitung Tahun 2025

Ketersediaan infrastruktur kewilayahan yang memadai merupakan prasyarat penting dalam pemerataan pembangunan, konektivitas antar wilayah, serta penguatan pelayanan dasar dan ekonomi lokal. Namun di Kabupaten Belitung, masih terdapat ketimpangan kualitas dan jangkauan infrastruktur antar wilayah, terutama di wilayah-wilayah perdesaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Permasalahan mencakup keterbatasan jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan, minimnya sarana transportasi publik, serta keterbatasan infrastruktur penunjang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi rakyat.

Target indikator sasaran Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan yang kedua yaitu Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) tahun 2024 dengan target sebesar 54,55 dan terealisasi tahun 2025 sebesar 54,4 dengan capaian sebesar 99,73%.

Rendahnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Belitung menjadi salah satu hambatan utama dalam pemerataan pembangunan, mobilitas masyarakat, serta distribusi barang dan jasa. Banyak wilayah perdesaan dan kawasan pesisir yang masih sulit dijangkau, baik karena kondisi infrastruktur jalan yang rusak maupun belum tersambungnya jalur transportasi yang layak. Akibatnya, keterisolasian wilayah-wilayah tertentu masih tinggi dan berdampak pada rendahnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar lokal.

Konektivitas yang rendah juga berdampak langsung pada lambatnya pertumbuhan ekonomi lokal, terutama sektor-sektor berbasis potensi wilayah seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Wilayah yang memiliki keunggulan komparatif belum mampu mengakses rantai pasok dan pasar secara efisien, sehingga potensi ekonomi yang dimiliki belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Keterbatasan sarana transportasi publik, minimnya integrasi antar moda, serta kurangnya dukungan logistik menjadi faktor penghambat utama.

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan upaya sistematis dalam memperkuat konektivitas fisik antar wilayah melalui pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan jalan, jembatan, pelabuhan, dan infrastruktur pendukung lainnya. Selain itu, konektivitas digital juga perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan, agar wilayah-wilayah terpencil tidak tertinggal dalam era transformasi informasi dan ekonomi digital. Akses yang merata akan membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan memperkuat kohesi sosial antar wilayah dalam kerangka pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Tabel 3.92. Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 4

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 4 Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan,	Strategi Misi 4 Membangun Infrastruktur yang Berkualitas Secara Merata dan Berkelanjutan	1. Peningkatan pelayanan infrastruktur inklusif 2. Pemerataan pelayanan infrastruktur kewilayahan dan kawasan strategis 3. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan 4. Penguatan kapasitas masyarakat, serta tata kelola kebencanaan yang adaptif dan berbasis data

SASARAN 11 : Tersedianya Infrastruktur yang Inklusif dan Berkualitas

Capaian kinerja sasaran **"Tersedianya Infrastruktur yang Inklusif dan Berkualitas"** merupakan salah indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur dengan target "67,28". Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Indeks Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Tabel 3.93. Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Infrastruktur yang Inklusif dan Berkualitas

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2025			Kategori	Akhir RPJMD 2030 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	65,01	67,28	70,3	104,49	SB	107,97

Target indikator sasaran Tersedianya Infrastruktur yang inklusif dan berkualitas yaitu Indeks Pembangunan Infrastruktur tahun 2025 dengan target sebesar 67,28 dan terealisasi tahun 2025 sebesar 70,30 dengan capaian sebesar 104,49%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung dalam penyediaan infrastruktur yang inklusif dan berkualitas telah berjalan dengan baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Nilai Indeks Pembangunan Infrastruktur yang mencapai 70,30 menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan kondisi awal RPJMD sebesar 65,01. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Belitung terus mengalami perbaikan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Peningkatan indeks pembangunan infrastruktur tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Belitung melalui pembangunan dan peningkatan sarana prasarana dasar yang mendukung konektivitas wilayah, pelayanan publik, serta aktivitas perekonomian masyarakat. Infrastruktur yang memadai diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan capaian sebesar 104,49 persen dari target yang ditetapkan, indikator ini berada pada kategori Sangat Berhasil (SB). Kondisi ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan selama tahun 2025 telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung terwujudnya pembangunan wilayah yang lebih merata dan berkelanjutan di Kabupaten Belitung.

Berikut perbandingan realisasi perhitungan Indeks Pembangunan Infrastruktur tahun 2024 dan 2025 :

Tabel 3.94. Realisasi perhitungan Indeks Pembangunan Infrastruktur tahun 2025

No	Komponen	Realisasi 2025	rencana s/d 2029	Bobot	Nilai	Satuan
1	Jalan	613,99	696,96	20	17,61908861	km
2	Air Bersih	8,981	11,57	20	15,52463267	rumah tangga
3	Sanitasi	5,682	11,972	20	94,92148346	rumah tangga
4	Drainase	12,392	17,479	10	70,89650438	meter
5	Pelabuhan	23	30	20	15,33333333	Unit
6	Faskes jalan	13,195	25,178	10	52,40686313	Unit
TOTAL				**100**	**70,29953971**	
PREDIKAT					**Baik**	

Tabel 3.95. Realisasi perhitungan Indeks Pembangunan Infrastruktur tahun 2024

No	Komponen	Realisasi 2024	rencana s/d 2029	Bobot	Nilai	Satuan
1	Jalan	591,76	696,96	20	16,981	km
2	Air Bersih	8,07	11,57	20	13,950	rumah tangga
3	Sanitasi	5,547	11,972	20	9,267	rumah tangga
4	Drainase	11,653	17,479	10	6,667	meter
5	Pelabuhan	23	30	20	15,333	Unit
6	Faskes jalan	12,658	25,178	10	5,027	Unit
TOTAL				**100**	**67,225**	
PREDIKAT					**Baik**	

Komponen Indeks Pembangunan Infrastruktur

$$\text{Pencapaian per-komponen} = \frac{\text{Nilai Realisasi}}{\text{Nilai Rencana}} \times \text{Bobot}$$

$$\text{Nilai Total IPI} = \frac{\text{Nilai Total Komponen}}{\text{Total Bobot}} \times 100$$

Bobot = 10 s/d 100

Range Nilai :	
Sangat Baik	>= 80
Baik	60-79
Cukup	40-59
Kurang	20-39
Sangat Kurang	<20

SASARAN 12 : Berkurangnya Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah

Capaian kinerja sasaran **"Berkurangnya kesenjangan Pembangunan antar wilayah"** merupakan salah indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Indeks Kesulitan Geografis dengan target "32,52". Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Tabel 3.96. Capaian Kinerja Sasaran Berkurangnya Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2025			Kategori	Akhir RPJMD 2030 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks Kesulitan Geografis	Nilai	32,72	32,52	32,72	99,39	SB	32,09

Indikator Kinerja Utama Indeks Kesulitan Geografis Tahun 2025 merupakan Indeks Kesulitan Geografis yang dihitung BPS Kabupaten Belitung Tahun 2024.

Indeks Kesulitan Geografis adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kesulitan geografis yang dihadapi oleh suatu wilayah dalam kaitannya dengan aksesibilitas dan infrastruktur. Indeks ini mempertimbangkan berbagai aspek seperti jarak, kondisi jalan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tingkat aksesibilitas terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik lainnya. Tujuan utama dari pengukuran IKG adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan-tantangan fisik yang dihadapi oleh suatu daerah dalam rangka mendukung kebijakai pemerataan pembangunan.

Indeks Kesulitan Geografis (IKG) merupakan indeks komposit tertimbang yang besarannya antara 0-100 untuk setiap wilayah. Semakin besar indeks yang dimiliki suatu wilayah, maka semakin tinggi tingkat kesulitan wilayah tersebut. IKG disusun oleh BPS yang dilakukan

berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 menindaklanjuti permintaan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyediakan data terkait tingkat kesulitan geografis sebagai alat ukur penghitung tingkat kesulitan geografis.

Dampak pemanasan global menjadi permasalahan yang semakin nyata, Kenaikan suhu dan pola curah hujan yang tidak menentu mempengaruhi sektor pertanian, perikanan, dan ketersediaan air bersih. Kerusakan Lingkungan yang terjadi akibat penebangan liar, pembukaan lahan untuk pertanian, dan konversi hutan menjadi wilayah tambang masyarakat berkontribusi pada hilangnya keanekaragaman hayati dan gangguan ekosistem. Perkembangan urbanisasi yang pesat seringkali dilakukan tanpa perencanaan yang matang, menyebabkan kawasan pemukiman yang padat, kumuh, dan rawan terhadap bencana.

Walaupun Kabupaten Belitung telah mengalami pertumbuhan ekonomi, masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial masih menjadi tantangan. Beberapa daerah di wilayah Kabupaten Belitung masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Kesulitan Akses Transportasi karena infrastruktur transportasi yang kurang memadai, Hal ini mempengaruhi mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan konektivitas antar daerah.

Kabupaten Belitung menghadapi serangkaian tantangan geografi fisik dan sosial yang memerlukan perhatian serius. Penanganan masalah-masalah ini tidak hanya membutuhkan kerjasama dari pemerintah, tetapi juga peran aktif masyarakat dan sektor swasta. Dengan melibatkan semua pihak dalam solusi yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan tantangan-tantangan ini dapat diatasi dengan lebih efektif. Keberhasilan dalam mengatasi permasalahan ini akan berdampak besar pada pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kabupaten Belitung. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, penguatan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pada keberlanjutan menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut. Pemerintah Kabupaten Belitung perlu terus mendorong integrasi kebijakan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas infrastruktur dasar, pengelolaan sumber daya alam yang lebih bijaksana, penguatan ketahanan lingkungan, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan kesempatan ekonomi. Dengan perencanaan pembangunan yang terarah dan partisipatif, diharapkan Kabupaten Belitung mampu menghadapi berbagai dinamika pembangunan sekaligus mewujudkan pembangunan daerah yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

SASARAN 13 : Meningkatnya Kelestarian Lingkungan

Capaian kinerja sasaran "**Meningkatnya Kelestarian Lingkungan**" merupakan salah indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Resiko Bencana. Berikut realisasi dan capaian sasaran Meningkatnya Kelestarian Lingkungan .

Tabel 3.96. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kelestarian Lingkungan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2025			Kategori	Akhir RPJMD 2030 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	69,84	76,81	75,77	98,65	SB	77,66
2	Indeks Resiko Bencana	Nilai	143,71	117,14	98,97	117,3	SB	111,71

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator dari sasaran Meningkatnya Kelestarian Lingkungan yang pertama yaitu indeks kualitas lingkungan hidup, telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan realisasi kinerja sebesar 75,77 melampaui target dengan kategori SANGAT BERHASIL. Dari realisasi IKLH Tahun 2025 sebesar 75,77 nilai IKLH Kabupaten Belitung pada posisi dan katagori Baik. Kondisi tersebut perlu dipertahankan untuk terus meningkatkan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang merupakan komponen terpenting dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Belitung.

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam proses perhitungannya sudah mempergunakan Aplikasi Pelaporan dan Perhitungan IKLH PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan rumus sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. rumusannya sebagai berikut :

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) = **(0.376×IKA) + (0.405×IKU) + (0.219×IKL)**

Keterangan :

IKA : Indeks Kualitas Air
IKU : Indeks Kualitas Udara
IKL : Indeks Kualitas Lahan

Untuk perhitungan nilai IKLH sebagai berikut :

Indeks Kualitas Air (IKA) = 74,59
Indeks Kualitas Udara (IKU) = 82,53
Indeks Tutupan Lahan (IKL) = 65,28

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) = **(0.376×IKA) + (0.405×IKU) + (0.219×IKL)**
= **(0.376 x 74,59) + (0.405 x 82,53) + (0.219 x 65,28)**
= **28,046 + 33,425 + 14,296**
= **75,77**

Untuk melihat perbandingan antara nilai IKLH dari tahun 2022 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.98. Perbandingan Nilai IKLH Tahun 2022 sampai dengan 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,25	68,9	69,84	75,77

Sumber :Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai IKLH pada tahun 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hidup masih tergolong rendah di Kabupaten Belitung. Masih banyak aktivitas yang tidak memperhatikan dampak ekologis jangka panjang, seperti pembuangan sampah sembarangan, alih fungsi lahan tanpa pengendalian, penangkapan ikan yang merusak, dan penggunaan sumber daya alam secara berlebihan. Kurangnya edukasi lingkungan dan minimnya penerapan nilai-nilai kelestarian dalam keseharian menjadi faktor penyebab utama rendahnya kesadaran tersebut.

Selain kesadaran, aspek kelembagaan dan tata kelola lingkungan juga masih belum optimal. Koordinasi antar sektor dalam pengelolaan Kawasan lindung, konservasi sumber daya, dan pengendalian pencemaran seringkali lemah. Pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan belum dilakukan secara konsisten, dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan masih rendah. Hal ini berisiko mempercepat degrades lingkungan, menurunkan daya dukung wilayah, dan mengancam keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.

Meningkatkan kesadaran dan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari pembangunan daerah. Upaya ini dapat dilakukan melalui edukasi publik, kampanye perilaku ramah lingkungan, pemberdayaan komunitas lokal dalam pengelolaan kawasan, serta insentif bagi praktik ekonomi hijau dan biru. Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas apparat pengelola lingkungan, dan pemanfaatan teknologi pemantauan juga menjadi langkah penting. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan semua pihak, pembangunan daerah dapat berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan yang menjadi pondasinya.

Rendahnya kesadaran dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan memiliki keterkaitan langsung dengan buruknya pengelolaan sampah dan limbah, yang pada gilirannya menurunkan ketahanan terhadap bencana. Ketiga isu ini saling terkait dalam sebuah siklus negatif yang dapat memperburuk kondisi lingkungan dan sosial. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang benar seperti memilah, mendaur ulang, dan mengurangi limbah mengakibatkan tumpukan sampah di lingkungan. Sampah yang tidak terkelola dengan baik ini menyumbat saluran air, mencemari Sungai dan laut, serta menjadi sumber penyakit. Buruknya pengelolaan sampah dan limbah secara langsung menurunkan ketahanan terhadap bencana, terutama bencana hidrometeorologi seperti banjir. Penguatan kesadaran dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan adalah kunci untuk memutus siklus negatif ini.

Ketika masyarakat sadar bahwa tindakan mereka berdampak besar pada lingkungan, mereka akan lebih termotivasi untuk mengurangi limbah dengan menggunakan produk yang ramah lingkungan dan mengurangi konsumsi. Memilah sampah dengan memisahkan sampah organik, anorganik, dan berbahaya untuk memudahkan daur ulang. Mendukung kebijakan lingkungan dengan Berpartisipasi dalam program-program pemerintah atau komunitas yang bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Beberapa alternatif kebijakan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai IKLH diantaranya adalah :

- Pembuatan kebijakan yaitu peraturan daerah mengenai pengendalian pencemaran air, pengelolaan pengendalian pencemaran udara serta pengendalian kerusakan lahan.
- Sosialisasi lebih lanjut dan intens kepada masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di area sempadan sungai serta menggunakan air sungai untuk aktivitas sehari-hari agar dapat menjaga perilaku hidup bersih dan sehat.
- Sosialisasi dan peningkatan pelayanan IPAL domestik kepada masyarakat dan usaha-usaha kecil.
- Peningkatan pengawasan dan pembinaan industri terkait pengelolaan limbah dan emisi udara yang dihasilkan.

- Penambahan lokasi titik pantau kualitas udara agar dapat mewakili semua kecamatan yang ada di Kabupaten Belitung dan pelaksanaan pemantauan secara kontinyu menggunakan *Air Quality Monitoring System* (AQMS).
- Peningkatan inventarisasi data Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan data vegetasi lainnya, baik data primer maupun sekunder serta melakukan penetapan Kawasan area terbuka hijau melalui kebijakan peraturan daerah.
- Peningkatan program pemulihan kualitas lingkungan atau kegiatan inovasi lainnya bersama masyarakat dan pemangku kepentingan.
- Penyebarluasan informasi dan publikasi terkait ruang terbuka hijau dan tutupan hutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan hutan.
- Sosialisasi dan publikasi terkait dengan pengelolaan kualitas lingkungan hidup terhadap stakeholder

Indikator Kinerja Utama kedua yaitu Indeks Resiko Bencana Tahun 2025 Kabupaten Belitung Adalah 98,97. Nilai Indeks Resiko Bencana Tahun 2025dihitung dengan menggunakan salah satu input berupa Nilai IKD Tahun 2025. Nilai Indeks Resiko Bencana Tahun 2025 dihitung menggunakan *baseline* yang telah dimutakhirkan pada komponen bahaya dan komponen kerentanan, sehingga tidak untuk dibandingkan dengan hasil perhitungan IRB pada periode tahun 2015-2024.

Tabel 3.99 Nilai IKD 2025 dan IRB 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	IKD 2025	IRB 2025
1	Bangka	0,52	100,03
2	Bangka Barat	0,62	96,66
3	Bangka Selatan	0,24	159,49
4	Bangka Tengah	0,4	140,12
5	Belitung	0,5	98,97
6	Belitung Timur	0,48	112,36
7	Kata Pangkapinang	0,51	84,26
8	Prov.Kep. Bangka Belitung	0,47	113,13

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Tabel 3.100 Perbandingan Capaian Indikator dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	117,14	98,97	143,71	158,53	148,48

Berdasarkan data capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) dari tahun 2022 hingga tahun 2025 menunjukkan adanya tren penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022 nilai IRB tercatat sebesar 148,48, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 158,53 yang menunjukkan tingkat risiko bencana yang relatif lebih tinggi pada periode tersebut. Pada tahun 2024 terjadi penurunan nilai IRB menjadi 143,71, lebih baik dibandingkan tahun 2023 dan juga lebih rendah dari target tahun 2024 sebesar 148,48. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Selanjutnya pada tahun 2025 capaian IRB kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 98,97, jauh lebih rendah dibandingkan target tahun 2025 yaitu 117,30 serta lebih baik dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan bencana, mitigasi, serta peningkatan kesiapsiagaan yang dilakukan telah memberikan dampak positif dalam menurunkan tingkat risiko bencana di daerah. Secara keseluruhan, walaupun formulasi perhitungan IRB hanya bisa dilakukan oleh BNPB namun tren penurunan nilai IRB dari tahun 2023 hingga tahun 2025 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan kinerja dalam penanggulangan bencana semakin meningkat, sehingga tingkat risiko bencana di wilayah tersebut dapat ditekan secara signifikan.

Tabel 3.101 Penghitungan Indeks Resiko Bencana

Bencana	Skor Bahaya	Skor Kerentanan	Skor Kapasitas	IRBI	IRB Kabupaten
	H	V	C	R	
Banjir					98,97
Banjir Bandang					
Cuaca Ekstrem					
Gelombang Ekstrem dan Abrasi					
Gempabumi					
Kebakaran Hutan dan Lahan					
Kekeringan					
Tanah Longsor					

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut Indeks Resiko Bencana Kabupaten Belitung adalah 98,97 atau kategori **"SEDANG"**. Faktor pendorongnya adalah Indeks Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*). Komponen 27 bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempabumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logisitik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan. Oleh karena itu, indeks risiko bencana dapat dicapai melalui strategi peningkatan komponen kapasitas (*coping capacity*) yang diukur berdasarkan kapasitas penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan uraian pengaruh komponen dalam penurunan indeks risiko bencana serta strategi pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas, capaian penanggulangan bencana dinilai berdasarkan investasi peningkatan komponen kapasitas. Untuk itu, komponen bahaya dan kerentanan diasumsikan konstan atau sama.

Sementara itu, Faktor Penghambatnya adalah Komponen kapasitas: dihitung berdasarkan kapasitas pemerintah daerah berdasarkan perangkat Penilaian IKD (71 Indikator).

Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan didaerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing unit OPD dan penganggaran daerah yang disusun berdasarkan koordinasi di tataran daerah. Hal ini sulit terealisasi manakala dukungan semua pihak yang terkait belum optimal .

Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja diperlukan untuk mengetahui *cost* per *outcome* atau biaya/anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja serta menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang ditetapkan telah efektif sebagai pengungkit untuk mencapai kinerja. Analisis efisiensi penggunaan anggaran menggunakan formula pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 466 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, dengan penyesuaian dan modifikasi sesuai kondisi di Pemerintah Daerah.

Efisiensi pada pelaporan ini dihitung dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran sasaran dengan capaian kinerja sasaran dan realisasi anggaran sasaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran sasaran. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:

1. **Efisien**, jika persentase rata-rata capaian kinerja Sasaran mencapai 100% atau lebih, dan tingkat efisiensi anggaran lebih dari sama dengan 0%. Batas atas kewajaran tingkat efisiensi anggaran adalah maksimal 20%.
2. **Tidak efisien**, jika persentase rata-rata capaian kinerja Sasaran kurang dari 100%, dan/atau tingkat efisiensi anggaran kurang dari 0%.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada tahun 2025 terlampir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.102 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Pagu Anggaran x Capaian Kinerja	(Pagu Anggaran x Capaian Kinerja)-Realisasi	Tingkat Efisiensi Anggaran	Ket
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian Serapan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)	(10)=(6)x(7)	(11)=(10)-(8)	(12)=(11)/(7)	(13)
1	Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	1.Indeks Modal Manusia	0,55	n.a	n.a	178,785,359,154	163,311,071,739	91.34%	n.a	n.a	n.a	n.a-
		2.Tingkat Kemiskinan	5,2	6,44	76,15							
2	Meningkatnya kualitas pendidikan	1.Rata-rata lama sekolah	9,16	9,11	99,45	69,567,877,996	66,285,460,590	95.28%	68,479,140,705.36	2,193,680,115.36	0,03%	Efisien
		2.Harapan lama sekolah	12,42	12,1	97,42							
3	Meningkatnya kualitas kesehatan	Usia harapan hidup	74,15	73,13	98,62	103,987,369,288	92,301,873,963	88.76%	102,552,343,591.83	10,250,469,628.83	0,10%	Efisien
4	Menurunnya prevalensi stunting	Prevalensi stunting	16,94	8,82	147,93	4,663,248,144	4,185,682,566	89.76%	6,898,342,979.42	2,712,660,413.42	6,81%	Efisien
5	Meningkatnya pemerataan dan pendapatan masyarakat	Pengeluaran per kapita	14.651.000	14.550.000	99,31	566,863,726	538,054,620	94.92%	598,834,840.15	60,780,220.15	0,11%	Efisien
		Tingkat pengangguran terbuka	3,74	3,64	102,67							
		Indeks Gini	0,241	0,205	114,94							
6	Meningkatnya daya saing ekonomi sektor unggulan dan potensial	Laju pertumbuhan ekonomi	2,11	4,06	192,42	37,462,566,704	33,623,147,719	89.75%	72,085,470,851.84	38,462323,132.84	1,03%	Efisien
7	Meningkatnya investasi daerah	Nilai investasi (tahun berkenaan) (dalam juta rupiah) (PMDN dan PMA)	1.200.000 Juta Rupiah	730.000 Juta Rupiah	60,83	**1,598,829,291**	**1,218,499,342**	76.21%	972,567,857.72	(245,931,484.28)	0,00%	Tidak Efisien
8	Meningkatnya pertumbuhan sektor prima	Pertumbuhan sektor Prima	3,8	3,78	99,47	7,830,215,131	6,316,324,462	80.67%	7,788,714,990.81	1,472,390,528.81	0,19%	Efisien

9	Meningkatnya kualitas dan daya saing pariwisata serta budaya daerah	Indeks Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kota	3,8	3,14	82,63	28,033,522,282	26,088,323,915	93.06%	23,164,099.461.62	(2,924,224,453.38)	0,00%	Tidak Efisien
10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, adaptif dan Kolaboratif)	Indeks reformasi birokrasi	80(BB)	76,93 (Nilai Sementara)	96,16	728,839,826,463.66	667,045,394,104.21	91.52%	700.852,377,127.46	33,806,983,023.25	0,05%	Efisien
11	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel berbasis digital	Indeks pemerintah digital	1,80	Indeks SPBE 4,15	n.a	134,137,736,582.00	129,443,759,466.00	96.50%	n.a	n.a	n.a	n.a-
		Nilai SAKIP	65,84 (B)	65,49	99,47							
		Indeks pengelolaan keuangan daerah	76,8121	70.4597	91,73							
		Indeks Pelayanan Publik	4,1	4,06	99,02							
		Tingkat Maturitas SPIP	Level3 (3,541)	Level2 (2,449)	69,16							
12	Terwujudnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	79,80	81,93	102,67	592,340,202,856.66	535,985,980,641.21	90.49%	608,155,686,272.93	72,169,705,631.72	0,12%	Efisien
13	Rasio kemandirian fiskal Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian fiskal	23,94	29,38	122,72	2,361,887,025	1,615,653,997	68.41%	2,898,507,757.08	1,282,853,760.08	0,54%	Efisien
14	Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Baik (85,35)	n.a	n.a	99,812,835,640.04	94,231,265,730.00	94.41%	99,543,340,983.81	5,312,075,253.81	0,05%	Efisien
		Penurunan intensitas Emisi GRK	54,55	54,4	99,73							
15	Tersedianya Infrastruktur yang inklusif dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	67,28	70,30	104,49	61,538,588,955.04	58,000,849,145.00	94.25%	64,301,671,599.12	6,300,822,454.12	0,10%	Efisien

16	Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	Indeks Kesulitan geografis	32,52	n.a	n.a	10,978,167,750	10,809,704,734	98.47%	n.a	n.a	n.a	n.a-
17	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Indeks Resiko Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,81	75,77	98,65	27,296,078,935	25,420,711,851	93.13%	24,995,019,480,78	(425,692,370)	0,00%	Tidak Efisien
		Indeks Resiko Bencana	117,14	98,97	84,49							
Rata-rata Capaian					105,18%	Rata – Rata Capaian					0,30%	

Berdasarkan informasi yang tertuang pada tabel di atas dapat dilihat bahwa rata- rata capaian kinerja outcome adalah sebesar 105,18% dengan tingkat efisiensi anggaran 0,30%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Belitung sudah cukup efektif dan efisien dalam menggunakan sumber dayanya untuk mencapai kinerja sasaran daerah. Kemudian secara umum capaian anggaran pada seluruh sasaran daerah juga sudah baik karena tidak ada capaian dengan deviasi keuangan lebih dari 10 persen. Namun demikian, masih terdapat tiga sasaran daerah yang belum efisien dalam memanfaatkan sumber daya dikarenakan capaian kinerja tidak melampaui target dan empat indikator sasaran yang masih dalam perhitungan realisasi tahun 2025.

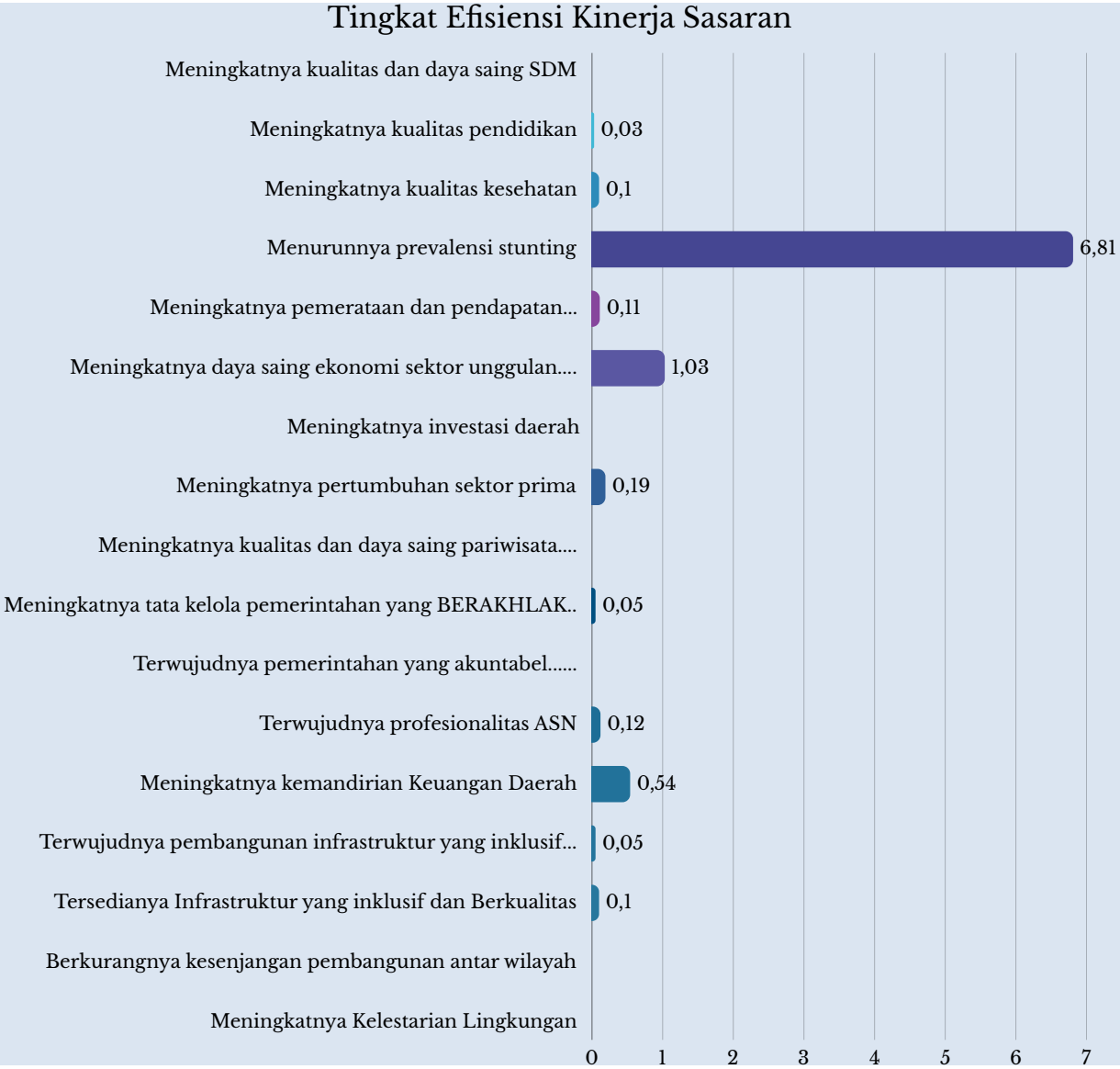

Grafik 3.13 Tingkat Efisiensi Anggaran Kinerja Sasaran Tahun 2025

Pada sasaran ketujuh "**Meningkatnya investasi daerah**", perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi anggaran menunjukkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Capaian Kinerja Sasaran ketujuh pada tahun 2025 sebesar 60,83% yang artinya realisasi lebih kecil dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Kemudian, realisasi anggaran untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp1.218.499.342,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp1.598.829.291,00 atau capaian serapan anggarannya sebesar 76,21%.

Selanjutnya pada sasaran sembilan "**Meningkatnya kualitas dan daya saing pariwisata serta budaya daerah**" juga menunjukkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Capaian Kinerja Sasaran kesembilan pada tahun 2025 sebesar 82,63% yang artinya realisasi lebih kecil dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Kemudian, realisasi anggaran untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp26.088.323.915,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp28.033.522.282,00 atau capaian serapan anggarannya sebesar 93,06%.

Pada sasaran tujuh belas "**Meningkatnya Kelestarian Lingkungan**" juga menunjukkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Capaian Kinerja Sasaran kesembilan pada tahun 2025 sebesar 91,57% yang artinya

realisasi lebih kecil dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Kemudian, realisasi anggaran untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp26.088.323.915,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp28.033.522.282,00 atau capaian serapan anggarannya sebesar 93,06%.

Pada sasaran tujuh belas **"Meningkatnya Kelestarian Lingkungan"** juga menunjukkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Capaian Kinerja Sasaran kesembilan pada tahun 2025 sebesar 91,57% yang artinya realisasi lebih kecil dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Kemudian, realisasi anggaran untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp25.420.711.851,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp27.296.078.935,00 atau capaian serapan anggarannya sebesar 93,13%.

Selanjutnya, evaluasi terhadap pencapaian kinerja sasaran yang belum tercapai akan dilaksanakan dengan mencermati faktor-faktor penghambat kinerja dan memetakan aktor dan *stakeholder* terkait dalam *crosscutting* intervensi program dan kegiatan pendorong kinerja agar pada tahun tahun 2026 realisasi sasaran tersebut dapat tercapai.

3.3 CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Upaya peningkatan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung sepanjang tahun 2025 telah menghasilkan berbagai capaian dan prestasi di berbagai bidang pembangunan. Prestasi tersebut merupakan hasil dari kerja sama, komitmen, serta sinergi antara pemerintah daerah, perangkat daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan daerah, serta pemberdayaan masyarakat.

Salah satu capaian penting pada tahun 2025 adalah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Belitung untuk kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. Opini tersebut disampaikan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 23 Mei 2025. Perolehan opini WTP ini merupakan yang ke-5 (lima) kalinya bagi Pemerintah Kabupaten Belitung, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Di bidang inovasi pelayanan publik, Puskesmas Badau berhasil meraih penghargaan Top 5 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025. Penghargaan ini mencerminkan adanya inovasi dan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terus dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Belitung.

Prestasi juga diraih di bidang olahraga, dimana Kabupaten Belitung berhasil menempati posisi tiga besar dalam Kejuaraan Daerah (Kejurda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dengan perolehan medali sebanyak 21 medali emas, 17 medali perak, dan 17 medali perunggu. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan pembinaan dan

pengembangan atlet daerah yang dilakukan secara berkelanjutan.

Di bidang pendidikan dan inovasi teknologi, prestasi membanggakan diraih oleh SMP Negeri 6 Tanjungpandan yang berhasil meraih Juara I Lomba Teknologi Tepat Guna Kategori Pelajar melalui karya inovatif yang dikembangkan oleh siswa atas nama Silva Caesar Haidari, Sherina Tri Antini, dan Hanika Nur Rahma. Keberhasilan ini mencerminkan berkembangnya kreativitas dan inovasi generasi muda di Kabupaten Belitung.

Selain itu, prestasi juga diraih dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan desa dan kelurahan. Desa Air Seruk, Kecamatan Sijuk berhasil meraih Juara II Lomba Desa Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sementara Kelurahan Lesung Batang juga memperoleh Juara II Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pemerintah desa dan kelurahan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, serta pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

Dalam bidang pemberdayaan ekonomi keluarga, Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk berhasil meraih Juara II Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Prestasi ini menjadi bukti keberhasilan program pemberdayaan ekonomi keluarga yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif.

Di bidang pembangunan keluarga dan kependudukan, Kabupaten Belitung juga meraih berbagai penghargaan dalam Lomba Apresiasi Tenaga Lini Lapangan Terbaik Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diselenggarakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penghargaan tersebut antara lain diraih oleh Gustri Wenni sebagai Kader IMP Terbaik III, serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa Badau Kecamatan Badau yang terdiri dari Elinda, Fitriani, dan Rita sebagai TPK Terbaik III.

Selanjutnya, dalam kategori Pasangan Keluarga Berencana Lestari, pasangan Ibu Yeni Yuliantina dan Bapak Daharin berhasil meraih Juara I Pasangan KB Lestari 20 Tahun Terbaik Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Prestasi ini menunjukkan keberhasilan program keluarga berencana dalam membangun keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas.

Prestasi lainnya juga diraih dalam Pemilihan Kampung Keluarga Berkualitas, dimana Kampung KB Tanjong Tinggi Kecamatan Sijuk berhasil meraih Kategori Kabupaten Terbaik I Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Capaian ini menunjukkan keberhasilan implementasi program pembangunan keluarga yang terintegrasi dengan berbagai sektor pembangunan di tingkat desa.

Berbagai prestasi yang diraih sepanjang tahun 2025 tersebut menjadi bukti nyata dari komitmen Pemerintah Kabupaten Belitung dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta

pembangunan daerah secara berkelanjutan. Ke depan, capaian ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kebijakan umum keuangan/anggaran Kabupaten Belitung tahun 2025 diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu :

- Fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat publik servis seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur:
- Fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah infrastruktur dasar dan lainnya;
- Fungsi stabilitasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 27 Tahun 2025 tanggal 1 September 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran2025, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 1.068.887.632.449,00 berkurang sejumlah Rp. 30.615.057.345,30,00 sehingga menjadi Rp. 1.038.272.575.103,70,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Daerah :		
Semula	:	**Rp. 953.887.632.449,00**
Bertambah/ (berkurang)	:	**Rp. (14.638.433.227,00)**
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	:	**Rp. 939.249.199.222,00**
Belanja Daerah :		
Semula	:	**Rp. 1.068.887.632.449,00**
Bertambah/ (berkurang)	:	**Rp. (30.615.057.345,30)**
Jumlah Belanja setelah Perubahan	:	**Rp. 1.038.272.575.103,70**
Pembiayaan Daerah :		
Penerimaan Pembiayaan :		
Semula	:	**Rp. 115.000.000.000,00**
Bertambah/ (berkurang)	:	**Rp. (15.976.624.118,30)**
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	:	**Rp. 99.023.375.881,70**
Pengeluaran Pembiayaan :		
Semula	:	--
Bertambah/ (berkurang)	:	--
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	:	--
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	:	**Rp. 99.023.375.881,70**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	:	--

3.4.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah merupakan hasil akumulasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah: (1) Pendapatan pajak daerah, (2) Pendapatan retribusi daerah, (3) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Transfer terdiri dari komponen (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari komponen (1) Pendapatan hibah, (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar. Pendapatan Daerah dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain – Lain Pendapatan Yang Sah yang masing - masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.103 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**940.590.481.222,00**	**940.242.247.555,09**	**99,96**	**977.370.104.650,33**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**202.354.324.639,00**	**213.489.485.745,09**	**105,5**	**185.033.042.636,33**
	Pajak Daerah	109.084.621.493,00	104.082.515.970,00	**95,41**	95.733329497,25.
	Retribusi Daerah	78.007.440.946,00	92.848.376.288,50	**119,02**	28.328.411.252,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.600.000.000,00	4.886.428.412,02	**87,25**	5.566.654.063,95
	Lain-lain PAD yang Sah	9.662.262.200,00	11.672.165.074,57	**120,8**	55.404.647.823,13
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**202.354.324.639,00**	**213.489.485.745,09**	**105,5**	**185.033.042.636,33**
2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**738.236.156.583,00**	**726.752.761.810,00**	**98,44**	**781.559.654.246,00**
	Dana Perimbangan	-	-	-	661.132.445.242,00

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	-	80.735.062.654,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	**485.393.500.051,00**
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	-	-	**10.766.758.288,00**
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	-	-	84.237.114.249,00
	Dana Bagi Hasil (DBH)	39.425.962.000,00	38.705.944.300,00	**98,17**	-
	Dana Alokasi Umum (DAU)	489.709.683.000,00	478.853.010.054,00	**97,78**	-
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	102.374.688.190,00	100,057.600.988,00	**97,73**	-
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**631.510.333.190,00**	**617.616.555.342,00**	**97,79**	**661.132.445.242,00**
	Dana Desa	**41.614.636.000,00**	**40.620.586.800,00**	**97,61**	**41.477.591.670,00**
	Insentif Fiskal	20.586.869.000,00	20.586.869.000,00	100	15.976.321.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	62.201.505.000,00	61.207.455.800,00	98,4	57.453.912.670,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.524.318.393,00	47.928.750.668,00	107,64	62.973.287.334,00
	Pendapatan Bagi Hasil	42.743.036.393,00	46.262.718.168,00	108,23	59.001.661.334,00
	Bantuan Keuangan	1.781.282.000,00	1.666.032.500,00	93,52	3.971.626.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	44.524.318.393,00	47.928.750.668,00	107,64	62.973.287.334,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	738.236.156.583,00	726.752.761.810,00	98,44	781.559.645.246,00

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	10.777.416.768,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	10.777.416.768,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	10.777.416.768,00
	JUMLAH PENDAPATAN	940.590.481.222,00	940.242.247.555,09	99,96	977.370.104.650,33

3.4.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Rencana Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Sedangkan orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah. Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, Belanja harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas sesuaidengan prioritas dan program- program strategis daerah. Belanja Daerah Tahun 2025 dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer yang masing - masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.104 Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
1	**BELANJA DAERAH**	**1.039.613.857.103,70**	**943.425.590.181,53**	**90,74**	**1.060.978.760.805,40**
	BELANJA OPERASI	888.104.600.616,70	798.966.103.189,53	89,96	885.984.171.231,78

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
	Belanja Pegawai	529.950.395.509,00	473.457.900.870,00	89,34	475.569.482.472,00
	Belanja Barang dan Jasa	335.543.976.031,70	303.357.300.325,53	90,4	363.320.239.519,78
	Belanja Subsidi	648.688.228,00	540.823.642,00	83,37	638.399.797,00
	Belanja Hibah	21.495.325.230,00	21.162.331.642,00	98,45	46.220.077.443,00
	Belanja Bantuan Sosial	466.215.618,00	447.746.725,00	96,03	235.972.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	888.104.600.616,70	798.966.103.189,53	89,96	885.984.171.231,78
2	**BELANJA MODAL**	**43.619.973.682,00**	**38.837.469.692,00**	**89,03**	**67.145.369.203,62**
	Belanja Modal Tanah	500.000.000,00	491.325.000,00	98,26	4.135.660.290,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.118.173.570,00	15.344.503.359,00	89,63	26.330.082.535,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.732.488.800,00	8.954.328.979,00	76,32	18.418.277.038,62
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.192.587.965,00	10.996.019.657,00	98,24	14.696.115.290,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.037.603.347,00	3.012.397.697,00	99,17	3.400.250.200,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	39.120.000,00	38.895.000,00	99,42	164.983.850,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	43.619.973.682,00	38.837.469.692,00	89,03	67.145.369.203,62
	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.250.000.000,00	-	-	-
	Belanja Tidak Terduga	1.250.000.000,00	-	-	-
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	1.250.000.000,00	-	-	-
3	BELANJA TRANSFER	106.639.282.805	105.622.017.300	99	107.849.220.370
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	10.931.713.305,00	10.908.500.000,00	99,78	8.774.242.924,00

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	879.333.000,00	879.330.000,00	99,99	987.814.876,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	30.000.000.000,00	300.000.000,00	100	-
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	94.528.236.500,00	93.534.187.300,00	98,94	98.096.162.570,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	106,639.282.805,00	105.622.017.300	99	107.849.220.370
	JUMLAH BELANJA	1.039.613.857.103,70	943.425.590.181,53	90,74	1.060.978.760.805,40
	SURPLUS/DEFISIT	-99.023.375.881,70	-3.183.342.626,44	3,21	- 83,608.656.155,07

3.4.3 KONDISI PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun kebijakan umum pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;
- Apabila APBD dalam keadaansurplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan;
- Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

Pembiayaan Daerah dikelompokkan ke dalam Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.105. Komposisi Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
1	PEMBIAYAAN DAERAH	99.023.375.881,70	99.023.375.881,70	100	182.632.032.036,77
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	99.023.375.881,70	99.023.375.881,70	100	182.632.032.036,77
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	99.023.375.881,70	99.023.375.881,70	100	182.632.032.036,77
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	99.023.375.881,70	99.023.375.881,70	100,00	182.632.032.036,77
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	3.000.000.000,00
	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	3.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	3.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	99.023.375.881,70	99.023.375.881,70	10.000,00	182.632.032.036,77
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	95.840.033.255,26	-	99.023.375.881,70

BAB IV PENUTUP

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan daerah, maka laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Belitung Tahun 2025 yang merupakan tahun kedua pada RPD 2024 -2026 dalam pembangunan periode masa transisi kepemimpinan Bupati Belitung.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025, disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Belitung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 12 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Belitung yang telah ditetapkan pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Belitung ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Beliltung Tahun 2024 - 2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 12 indikator kinerja utama tahun 2025, sebagai berikut:

- 10 Indikator atau 83,34% dengan kategori Sangat Berhasil
- 2 Indikator atau 16,67% dengan kategori Berhasil

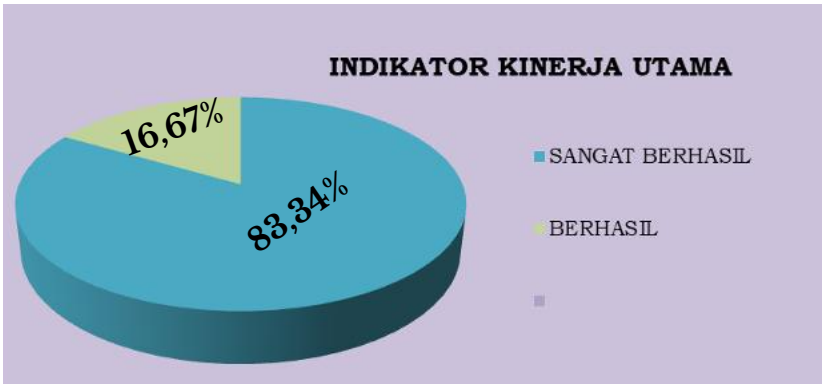

Grafik 4.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis RPD 2024-2026 Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025

Namun jika dibandingkan dengan pencapaian periode pertama RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan pada triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang ditetapkan pada 19 Agustus 2025, Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target yang disajikan dalam grafik berikut ini:

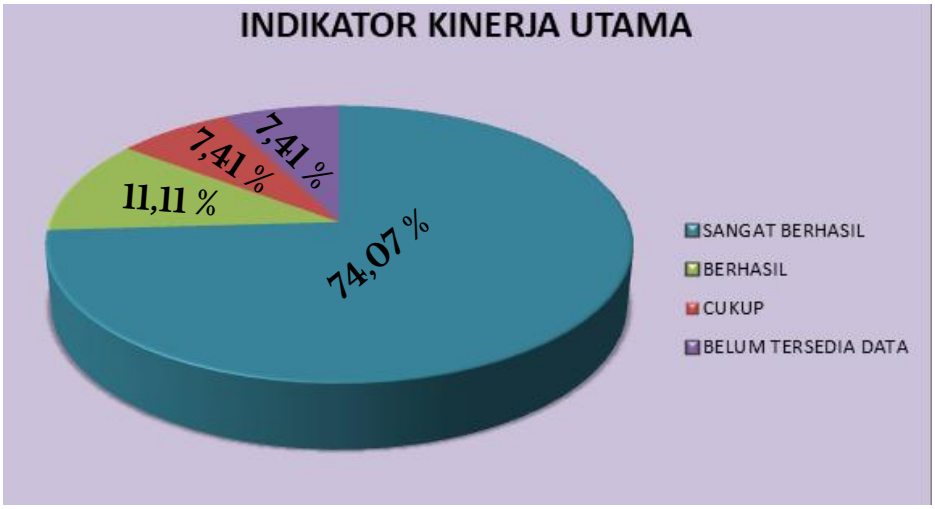

Grafik 4.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis RPJMD 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 27 indikator kinerja utama tahun 2025, sebagai berikut:

- 20 Indikator atau 74,07% dengan kategori Sangat Berhasil
- 3 Indikator atau 11,11% dengan kategori Berhasil
- 2 Indikator atau 7,41% dengan kategori Cukup
- 2 Indikator atau 7,41% dengan kategori Belum Tersedia Data

Meskipun demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja utama yang capaiannya belum seperti yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025 – 2029 khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, menjadi bahan refleksi sebagai motivasi untuk berusaha lebih keras dan lebih baik lagi.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR : 22 TAHUN 2023

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET
I	**Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi**	**Rasio Gini**	$G = 1 - \sum_{i=l}^{k} P_i(Q_i + Q_{i-1})$ dimana: Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi	BPS	- Diskominfo - BAPPEDA	
I.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{\textbf{∑ pertumbuhan PDRB tahun (n) – tahun (n-1)}}{\textbf{∑ pertumbuhan PDRBtahun(n-1)}}$ **x** 100%	BPS	- Diskominfo - BAPPEDA	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Ketentuan mengenai SAKIP diatur dalam Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sedangkan pelaksanaan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Pemberyaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD). Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

Bertitik tolak dari Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025, selanjutnya pada tahun 2025 ini merupakan tahun transisi kepemimpinan Bupati terpilih untuk periode 2025-2029, oleh sebab itu dalam pelaksanaanya juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang ditetapkan pada 19 Agustus 2025, serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan LKjIP Tahun 2025 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET
I.2	Menurunnya Kemiskinan Penduduk	Tingkat Kemiskinan	Po = $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{Z-Yi}{Z}\right]$ *Dimana :* Po = Rasio kesenjangan kemiskinan (*poverty gap*) Z = garis kemiskinan q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan Yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,3,…,q), yi < z n = jumlahpenduduk	BPS	- Diskominfo - BAPPEDA	
I.3	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	0,5 x (infrastruktur ke-PU-an dan permukiman)) + (0,5 x infrastruktur perhubungan) dimana: Infrastruktur ke-PU-an dan permukiman = (0,5 x Persentase pemenuhan infrastruktur ke-PU-an) + (0,50 x Rata-rata Pemenuhan PSU Permukiman) Infrastruktur perhubungan = (0,5 x persentase pemenuhan pelabuhan) + (0,5 x sarpras keselamatan jalan)	- Data dasar prasarana jalan kabupaten/kota form DD- 1 - SK Bupati tentang penetapan jalan kabupaten - Laporan monitoring dan evaluasi bina marga - Laporan monitoring dan evaluasi sumber daya air - SK Bupati tentang Penetapan Daerah Irigasi - Laporan monitoring dan evaluasi tata ruang - Laporan monitoring dan evaluasi cipta karya - Laporan monitoring dan evaluasi perumahan dan permukiman - Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Dinas Perhubungan	- Dinas PUPR - Dinas Perhubungan	

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET
II	**Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran. $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	BPS	- Diskominfo - BAPPEDA	
II.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup = (rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu) atau (jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang) BPS dalam menghitung menggunakan rumusan dari angka kematian menurut umur (ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan register kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program **Mortpak Lite**.	BPS	- Diskominfo - Dinas Kesehatan	
II.2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	(Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas dan lama pendidikan yang ditamatkan/dijalani/ Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas) x 100%	BPS	- Diskominfo - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
III	**Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transfaran**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	Hasil Evaluasi KemenPAN-RB	Laporan Hasil Evaluasi KemenPAN-RB	- Seluruh Perangkat Daerah	

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET
III.1	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Opini BPK	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah pada tahun berkenaan	- Laporan Keuangan Daerah hasil Evaluasi dan Penilaian BPK - Laporan pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kabupaten Belitung	- SETDA - BPKAD - Inspektorat	
		Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	Nilai hasil evaluasi AKIP oleh Kemen PAN-RB	- Laporan Evaluasi SAKIP Kabupaten - Laporan Hasil Implementasi SAKIP	- SETDA - BAPPEDA - Inspektorat	
III.2	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, rumusan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN merupakan jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/ indikator $IP = \sum_{i=1}^{4} IP_i = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	Laporan Hasil Pengukuran Indeks Profesional ASN - BKN	BKPSDM	

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET
IV	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**IKLH=(0,376 x IKA)+(0,405 x IKU) + (0,219 x IKTL)** Keterangan: IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks KualitasUdara IKTL = Indeks Kualitas TutupanLahan	Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	- Dinas Lingkungan Hidup	
IV.1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	**IKLH=(0,376 x IKA)+(0,405 x IKU) + (0,219 x IKTL)** Keterangan: IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks KualitasUdara IKTL = Indeks Kualitas TutupanLahan	Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	- Dinas Lingkungan Hidup	

Tanjungpandan, Januari 2024

Pj. Bupati Belitung,

Yuspian, S.Sos., M.I.R

Lampiran I Peraturan Bupati Belitung
Nomor : 42 Tahun 2025
Tanggal : 21 November 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025-2029

VISI dan MISI Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029

Visi : Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera

Misi :
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dalam Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing berbasis Sektor Unggul dan Potensial;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih dan Bermartabat;
4. Membangun Infrastruktur yang Berkualitas secara Merata dan Berkelanjutan.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KOORDINATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5	6	7
I	**Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**	**Indeks Modal Manusia**	**Nilai**	Indeks Modal Manusia menghitung kontribusi kesehatan dan pendidikan terhadap produktivitas pekerja. Skor indeks akhir berkisar dari 0 hingga 1 dan mengukur produktivitas sebagai pekerja masa depan dari anak yang lahir hari ini relatif terhadap patokan kesehatan penuh dan pendidikan lengkap. Indeks Modal Manusia adalah pendekatan yang dilakukan oleh World Bank (*Human Capital Index*). Indeks modal manusia diukur melalui beberapa komponen utama: 1. Probabilitas bertahan hidup (*survival*) hingga usia 5 tahun: Probabilitas bahwa seorang anak yang baru lahir akan bertahan hingga usia 5 tahun. Data dihitung dari angka kematian balita. 2. Pendidikan: Akses pendidikan diukur melalui harapan lama sekolah. Kualitas pendidikan diukur melalui *harmonized test scores*. Data akses dan kualitas	Badan Pusat Statistik	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Kesehatan - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Perhubungan - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KOORDINATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5	6	7
				pendidikan ditransformasikan menjadi pengukuran *Learning-Adjusted Years of Schooling* menggunakan metrik konversi. 3. Kesehatan: Mencakup berbagai indikator kesehatan, termasuk stunting, yang merupakan kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat karena malnutrisi kronis. 2 (dua) proksi yang digunakan adalah: (1) *adult survival rate* yang didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia 15 tahun yang hidup hingga 60 tahun; dan (2) prevalensi stunting. Rumus HCI pada dasarnya adalah **produk (perkalian) dari tiga komponen utama**, yang masing-masing mengukur produktivitas relatif terhadap tolok ukur ideal: $$\text{HCI} = \text{Survival} \times \text{School} \times \text{Health}$$ Atau, dalam notasi yang lebih rinci: $$\text{HCI} = \left(\frac{p}{p^*}\right) \times e^{\phi(s_{NG} - s^*)} \times e^{\gamma(z_{NG} - z^*)}$$ Di mana: • p = Probabilitas kelangsungan hidup hingga usia 5 tahun (*Probability of survival to age 5*). • p^* = Tolok ukur kelangsungan hidup (ditetapkan *$p^ = 1$** atau 100%). • s_{NG} = Rata-rata tahun sekolah yang disesuaikan dengan kualitas (*Learning-adjusted years of schooling*) yang diharapkan dicapai oleh anak yang lahir hari ini. • s^* = Tolok ukur tahun sekolah lengkap (ditetapkan *$s^ = 14$** tahun). • z_{NG} = Ukuran kesehatan generasi berikutnya (diperoleh dari Tingkat Kelangsungan Hidup Dewasa dan Tingkat Stunting Anak). • z^* = Tolok ukur kesehatan penuh. • ϕ dan γ = Tingkat pengembalian produktivitas terhadap pendidikan (ϕ) dan kesehatan (γ) yang diambil dari studi mikro-ekonometri.			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Sekretariat Daerah - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KOORDINATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5	6	7

				HCI terdiri dari tiga komponen yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
				1. Komponen Kelangsungan Hidup (*Survival*)
				Ini mengukur kemungkinan seorang anak yang lahir hari ini akan bertahan hidup hingga usia ketika mereka mulai bersekolah dan bekerja (diukur sebagai **probabilitas bertahan hidup hingga usia 5 tahun**).
				• **Indikator:** Probabilitas Bertahan Hidup hingga usia 5 tahun (1 - Tingkat Kematian Balita).
				2. Komponen Sekolah (*School*)
				Ini mengukur kualitas dan kuantitas pendidikan yang diharapkan diperoleh seorang anak pada usia 18 tahun.
				• **Indikator:**
				  ○ **Kuantitas Pendidikan:** Harapan Tahun Sekolah (*Expected Years of Schooling*) oleh usia 18.
				  ○ **Kualitas Pendidikan:** Nilai Tes yang Diharmonisasi (*Harmonized Test Scores*).
				  ○ Kedua indikator ini digabungkan untuk menghasilkan **Rata-rata Tahun Sekolah yang Disesuaikan dengan Pembelajaran** (*Learning-Adjusted Years of School*).
				3. Komponen Kesehatan (*Health*)
				Ini mengukur lingkungan kesehatan secara keseluruhan yang akan dihadapi seorang anak.
				• **Indikator:**
				  ○ **Kelangsungan Hidup Dewasa** (*Adult* Survival *Rate*): Persentase remaja usia 15 tahun yang akan bertahan hidup hingga usia 60 tahun.
				  ○ **Pertumbuhan Sehat Anak** (*Healthy* Growth *among Children*): Tingkat **Stunting** (rasio anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami stunting).
				
				Interpretasi Skor HCI
				• Skor HCI berkisar antara **0 hingga 1**.
				• Skor **1.0** berarti anak yang lahir hari ini dapat mencapai tolok ukur penuh yaitu **kesehatan**			

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KOORDINATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5	6	7
				penuh dan **pendidikan lengkap** (14 tahun sekolah berkualitas tinggi). • Jika suatu negara memiliki skor HCI **0.70**, ini menunjukkan bahwa potensi pendapatan calon pekerja di masa depan hanya akan **70%** dari potensi mereka jika mereka mencapai kondisi kesehatan penuh dan pendidikan lengkap. Secara umum, IMM yang tinggi menunjukkan bahwa suatu wilayah telah berhasil dalam memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang baik kepada penduduknya, yang pada gilirannya akan mendukung produktivitas tenaga kerja di masa depan.			
		Tingkat Kemiskinan	**%**	$P_0 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{Z - Yi}{Z}\right]$ dimana: P_0 = Rasio kesenjangan kemiskinan (*poverty gap*) Z = garis kemiskinan q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan Yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,3,…,q), yi < z n = jumlah penduduk Tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin merupakan bagian dari populasi penduduk yang tidak mampu memenuhi hak dasar (hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan) secara layak dan mandiri dan memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan.	Badan Pusat Statistik	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KOORDINATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5	6	7
I.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	Rata-rata lama sekolah (RLS)/ *Mean years of schooling* (MYS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. ((Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas dan lama pendidikan yang ditamatkan/dijalani) / Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas) x 100 %	Badan Pusat Statistik	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Perhubugan
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	Harapan Lama Sekolah (HLS)/*Expected Years of Schooling* (EYS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. $$Harapan\ Lama\ Sekolah = FK \sum_{i=7}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n)	Badan Pusat Statistik	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika	- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Sekretariat Daerah
I.2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Tahun	Umur/Usia Harapan Hidup adalah Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. BPS dalam menghitung menggunakan rumusan dari angka kematian menurut umur (ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan register kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Usia	Badan Pusat Statistik	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika	- Dinas Kesehatan - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KOORDINATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5	6	7
				Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program **Mortpak Lite**. Usia Harapan Hidup = (rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu) atau (jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang).			
I.3	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	%	Prevalensi stunting adalah persentase anak balita di suatu wilayah atau negara yang mengalami gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis <u>Rumus:</u> Prevalensi stunting = (Jumlah penderita lama di wilayah dalam suatu waktu + Jumlah penderita baru diwilayah dalam satu waktu) / jumlah penduduk x 100%	Survey Kesehatan Indonesia	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah - Dinas Kesehatan	- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Dinas Kesehatan - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
I.4	Meningkatnya Pemerataan dan Pendapatan Masyarakat	Pengeluaran per Kapita	Rupiah	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*). Rata-rata Pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari SUSENAS, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100.	Badan Pusat Statistik	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KOORDINATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5	6	7
				Perhitungan Paritas Daya Beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan komoditas non makanan. Metode penghitungan Paritas Daya Beli menggunakan Metode Rao. Rumus Penghitungan Paritas Daya Beli (PPP) $PPP_j = \prod_{i=1}^{m} \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}}\right)^{1/m}$ p_{ij} : harga komoditas i di kab/kota j p_{ik} : harga komoditas i di Jakarta Selatan m : jumlah komoditas			
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	$TPT = \frac{PP}{PAK} x\ 100\%$ Keterangan : TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)	Badan Pusat Statistik	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika	- Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja
		Indeks Gini	Nilai	Indeks Gini merupakan ukuran tingkat ketimpangan pendapatan relatif antar penduduk yang berada di suatu wilayah. Indeks gini dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk. <u>Rumus:</u> $G = 1 - \sum_{i=l}^{k} P_i(Q_i + Q_{i-1})$ dimana: Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i	Badan Pusat Statistik	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika	- Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pelrindungan Anak - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KOORDINATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5	6	7
				Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi			Masyarakat dan Desa - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
II	**Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Sektor Unggulan dan Potensial**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. $\frac{\sum pertumbuhan\ PDRB\ tahun\ (n) - tahun\ (n-1)}{\sum pertumbuhan\ PDRB\ tahun\ (n-1)} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian - Sekretariat Daerah - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Dinas Perikanan - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja - Dinas Pariwisata - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pemuda dan Olahraga - Dinas Perhubungan
II.1	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	Dalam juta	Tahun berkenaan (PMDN dan PMA) Realisasi Investasi Tahun (n) = Realisasi Investasi PMDN Tahun (n) + Realisasi Investasi PMA Tahun (n)	Data jumlah realisasi investasi tahun berkenaan yang dikeluarkan LKPM BKPM RI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KOORDINATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5	6	7
							Pintu dan Perindustrian - Sekretariat Daerah
II.2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Prima	Pertumbuhan Sektor Prima	%	Sektor prima merupakan sektor lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tinggi dan memiliki kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian Daerah. Pertumbuhan sektor prima dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni: 1. Laju pertumbuhan produksi, indikator ini mengukur peningkatan jumlah produksi dari sektor-sektor prima yang memiliki produk bukan sektor jasa. 2. Kontribusi sektor terhadap PDRB, melihat seberapa besar peran sektor prima dalam menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Belitung. 3. Nilai Tambah Sektor Prima, menghitung selisih antara nilai output (hasil produksi) dengan biaya input (bahan baku dan biaya produksi lainnya). Nilai tambah yang tinggi menandakan sektor tersebut efisien dan produktif. 4. Laju Penyerapan Tenaga Kerja, melihat sejauh mana sektor prima mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.	Badan Pusat Statistik	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika	- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Dinas Perikanan - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja
II.3	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pariwisata serta Budaya Daerah	Indeks Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota	Nilai	Indeks Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kota adalah nilai yang menggambarkan kualitas Pembangunan Kepariwisataan bersifat lintas sektor dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Perhitungan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kota Mengacu kepada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional.	Laporan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Belitung	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah - Dinas Pariwisata	- Dinas Pariwisata - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pemuda dan Olahraga - Dinas Perhubungan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KOORDINATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5	6	7
				Penghitungan IPKN menggunakan dua metode penghitungan sebagai berikut: ▪ Formulasi Perhitungan Indikator Data Primer. Formula perhitungan untuk indikator yang bersumber dari data primer akan menggunakan survei opini publik dari angka 1 – 7. Survei opini publik akan dilaksanakan kepada para pemangku kepentingan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjawab seluruh komponen isi survei. Sistem perhitungan akan dilakukan penjumlahan dari seluruh responden, kemudian untuk memperoleh hasil nilai kumulatifnya akan dihitung sebagai nilai rata-rata. Hal ini bertujuan untuk dapat merepresentasikan seluruh hasil survei kepada para pemangku kepentingan, sehingga diperoleh nilai yang dapat menggambarkan kondisi keseluruhan jawaban survei. $\left(\frac{Jumlah\ total\ skor\ hasil\ survey\ per\ indikator}{Jumlah\ Responden}\right)$ ▪ Formulasi Perhitungan Indikator Data Sekunder. Formulasi perhitungan pada setiap indikator untuk IPKN selanjutnya masih menggunakan formulasi yang sama dengan IPKN sebelumnya yang digunakan untuk menormalisasi data dari hasil penilaian setiap indikator. Formula yang digunakan untuk menormalisasi setiap data indikator ke dalam skala 1 hingga 7, yaitu: Jika semakin besar nilai indikator menunjukkan hal yang positif maka menggunakan rumus: $6\left(\frac{Jumskor\ provinsi - skor\ minimum}{skor\ maksimum - skor\ minimum}\right) + 1$ Jika semakin besar nilai indikator menunjukkan hal yang negatif maka menggunakan rumus: $6\left(\frac{Jskor\ provinsi - skor\ maksimum}{skor\ minimum - skor\ maksimum}\right) + 1$			

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KOORDINATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5	6	7
				▪ Formulasi Perhitungan Skor IPKN Setelah mendapatkan nilai indikator yang telah dikonversi menjadi skala 1 hingga 7, nilai setiap pilar dapat dihitung dengan menggunakan rumus: $\left(\frac{Jumlah\ total\ skor\ indikator\ di\ tiap\ pilar}{Jumlah\ indikator\ tiap\ pilar}\right)$ Setelah mendapatkan nilai setiap indikator, nilai IPKN dapat diperoleh dengan menggunakan rumus perhitungan: $\left(\frac{Jumlah\ total\ skor\ pilar}{Jumlah\ total\ pilar}\right)$ Skor IPKN didapatkan dari penghitungan rata - rata (rata – rata aritmatik) keseluruhan komponen pilar.			
III	**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Nilai**	Nilai untuk mengukur terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif serta budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Komponen Penilaian berdasarkan: 1. Peraturan Menteri PANRB Nmor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi 2. Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 Komponen: a. RB General b. RB Tematik c. Indeks RB - RB General adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso.	Laporan Hasil Evaluasi KemenPAN-RB	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KOORDINATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5	6	7
				- RB Tematik adalah upaya percepatan pencapaian dampak berbagai agenda prioritas pembangunan nasional dengan mengurai dan menjawab untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan *(debottlenecking)* berbagai permasalahan hilir tata kelola yang terkait tema yang sudah ditetapkan oleh tingkat makro.			
III.1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel Berbasis Digital	Indeks Pemerintah Digital	Nilai	Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi) adalah penyempurnaan dari Indeks SPBE yang mengukur sejauh mana transformasi digital diterapkan di instansi pemerintah, sesuai arahan RPJMN 2025-2029 dan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Indeks Pemdi penting untuk menilai tata kelola, layanan dan infrastruktur digital, serta sebagai dasar peningkatan layanan digital berbasis evaluasi yang terukur. Indeks Pemdi terdiri dari 9 aspek penilaian dan 35 indikator spesifik. 9 aspek tersebut yaitu: 1. strategi dan rencana 2. tata kelola dan manajemen 3. teknologi digital 4. audit teknologi digital 5. keamanan siber 6. kapabilitas dan budaya digital 7. pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi 8. keterpadua layanan digital pemerintah 9. kepuasan pelanggan layanan digital pemerintah	KemenPAN RB	Dinas Komunikasi dan Informatika	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP menunjukkan penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Daerah yang memuat perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang selaras dengan sistem akuntabilitas keuangan. Nilai hasil evaluasi AKIP oleh KemenPAN-RB.	- Laporan Evaluasi SAKIP Kabupaten - Laporan Hasil Implementasi SAKIP	- Sekretariat Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah - Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KOORDINATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5	6	7
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Penghitungan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dilakukan dengan menilai 6 dimensi utama: kesesuaian perencanaan dan penganggaran, alokasi belanja APBD, transparansi, penyerapan anggaran, kondisi keuangan, dan Opini BPK atas LKPD. **6 Dimensi Penilaian IPKD** 1. **Kesesuaian Dokumen Perencanaan & Penganggaran**: Seberapa selaras dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan KUA-PPAS dan APBD. 2. **Pengalokasian Anggaran Belanja**: Proporsi belanja untuk urusan wajib, urusan pilihan, dan belanja modal. 3. **Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah**: Ketersediaan informasi keuangan daerah (APBD, Laporan Keuangan, dll.) secara publik. 4. **Penyerapan Anggaran Belanja**: Tingkat realisasi penyerapan anggaran APBD. 5. **Kondisi Keuangan Daerah**: Kemampuan daerah dalam membiayai urusan pemerintahan (rasio kemandirian, rasio ketergantungan, dll.). 6. **Opini BPK atas LKPD**: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau lainnya dari Badan Pemeriksa Keuangan.	- Kepmendagri - Keputusan Gubernur	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Indeks Pelayanan Publik	Nilai	Perhitungan Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Indonesia, yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), adalah proses yang melibatkan beberapa tahapan perhitungan bertingkat (komposit) dan pembobotan.	Keputusan MENPANRB	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	- Satuan Polisi Pamong Praja - Dinas Kependudukan

<table>
<tr><th>NO.</th><th>SASARAN STRATEGIS</th><th>INDIKATOR KINERJA UTAMA</th><th>SATUAN</th><th>PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN</th><th>SUMBER DATA</th><th>KOORDINATOR</th><th>PENANGGUNG JAWAB</th></tr>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th></th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rumus akhir IPP adalah penggabungan nilai dari beberapa aspek penilaian, seringkali dikumpulkan melalui instrumen yang berbeda (seperti formulir penilaian internal dan survei pengguna layanan).

Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik.

1. Menentukan nilai untuk setiap indikator
$Nilai\ per\ indikator: \left(\frac{nilai\ F01 + Nilai\ F02 + nilai\ F03}{3}\right)\ x\ bobot\ per\ indikator$

2. Menentukan nilai setiap aspek
$Nilai\ per\ aspek: \sum nilai\ per\ indikator$

3. Menentukan indeks
$Nilai\ indeks: \sum (nilai\ aspek_n\ x\ bobot\ aspek_n)$

Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi:
<table>
<tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr>
<tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr>
<tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr>
<tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr>
<tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr>
<tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr>
<tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td></td>
<td>dan Pencatatan Sipil
- Sekretariat DPRD
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
- Kecamatan
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Dinas Kesehatan
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Tingkat Maturitas SPIP</td>
<td>Angka</td>
<td>Tingkat maturitas SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penilaian Berdasarkan
▪ Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</td>
<td>Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP</td>
<td>Inspektorat</td>
<td>Seluruh Perangkat Daerah</td>
</tr>
</table>

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KOORDINATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5	6	7
				▪ Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Komponen penilaian: a. Penetapan Tujuan (40%) - Kualitas Sasaran Strategis - Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis b. Struktur dan Proses (30%) - Lingkungan Pengendalian - Penilaian Risiko - Kegiatan Pengendalian - Informasi dan Komunikasi - Pemantauan c. Pencapaian Tujuan (30%) - Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi - Keandalan Pelaporan Keuangan - Pengamanan atas Aset - Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan			
III.2	Terwujudnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, rumusan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN merupakan jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/ indikator.	Hasil Pengukuran Indeks Profesional ASN - BKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Sekretariat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KOORDINATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5	6	7
				$IP = \sum_{i=1}^{4} IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m <u>Keterangan:</u> • Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran. • Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki			

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KOORDINATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5	6	7
				kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. • Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. • Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.			
III.3	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	%	Rasio kemandirian fiskal merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar suatu pemerintah daerah mampu membiayai sendiri kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik-nya tanpa bergantung pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat atau pinjaman. Rasio ini mencerminkan tingkat ketergantungan terhadap sumber eksternal (transfer maupun utang) dalam pendanaan anggaran daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin mandiri secara fiskal suatu daerah Rasio kemandirian fiskal = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{(\text{Bantuan dan Transfer Pemerintah Pusat} + \text{Pinjaman})} \times 100\%$	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Badan Pendapatan Daerah	- Badan Pendapatan Daerah - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Sekretariat Daerah
IV	**Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan**	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**	**Nilai**	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.	Laporan Hasil Survey IKLI	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Perhubungan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KOORDINATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5	6	7
				Secara umum, IKLI dihitung dengan rumus rata-rata tertimbang dari beberapa indikator kualitas: IKLI = $\sum_{i=1}^{n}(I\ i\ x\ wi)$ Keterangan: • I_i = indeks indikator kualitas layanan ke-i • w_i = bobot indikator ke-i • n = jumlah indikator • $\sum w_i=1$		- Dinas Komunikasi dan Informatika	- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Penurunan Intensitas Emisi GRK	**%**	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi. Inntensitas emisi GRK (ton CO2e/2010 IDR) **IEt = TEt / PDRBt** IEt = Intensitas emisi GRK pada tahun t (ton CO2e/2010 IDR miliar) TEt = Total tingkat emisi GRK pada tahun t (ton CO2e) PDRBt = Produk Domestik Regional Bruto tahun t (2010 IDR miliar) t = titik tahun perhitungan Penurunan intensitas emisi GRK (%) Penurunan intensitas emisi GRK (%) **%IEt = (IEt - IEBt) / IEBt** %IEt = Persentase intensitas emisi GRK pada tahun t IEt = Intensitas emisi GRK pada tahun t (ton CO2e/2010 IDR miliar) IEBt = Intensitas emisi GRK baseline tahun t (ton CO2e/2010 IDR miliar) t = titik tahun perhitungan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Lingkungan Hidup	- Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Perhubungan - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KOORDINATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5	6	7
IV.1	Tersedianya Infrastruktur yang Inklusif dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) adalah indikator komposit untuk mengukur kualitas dan ketersediaan infrastruktur suatu wilayah (kota/kabupaten/provinsi) berdasarkan komponen-komponen vital seperti jaringan jalan, air bersih, sanitasi, perumahan, transportasi, fasilitas publik, irigasi, dan persampahan, yang bertujuan untuk menilai kinerja pembangunan dan pemerataan wilayah. IPI membantu pemerintah mengidentifikasi daerah tertinggal untuk perbaikan dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Komponen tersebut mencakup air bersih, jalan, sanitasi, drainase, pelabuhan dan fasilitas keselamatan jalan. Nilai per komponen : (nilai realisasi/nilai rencana) x bobot Nilai total IPI : (nilai total komponen/total bobot) x 100 Interpretasi Nilai IPI Umumnya: • 0 – 0,3 → Infrastruktur rendah • 0,3 – 0,6 → Infrastruktur sedang • 0,6 – 1,0 → Infrastruktur tinggi	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika - Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Perhubungan
IV.2	Berkurangnya Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis	Nilai	Indeks Kesulitan Geografis adalah indeks komposit tertimbang yang mengukur hambatan pembangunan daerah berdasarkan tiga dimensi utama: 1) Ketersediaan Pelayanan Dasar (pendidikan, kesehatan), 2) Kondisi Infrastruktur (ekonomi, energi, listrik), dan 3) Aksesibilitas Transportasi (kualitas jalan, angkutan umum). IKG dihitung menggunakan data dari Survei Potensi Desa (Podes) BPS, di mana setiap indikator diberi bobot tertentu untuk menghasilkan nilai antara 0-100, semakin tinggi nilainya, semakin sulit geografisnya. Rumus Dasar IKG $IKG = (V_1 \times B_1 + V_2 \times B_2 + V_3 \times B_3 + \ldots\ldots + V_n \times B_n) \times k$	Badan Pusat Statistik	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika	- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Perhubungan - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KOORDINATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5	6	7
				Keterangan : • V_i = *Skor masing-masing variabel indikator* yang telah diolah dari data PODES • B_i = *Bobot/penimbang* untuk variabel ke-i (proporsional terhadap pentingnya indikator) • n = jumlah semua variabel indikator yang dipakai dalam perhitungan IKG • k = konstanta skala (umumnya 20) untuk menyesuaikan hasil agar berada pada skala 0–100			
IV.3	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkunga hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yan merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL) Keterangan: IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara IKL : Indeks Kualitas Lahan	Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Dinas Lingkungan Hidup	- Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Perhubungan
		Indeks Risiko Bencana	Nilai	Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah alat ukur untuk menilai tingkat kerentanan dan kapasitas suatu wilayah terhadap bencana, dengan mempertimbangkan data bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) untuk mengidentifikasi wilayah berisiko tinggi, sedang, atau rendah. IRB dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut: $$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$$ Keterangan: • H*azard* (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KOORDINATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5	6	7
				fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. • *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas, yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.			

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	H. DJONI ALAMSYAH HIDAYAT, S.Sos.
Jabatan	:	BUPATI BELITUNG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tanjungpandan, 17 Maret 2025

BUPATI BELITUNG,

H. DJONI ALAMSYAH HIDAYAT, S.Sos.

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MISI I :Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
Tujuan : Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi				
1	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Rasio gini	0,247 - 0,252	Poin
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Laju pertumbuhan ekonomi	4,6	Persentase
3	Menurunnya kemiskinan penduduk	Tingkat kemiskinan	6,3	Persentase
4	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	65,85	Persentase
MISI 2 : Meningkatnya kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah				
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia				
5	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,7	Poin
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	71,42	Tahun
7	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	8,80	Tahun
Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan				
8	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	B	Predikat
9	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	1. Opini BPK	WTP	Predikat
		2. Nilai SAKIP	BB	Predikat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Indeks Profesionalitas ASN	7 - 80	Skala
MISI 3 : Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan				
Tujuan : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				
11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,26	Poin

		Program		Anggaran
Tujuan Misi 1	***Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi***			
Sasaran 1	***Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan***			
	1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp	3.857.410.164
	2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp	1.264.866.275
	3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp	517.452.564
	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Rp	0
	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp	323.306.208
	6	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp	921.579.919
	7	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Rp	3.573.672.270
	8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp	1.573.297.415
	9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp	432.273.094
	10	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp	107.865.801
	11	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp	105.426.420
	12	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Rp	373.734.000
	13	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp	382.064.330
	14	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp	853.663.950
	15	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp	860.677.932
	16	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp	383.385.197
	17	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp	837.245.764
	18	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGKOPERASIAN	Rp	0
	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp	137.774.682
	20	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp	452.242.038
	21	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp	538.007.820
	22	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp	55.342.908
	23	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp	63.851.493
	24	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp	537.356.107
	25	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp	19.487.600
	26	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp	322.682.101
	27	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp	319.232.373
	28	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp	1.165.489.580

	29	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp	21.739.349.149
Sasaran 2	***Menurunnya kemiskinan penduduk***			
	30	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp	27.434.328
	31	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp	0
	32	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp	36.507.000
	33	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp	149.353.388
	34	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp	457.099.525
	35	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp	494.087.007
Sasaran 3	***Meningkatnya infrastruktur kewilayahan***			
	36	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp	1.420.061.820
	37	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp	7.939.653.220
	38	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp	680.000.000
	39	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp	604.422.041
	40	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp	0
	41	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp	141.167.820
	42	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp	15.518.651.660
	43	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp	93.427.500
	44	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp	123.268.377
	45	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp	468.133.930
	46	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp	6.058.909.687
	47	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp	11.427.091.838
	48	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp	685.697.900
Tujuan 1 Misi 2	***Meningkatnya kualitas sumber daya manusia***			
Sasaran 1	***Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat***			
	49	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp	9.105.134.866
	50	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp	1.866.929.607
	51	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp	298.158.000
	52	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp	333.092.300
	53	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp	63.967.000
	54	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp	1.643.165.510
	55	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp	2.644.493.200

	56	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp	344.838.977
	57	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp	29.830.200
	58	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp	82.432.490
Sasaran 2	***Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat***			
	59	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp	52.200.071.980
	60	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN	Rp	110.960.886
	61	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp	860.948.582
Tujuan 2 Misi 2	***Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan***			
Sasaran 1	***Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel***			
	62	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp	110.246.368.897
	63	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp	1.058.326.420
	64	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp	1.663.620.885
	65	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp	12.084.398.276
	66	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	1.101.153.523
	67	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	296.151.948
	68	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp	202.470.730
	69	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp	181.514.421
	70	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp	273.531.300
	71	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp	2.243.276.496
	72	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp	264.291.863
	73	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp	674.177.945
	74	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp	4.312.937.070
	75	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp	810.232.810
	76	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp	1.256.323.000
	77	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp	1.078.464.159
	78	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp	1.975.516.800
	79	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Rp	502.676.300
	80	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp	465.259.957
Sasaran 2	***Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional***			
	81	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp	2.312.924.431

	82	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp	1.441.025.656
Tujuan Misi 3		***Meningkatnya kualitas lingkungan hidup***		
	83	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp	296.700.482
	84	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp	592.588.055
	85	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp	189.030.617
	86	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Rp	24.222.794
	87	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp	68.891.167
	88	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Rp	27.675.427
	89	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp	90.347.973
	90	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp	13.215.327
	91	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp	6.505.342.156
		TOTAL ANGGARAN	**Rp**	**380.062.525.388,00**

Tanjungpandan, 17 Maret 2025

BUPATI BELITUNG,

H. DJONI ALAMSYAH HIDAYAT, S.Sos.

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. DJONI ALAMSYAH HIDAYAT, S.Sos.

Jabatan : BUPATI BELITUNG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tanjungpandan, 12 November 2025

BUPATI BELITUNG,

H. DJONI ALAMSYAH HIDAYAT, S.Sos.

Dipindai dengan CamScanner

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	SATUAN	REALISASI 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia yang berdaya saing dalam mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera					
Tujuan : Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia					
1	Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	1 Indeks Modal Manusia	0,55	Nilai	-
		2 Tingkat kemiskinan	5,2	Persentase	6,11
2	Meningkatnya kualitas pendidikan	1 Rata-rata lama sekolah	9,16	Tahun	9,05
		2 Harapan lama sekolah	12,42	Tahun	-
3	Meningkatnya kualitas kesehatan	Usia harapan hidup	74,15	Tahun	71,75
4	Menurunnya prevalensi stunting	Prevalensi stunting	16,94	Persentase	-
5	Meningkatnya pemerataan dan pendapatan masyarakat	1 Pengeluaran per kapita	14.651.0000	Rupiah	-
		2 Tingkat pengangguran terbuka	3,74	Persentase	-
		3 Indeks Gini	0,241	Nilai	-
MISI 2 : Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing berbasis sektor unggul dan potensial					
Tujuan : Meningkatnya daya saing ekonomi sektor unggulan dan potensial					
6	Meningkatnya daya saing ekonomi sektor unggulan dan potensial	Laju pertumbuhan ekonomi	2,11	Persentase	1,84
7	Meningkatnya investasi daerah	Nilai investasi (tahun berkenaan) (dalam juta rupiah) (PMDN dan PMA)	1.200.000	Juta Rupiah	-
8	Meningkatnya pertumbuhan sektor prima	Pertumbuhan sektor Prima	3,8	Persentase	-
9	Meningkatnya kualitas dan daya saing pariwisata serta budaya daerah	Indeks pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kota	3,8	Nilai	-

Dipindai dengan CamScanner

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MISI 3 : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih dan Bermartabat					
Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, adaptif dan Kolaboratif)					
10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, adaptif dan Kolaboratif)	Indeks reformasi birokrasi	80 (BB)	Nilai	79,74 (BB)
11	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel berbasis digital	1 Indeks pemerintah digital	1,80	Nilai	-
		2 Nilai SAKIP	65,84 (B)	Nilai	64,68 (B)
		3 Indeks pengelolaan keuangan daerah	76,8121	Nilai	-
		4 Indeks pelayanan publik	4,1	Nilai	-
		5 Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (3,541)	Angka	-
12	Terwujudnya profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	79,80	Nilai	78,63
13	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian fiskal	18,07	Persentase	-
MISI 4 : Membangun Infrastruktur yang Berkualitas secara merata dan Berkelanjutan					
Tujuan : Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan					
14	Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan	1 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Baik (85,35)	Nilai	-
		2 Penurunan intensitas Emisi GRK	54,55	Persentase	-
15	Tersedianya Infrastruktur yang inklusif dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	67,28	Nilai	-
16	Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	Indeks Kesulitan geografis	32,52	Nilai	-
17	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,81	Nilai	69,84
		2 Indeks Resiko Bencana	117,14	Nilai	-

Dipindai dengan CamScanner

		Program		Anggaran
Tujuan Misi 1	***Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia***			
Sasaran 1	***Meningkatnya kualitas pendidikan***			
	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp	47,294,503,756.00
	2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN	Rp	110,960,886.00
	3	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Rp	191,346,692.00
	4	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp	218,400,000.00
	5	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp	425,656,874.00
	6	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp	15,510,234,939.00
	7	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp	851,588,638.00
	8	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp	2,634,717,280.00
	9	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp	13,986,354.00
	10	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp	10,832,215,550.00
Sasaran 2	***Meningkatnya kualitas kesehatan***			
	11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Program GERBANG SEHAT)	Rp	33,357,719,310.00
	12	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp	1,249,651,530.00
	13	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp	298,158,000.00
	14	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp	333,704,300.00
	15	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp	1,637,860,000.00
Sasaran 3	***Menurunnya prevalensi stunting***			
	16	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp	313,266,977.00
	17	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp	22,263,200.00
	18	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Siaga Stunting)	Rp	2,814,336,954.00
	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp	333,704,300.00
	20	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp	402,985,201.00
	21	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp	521,651,212.00
Sasaran 4	***Meningkatnya pemerataan dan pendapatan masyarakat***			
	22	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp	318,857,773.00
	23	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp	248,005,953.00

Dipindai dengan CamScanner

Tujuan Misi 2	*Meningkatnya daya saing ekonomi sektor unggulan dan potensial*			
Sasaran 1	*Meningkatnya investasi daerah*			
	24	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp	43,681,944.00
	25	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp	60,003,060.00
	26	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp	699,627,512.00
	27	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp	795,516,775.00
Sasaran 2	*Meningkatnya pertumbuhan sektor prima*			
	28	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp	1,631,784,735.00
	29	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp	429,049,385.00
	30	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp	741,879,180.00
	31	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp	986,007,692.00
	32	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp	740,035,870.00
	33	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp	988,936,173.00
	34	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp	446,675,120.00
	35	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp	170,390,156.00
	36	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp	109,067,220.00
	37	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp	1,421,068,000.00
	38	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp	15,321,600.00
Sasaran 3	*Meningkatnya kualitas dan daya saing pariwisata serta budaya daerah*			
	39	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp	2,416,307,052.00
	40	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp	4,248,762,913.00
	41	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp	517,452,564.00
	42	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp	921,759,919.00
	43	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp	323,306,208.00
	44	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp	4,093,738,687.00
	45	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp	15,510,234,939.00
Tujuan 1 Misi 3	*Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, adaptif dan Kolaboratif)*			
Sasaran 1	*Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel berbasis digital*			
	46	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp	2,113,860,664.00
	47	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp	262,360,709.00
	48	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp	298,158,000.00
	49	PROGRAM PENGELOLAAN KEARSIPAN	Rp	80,370,098.00
	50	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	763,369,994.00

Dipindai dengan CamScanner

	51	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	266,178,904.00
	52	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH)	Rp	39,633,000.00
	53	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp	109,592,165,733.00
	54	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp	980,797,352.00
	55	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp	4,124,888,595.00
	56	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp	359,220,644.00
	57	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp	21,588,410.00
	58	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp	3,471,858.00
	59	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp	11,542,566,650.00
	60	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp	39,261,860.00
	61	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp	1,339,995,800.00
	62	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp	1,428,680,199.00
	63	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp	190,137,857.00
	64	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp	265,940,730.00
	65	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp	181,494,341.00
Sasaran 2	***Terwujudnya profesionalitas ASN***			
	66	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp	1,999,563,638.00
	67	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp	1,063,504,883.00
	68	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	629,982,345,404.66
Sasaran 3	***Meningkatnya kemandirian keuangan daerah***			
	69	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp	1,566,370,250.00
	70	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp	795,516,775.00
Tujuan 1 Misi 4	***Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan***			
Sasaran 1	***Tersedianya Infrastruktur yang inklusif dan Berkualitas***			
	71	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp	18,604,651,660.04
	72	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp	558,502,041.00
	73	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp	7,982,335,020.00
	74	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp	645,000,000.00
	75	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp	8,059,141,421.00
	76	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp	15,510,234,939.00
	77	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp	1,411,863,200.00
	78	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp	88,985,680.00

Dipindai dengan CamScanner

79	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp	7,979,122,300.00
80	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp	155,124,163.00
81	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp	75,494,601.00
82	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp	468,133,930.00
Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah			
83	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp	18,604,651,660.00
84	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp	558,502,041.00
85	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp	7,982,335,020.00
86	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp	645,000,000.00
87	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp	8,281,875,495.00
88	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp	8,059,141,421.00
89	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp	15,510,234,939.00
90	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp	1,411,863,200.00
91	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp	1,313,257,663.00
Meningkatnya Kelestarian Lingkungan			
92	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp	8,281,875,495.00
93	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp	
94	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp	925,176,788.00
95	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp	89,978,676.00
96	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp	1,781,050,615.00
97	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN GEDUNG	Rp	7,979,122,300.00
98	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp	8,059,141,421.00
99	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp	520,000,000.00

Tanjungpandan, 12 November 2025

BUPATI BELITUNG,

H. DJONI ALAMSYAH HIDAYAT, S.Sos.

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
KABUPATEN BELITUNG

IKU KABUPATEN TAHUN 2025				PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025					AKSI KEGIATAN TAHUN 2025	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(13)	(14)
Misi I :Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat										
Tujuan : Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi										
1	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Rasio Gini	0,247 – 0,252							
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,6		1	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan kualitas daya tarik wisata	80	%	4.263.435.068	Dinas Pariwisata
					2	Pemasaran pariwisata	Persentase capaian pemasaran pariwisata	100	%	1.600.654.173	Dinas Pariwisata
					3	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	90	%	439.699.300	Dinas Pariwisata
					4	Pengembangan kesenian tradisioanal	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	60	%	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

IKU KABUPATEN TAHUN 2025				PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025					AKSI KEGIATAN TAHUN 2025	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(13)	(14)
				5	Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan	60	%	323.306.208	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				6	Pengembangan kebudayaan	Persentase budaya daerah yang dikembangkan	54	%	949.259.919	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				7	Pengelolaan permuseuman	Persentase pelajar yang mengunjungi museum	60	%	3.975.372.270	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				8	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase Kebutuhan sarana pertanian	14,70	%	1.276.317.687	DKPP
				9	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase prasarana yang digunakan	24,62	%	529.119.494	DKPP
						Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	80	%		
				10	Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100	%	213.162.141	DKPP

IKU KABUPATEN TAHUN 2025				PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025					AKSI KEGIATAN TAHUN 2025	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(13)	(14)
				11	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase penaggulangan bencana pertanian	100	%	132.284.030	DKPP
				12	Periz inan usaha pertanian	Persentase usaha pertanian yang memiliki iz in pertanian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	%	55.400.000	DKPP
				13	Penyuluh pertanian	Peningkatan kelas kelembagaan kelompok tani dan usaha pelayanan jasa alsintan (UPJA)	40	Kelembagaan petani	260.902.000	DKPP
				14	Pengelolaan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap	43.200	ton	893.625.928	Dinas Perikanan
				15	Pengelolaan perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya	15	ton	892.975.532	Dinas Perikanan
				16	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	70,04	%	413.399.735	Dinas Perikanan
				17	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Produksi pengolahan hasil perikanan	9.050	ton	853.007.384	Dinas Perikanan

IKU KABUPATEN TAHUN 2025				PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025					AKSI KEGIATAN TAHUN 2025	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(13)	(14)
				18	Pendidikan dan Pelatihan Pengkoperasian	Persentase koperasi yang melaksanakan administrasi secara tertib	43	%	0	DKUKMPTK
				19	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan dan menyampaikan RAT tepat waktu	57	%	137.774.682	DKUKMPTK
				20	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan usaha mikro	6,07	%	452.908.038	DKUKMPTK
				21	Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil	1,92	%	458.260.880	DKUKMPTK
				22	Pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah investor yang diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal	60	investor	62.666.950	DPMPTSPP
				23	Promosi penanaman modal	Persentase promosi penanaman modal	100	%	131.374.557	DPMPTSPP
				24	Perencanaan dan Pembangunan industri	Pertumbuhan jumlah IKM	45	IKM	598.997.607	DPMPTSPP
				25	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase laporan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya	100	%	45.429.200	DKUKMPTK

IKU KABUPATEN TAHUN 2025					PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025					AKSI KEGIATAN TAHUN 2025	
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(13)	(14)
					26	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif	87	%	323.432.101	DPPKBPMD
					27	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	36,25	%	383.733.147	DSPPPA
					28	Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan daerah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Pereonomian dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti	85	%	1.975.933.390	Setda
							Persentase rekomendasi kebijakan daerah di Bidang Penyusunan, Pengendalian Program Pembangunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	%		
							Persentase rekomendasi kebijakan daerah di Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa yang ditindaklanjuti	100	%		

IKU KABUPATEN TAHUN 2025					PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025					AKSI KEGIATAN TAHUN 2025	
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(13)	(14)
					29	Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase peningkatan prestasi olahraga	80	%	22.120.041.213	DISPORA
3	Menurunnya kemiskinan penduduk	Tingkat kemiskinan	6,30		1	Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang memiliki kompetensi	21	%	190.359.436	DKUKMPTK
					2	Penempatan tenaga kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	25	%	0	DKUKMPTK
					3	Hubungan industrial	Harmonisasi hubungan industrial	100	%	65.020.000	DKUKMPTK
					4	Pemberdayaan sosial	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	100	%	182.235.478	DSPPPA
					5	Rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	100	%	416.384.930	DSPPPA
					6	Perlindungan dan jaminan sosial	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	100	%	565.178.436	DSPPPA
4	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	65,85		1	Pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase sumber daya air yang terkelola dengan baik	52,82	%	1.732.955.240	DPUPR

IKU KABUPATEN TAHUN 2025				PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025					AKSI KEGIATAN TAHUN 2025	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(13)	(14)
				2	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman	19,73	%	8.918.194.374	DPUPR
				3	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase jumlah rumah dengan sistem pengolahan limbah domestik	8,69	%	975.000.000	DPUPR
				4	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	29,59	%	566.720.000	DPUPR
				5	Penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase tertatanya bangunan dan lingkungan	46,67	%	100.000.000	DPUPR
				6	Penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	100	%	410.589.400	DPUPR
				7	Penyelenggaraan jalan	Persentase jalan standar kabupaten	29	%	17.545.616.867	DPUPR
				8	Pengembangan perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni korban bencana	100	%	93.472.500	DPUPR
				9	Kawasan permukiman	Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh	0,18	%	349.386.730	DPUPR

IKU KABUPATEN TAHUN 2025					PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025					AKSI KEGIATAN TAHUN 2025	
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(13)	(14)
					10	Perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase penanganan dan pencegahan permukiman kumuh diluar kawasan kumuh	99,82	%	468.133.930	DPUPR
					11	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas (PSU)	Persentase PSU yang dikelola	69,84	%	5.738.804.982	DPUPR
					12	Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana lalu lintas jalan yang laik	100	%	11.338.265.208	Dinas Perhubungan
					13	Pengelolaan pelayaran	Persentase pelabuhan pengumpain lokal yang dioperasikan	100	%	836.190.100	Dinas Perhubungan
Misi 2 :Meningkatnya kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stake holder lainnya dalam pembangunan daerah											
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia											
5	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks pembangunan manusia (IPM)	74,7								
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	71,42		1	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Puskesmas terakreditasi madya	100	%	80.224.249.482	Dinas Kesehatan
							Rumah sakit kelas B berstandar internasional	60	%		

IKU KABUPATEN TAHUN 2025				PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025					AKSI KEGIATAN TAHUN 2025	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(13)	(14)
				2	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas SDM kesehatan	100	%	1.852.422.740	Dinas Kesehatan
				3	Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Tersedianya sediaan farmasi alat kesehatan, makanan dan minuman dan UMOT	100	%	191.190.956	Dinas Kesehatan
				4	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase rumah tangga yang berPHBS	7	%	380.487.204	Dinas Kesehatan
						Persentase kbupaten dengan minimal 80% posyandu aktif	95	%		
				5	Pengendalian penduduk	Unmet need	11,92	%	1027.500	DPPKBPMD
				6	Pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	14,60	%	1.838.437.135	DPPKBPMD
				7	Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Persentase PUS ber KB	57,10	%	2.676.013.912	DPPKBPMD
				8	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase konsumsi pangan terhadap angka kecukupan giz i	95,00	%	183.232.529	DKPP

IKU KABUPATEN TAHUN 2025					PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025					AKSI KEGIATAN TAHUN 2025	
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(13)	(14)
					9	Penanganan kerawanan pangan	Persentase penurunan status desa/kelurahan rawan pangan	2	%	53.915.457	DKPP
					10	Pengawasan keamanan pangan	Persentase tingkat keamanan pangan	89,29	%	92.432.490	DKPP
7	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	8,80		1	Pengelolaan pendidikan	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100	%	53.319.890.523	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100	%		
							Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	100	%		
					2	Pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik	69,41	%	110.960.886	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					3	Pembinaan perpustakaan	Meningkatnya jumlah pemustaka	13.500		1.005.024.204	DPKD

IKU KABUPATEN TAHUN 2025					PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025					AKSI KEGIATAN TAHUN 2025	
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(13)	(14)
Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan											
8	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Indeks reformasi birokrasi	B								
9	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Opini BPK	WTP		1	Pengelolaan keuangan daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	100	%	111.973.222.037	BPKAD
		Nilai SAKIP	BB		2	Pengelolaan barang milik daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	100	%	1.475.541.834	BPKAD
					3	Pengelolaan pendapatan daerah	Peningkatan pendapatan asli daerah	21,74	%	2.354.307.313	BPPRD
					4	Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rekomendasi kebijakan daerah di Bidang Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	100	%	15.908.323.513	Setda

IKU KABUPATEN TAHUN 2025				PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025					AKSI KEGIATAN TAHUN 2025	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(13)	(14)
						Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	%		
						Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang ditindaklanjuti	100	%		
				5	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program dokumen perencanaan daerah	100	%	1.393.769.481	Bappeda
				6	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan program perencanaan pembangunan daerah	100	%	402.642.450	Bappeda
						Persentase kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang perekonomian dan sumber daya alam dengan program perencanaan pembangunan daerah	100	%		

IKU KABUPATEN TAHUN 2025				PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025					AKSI KEGIATAN TAHUN 2025	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(13)	(14)
						Persentase kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan program perencanaan pembangunan daerah	100	%		
				7	Penyelenggaraan pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan	80	%	310.299.571	Inspektorat
				8	Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Hasil survei penilaian tingkat kepuasan terhadapjasa layanan di bidang pengawasan (perumusan kebijkan teknis, pendampingan dan asistensi)	85	%	268.197.871	Inspektorat
				9	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	65	%	325.917.106	Diskominfo
				10	Pengelolaan aplikasi informatika	Persentase terintegrasinya sistem informasi pelayanan publik dan birokrasi	98	%	2.541.315.238	Diskominfo
				11	Penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik sektoral	100	%	303.184.262	Diskominfo

IKU KABUPATEN TAHUN 2025					PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025					AKSI KEGIATAN TAHUN 2025	
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(13)	(14)
					12	Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik	Persentase diseminasi informasi kebijakan yang didiseminasikan	100	%	822.255.959	Diskominfo
					13	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100	%	4.582.517.124	SATPOLPP
					14	Penanggulangan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%	1.301.232.810	BPBD
							Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%		
							Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%		
					15	Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	%	1.256.323.000	BPBD

IKU KABUPATEN TAHUN 2025				PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025					AKSI KEGIATAN TAHUN 2025	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(13)	(14)
				16	Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	100	%	1.118.973.399	Badan Kesbangpol
				17	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase parpol dan lembaga pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik daan pengembangan etika serta budaya politik	100	%	1.926.548.200	Badan Kesbangpol
				18	Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan masalah ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100	%	510.593.300	Badan Kesbangpol
				19	Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase penanganan konflik sosial di masyarakat	100	%	834.582.598	Badan Kesbangpol

IKU KABUPATEN TAHUN 2025					PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025					AKSI KEGIATAN TAHUN 2025	
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(13)	(14)
10	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Indeks profesionalitas ASN	77 - 80	sedang	1	Kepegawaian daerah	Persentase pemenuhan penataan ASN sesuai ketentuan	100	%	2.774.982.559	BKPSDM
					2	Pengembangan sumber daya manusia	Persentase sumber daya aparatur sipil negara yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	57	%	2.549.807.868	BKPSDM
Misi 3 :Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan											
Tujuan : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup											
11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	69,26		1	Perencanaan lingkungan hidup	Kesesuaian kebijakan rencana program (KRP) yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan	100	%	385.876.455	DLH
					2	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Persentase pengurangan dampak pencemaran/kerusakan lingkungan hidup Kabupaten Belitung	27	%	818.728.799	DLH
					3	Pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	100	%	210.232.317	DLH

IKU KABUPATEN TAHUN 2025				PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025					AKSI KEGIATAN TAHUN 2025	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(13)	(14)
				4	Pengendalian bahan bahaya dan beracun (B3) dan limbahbahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian limbah B3	65	%	28.222.974	DLH
				5	Pembinaan dan pengawasan terhadap iz in lingkungan dan iz in perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, udara dan tutupan lahan	43	%	6.391.167	DLH
				6	Pengakuan kberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rekomendasi calon MHA	2	Calon MHA	94.576.946	DLH

IKU KABUPATEN TAHUN 2025				PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025					AKSI KEGIATAN TAHUN 2025	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(13)	(14)
				7	Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	78	kelompok	109.482.883	DLH
				8	Penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	%	13.215.327	DLH
				9	Pengelolaan persampahan	Persentase jumlah sampah yang dikelola	65	%	6.700.105.070	DLH

Tanjungpandan, Januari 2025

Pj. Bupati Belitung,

Mikrun Antariksa

PERUBAHAN RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
KABUPATEN BELITUNG

IKU KABUPATEN TAHUN 2025-2029					PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025				AKSI KEGIATAN TAHUN 2025	
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi I : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera										
Tujuan : Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia										
I	Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Indeks Modal Manusia	0.55	Nilai						
		Tingkat Kemiskinan	5.2	%						
					1 Pengelolaan Pendidikan	Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100	%	47,294,503,756.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Persentase murid SD tidak mampu yang menerima bantuan biaya personil sesuai data DTSEN	100	%		
						Persentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100	%		
						Persentase murid SMP tidak mampu yang menerima bantuan biaya personil yang sesuai data DTSEN	100	%		
						Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100	%		
						Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100	%		
						Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik	89.1	%		

IKU KABUPATEN TAHUN 2025-2029					PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025					AKSI KEGIATAN TAHUN 2025	
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10
I.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	9.16	Tahun	2	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi pendidikan S1	91	%	110,960,886.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Persentase tenaga pendidik yang memiliki sertifikat pendidik	55.53	%		
					3	Pemenuhan Hak Anak	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA) (5 kluster)	61 (baseline 2024)	%	191,346,692.00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					4	Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan komprehensif	95,55 (baseline 2024)	%	218,400,000.00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					5	Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 (baseline 2024)	%	425,656,874.00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar hiv/aids dan napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	n/a	%		
					6	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana kelengkapan jalan dalam kondisi baik	87	%	15,510,234,939.00	Dinas Perhubungan
							Persentase tersedianya kelengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota	55	%		
							Persentase layanan angkutan yang terpenuhi	37 (baseline 2024)	%		
							Persentase sarana dan prasarana layanan angkutan dalam kondisi baik	74 (baseline 2024)	%		
					1	Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengelolaan Perpustakaan sesuai Standar	20	%	851,588,638.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
							Persentase Peningkatan Pemustaka yang terlayani	1.96	%		

IKU KABUPATEN TAHUN 2025-2029					PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025					AKSI KEGIATAN TAHUN 2025	
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10
		Harapan Lama Sekolah	12.42	Tahun	2	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	14.58 (baseline 2024)	%	2,634,717,280.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					3	Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga yangmendapatkan pelayanan di Pusat Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	100 (baseline 2024)	%	13,986,354.00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					4	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rekomendasi kebijakan Bagian Hukum yang ditetapkan	n/a	%	10,832,215,550.00	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)
							Persentase rekomendasi kebijakan Bagian Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	n/a	%		
							Persentase rekomendasi kebijakan Bagian Pemerintahan yang ditindaklanjuti	n/a	%		
I.2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Usia Harapan Hidup	74.15	Tahun	1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (GERBANG SEHAT)	Persentase penyakit menular	1.69 (baseline 2024)	%	33,357,719,310.00	Dinas Kesehatan
							Persentase penyakit tidak menular	22.82 (baseline 2024)	%		
							Persentase Kasus Rujukan yang Benar dan Tepat Waktu	n/a	%		
					2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Pelatihan Sesuai Kompetensi	100	%	1,249,651,530.00	Dinas Kesehatan
					3	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Produk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang Tercatat dan Terdaftar Secara Resmi	100	%	298,158,000.00	Dinas Kesehatan
					4	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	50.38 (baseline 2024)	%	333,704,300.00	Dinas Kesehatan
					5	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR)	77.90	%	1,637,860,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan

IKU KABUPATEN TAHUN 2025-2029					PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025					AKSI KEGIATAN TAHUN 2025	
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10
					5	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				1,637,860,000.00	dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
							Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)	7.08	%		
I.3	Menurunnya Prevalensi *Stunting*	Prevalensi *Stunting*	16.94	Persentase	1	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (PPH Konsumsi)	n/a	Skor	313,266,977.00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan)	n/a	Skor		
					2	Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan yang diintervensi	n/a	%	22,263,200.00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	n/a	%		
					3	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (SIAGA *STUNTING*)	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup (Per 1.000 Kelahiran)	12.62	Angka	2,814,336,954.00	Dinas Kesehatan
							Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	122	Angka		
					4	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	n/a	%	333,704,300.00	Dinas Kesehatan
					5	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Kabupaten	35.71 (baseline 2024)	%	402,985,201.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
							Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD) LKD = PKK, Posyandu, RT, RW, Karang Taruna, LPM	33 (baseline 2024)	%		
					6	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	n/a	%	521,651,212.00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	n/a	%		
							Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100 (baseline 2024)	%		

IKU KABUPATEN TAHUN 2025-2029					PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025				AKSI KEGIATAN TAHUN 2025	
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Persentase pengelolaan pendataan fakir miskin	n/a	%		
I.4	Meningkatnya Pemerataan dan Pendapatan Masyarakat	Pengeluaran per-Kapita	14,651,000	Rupiah	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	36.25	%	318,857,773.00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3.74	Persentase	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Memiliki Kompetensi	22	%	248,005,953.00	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja
		Indeks Gini	0.241	Nilai						

IKU KABUPATEN TAHUN 2025-2029					PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025				AKSI KEGIATAN TAHUN 2025	
SASARAN STRATEGIS		**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET**	**SATUAN**	**PROGRAM/KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET**	**SATUAN**	**ANGGARAN (Rp)**	**PENANGGUNG JAWAB**
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi II : Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing berbasis sektor unggul dan potensial										
Tujuan : Meningkatnya daya saing ekonomi sektor unggulan dan potensial										
II	Meningkatnya daya saing ekonomi sektor unggulan dan potensial	Laju pertumbuhan ekonomi	2.11	Persentase						
II.1	Meningkatnya investasi daerah	Nilai investasi (tahun berkenaan) (dalam juta rupiah) (PMDN dan PMA)	1,200,000	Juta Rupiah	1 Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi total terhadap target investasi	20.14 (baseline 2024)	%	43,681,944.00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
					2 Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	26.43 (baseline 2024)	%	60,003,060.00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
					3 Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase realisasi investasi sektor industri (hilirisasi)	n/a	%	699,627,512.00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					4 Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola PBJ	n/a	Nilai	795,516,775.00	Sekretariat Daerah (Bagian PBJ & Perekonomian dan Sumber Daya Alam)
						Persentase kebijakan Program Pembangunan Daerah yang dievaluasi	n/a	%		
						Persentase rekomendasi kebijakan Bagian Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti	n/a	%		
						Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Lada)	4.321.862 (baseline 2024)	Kg		
						Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Sawit (TBS))	59.969.391 (baseline 2024)	Kg		

IKU KABUPATEN TAHUN 2025-2029					PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025					AKSI KEGIATAN TAHUN 2025	
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10
II.2	Meningkatnya pertumbuhan sektor prima	Pertumbuhan sektor Prima	3.8	Persentase	1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Komoditas Peternakan Ayam	4,917,860 (baseline 2024)	Kg	1,631,784,735.00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							Jumlah Produksi Komoditas Peternakan Sapi	70,686 (baseline 2024)	Kg		
							Persentase pendampingan kelompok tani yang menerima sarana pertanian	100 (baseline 2024)	%		
							Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Cabai	1.183.000 (baseline 2024)	Kg		
							Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Padi	870.200 (baseline 2024)	Kg		
					2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Areal Perkebunan yang mendapatkan Pendampingan	743 (baseline 2024)	Ha	429,049,385.00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							Persentase Luas Lahan Pertanian yang dikelola	18.91 (baseline 2024)	%		
							Persentase Prasarana Peternakan yang Terkelola	100 (baseline 2024)	%		
					3	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	40,900	Ton	741,879,180.00	Dinas Perikanan
					4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	71.84	Angka	986,007,692.00	Dinas Perikanan
					5	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	452	Ton	740,035,870.00	Dinas Perikanan
							Jumlah Produksi Benih Ikan	2,450,000	Ekor		
					6	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan usaha mikro	6.7	%	988,936,173.00	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja

IKU KABUPATEN TAHUN 2025-2029					PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025					AKSI KEGIATAN TAHUN 2025	
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10
					7	Pengembangan UMKM	Persentase pengembangan usaha mikro	1.92	%	446,675,120.00	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja
					8	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan dan menyampaikan RAT tepat waktu	57	%	170,390,156.00	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja
					9	Standarisasi dan perlindungan konsumen	Cakupan pengawasan pada alat tera	82	%	109,067,220.00	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja
					10	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Representatif	2	Pasar	1,421,068,000.00	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja
					11	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laporan Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Lainnya	12	Laporan	15,321,600.00	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja
II.3	Meningkatnya kualitas dan daya saing pariwisata serta budaya daerah	Indeks pembangunan kepariwisataan Kabupaten/Kota	3.8	Nilai	1	Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	286.843 (baseline 2024)	Orang	2,416,307,052.00	Dinas Pariwisata
					2	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik	80	%	4,248,762,913.00	Dinas Pariwisata
					3	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	90	%	517,452,564.00	Dinas Pariwisata
					4	Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya daerah yang dikembangkan	28	%	921,759,919.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					5	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan	28.95	%	323,306,208.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Persentase kualitas pembinaan atlet berprestasi	71	%		

IKU KABUPATEN TAHUN 2025-2029				PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025					AKSI KEGIATAN TAHUN 2025	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN		ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				6 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase kualitas pembinaan pelatih bersertifikasi	77.06	%		4,093,738,687.00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
					Persentase kualitas pembinaan penggiat olahraga rekreasi	12.9	%			
				7 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana kelengkapan jalan dalam kondisi baik	87	%		15,510,234,939.00	Dinas Perhubungan
					Persentase tersedianya kelengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota	55	%			
					Persentase layanan angkutan yang terpenuhi	37 (baseline 2024)	%			
					Persentase sarana dan prasarana layanan angkutan dalam	74 (baseline 2024)	%			

IKU KABUPATEN TAHUN 2025-2029					PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025					AKSI KEGIATAN TAHUN 2025	
SASARAN STRATEGIS		**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET**	**SATUAN**	**PROGRAM/KEGIATAN**		**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET**	**SATUAN**	**ANGGARAN (Rp)**	**PENANGGUNG JAWAB**
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10
Misi III : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih dan Bermartabat											
Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)											
III	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)	Indeks Reformasi Birokrasi	80 (BB)	Nilai							
		Indeks Pemerintah Digital	1.80	Nilai	1	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi	100	%	2,113,860,664.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
							Persentase Penyelenggaraan Aplikasi Informatika yang terkelola dengan baik	n/a	%		
					2	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Indeks KAMI	443 (baseline 2024)	%	262,360,709.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
							Persentase Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi	n/a	%		
					3	Pengelolaan Kearsipan	Tingkat Ketersediaan Arsip	69.65	%	80,370,098.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
					1	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program dalam RKPD dengan RPJMD	100	%	763,369,994.00	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

		Nilai SAKIP	65.84 (B)	Nilai	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program dalam RENJA Perangkat Daerah dengan RENSTRA Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	%	266,178,904.00	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah)	Persentase pelaksanaan kebijakan penataan organisasi	100	%	39,633,000.00	Sekretariat Daerah
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	76.8121		1	Pengelolaan Keuangan Daerah	Optimalisasi penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Daerah	97.68	%	109,592,165,733.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
							Persentase pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	95	%		
					2	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	85	%	980,797,352.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
III. 1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel berbasis digital				1	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase penyelenggaraan Trantibumlinmas	100	%	4,124,888,595.00	Satuan Polisi Pamong Praja
							Persentase Satgas Linmas dan Satlinmas yang diberdayakan	30	%		
					2	Pendaftaran Penduduk	Persentase capaian pendaftaran penduduk	78	%	359,220,644.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					3	Pencatatan Sipil	Persentase capaian pencatatan sipil	99.5	%	21,588,410.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	100	%	3,471,858.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Persentase penetapan rancangan Peraturan Daerah tahun N	67	%		

		Indeks Pelayanan Publik	4.1	Nilai	5	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	100	%	11,542,566,650.00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
					6	Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	80 (baseline 2024)	%	39,261,860.00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
					7	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	%	1,339,995,800.00	Kecamatan
					8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	%	1,428,680,199.00	Kecamatan
					9	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa taat administrasi	100	%	190,137,857.00	Kecamatan
		Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (3.541)	Angka	1	Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan/Pemeriksaan pada wilayah Irban I	80	%	265,940,730.00	Inspektorat
							Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan/Pemeriksaan pada wilayah Irban II	80	%		
							Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan/Pemeriksaan pada wilayah Irban III	80	%		
							Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan/Pemeriksaan pada wilayah Irban Pencegahan dan Investigasi	80	%		
						Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan	Persentase Jumlah Pelayanan *Consulting* yang diberikan di bidang pengawasan pada wilayah Irban I	100	%		
							Persentase Jumlah Pelayanan *Consulting* yang diberikan di bidang pengawasan pada wilayah Irban II	100	%		

					2	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Jumlah Pelayanan *Consulting* yang diberikan di bidang pengawasan pada wilayah Irban III	100	%	181,494,341.00	Inspektorat
							Persentase Jumlah Pelayanan *Consulting* yang diberikan di bidang pengawasan pada wilayah Irban Pencegahan dan Investigasi	100	%		
III.2	Terwujudnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	79.80	Nilai	1	Kepegawaian Daerah	Persentase ASN dengan nilai prestasi kinerja Baik	n/a	%	1,999,563,638.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							Persentase penempatan pegawai sesuai kualifikasi	n/a	%		
							Persentase pengisian ASN berdasarkan formasi kebutuhan	n/a	%		
							Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	n/a	%		
					2	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	n/a	%	1,063,504,883.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				629,982,345,404.66	Sekretariat Daerah
III.3	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	18.07	Persentase	1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.5	%	1,566,370,250.00	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
					2	Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola PBJ	n/a	Nilai	795,516,775.00	Sekretariat Daerah
							Persentase kebijakan Program Pembangunan Daerah yang dievaluasi	n/a	%		
							Persentase rekomendasi kebijakan Bagian Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti	n/a	%		

IKU KABUPATEN TAHUN 2025-2029					PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025					AKSI KEGIATAN TAHUN 2025	
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10
Misi IV : Membangun Infrastruktur yang Berkualitas secara Merata dan Berkelanjutan											
Tujuan : Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan											
IV	Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Baik (85.35)	Nilai							
		Penurunan intensitas Emisi GRK	54.55	Persentase							
					1	Penyelenggaraan Jalan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	86.66	%	18,604,651,660.04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	29.59	%	558,502,041.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman	16.56	%	7,982,335,020.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					4	Program Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga dengan sistem pengolahan limbah domestik yang aman	2.36	%	645,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					5	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU dalam Kondisi Baik	48.42 (baseline 2024)	%	8,059,141,421.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					6	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase sarana dan prasarana kelengkapan jalan dalam kondisi baik	87	%	15,510,234,939.00	Dinas Perhubungan
							Persentase tersedianya kelengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota	55	%		
							Persentase layanan angkutan yang terpenuhi	37 (baseline 2024)	%		

IV. 1	Tersedianya Infrastruktur yang Inklusif dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	67.28	Nilai		Persentase sarana dan prasarana layanan angkutan dalam kondisi baik	74 (baseline 2024)	%		
					7 Pengelolaan Pelayaran	Persentase sarana dan prasarana perhubungan laut dalam kondisi baik	58	%	1,411,863,200.00	Dinas Perhubungan
						Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan laut	55	%		
					8 Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	51.82	%	88,985,680.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					9 Penataan Bangunan dan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar	4	%	7,979,122,300.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					10 Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten	100	%	155,124,163.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang tersertifikasi	16.67	%		
					11 Kawasan Permukiman	Persentase pengurangan Luasan kawasan kumuh	2.55	%	75,494,601.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					12 Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni	3.85	%	468,133,930.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					1 Penyelenggaraan Jalan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	86.66	%	18,604,651,660.04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					2 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	29.59	%	558,502,041.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					3 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman	16.56	%	7,982,335,020.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					4 Program Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga dengan sistem pengolahan limbah domestik yang aman	2.36	%	645,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

IV.2	Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	Indeks Kesulitan geografis	32.52	Nilai	5	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase TPST, TPS dan TPS3R yang layak fungsi	n/a	%	8,281,875,495.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					6	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU dalam Kondisi Baik	48.42 (baseline 2024)	%	8,059,141,421.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					7	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase sarana dan prasarana kelengkapan jalan dalam kondisi baik	87	%	15,510,234,939.00	Dinas Perhubungan
							Persentase tersedianya kelengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota	55	%		
							Persentase layanan angkutan yang terpenuhi	37 (baseline 2024)	%		
							Persentase sarana dan prasarana layanan angkutan dalam kondisi baik	74 (baseline 2024)	%		
					8	Pengelolaan Pelayaran	Persentase sarana dan prasarana perhubungan laut dalam kondisi baik	58	%	1,411,863,200.00	Dinas Perhubungan
							Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan laut	55	%		
					9	Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD Ditingkatkan Kapasitasnya	40 (baseline 2024)	%	1,313,257,663.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
IV.3	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76.81	Nilai	1	Pengelolaan Persampahan	Persentase TPST, TPS dan TPS3R yang layak fungsi	n/a	%	8,281,875,495.00	Dinas Lingkungan Hidup
					2	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					Dinas Lingkungan Hidup
					3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengurangan dampak pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	27	%	925,176,788.00	Dinas Lingkungan Hidup
					4	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan Kompetensinya	n/a	%	89,978,676.00	Dinas Lingkungan Hidup

					5 Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sumber daya air yang terkelola dengan baik	22.15	%	1,781,050,615.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					6 Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar	4	%	7,979,122,300.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					7 Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU dalam Kondisi Baik	48.42 (baseline 2024)	%	8,059,141,421.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					8 Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Tertatanya Bangunan dan Lingkungan	15 (baseline 2024)	%	520,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

"Maju Terus Mawas Diri"

Bagian Organisasi Setda Kab. Belitung